

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN



KAJIAN MENYONGSONG SATU ABAD

*Kabupaten
Kotawaringin
Barat*

2024

KATA

PENGANTAR



Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan YME atas tersusunnya “**DOKUMEN KAJIAN**” dari kegiatan penyusunan Kajian Menyongsong Satu Abad Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 telah dapat diselesaikan pada waktu yang ditentukan.

Dalam melakukan proses Penyusunan Kajian Menyongsong Satu Abad Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024, tim penyusun melalui tahapan - tahapan pelaksanaan yang telah direncanakan. Pada tahap pertama disampaikan Laporan Akhir, yang berisikan tentang pendahuluan, tinjauan kebijakan, gambaran umum, analisis serta konsep, strategi, visi, misi dan rencana aksi pengembangan 100 tahun abad Kotawaringin Barat.

Akhir kata, terimakasih atas segala dukungan dari berbagai pihak dalam upaya penyempurnaan Laporan Akhir ini.

TIM PENYUSUN

DAFTAR

ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii

BAB 01 PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang.....	I-1
1.2	Maksud, Tujuan, Dan Sasaran	I-2
1.2.1	Maksud.....	I-2
1.2.2	Tujuan.....	I-2
1.2.3	Sasaran	I-3
1.3	Dasar Hukum.....	I-3
1.4	Ruang Lingkup Pekerjaan	I-4
1.4.1	Lingkup Pekerjaan	I-4
1.4.2	Lingkup Lokasi	I-5
1.5	Sistematika Pelaporan.....	I-5

BAB 02 TINJAUAN KEBIJAKAN

2.1	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).....	II-1
2.1.1	Visi	II-1
2.1.2	Misi	II-2
2.1.3	Arah Pembangunan.....	II-3
2.2	RANCANGAN RPJMN.....	II-5
2.2.1	Visi	II-5
2.2.2	Tema Dan Arah Kebijakan RPJMN Tahun 2025 – 2029	II-5
2.2.3	Tema dan Arah kebijakan Pembangunan Pulau Kalimantan	II-6

2.3	RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	II-7
2.4	RTRW PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.....	II-8
2.5	RPJPD KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	II-15
2.6	RANCANGAN RPJPD KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	II-16
2.7	RANCANGAN RPJMD KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	II-17
2.8	RPD KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	II-18
2.9	RTRW KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.....	II-24
2.9.1	Rencana Struktur Ruang.....	II-25
2.9.2	Rencana Pola Ruang	II-31
2.9.3	Rencana Kawasan Strategis.....	II-36
2.10	STUDI TERDAHULU.....	II-38
2.10.1	Kajian Pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Kabupaten Kotawaringin Barat	II-38
2.10.2	Kajian Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kabupaten Kotawaringin Barat	II-39
2.10.3	Kajian Penghitungan Nilai Tambah Ekonomi Kreatif Kabupaten Kotawaringin Barat 44	
2.10.4	Kajian Potensi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	II-45
2.10.5	Kajian Review Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Kotawaringin Barat	II-46
2.10.6	Kajian Energi Berkelanjutan di Kabupaten Kotawaringin Barat.....	II-50
2.10.7	Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (Jakstrada SPAM) Kabupaten Kotawaringin Barat	II-53
2.10.8	Rencana Induk Pembangunan Transportasi Umum Kabupaten Kotawaringin Barat.....	II-55

BAB 03 GAMBARAN UMUM

3.1	KONDISI WILAYAH.....	III-1
3.1.1	Kondisi Administrasi Dan Geografis	III-1
3.1.2	Kondisi Fisik Dasar	III-4
3.1.3	Penggunaan Lahan	III-6
3.1.4	Kondisi Kependudukan.....	III-9
3.1.5	Kondisi Bidang Pendidikan	III-13
3.1.6	Kondisi Bidang Kesehatan	III-17
3.1.7	Kondisi Bidang Kebencanaan	III-20
3.1.8	Kondisi Bidang Sosial	III-27
3.1.9	Kondisi Bidang Pekerjaan Umum Dan Transportasi.....	III-29
3.1.10	Kondisi Perekonomian	III-46
3.1.11	Potensi Wilayah.....	III-50

3.1.12	Pariwisata	III-55
3.2	SEJARAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	III-57

BAB 04 ANALISIS

4.1	SINTESIS KEBIJAKAN	IV-1
4.2	ANALISIS EKONOMI	IV-3
4.2.1	Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha	IV-3
4.2.2	Sektor/Sub Sektor Unggulan	IV-5
4.2.3	Komoditas Unggulan	IV-12
4.3	PROYEKSI DAN PREDIKSI	IV-29
4.3.1	Proyeksi Penduduk	IV-29
4.3.2	Proyeksi Kebutuhan Pangan	IV-32
4.3.3	Potensi Pengembangan Kawasan Food Estate	IV-34
4.3.4	Proyeksi Industri Kecil dan Menengah	IV-51
4.3.5	Kebutuhan Lahan Permukiman dan Sarana Pendukung	IV-53
4.3.6	Kebutuhan Infrastruktur	IV-60
4.3.7	Kebutuhan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	IV-76
4.3.8	Kebutuhan Capaian Standar Pelayanan Minimal	IV-52
4.4	ANALISIS EKSTERNALITAS	IV-56
4.4.1	Megatren Dunia 2045	IV-56
4.4.2	Pembangunan SDG's	IV-59
4.4.3	Industrialisasi 4.0	IV-63
4.5	ASPIRASI STAKEHOLDER	IV-69

BAB 05 KONSEP DAN STRATEGI PENGEMBANGAN 100 TAHUN ABAD KOTAWARINGIN BARAT

5.1	ISU	V-1
5.2	PELUANG PENGEMBANGAN	V-12
5.3	TANTANGAN PENGEMBANGAN	V-16
5.4	KEBUTUHAN PENGEMBANGAN	V-19
5.5	KONSEP PENGEMBANGAN	V-23
5.6	VISI DAN MISI	V-31
5.7	STRATEGI	V-34
5.8	RENCANA AKSI	V-37

BAB 01

Pendahuluan



1.1 LATAR BELAKANG

Kabupaten Kotawaringin Barat, yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, memiliki warisan budaya yang kaya dan sejarah panjang sebagai pusat perdagangan dan budaya di wilayah sekitar. Sejarah Kerajaan Kotawaringin menunjukkan kaitan erat dengan Kerajaan Banjar yang melakukan perluasan dan bersama dengan masyarakat Suku Dayak Arut untuk mendukung berdirinya Kasultanan Kutaringin sejak 1679. Untuk Pertama kalinya Keraton Kesultanan dibangun di Kotawaringin Lama dengan nama Astana Alnusari selanjutnya pada tahun 1814 Keraton Kesultanan dipindahkan ke Pangkalan Bun sebagai pusat pemerintahan yang disebut dengan Keraton Kuning atau Indra Kencana.

Setelah Proklamasi kemerdekaan RI maka wilayah Kesultanan Kotawaringin menjadi bagian wilayah negara RI, dengan status Swapraja / Kwedanan dan selanjutnya berkembang menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat sebagai Daerah Otonom Pangkalan Bun sebagai ibu kota Kabupaten. Sehingga perjalanan sejarah dan perkembangan ekonomi serta sosial di wilayah ini akan sangat penting dalam perkembangan daerah yang inklusif dan berkelanjutan untuk masa depannya.

Dengan memasuki abad ke-21, Kabupaten Kotawaringin Barat dihadapkan pada berbagai tantangan dan peluang pembangunan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perubahan iklim, urbanisasi, globalisasi ekonomi, serta perkembangan teknologi adalah beberapa dari banyak faktor yang akan mempengaruhi perjalanan pembangunan daerah ini. Memahami dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan yang terjadi saat ini menjadi landasan penting dalam merumuskan visi pembangunan yang relevan dan berdaya saing untuk masa depan yang berkelanjutan.

Dalam menyusun konsep pengembangan ke depan, Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Lokal harus terus terlibat bersama berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal, pemerintah daerah, sektor swasta, dan lembaga kemasyarakatan. Maka dialog yang inklusif dan kolaboratif

diperlukan guna mengidentifikasi aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat terkait dengan pembangunan jangka panjang Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pembangunan dan cita-cita ke depan juga memiliki keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Nasional dan Global. Visi pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat harus juga selaras dengan agenda pembangunan nasional dan global. Mengacu pada Visi Indonesia 2045 dan Agenda Pembangunan Berkelanjutan PBB 2030, Kabupaten Kotawaringin Barat dapat menentukan arah pembangunan yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi lokal, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Selain itu diperlukan evaluasi terhadap keberhasilan dan kegagalan inisiatif pembangunan sebelumnya untuk dipertimbangkan. Melalui pembelajaran dari pengalaman masa lalu, pembangunan ke depan dapat mengidentifikasi strategi yang efektif dan memperbaiki kelemahan yang ada dalam merumuskan visi pembangunan yang berkelanjutan untuk masa depan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Kajian ini diperlukan mengingat pentingnya menyusun visi jangka panjang sebagai bagian dari upaya:

- Mengarahkan Pembangunan yang Berkelanjutan
- Mengantisipasi Perubahan dan Tantangan
- Mendorong Investasi dan Pembangunan Infrastruktur
- Mengoptimalkan Sumber Daya dan Anggaran
- Merancang Peningkatan Partisipasi Masyarakat
- Mengukur dan Mengevaluasi Kemajuan Pembangunan

1.2 MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

1.2.1 Maksud

Kajian ini bertujuan untuk merumuskan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Kotawaringin Barat untuk periode satu abad ke depan. Maksud utama dari kajian ini adalah memberikan pandangan yang jelas dan terperinci mengenai arah pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam jangka waktu yang sangat panjang. Melalui kajian ini, diharapkan dapat terwujud suatu visi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing untuk Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai bagian dari tantangan global dan lokal yang dihadapi.

1.2.2 Tujuan

- a. Tujuan utama dari kajian ini adalah merumuskan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Kotawaringin Barat yang menggambarkan cita-cita dan harapan masyarakat serta pemerintah dalam kurun waktu satu abad ke depan.

- b. menetapkan prioritas-prioritas pembangunan yang strategis dan berkelanjutan yang akan menjadi fokus utama dalam pencapaian visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Kotawaringin Barat.
- c. mengidentifikasi tantangan dan peluang yang akan dihadapi Kabupaten Kotawaringin Barat dalam perjalanan menuju visi pembangunan jangka panjangnya, baik dari segi ekonomi, sosial, lingkungan, maupun politik.

1.2.3 Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah

- a. Menyusun Dokumen Visi Pembangunan Jangka Panjang. Sasaran utama dari kajian ini adalah menghasilkan dokumen visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Kotawaringin Barat yang komprehensif, jelas, dan terukur untuk periode satu abad ke depan.
- b. Menyusun Rencana Aksi dan Implementasi: Selain itu, kajian ini juga diharapkan dapat menghasilkan rencana aksi dan strategi implementasi yang konkret untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Kotawaringin Barat.
- c. Menyusun Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi: Sasaran terakhir adalah memastikan adanya mekanisme pemantauan dan evaluasi berkala terhadap implementasi visi pembangunan jangka panjang, sehingga dapat dilakukan penyesuaian dan perbaikan sesuai dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi di masa mendatang.

1.3 DASAR HUKUM

Secara umum peraturan perundangan yang melandasi pelaksanaan pekerjaan ini adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah No.26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Berkelanjutan;
- d. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
- e. Peraturan Kepala Daerah Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Rencana Detai Tata Ruang Kawasan Perkotaan Pendukung Industri Kumai.

1.4 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1.4.1 Lingkup Pekerjaan

- a. Melakukan kajian Sejarah dan Konteks Kabupaten Kotawaringin Barat
- b. Merumuskan Tantangan dan Peluang Pembangunan Abad ke-21:
- c. Melakukan kajian dan diskusi serta konsultasi kepada pihak-pihak yang perlu dilibatkan
- d. Melakukan review terhadap kajian pembangunan yang sudah ada sebelumnya
- e. Melakukan review atau kajian terhadap rencana pembangunan nasional dan global dan kedudukan wilayah studi terhadapnya.

Kajian dapat dilakukan dengan menggunakan metode penelitian baik metode kuantitatif maupun metode kualitatif atau kombinasi (mixed method) untuk digunakan secara bersama – sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable, dan obyektif. Selanjutnya, proses pelaksanaan pekerjaan secara prosedural adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data
 1. Data Primer
Data Primer diperoleh dari pendapat para ahli atau orang yang berkompeten di bidangnya serta observasi lapangan.
 2. Data Sekunder
Data Sekunder diperoleh melalui peraturan-peraturan, buku ilmiah, laporan penelitian, tesis, disertasi, dan data-data di instansi terkait. Data ini juga meliputi data terkait nilai dari variabel-variabel yang akan diteliti.
- b. Melakukan survey di obyek penelitian dan sekitarnya.
- c. Melakukan analisis hasil survey.
- d. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait sesuai kebutuhan analisis.
- e. Melaksanakan pertemuan internal untuk membahas instrumen serta strategi pengerjaan analisis.
- f. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
- g. Melaporkan dan mempresentasikan hasil analisis secara periodic.
- h. Melakukan penyempurnaan dan perbaikan hasil analisis berdasarkan kesepakatan dan masukan yang diperoleh guna perbaikan dan penyusunan Laporan Akhir.
- i. Melakukan ekspose hasil studi kepada stakeholder yang terkait.
- j. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
- k. Melakukan ekspose hasil studi kepada stakeholder yang terkait.

1.4.2 Lingkup Lokasi

Lokasi pekerjaan Kajian Menyongsong Satu Abad Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.

1.5 SISTEMATIKA PELAPORAN

Adapun sistematika Penyusunan Laporan Akhir Kajian Menyongsong Satu Abad Kabupaten Kotawaringin Barat ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Mengungkapkan latar belakang, maksud, tujuan dan sasaran, dasar hukum, ruang lingkup, dan sistematika pelaporan.

BAB II TINJAUAN KEBIJAKAN

Berisi gambaran kebijakan yang menjadi dasar acuan penyusunan Kajian Menyongsong Satu Abad Kabupaten Kotawaringin Barat yang meliputi RTRW, RPJMD dan Kebijakan lain yang terkait.

BAB III GAMBARAN UMUM

Dalam bab ini gambaran kondisi dan data wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.

BAB IV ANALISIS

Dalam bab ini berisi analisis dalam Menyongsong Satu Abad Kabupaten Kotawaringin Barat untuk mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat

BAB V KONSEP, VISI, MISI DAN RENCANA AKSI PENGEMBANGAN 100 TAHUN ABAD

Dalam bab ini berisi konsep, strategi, misi dan rencana aksi pengembangan dalam Menyongsong Satu Abad Kabupaten Kotawaringin Barat untuk mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat

BAB 02

Tinjauan Kebijakan

2.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)

Undang-Undang RI No. 59 Tahun 2024 Tentang RPJPN Tahun 2025-2045

2.1.1 Visi

Visi pembangunan RPJPN Tahun 2025-2045 adalah sebagai **Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan**. Penentuan visi dalam RPJPN berlandaskan pada : (i) kekuatan modal dasar yang dimiliki Indonesia meliputi kependudukan, modal sosial dan budaya, kekayaan alam, kekuatan maritim, (ii) perkembangan megatren global, dan (iii) pencapaian pembangunan periode sebelumnya.



Gambar 2. 1
Visi RPJPN Tahun 2025-2045

2.1.2 Misi

Dalam RPPJPN terdapat 8 (delapan) misi (agenda) pembangunan 2045 sebagai berikut :

1. Transformasi Sosial

Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul dan berdaya saing

2. Transformasi Ekonomi

Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi IPTEK, ekonomi produktif (termasuk industry manufaktur, ekonomi biru, pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestic dan konektivitas global, serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan.

3. Transformasi Tata Kelola

Mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegrasi dan adaptif

4. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia

Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gantar kawasan.

5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan SDA.

6. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan

Pembangunan kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial, budaya dan ekologi.

7. Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi.

8. Kestinambungan Pembangunan

Kesinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan pembangunan.

Kedelapan misi (agenda) tersebut dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) arah (tujuan) pembangunan sebagai berikut.

8 Misi (Agenda) Pembangunan:

- (1) Transformasi Sosial; (2) Transformasi Ekonomi; (3) Transformasi Tata Kelola;
- (4) Stabilitas dan Ketangguhan Diplomasi; (5) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
- (6) Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkualitas; (7) Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; serta (8) Kesinambungan Pembangunan



17 Arah (Tujuan) Pembangunan



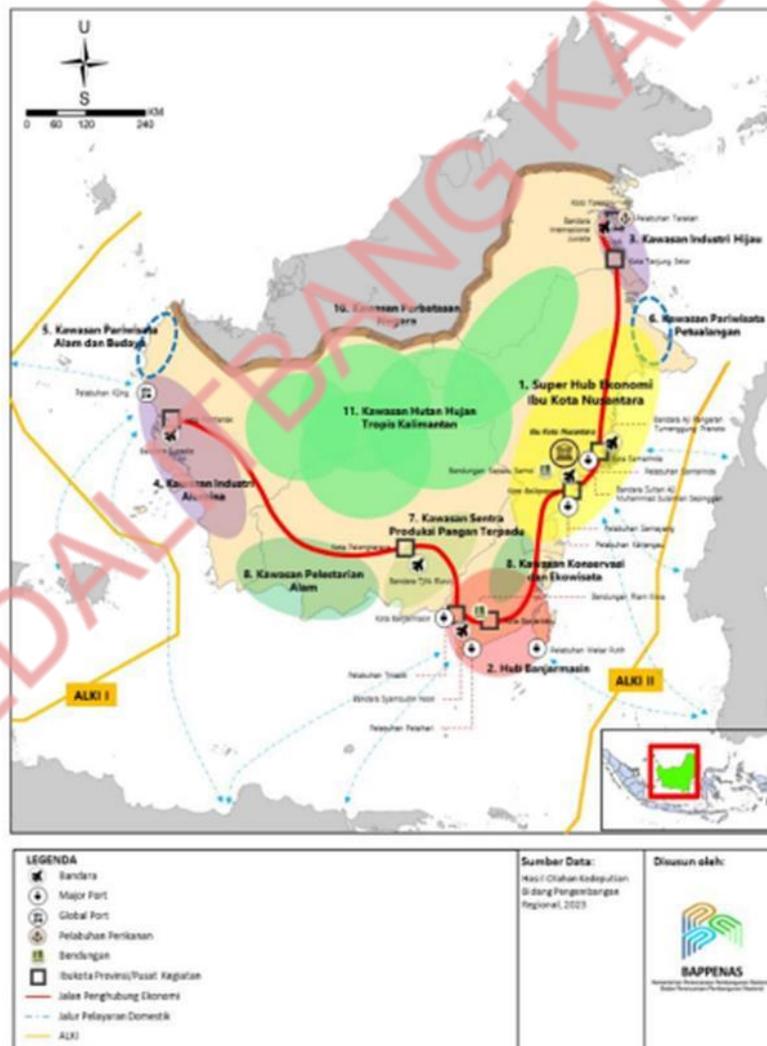
Gambar 2. 2
Arah Pembangunan RPJPN Tahun 2025-2045

2.1.3 Arah Pembangunan

Pembangunan wilayah Kalimantan diarahkan sebagai “ *Superhub Ekonomi Nusantara*” dengan 5 (lima) arah pembangunan sebagai berikut:

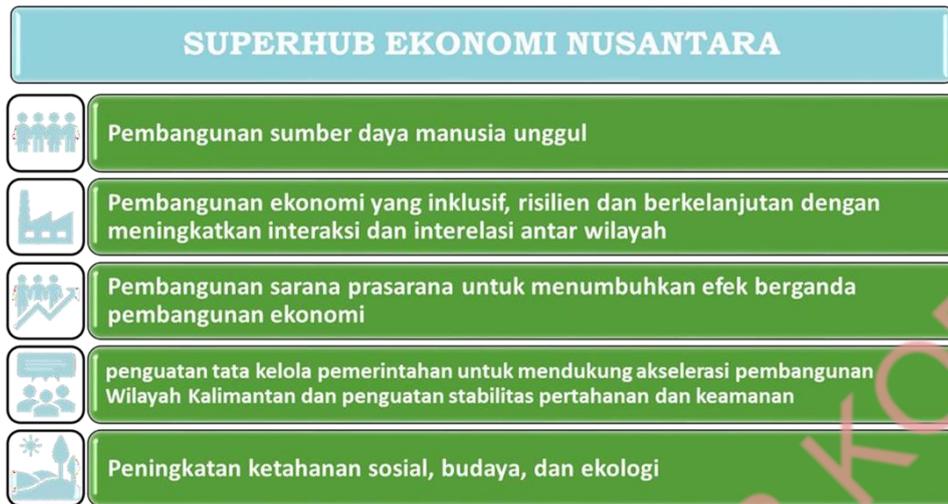
1. **Pertama**, pembangunan sumber daya manusia unggul yang menjadi salah satu kunci transformasi sosial dan ekonomi di Wilayah Kalimantan yang didukung dengan peningkatan layanan kesehatan, pendidikan keilmuan maupun pendidikan karakter, serta keterampilan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan kegiatan ekonomi masa depan di Wilayah Kalimantan.
2. **Kedua**, pembangunan ekonomi yang inklusif, resilien, dan berkelanjutan dengan meningkatkan interaksi dan interelasi antar wilayah, terutama antara Ibu Kota Nusantara dengan daerah mitra sebagai superhub ekonomi, pengembangan hilirisasi industri berbasis sektor ekonomi potensial yang bernilai tambah dan berkelanjutan, serta pengembangan destinasi wisata potensial dengan mengoptimalkan mitra dan tenaga kerja lokal.

3. **Ketiga**, pembangunan sarana prasarana untuk menumbuhkan efek berganda pembangunan ekonomi di Wilayah Kalimantan dalam mewujudkan konsep superhub ekonomi serta meningkatkan infrastruktur konektivitas, kelistrikan dan digital, serta pemerataan infrastruktur dasar di daerah-daerah afirmasi 3TP.
4. **Keempat**, penguatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung akselerasi pembangunan Wilayah Kalimantan dan penguatan stabilitas pertahanan dan keamanan untuk menjamin kedaulatan negara di kawasan perbatasan negara dan kawasan Ibu Kota Nusantara, serta penuntasan RDTR Kabupaten/ Kota dan perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, terutama mitigasi pada wilayah perkotaan dan perdesaan.
5. **Kelima**, peningkatan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan ekologi sebagai modal dasar untuk mendukung pembangunan yang merata, inklusif, dan berkelanjutan.



Gambar 2. 3
Arah Pembangunan Pulau Kalimantan

TEMA PEMBANGUNAN DAN ARAH KEBIJAKAN WILAYAH KALIMANTAN



Gambar 2. 4
Tema Pembangunan dan Arah Kebijakan Wilayah Kalimantan

2.2 RANCANGAN RPJMN

2.2.1 Visi

Berdasarkan Konsep Rancangan Teknokratik RPJMN tahun 2025-2029, sasaran visi Indonesia Emas Menuju 2045, yaitu **menuju Indonesia sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan**. Terwujudnya Indonesia sebagai negara berdaulat, maju, dan berkelanjutan tercermin dari lima sasaran visi, yaitu:

1. Pendapatan per kapita setara negara maju
2. Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang
3. Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat
4. Daya saing sumber daya manusia meningkat
5. Intensitas Emisi GRK menurun menuju *net zero emission*

2.2.2 Tema Dan Arah Kebijakan RPJMN Tahun 2025 – 2029

Tema dan arah kebijakan dalam Konsep Rancangan Teknokratik RPJMN tahun 2025-2029, sebagai berikut:

1. Transformasi Sosial

Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial

2. Transformasi Ekonomi

Hilirisasi SDA serta penguatan riset, inovasi, dan produktivitas tenaga kerja

3. Transformasi Tata Kelola

Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil

4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia

Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi

5. Transformasi Sosial Budaya dan Ekologi

Memperkuat ketahanan sosial, budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan

2.2.3 Tema dan Arah kebijakan Pembangunan Pulau Kalimantan

Tema Pembangunan Pulau Kalimantan : SUPERHUB EKONOMI NUSANTARA

Pusat Aglomerasi dan Pengembangan Ekonomi Baru Berbasis Klaster Ekonomi Masa Depan Untuk Mendorong Terciptanya Pemerataan Ekonomi Di Kawasan Timur Indonesia.

Untuk Provinsi Kalimantan Tengah diarahkan sebagai **Lumbung Pangan nasional dan Pusat Konservasi Internasional** dengan arahan kebijakan sebagai berikut:

**Tabel 2. 1
Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah**

Transformasi	Highlight Arah Kebijakan / Indikasi Intervensi
Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Percepatan penuntasan <i>stunting</i> dan percepatan eliminasi malaria dan penyakit tropis terabaikan 2. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi terutama di bidang pertanian, perkebunan, dan industri pengolahan yang mendukung potensi lokal
Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan pusat-pusat industri khususnya dengan hilirisasi komoditas unggulan daerah (pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan) berbasis teknologi tinggi dan berkelanjutan 2. Pengembangan kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern, dan berkelanjutan termasuk <i>food estate</i> untuk pemenuhan konsumsi pangan dan gizi, penguatan cadangan pangan nasional, dan peningkatan kesejahteraan petani 3. Pengembangan destinasi wisata potensial berkelanjutan seperti pengembangan eco-tourism berbasis aset alam di Taman Nasional Tanjung puting dan Taman Nasional Sebangau dengan pelibatan mitra lokal 4. Lanjutan pembangunan Bandara Baru Murung Raya 5. Lanjutan pembangunan Jalan <i>Trans</i> Kalimantan Penghubung Kaltim – Kalteng 6. Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan sungai perintis 7. Pembangunan pembangkit terbarukan berbasis surya pada daerah <i>isolated</i> berbeban rendah
Tata Kelola	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kerjasama Kalimantan tengah dengan daerah lainnya dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ ekosistem termasuk <i>Heart of Borneo</i> di Wilayah Kalimantan 2. Peningkatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga khususnya dalam pelayanan publik berbasis digital
Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan fiskal daerah khususnya intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) serta pemanfaatan pembiayaan alternatif 2. Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen resiko

Transformasi	Highlight Arah Kebijakan / Indikasi Intervensi
Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan mitigasi struktural dan non struktural dalam penanggulangan bencana, termasuk adaptasi perubahan iklim di Kota Palangkaraya 2. Pemenuhan akses air minum aman serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah 3. Pengembangan irigasi di WS Barito, Mentaya – Katingan untuk mendukung lumbung pangan nasional

Sumber: Konsep Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029

2.3 RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 – 2026

Adapun Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah dalam dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 dijelaskan sebagai berikut:

VISI:

“Kalimantan Tengah makin BERKAH: Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis”

1. Bermartabat, Kalimantan Tengah yang makin unggul, berdaya saing tinggi, dan memiliki reputasi cemerlang.
2. Elok, Kalimantan Tengah yang makin indah dan menawan secara tata ruang kewilayahan serta berorientasi Green Kalteng (kalteng hijau), disertai perilaku masyarakat yang ramah.
3. Religius, Kalimantan Tengah yang makin taat dalam melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan individu maupun publik demi kalteng berkarakter.
4. Kuat, Kalimantan Tengah yang kuat secara ekonomi, sejahtera lahir dan batin, kalteng sehat, mandiri, tangguh dan maju dalam berbagai sektor.
5. Amanah, Kalimantan Tengah yang berintegritas, jujur dan penuh dedikasi. Komitmen dan konsisten dalam menjaga dan melindungi seluruh warga kalteng.
6. Harmonis, Hidup rukun antar sesama warga dengan latar belakang kemajemukan secara agama, etnik, dan antar golongan dalam suasana saling menghormati dan menghargai demi keberkahan bersama.

Sedangkan misi yang termuat dalam dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Mempercepat pembangunan ekonomi yang produktif, kreatif dan berwawasan lingkungan
2. Memperkuat ketahanan daerah dalam megantisipasi perubahan global
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi
4. Mempercepat pembangunan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat dan berdaya saing.
5. Meneguhkan kalteng yang beriman, berbudaya dan berkesetaraan gender.

2.4 RTRW PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 – 2035

Tujuan penataan ruang wilayah provinsi adalah mewujudkan tatanan ruang wilayah Kalimantan Tengah berbasis pertanian yang berorientasi agribisnis dan agroindustri, serta sebagai lumbung energi dan lumbung pangan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Kebijakan penataan ruang wilayah provinsi meliputi:

1. peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dalam rangka mendukung pengembangan potensi provinsi;
2. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana yang terpadu dalam rangka mendukung pengembangan potensi provinsi;
3. perwujudan kawasan agribisnis dan agroindustri dalam rangka mendukung pengembangan pertanian;
4. perwujudan Kalimantan Tengah sebagai lumbung pangan;
5. perwujudan Kalimantan Tengah sebagai lumbung energi;
6. pencegahan dampak negatif kegiatan ekonomi yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup terutama akibat kegiatan pertanian dan energi;
7. pengembangan potensi berkembang melalui penetapan kawasan strategis provinsi; dan
8. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Berikut arahan penataan ruang yang dapat dikaji berdasarkan RTRW Provinsi Kalimantan Tengah.

Tabel 2. 2
Arahan Rencana Struktur Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam RTRW Provinsi Kalimantan Tengah

Kebijakan	Arahan
Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan Wilayah Provinsi	PKW : Pangkalan Bun di Kabupaten Kotawaringin Barat
Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Utama	
a. sistem jaringan transportasi darat	<p>Rencana jaringan lalu lintas angkutan jalan</p> <p>Jaringan jalan arteri primer : Batas Kota Pangkalan Bun– P. Lada – Asam Baru – Km. 65 SP. Bangkal – Batas Kota Sampit – Jl. Lingkar Utara Kota Sampit - Jl. Tjilik Riwut (Sampit) – Batas Kota Sampit - Palantaran - Kasongan – Tangkiling - Batas Kota P. Raya - Jl. Tjilik Riwut – Jl. Imam Bonjol - Jl. RTA. Milono - SP. Kereng Bangkirai – Bereng Bengkel – Pilang (Km.35) - Pulang Pisau – Batas Kota Kuala Kapuas – Batas Prov. Kalimantan Selatan sepanjang 604,75 Km;</p> <p>Rencana pengembangan jalan arteri primer meliputi:</p>

Kebijakan	Arahan
	<p>Basarang – Batanjung sepanjang 51,8 Km, Simpang Bangkal – Bangkal – Telaga Pulang – Kuala Pembuang – Teluk Sigintung sepanjang 110 Km, Pangkalan Bun – Sebuai sepanjang 45 Km, dan Jalan Lingkar Luar Kota Palangka Raya sepanjang 18,5 Km.</p> <p>Jaringan jalan kolektor primer K1 (JKP-1) : Batas Kota Pangkalan Bun – Kumai, Jl. Diponegoro (Pangkalan Bun), Jl. Iskandar (Pangkalan Bun) sepanjang 16,53 Km.</p> <p>Jaringan jalan kolektor primer K3 (JKP-3) : Riam Durian - Kotawaringin Lama – Pangkalan Bun sepanjang 60,5 Km;</p> <p>Jaringan prasarana, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Terminal penumpang Tipe A di Pangkalan Bun Jembatan Timbang Simpang Runtu di Kotawaringin Barat <p>Jaringan pelayanan terdiri atas: jaringan pelayanan angkutan antara seluruh ibukota kabupaten dalam provinsi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) terdiri atas : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Palangka Raya – Sampit – Pangkalan Bun – Nanga Bulik – Pontianak; ▪ Pangkalan Bun – Sukamara – Ketapang – Pontianak; ▪ Pangkalan Bun – Lamandau – Ketapang; Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Palangka Raya – Pangkalan Bun; ▪ Kasongan – Pangkalan Bun; ▪ Sampit – Pangkalan Bun; ▪ Kuala Pembuang – Pangkalan Bun; ▪ Pangkalan Bun – Nanga Bulik; ▪ Pangkalan Bun – Sukamara; <p>Rencana jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jaringan angkutan sungai dan danau: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sungai Bantu: Kecamatan Pantai Lunci/Kabupaten Sukamara – Sungai ▪ Arut Kabupaten Kotawaringin Barat; ▪ Sungai Arut: Raja/Pangkalan Bun - Mendawai Seberang - Tanjung Putri; ▪ Sungai Kumai: Pangkalan Banteng – Kumai; ▪ Sungai Belantikan: Bayat - N. Belantikan;
<p>b. sistem jaringan transportasi perkeretaapian</p>	<p>Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi perkeretaapian yaitu jaringan jalur kereta api lintas utama.</p> <p>Jaringan jalur kereta api lintas utama provinsi di Kabupaten Kotawaringin Barat meliputi: Jalur kereta api Tumbang Samba – Rantau Pulut – Nanga Bulik – Pangkalan Bun – Kumai</p> <p>Sistem Jaringan Jalur Kereta api antar kota berdasarkan Raperpres Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan yang meliputi Jalur Kereta api di kabupaten Kotawaringin Barat dengan Prioritas rendah, ruas jalan kereta api Buntok – Palangka Raya, Palangka Raya – Sampit – Pangkalan Bun, Pangkalan Bun – Sanggau.</p> <p>Simpul Jaringan Jalur Kereta Api Barang di Kabupaten Kotawaringin Barat meliputi : Stasiun perkotaan Pangkalan Bun, Kumai (Kabupaten Kotawaringin Barat)</p>
<p>c. sistem jaringan transportasi laut</p>	<p>Tatanan kepelabuhanan</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelabuhan yang ditetapkan sebagai pelabuhan pengumpul : Pelabuhan Pangkalan Bun di Kabupaten Kotawaringin Barat

Kebijakan	Arahan
	<p>b. Rencana Pengembangan Pelabuhan Baru : Pelabuhan Sebuai di Kabupaten Kotawaringin Barat</p> <p>c. Pelabuhan Perikanan yang ditetapkan sebagai pangkalan pendaratan ikan (PPI) : PPI Kumai di Kabupaten Kotawaringin Barat</p> <p>Alur pelayaran nasional: Sampit – Semarang; Sampit – Surabaya; Sampit – Jakarta; Kumai – Semarang; Kumai – Surabaya; Kumai – Jakarta; Pangkalan Bun – Semarang; Pangkalan Bun – Surabaya; Pangkalan Bun – Jakarta; Sukamara – Semarang, Sukamara – Surabaya, Sukamara – Jakarta; Teluk Segintung – Semarang; Teluk Segintung – Surabaya; Teluk Segintung – Jakarta; Batanjung – Semarang, Batanjung – Surabaya; Batanjung – Jakarta; Pulang Pisau – Semarang; Pulang Pisau – Surabaya; Pulang Pisau – Jakarta.</p>
<p>d. sistem jaringan transportasi udara</p>	<p>Tatanan kebandarudaraan Bandar Udara Pengumpul Skala Tersier : skandar di Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat.</p>
<p>Rencana Pengembangan Sistem Jaringan prasarana Lainnya</p>	
<p>rencana sistem jaringan energi</p>	<p>Pembangkit tenaga listrik Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara di Kabupaten Kotawaringin Barat</p> <p>Pembangunan sistem interkoneksi dan jaringan transmisi tegangan Menengah/Tinggi Pembangunan Jaringan Transmisi Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV Palangka Raya – Kasongan – Sampit; Sampit – Pangkalan Bun; Pangkalan Bun – Kumai; Pangkalan Bun – Nanga Bulik</p> <p>Pembangunan Gardu Induk (GI) : Di Pangkalan Bun Kotawaringin Barat Depo bahan bakar minyak (BBM) : Di Pangkalan Bun Kotawaringin Barat</p>
<p>rencana sistem jaringan telekomunikasi</p>	<p>Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi terdiri atas:</p> <p>a. Sistem Jaringan Backbone : Trunk/MSC/Router/Metro-e/Node IP di Provinsi Kalteng dengan Provinsi lainnya dan Kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Jaringan backbone tersebut dalam bentuk kabel SKSO (Sistem Komunikasi Serat Optik) melalui jalur darat dengan sistem proteksi (sistem ring) dan SKKL (Sistem Komunikasi Kabel Laut) melalui Jalur Laut.</p> <p>b. Remote Metro Junction (RMJ) : jaringan telekomunikasi yang menghubungkan Sentral Remote/BSC/Metroe/ Node IP di Kabupaten dengan Kecamatan dan Desa di Provinsi Kalimantan Tengah. Jaringan RMJ tersebut dalam bentuk kabel SKSO dan Radio.</p> <p>c. Sistem Jaringan Akses : jaringan telekomunikasi yang menghubungkan Sentral Lokal/BTS/Node IP ke user terminal. Jaringan Akses tersebut dalam bentuk kabel SKSO, kabel tembaga Radio Akses dan VSAT (Verry Small Aperture Terminal).</p> <p>Pengembangan Kapasitas pelayanan sistem telekomunikasi sampai menjangkau:</p> <p>a. desa-desa yang letaknya berada di daerah tidak terjangkau sinyal telepon genggam atau handphone (daerah blank spot); (I–IV/2)</p> <p>b. desa-desa yang jaraknya jauh dari jaringan kabel telepon dan kondisi topografi alamnya sulit untuk dilalui jaringan teresterial telekomunikasi; (I–IV/2).</p> <p>c. desa-desa yang dapat diakses oleh jaringan kabel telepon atau sinyal handphone;(I–IV/2)</p>
<p>rencana sistem sumberdaya air</p>	<p>a. Wilayah Sungai (WS) Wilayah Sungai Lintas Provinsi meliputi: Wilayah Sungai (WS) Jelai-Kendawangan, terdiri dari: DAS Arut, DAS Lamandau, DAS Kumai, DAS Jelai</p>

Kebijakan	Arahan
	<p>b. Bendungan, Bendung, Embung, Danau dan Situ Bendung Kumai Kondang di Kabupaten Kotawaringin Barat Danau Asem, Danau Gatel, Danau Ghitam, Danau Jalapangin, dan Danau Kandang di Kabupaten Kotawaringin Barat</p> <p>c. Daerah Irigasi (DI), Daerah Rawa (DR) dan Daerah Rawa Tambak</p> <p>1) Daerah Irigasi yang merupakan Kewenangan Kabupaten di Kabupaten Kotawaringin meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ DI Sagu - Kumai Kondang (Luas Pelayanan 300 Ha); ▪ DI Mulya Jadi (Luas Pelayanan 200 Ha); ▪ DI Sei Bamban (Luas Pelayanan 297 Ha); ▪ DI Sei Tendang (Luas Pelayanan 600 Ha); dan ▪ DI Modang Mas (Luas Pelayanan 122 Ha). <p>2) Daerah Rawa Kewenangan Provinsi DR di Kabupaten Kotawaringin Barat (Luas Pelayanan 5.000 Ha/ 5 lokasi), yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ DR Mendawai/Tatakan Pialon Luas Pelayanan 1.000,00 Ha ▪ DR Raja Seberang Luas Pelayanan 1.000,00 Ha ▪ DR Mendawai Seberang Luas Pelayanan 1.000,00 Ha ▪ DR Teluk Pulai Luas Pelayanan 1.000,00 Ha ▪ DR Sungai Sekonyer Luas Pelayanan 1.000,00 Ha <p>d. Pengamanan Pantai terdiri atas kegiatan pembangunan, rehabilitasi serta pemeliharaan prasarana dan sarana pengaman pantai pantai di Kabupaten Kotawaringin Barat (Pantai Desa Kubu, Pantai Sei Bakau, Pantai Desa Keraya, Pantai Desa Sebuai, dan Pantai Teluk Bogam);</p> <p>e. Instalasi Pengolahan Air Minum Penyediaan dan pengelolaan air baku meliputi air permukaan dan air tanah yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan pertanian;</p> <p>1) Air permukaan meliputi: sungai Arut, sungai Lamandau, sungai Kumai, sungai Jelai Instalasi pengolahan air minum tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Air Baku Kabupaten Kotawaringin Barat ▪ Air Baku Kota Pangkalan Bun Kapasitas 200 l/dt dan IKK Kumai di Kabupaten Kotawaringin Barat <p>2) Air tanah tersebar di beberapa cekungan air tanah yang potensial di 14 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah dengan lokasi yang sudah terbangun sebanyak 10 Kabupaten/Kota,</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ sumur bor air dalam di Kabupaten Kotawaringin Barat terdapat 9 titik; <p>f. Pengendalian Banjir dan Pengamanan Longsoran Tebing Sungai</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengendalian banjir meliputi kegiatan pembangunan, rehabilitasi, serta Operasional dan Pemeliharaan (OP) prasarana dan sarana pengendalian banjir, yang meliputi Pengendalian Banjir dan Pengamanan Longsoran Tebing Sungai yang terjadi pada wilayah sungai strategis nasional, ▪ Pengendalian banjir meliputi kegiatan pembangunan, rehabilitasi, serta Operasional dan Pemeliharaan (OP) prasarana dan sarana pengendalian banjir, yang meliputi Pengendalian Banjir dan Pengamanan Longsoran Tebing Sungai yang terjadi pada wilayah sungai strategis nasional

Sumber: Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 – 2035

Tabel 2. 3

Arahan Rencana Pola Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat dalam RTRW Provinsi Kalimantan Tengah

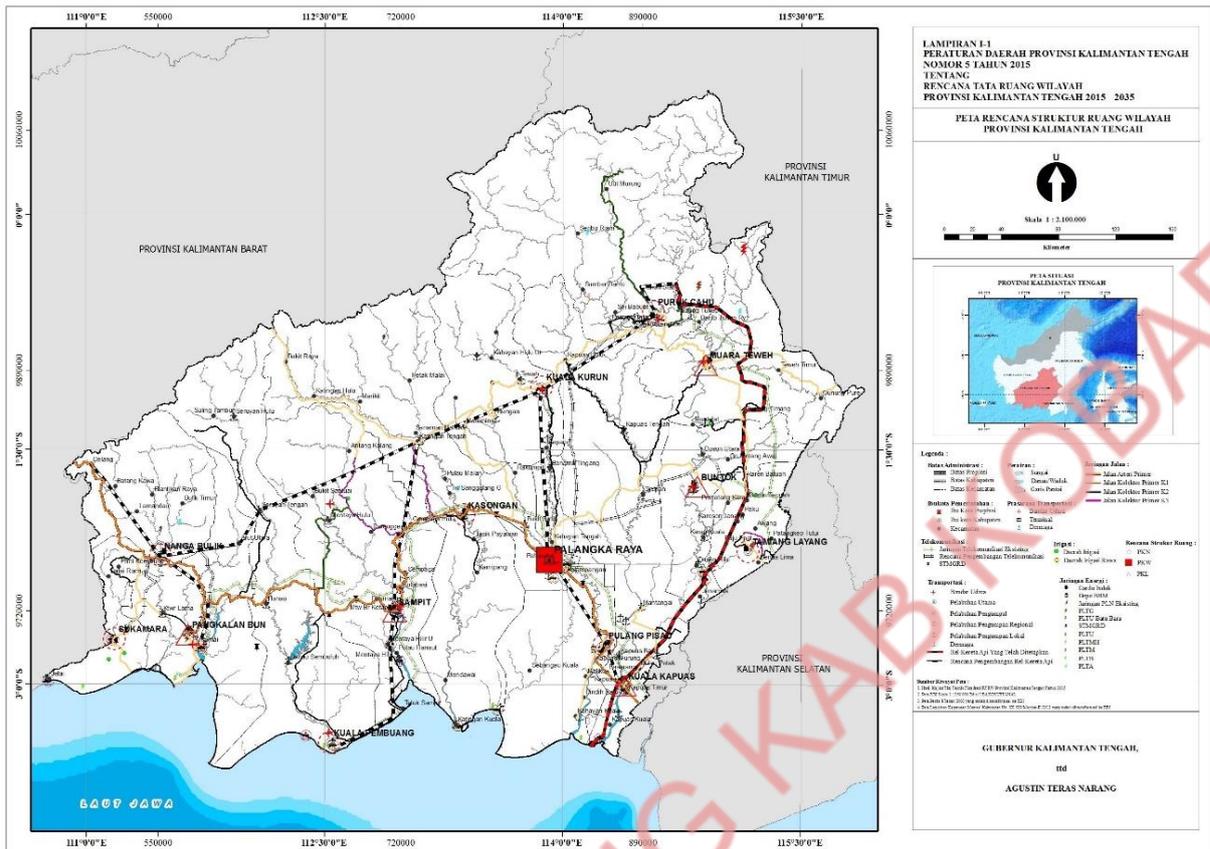
Kebijakan	Arahan
Kawasan Lindung	<p>Kawasan Lindung Provinsi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kawasan perlindungan setempat sempadan pantai yaitu kawasan di sepanjang pantai 751 km dengan lebar 12 mil laut, di kawasan perkotaan 30-100 m dan di luar kawasan perkotaan 100-250 m meliputi pantai di Kabupaten Sukamara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulang Pisau, dan di Kabupaten Kapuas; 2. Kawasan Cagar Budaya Puruk Kambang dan Kawasan Sekitar Bangunan Kerajaan/Kesultanan di Kabupaten Kotawaringin Barat. 3. kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kawasan Suaka Margasatwa Sungai Lamandau di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara seluas ±57.389 Ha. ▪ taman nasional yaitu Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan dengan seluas ±411.305 Ha ▪ Taman Wisata Alam Tanjung Keluang di Kabupaten Kotawaringin Barat seluas Ha ±2.563 Ha 4. kawasan rawan bencana alam <ul style="list-style-type: none"> ▪ kawasan rawan tanah longsor yaitu daerah yang membentang dari Barat-Timur wilayah Kalimantan Tengah bagian Utara dengan kondisi topografi berupa perbukitan-pegunungan yaitu di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Selatan, dan Kabupaten Barito Utara; ▪ kawasan rawan gelombang pasang yaitu kawasan yang berada di daerah pantai di Kabupaten Sukamara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kabupaten Kapuas ▪ Kawasan Lindung lainnya : Kawasan Terumbu Karang Gosong Senggora Kabupaten Kotawaringin Barat; Taman Buru di Kabupaten Kotawaringin Barat seluas ±4.036 Ha
Kawasan Budidaya	<p>Non kawasan hutan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan pertanian 2. Kawasan Peternakan 3. Kawasan peruntukan perkebunan 4. Kawasan peruntukan perikanan laut 5. Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Strategis Industri tersebar di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Katingan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara 6. Kawasan peruntukan pariwisata 7. kawasan peruntukan transmigrasi 8. kawasan peruntukan technopark 9. Kawasan peruntukan pertahanan keamanan hutan khusus untuk latihan militer (HKT-M) bagi kepentingan pemeliharaan, pertahanan dan keamanan Negara berdasarkan geostrategic nasional terletak di Kabupaten Kotawaringin Barat 10. Kawasan peruntukan pertambangan

Sumber: Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 – 2035

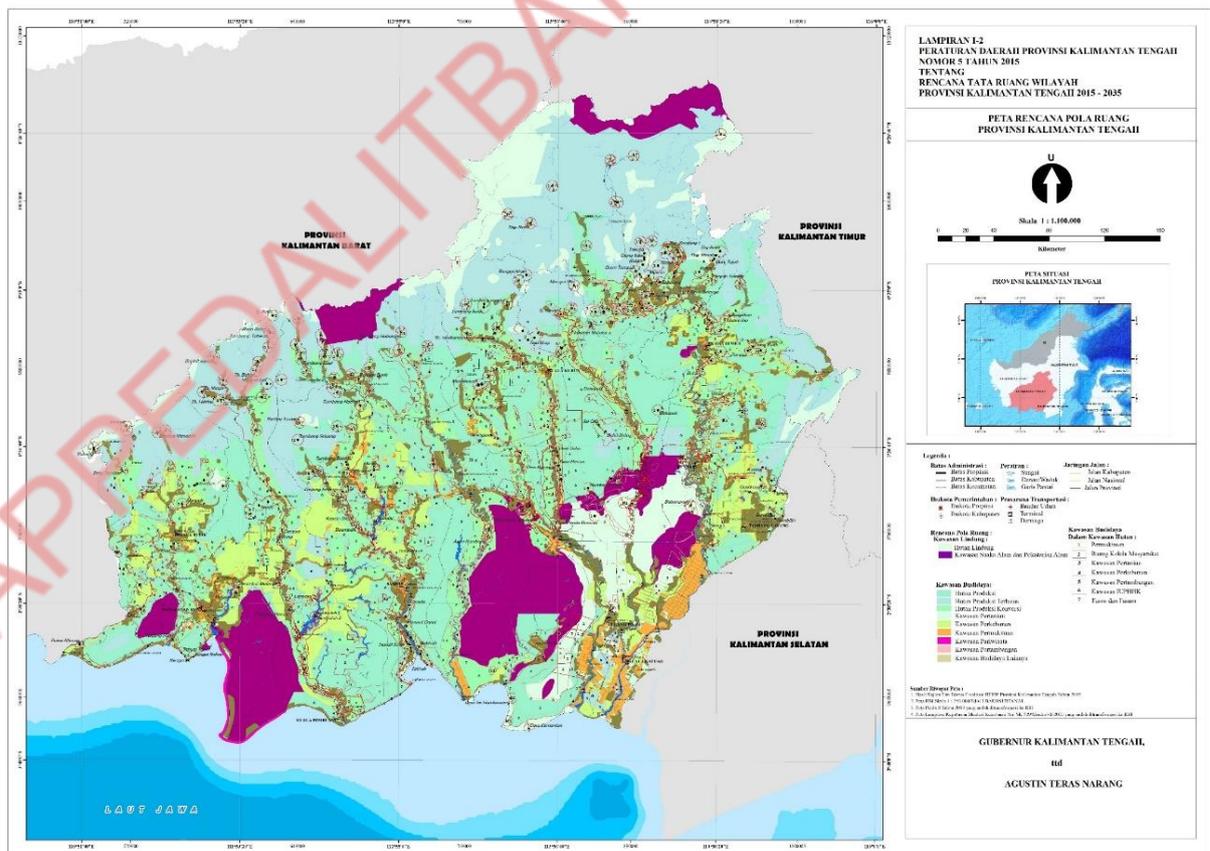
Tabel 2. 4
Arahan Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Kotawaringin Barat dalam RTRW Provinsi Kalimantan Tengah

Kebijakan	Arahan
Kawasan strategis nasional	Kawasan strategis nasional di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Taman Nasional Tanjung Puting yang terletak di Kecamatan Kumai seluas 415.050 ha Taman Nasional Tanjung Puting di kelola oleh Balai Taman Nasional Tanjung Puting, sebuah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Kementerian Kehutanan.
Kawasan strategis dari Provinsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, yaitu; <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kawasan pertanian berkelanjutan yang dipaduserasikan dengan pengembangan irigasi teknis ▪ Kawasan Pertanian Berkelanjutan yang dipaduserasikan dengan pengembangan DR. Pasang Surut, DR. Non Pasang Surut, DR. Lebak ▪ Kawasan pengembangan Peternakan berupa kawasan Peternakan ruminansia dan non ruminansia ▪ Kawasan perkebunan (kelapa sawit, kelapa, karet, lada dan kakao) ▪ Kawasan terpadu Industri, pelabuhan, petikemas dan pergudangan, serta simpul transportasi darat, laut dan udara berupa KSP Pangkalan Bun – Kumai di Kabupaten Kotawaringin Barat 2. Kawasan strategis ekonomi sektor unggulan agropolitan di Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat 3. Kawasan strategis ekonomi sektor unggulan minapolitan 4. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, yaitu Kawasan Strategis Sekitar Bangunan Kerajaan/Kesultanan di Kabupaten Kotawaringin Barat 5. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kawasan berpotensi pengembangan sumber daya energi ▪ Kawasan berpotensi pengembangan sumber daya perikanan di Kawasan Andalan Laut 6. Kawasan strategis dari sudut kepentingan lingkungan hidup <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kawasan Strategis Ekosistem Nasional ▪ Kawasan Strategis DAS meliputi DAS Jelai, DAS Arut, DAS Kumai 7. Kawasan Strategis Perlindungan Keanekaragaman Hayati <ul style="list-style-type: none"> ▪ Suaka Margasatwa Sungai Lamandau di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara ▪ Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan; ▪ Taman Wisata Alam Tanjung Keluang di Kabupaten Kotawaringin Barat;

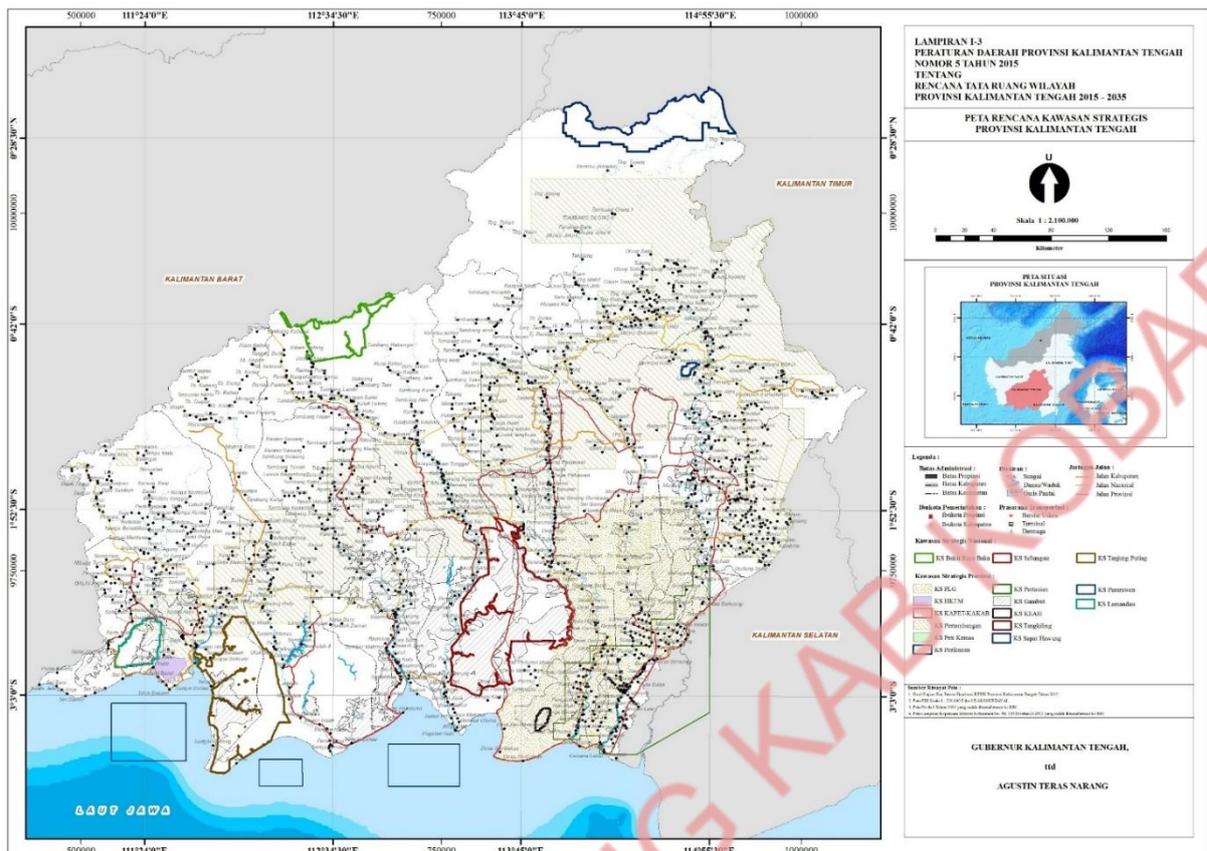
Sumber: Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 – 2035



Gambar 2. 5 Peta Rencana Struktur Ruang Provinsi Kalimantan Tengah



Gambar 2. 6 Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Kalimantan Tengah



Gambar 2. 7 Peta Rencana Kawasan Strategis Provinsi Kalimantan Tengah

2.5 RPJPD KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025

Visi RPJPD Kabupaten Kobar Tahun 2006-2025.

KOTAWARINGIN BARAT YANG AMAN, MAJU DAN SEJAHTERA, MANDIRI, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN

Misi RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025:

1. Mewujudkan Masyarakat Kobar yang Aman;
2. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik;
3. Meningkatkan Kehidupan Masyarakat yang Demokratis;
4. Mempercepat Kecukupan Sarana dan Prasarana Umum Secara Integratif dan Komprehensif dalam Rangka Peningkatan Daya Dukung Terhadap Pembangunan Daerah;
5. Mewujudkan Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Kehutanan yang Berorientasi Agribisnis untuk Pengembangan Agroindustri dan Ketahanan Pangan Secara Berkelanjutan;

6. Meningkatkan Akselerasi Perkembangan Koperasi (Sebagai Urat Nadi Ekonomi Kerakyatan) dan UKM Serta Dunia Usaha yang Saling Terkait dengan Sistem Berjaring antar Usaha dan Antar Daerah, Khususnya yang Berbasis Potensi dan Keunggulan;
7. Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertakwa, bermoral, cerdas, kreatif, dan inovatif serta memiliki daya saing yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat;
8. Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas hidup secara berkelanjutan;
9. Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan masalah sosial kemasyarakatan dan peningkatan kecepatan penanggulangannya secara berkesinambungan;
10. Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketanagkerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga diseluruh wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat;
11. Kewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan; dan
12. Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

2.6 RANCANGAN RPJPD KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Visi Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2025-2045 adalah:

KOTAWARINGIN BARAT MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN

Sebagai upaya mewujudkan visi Kabupaten Kotawaringin Barat Logistik Sejahtera, Maju, dan Berkelanjutan ditempuh melalui 5 misi pembangunan. Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan 2025-2045, meliputi:

Misi 1 Pembangunan SDM Unggul dan Berkarakter

Misi 2 Transformasi ekonomi berbasis kerakyatan mewujudkan kemandirian ekonomi

Misi 3 Transformasi Tata Kelola Mewujudkan Birokrasi Kelas Dunia

Misi 4 Mewujudkan Keamanan Daerah Dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

Misi 5 Transformasi Ketahanan Sosial dan Budaya yang Berkelanjutan Dalam Mewujudkan Masyarakat Kotawaringin Barat Sejahtera

Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2025-2045:

1. Transformasi Pembangunan SDM Unggul dan Berkarakter,

2. Transformasi ekonomi berbasis kerakyatan mewujudkan kemandirian ekonomi,
3. Transformasi Tata Kelola Mewujudkan Birokrasi Kelas Dunia,
4. Mewujudkan Keamanan Daerah Dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah,
5. Transformasi Ketahanan Sosial dan Budaya Mewujudkan Masyarakat Kotawaringin Barat Sejahtera
6. Mewujudkan Pembangunan Wilayah Yang Merata Dan Berkeadilan
7. Mewujudkan penyediaan infrastruktur melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana dasar yang ramah lingkungan
8. Mewujudkan Kesenambungan Pembangunan Antar Periode.

Secara umum arah kebijakan Kabupaten Kotawaringin Barat dalam RPJPD Tahun 2025-2045 disusun mengacu dan memerhatikan arah kebijakan nasional. Dimana Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai wilayah administratif dibawah Provinsi Kalimantan Tengah memiliki sumbangsih / peran dalam berkontribusi mencapai cita-cita pembangunan nasional. Berikut merupakan visualisasi arah kebijakan RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2025-2045 yang dibagi kedalam 4 periode sebagai berikut.



Gambar 2. 8
Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2025-2045

Sumber: Dokumen Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat, 2024

2.7 RANCANGAN RPJMD KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud untuk melihat perpektif perencanaan pembangunan daerah, dalam perspektif teknokratik khususnya menyimpulkan isu-isu strategis serta memberikan gambaran kinerja dan rencana kerja Kabupaten Kotawaringin Barat. Hal tersebut bertujuan memberikan gambaran rekonstruksi rekomendasi rangkaian kinerja yang seyogyanya dijadikan acuan pembangunan 5 tahun kedepan atau bahkan dapat memberikan rekomendasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan konstruksi visi dan misi calon kepala daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2025-2029.

Berikut dipetakan isu strategis Kabupaten Kotawaringin Barat kedalam rekomendasi rangkaian kinerja yang menjadi acuan pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2025-2029.

Tabel 2. 5
Isu Strategis dan Acuan Rekomendasi Kinerja Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2025-2029

No.	Isu	Rekomendasi Kinerja	Rekomendasi Kerja
1	Akses dan kualitas layanan pendidikan yang belum merata	Terciptanya SDM yang Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing
2	Akses dan kualitas kesehatan belum merata serta penurunan prevalensi stunting		
3	Penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial	Kesejahteraan Sosial Masyarakat Meningkat	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat
4	Hilirisasi produk pertanian, perkebunan, perikanan dan ketahanan Pangan	Terwujudnya Kemandirian Daerah Melalui Ekonomi Kerakyatan	Mengembangkan Kemandirian Daerah Melalui Ekonomi Kerakyatan
5	Ketersediaan air bersih yang berkualitas untuk rumah tangga dan usaha	Meningkatnya Ketahanan Daerah dengan Daya Dukung Infrastruktur Berkelanjutan	Meningkatkan Ketahanan Daerah Dengan Daya Dukung Infrastruktur Berkelanjutan
6	Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berfokus pada konservasi lahan		
7	Konektivitas wilayah dan telekomunikasi		
8	Sistem pemerintahan yang berbasis elektronik	Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Berdampak Meningkatkan	Meningkatkan Kualitas Birokrasi yang Berdampak

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2025-2029

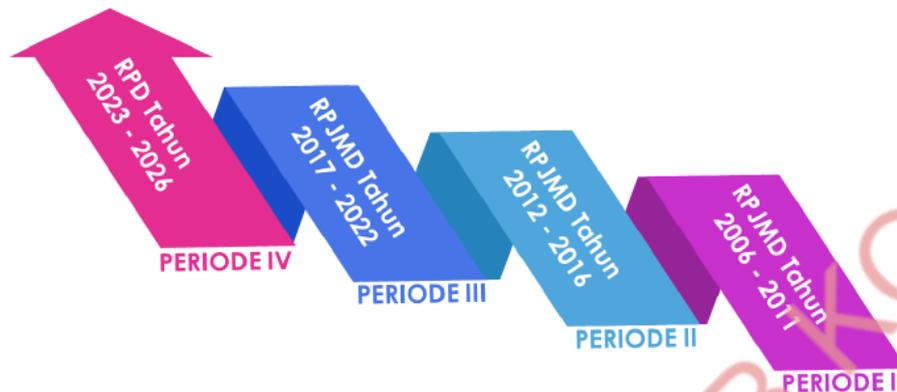
2.8 RPD KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026

Berbeda dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tidak memiliki Visi dan Misi yang merupakan mandat politis dari Kepala Daerah terpilih yang sekaligus menjadi cita-cita pembangunan yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 tahun perencanaan. RPD yang disusun mengadaptasi adanya Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024 bertujuan untuk mengisi ruang kosong perencanaan jangka menengah Kabupaten Kotawaringin Barat dikarenakan selesainya tahun perencanaan RPJMD Kabupaten Kobar 2017-2022.

Meskipun tidak memiliki Visi dan Misi untuk diacu sebagai cita-cita pembangunan jangka menengah Kabupaten Kotawaringin Barat, namun dijelaskan dalam Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 yang mana dalam ketentuan umum penyusunan RPD disusun memperhatikan kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kotawaringin Barat. RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006 – 2025. Berikut merupakan periode tahun perencanaan jangka menengah yang dibagi dalam 20 tahun perencanaan jangka panjang daerah:



Gambar 2. 9
Periode Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025

Gambaran diatas menunjukkan 20 tahun RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat dibagi menjadi 4 periode perencanaan jangka menengah. Dimulai dengan periode pertama yakni RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2011, RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016, RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022, dan terakhir ialah RPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 – 2026. Poin penting yang perlu diperhatikan dari gambaran periode pembangunan jangka menengah dalam RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2006-2025 ialah, disusunya RPD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2023-2026 merupakan tahapan terakhir dimana pada periode tersebut merupakan titik terakhir untuk menjamin Visi dan Misi RPJPD tercapai pada tahun 2025.

Berikut merupakan gambaran keterkaitan misi RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025 dengan RPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026.

1. **Tujuan I “Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Mendorong Pengembangan Sektor-sektor Potensial Dan Ekonomi Kreatif”.** Tujuan I RPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026 merupakan mandat dari Misi V dan Misi VI RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025.

Sebagai upaya mencapai Tujuan I Kabupaten Kotawaringin Barat maka berikut diturunkan Tujuan I kedalam 4 sasaran perangkat daerah yang terdiri sebagai berikut:

- Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Potensial dan Industri;
- Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Dengan Mendorong Masuknya Investasi Daerah;
- Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata; dan
- Meningkatnya Kemandirian Desa



Gambar 2. 10
Cascading Tujuan I RPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 – 2026

2. Tujuan II “Meningkatkan Pembangunan Pemenuhan Infrastruktur Dasar Berkualitas Yang Berwawasan Lingkungan”. Tujuan II RPD Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan mandat dari Misi IV, Misi XI, dan Misi XII RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat

Sebagai upaya mencapai Tujuan II Kabupaten Kotawaringin Barat maka berikut diturunkan Tujuan II kedalam 3 sasaran perangkat daerah yang terdiri sebagai berikut:

- Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
- Menurunnya Resiko Bencana; dan
- Meningkatnya Kualitas Dan Konektivitas Infrastruktur Dasar.



Gambar 2. 11
Cascading Tujuan II RPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 – 2026

3. **Tujuan III “Mewujudkan Masyarakat Kobar yang Aman Dan Demokratis”**. Tujuan III RPD Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan mandat dari Misi I, Misi III, dan Misi IX RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat.

Sebagai upaya mencapai Tujuan III Kabupaten Kotawaringin Barat maka berikut diturunkan Tujuan III kedalam 3 sasaran perangkat daerah yang terdiri sebagai berikut:

- Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- Menurunnya Tingkat Pengangguran; dan
- Meningkatnya Ketertiban Dan Ketentraman Masyarakat.



Gambar 2. 12
Cascading Tujuan III RPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 – 2026

4. **Tujuan IV “Meningkatkan Sistem Pemerintahan Dan Kualitas Layanan Birokrasi yang Inovatif dan Responsif”**. Tujuan IV RPD Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan mandat dari Misi II RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat.

Sebagai upaya mencapai Tujuan IV Kabupaten Kotawaringin Barat maka berikut diturunkan Tujuan IV kedalam 1 sasaran perangkat daerah yang terdiri sebagai berikut:

- Meningkatnya Birokrasi yang Akuntabel, Kapabel dan Pelayanan Publik yang Prima.



Gambar 2. 13
Cascading Tujuan IV RPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 – 2026

5. **Tujuan V “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia”.** Tujuan V RPD Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan mandat dari Misi VII, Misi VIII, dan Misi X RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat. Sebagai upaya mencapai Tujuan V Kabupaten Kotawaringin Barat maka berikut diturunkan Tujuan V kedalam 2 sasaran perangkat daerah yang terdiri sebagai berikut:
- Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan; dan
 - Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.



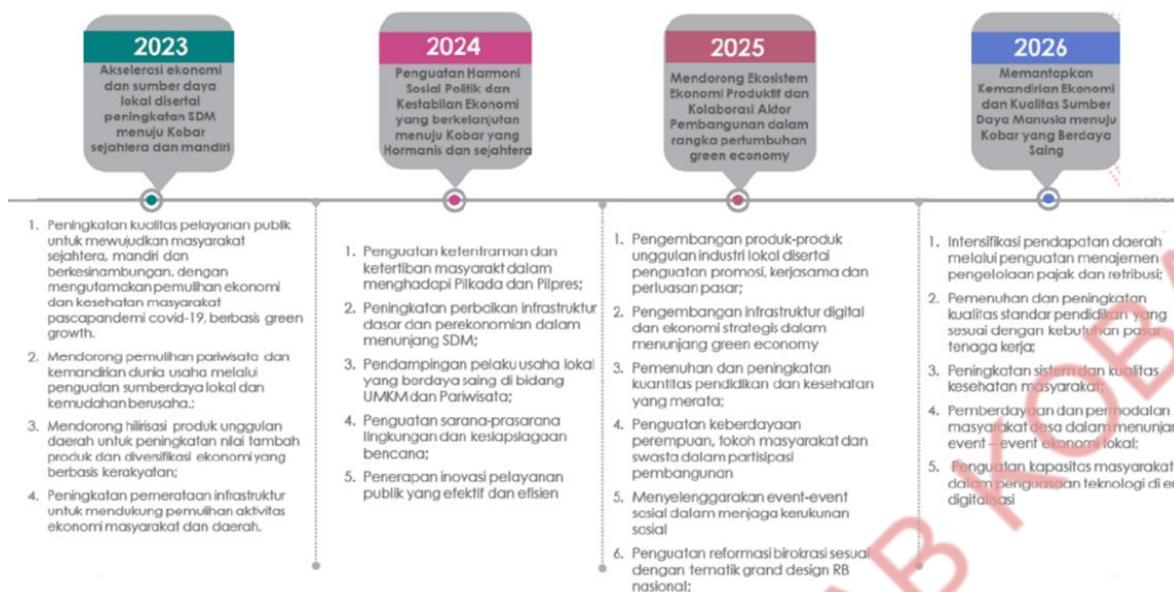
Gambar 2. 14
Cascading Tujuan V RPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 – 2026

Tabel 2. 6
Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pembangunan RPD Kabupaten Kotawaringin Barat
Periode Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi
T.1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong sektor-sektor potensial dan ekonomi kreatif	1. Meningkatnya pertumbuhan sektor potensial dan industri	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya produktivitas sektor ekonomi melalui pengembangan sektor potensial (pertanian, industri, perdagangan), daya tarik pariwisata dan investasi, serta pengembangan potensi desa
	2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan mendorong masuknya investasi daerah	
	3. Meningkatnya daya tarik pariwisata	
	4. Meningkatnya kemandirian desa	
T.2. Meningkatkan pembangunan pemenuhan infrastruktur dasar berkualitas berwawasan lingkungan	1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Optimalisasi proses rehabilitasi lingkungan hidup melalui peningkatan kualitas manajemen lingkungan hidup
	2. Menurunnya resiko bencana	
	3. Meningkatnya kualitas dan konektivitas infrastruktur dasar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan kualitas infrastruktur Kabupaten melalui pemenuhan infrastuktur dasar dan penunjang perekonomian pada sektor unggulan
T.3. Mewujudkan masyarakat Kobar yang aman dan demokratis	1. Meningkatnya kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menciptakan stabilitas sosial melalui pemberdayaan untuk menekan tingkat pengangguran dan jumlah PMKS
	2. Menurunnya tingkat pengangguran	
	3. Meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat	
T.4. Meningkatkan sistem pemerintahan dan kualitas layanan birokrasi yang inovatif dan responsif	1. Meningkatnya birokrasi yang akuntabel, kapabel, dan pelayanan publik yang prima	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan reformasi birokrasi melalui peningkatan delapan area perubahan reformasi birokrasi
T.5. Meningkatkan kualitas SDM	1. Meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sinergitas <i>stakeholders</i> dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Kotawaringin Barat ▪ Optimalisasi keterlibatan perempuan dalam pembangunan serta menciptakan lingkungan sosial layak dan ramah terhadap anak
	2. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	

Sumber : Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026

TEMA PEMBANGUNAN Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026



Sumber : Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026

2.9 RTRW KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR TAHUN 2018 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2017 – 2037

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten adalah mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dengan berbasis sumber daya pertanian, sumber daya kelautan, agroindustri, dan pariwisata ekologis.

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten sebagai berikut :

- a. pengaturan keseimbangan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan;
- b. pengembangan pertanian dan perkebunan didukung agroindustri yang berwawasan lingkungan;
- c. pengembangan dan pelestarian potensi sumber daya kelautan sepanjang Pantai Kumai tetap menjaga lingkungan;
- d. pengembangan pariwisata berbasis cagar budaya Kerajaan Kotawaringin dan pariwisata ekologis mencakup hutan untuk Taman Nasional Tanjung Puting, Taman Wisata Tanjung Keluang dan Suaka Margasatwa Sungai Lamandau;
- e. peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan
- f. penetapan pusat kegiatan melalui pendekatan pengembangan wilayah dan dukungan prasarana wilayah untuk mengatasi dan mengurangi ketimpangan pertumbuhan antar wilayah.

2.9.1 Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten digambarkan dengan perwujudan sistem pusat pelayanan terkait dengan sistem jaringan prasarana wilayah, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 7
Rencana Struktur Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat

Kebijakan	Arahan
Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan Wilayah Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PKW meliputi Kota Pangkalan Bun, ▪ PKL meliputi Kumai, ▪ PPK meliputi Ibukota Kecamatan Pangkalan Banteng, Ibukota Pangkalan Lada, Ibukota Kotawaringin Lama dan Ibukota Arut Utara, ▪ PPL meliputi semua desa di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.
Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Utama	
a. sistem jaringan transportasi darat	<p>jaringan lalu lintas dan angkutan jalan Jaringan jalan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. jaringan jalan arteri primer, jalan lintas kalimantan poros selatan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Batas Provinsi Kalimantan Barat – Kudangan – Penopa – Kujan – Simpang Runtu sepanjang 199,51 km; 2. Jalan Ahmad Yani (Pangkalan Bun), Jalan Pakunegara (Pangkalan Bun), Jalan Akses Palabuhan Tanjung Kalap (Bumi Harjo) sepanjang 17,82 km; 3. Batas KotaPangkalan Bun – Pangkalan Lada – Asam Baru. b. Rencana pengembangan jalan arteri primer meliputi : Pangkalan Bun – Sebuai sepanjang 45 km c. jaringan jalan kolektor primer K1 (JKP-1) meliputi : Batas Kota Pangkalan Bun – Kumai, jalan Pangeran Diponegoro – Jalan Iskandar, sepanjang 16,5 km. d. jaringan jalan kolektor primer K3 (JKP-3) meliputi : Riam Durian – Kotawaringin Lama – Pangkalan Bun sepanjang 60,5 km, Pangkalan Bun – Seberang Gajah – Lunci – Kuala Jelai sepanjang 256,9 km, Natai Raya – Kumai sepanjang 12 km, Sungai Kapitan – Kubu, Semanggang – Pangkut – Sungai Dau – batas Seruyan sepanjang 98,93 km, Iskandar – Bandar Udara Iskandar, Iskandar – Sungai Tendang, sepanjang 15 km dan Alternatif Ring Road Kota Pangkalan Bun; e. jaringan jalan khusus, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. ruas jalan khusus Nanga Mua – Semanggang, sepanjang 53,42 km; 2. ruas jalan khusus Rangda – Sei Rangit Jaya, sepanjang 51,80 km; 3. ruas jalan khusus Semanggang – Pabrik Pulp, sepanjang 18,80 km; 4. ruas jalan khusus Semanggang – Sei Rangit Jaya, sepanjang 25,90 km; 5. ruas jalan khusus Sei Rangit Jaya – Bumiharjo, sepanjang 8,43 km; dan 6. ruas jalan khusus jalan masuk dari Seruyan, sepanjang 39 km. f. jaringan jalan menuju pelabuhan, bandara, ibukota kecamatan dan jalan alternatif lingkaran kota di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan lebar antara 60 sampai dengan 100 meter. <p>Jaringan prasarana lalu lintas meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Terminal penumpang Tipe A Pangkalan Bun pada Bundaran GM Arsyad pangkalan Bun b. Terminal penumpang tipe C berlokasi di Desa Natai Suka terletak di Pangkalan Bun; c. Pengembangan terminal penumpang tipe C untuk mendukung fungsi PPK berlokasi di Kotawaringin Lama; d. pembangunan terminal penumpang tipe C berlokasi di Simpang Runtu, Amin Jaya, dan Kumai; e. pembangunan terminal penumpang tipe C berlokasi di Pangkut;

Kebijakan	Arahan
	<p>f. pembangunan terminal barang meliputi terminal kendaraan muatan barang berlokasi disekitar pergudangan, pelabuhan laut dan pelabuhan penyeberangan terletak di Kumai;</p> <p>g. pembangunan jembatan timbang muatan berada di Simpang Runtu</p> <p>Jaringan pelayanan terdiri atas : jaringan pelayanan angkutan antara seluruh ibukota kabupaten dalam provinsi meliputi :</p> <p>a. Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Palangka Raya – Pangkalan Bun – Nanga Bulik – Pontianak; 2. Pangkalan Bun – Sukamara – Ketapang – Pontianak; 3. Pangkalan Bun – Lamandau – Ketapang. <p>b. angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP) meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Palangka Raya - Pangkalan Bun; 2. Kasongan - Pangkalan Bun; 3. Sampit - Pangkalan Bun; 4. Kuala Pembuang - Pangkalan Bun; 5. Pangkalan Bun – Nanga Bulik. 6. Pangkalan Bun – Sukamara. <p>c. angkutan barang meliputi : angkutan barang dari Pelabuhan Panglima Utar menuju Terminal Barang Sungai Kapitan.</p> <p>jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan</p> <p>a. jaringan angkutan sungai dan danau meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sungai Arut Kabupaten Kotawaringin Barat 2. Sungai Arut : Raja/Pangkalan Bun – Mendawai Seberang – Tanjung Putri 3. Sungai Kumai : Kumai – Pangkalan Banteng; 4. Sungai Belantika : Bayat – N. Belantika 5. Sungai Lamandau : Tapin Bini – N. Belantika – N. Bulik – Kotawaringin Lama – Mendawai Seberang. <p>b. jaringan angkutan penyeberangan meliputi Kumai – Kendal di Jawa Tengah (lintas penghubung sabuk);</p>
<p>b. sistem jaringan transportasi perkeretaapian</p>	<p>Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi meliputi jaringan jalur kereta api lintas utama provinsi.</p> <p>a. Jaringan jalur kereta api lintas utama provinsi di Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan prioritas tinggi dan dititik beratkan pada angkutan barang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem jaringan jalur kereta api utama provinsi meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a) Jalur kereta api Tumbang Samba – Rantau Pulut – Nanga Bulik – Pangkalan Bun – Kumai; b) Jalur kereta api Kudangan – Nanga Bulik – Kumai. 2. Sistem jaringan jalur kereta api antar kota dengan prioritas rendah meliputi : Ruas jalan kereta api Buntok – Palangka Raya - Sampit – Pangkalan Bun - Sanggau 3. Simpul jaringan jalur kereta api barang di Kalimantan Tengah meliputi : perkotaan Pangkalan Bun dan Kumai.
<p>c. sistem jaringan transportasi laut</p>	<p>Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi laut meliputi :</p> <p>a. Tatanan kepelabuhan terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelabuhan yang ditetapkan sebagai pelabuhan pengumpul meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a) Pelabuhan Kumai berada di Kecamatan Kumai. b) Pelabuhan Pangkalan Bun berada di Kecamatan Arut Selatan. 2. Pelabuhan yang ditetapkan sebagai pelabuhan khusus, Pelabuhan Tanjung Kalap berada di Bumiharjo Kecamatan Kumai. 3. Rencana pengembangan pelabuhan yang ditetapkan sebagai pelabuhan angkutan barang dan penumpang ke luar pulau, pelabuhan ro-ro berada di Kecamatan Kumai.

Kebijakan	Arahan
	<ol style="list-style-type: none"> 4. Pelabuhan Perikanan merupakan pelabuhan yang ditetapkan sebagai pelabuhan Tempat Pendaratan Ikan (TPI) di Kecamatan Kumai. 5. Rencana pengembangan pelabuhan laut dalam di Sebuai atau Tanjung Pandan Kecamatan Kumai. 6. Tatanan kepelabuhan harus menjaga ungsi pertahanan dan keamanan negara, dengan tidak menutup akses pelabuhan dan fasilitas pemeliharaan serta perbaikan instalasi militer TNI AL <p>b. Alur pelayaran, alur pelayaran nasional terdiri atas Kumai – Semarang, Kumai – Surabaya, Kumai – Jakarta, Pangkalan Bun – Semarang, Pangkalan Bun – Surabaya; dan Pangkalan Bun – Jakarta.</p>
<p>c. sistem jaringan transportasi udara</p>	<p>Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi udara meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tatanan kebandarudaraan meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Bandar Udara pengumpul skala tersier yaitu Bandara Udara Iskandar di Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat 2. Rencana pembangunan bandara baru internasional/nasional meliputi : di Desa Sebuai Kabupaten Kotawaringin Barat. b. Ruang udara untuk penerbangan meliputi: ruang udara di atas bandar udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara; dan ruang udara disekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan. c. Ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan.
<p>Rencana Pengembangan Sistem Jaringan prasarana Lainnya</p>	
<p>a. rencana sistem jaringan energi</p>	<p>Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Energi, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pembangkit tenaga listrik, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Pangkalan Bun dan Kumai; 2. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kabupaten Kotawaringin Barat; 3. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bio Massa (PLTBM) di Kabupaten Kotawaringin Barat; 4. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kabupaten Kotawaringin Barat; b. Pembangunan sistem interkoneksi dan jaringan transmisi tegangan menengah/tinggi, terdiri atas : <ol style="list-style-type: none"> 1. pembangunan jaringan transmisi udara tegangan tinggi (SUTT) 150 KV Palangka Raya – Kasongan – Sampit; Sampit – Pangkalan Bun; Pangkalan Bun – Kumai, Pangkalan Bun - Nanga Bulik. 2. Perluasan pembangunan jaringan distribusi tegangan menengah dari gardu induk menuju pusat – pusat beban di seluruh Kabupaten Kotawaringin Barat; 3. perluasan jaringan transmisi tegangan rendah dari jaringan distribusi ke wilayah pemukiman berada di seluruh kabupaten Kotawaringin Barat 4. pembangunan kabel bawah laut dari Kabupaten Kotawaringin Barat menuju kearah Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah di Kecamatan Kumai. c. Gardu Induk (GI) merupakan pembangunan Gardu Induk (GI) di Kabupaten Kotawaringin Barat; dan d. Depo Bahan Bakar Minyak (BBM) meliputi depo bahan bakarminyak (BBM) di Kabupaten Kotawaringin Barat.
<p>b. rencana sistem jaringan telekomunikasi</p>	<p>Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi, terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sistem jaringan telekomunikasi tetap termasuk sistem jaringan tetap lokal wireline cakupan kabupaten, yang meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. sistem jaringan stasiun telepon otomatis (STO) berada di STO Pangkalan Bun; dan 2. sistem jaringan fiber optic (FO) yang terhubung antara Banjarmasin – Kapuas – Pulang Pisau - Palangka Raya – Kasongan – Sampit - Pangkalan Bun. b. Sistem jaringan stasiun radio gelombang mikro (STRGM) di Pangkalan Bun; c. Persebaran menara Base Transceiver Station (BTS) yang diatur dalam cell planning/site name dengan memperhatikan potensi ruang wilayah yang tersedia, kepadatan pemakai jasa telekomunikasi dan sesuai kaidah penataan ruang wilayah,

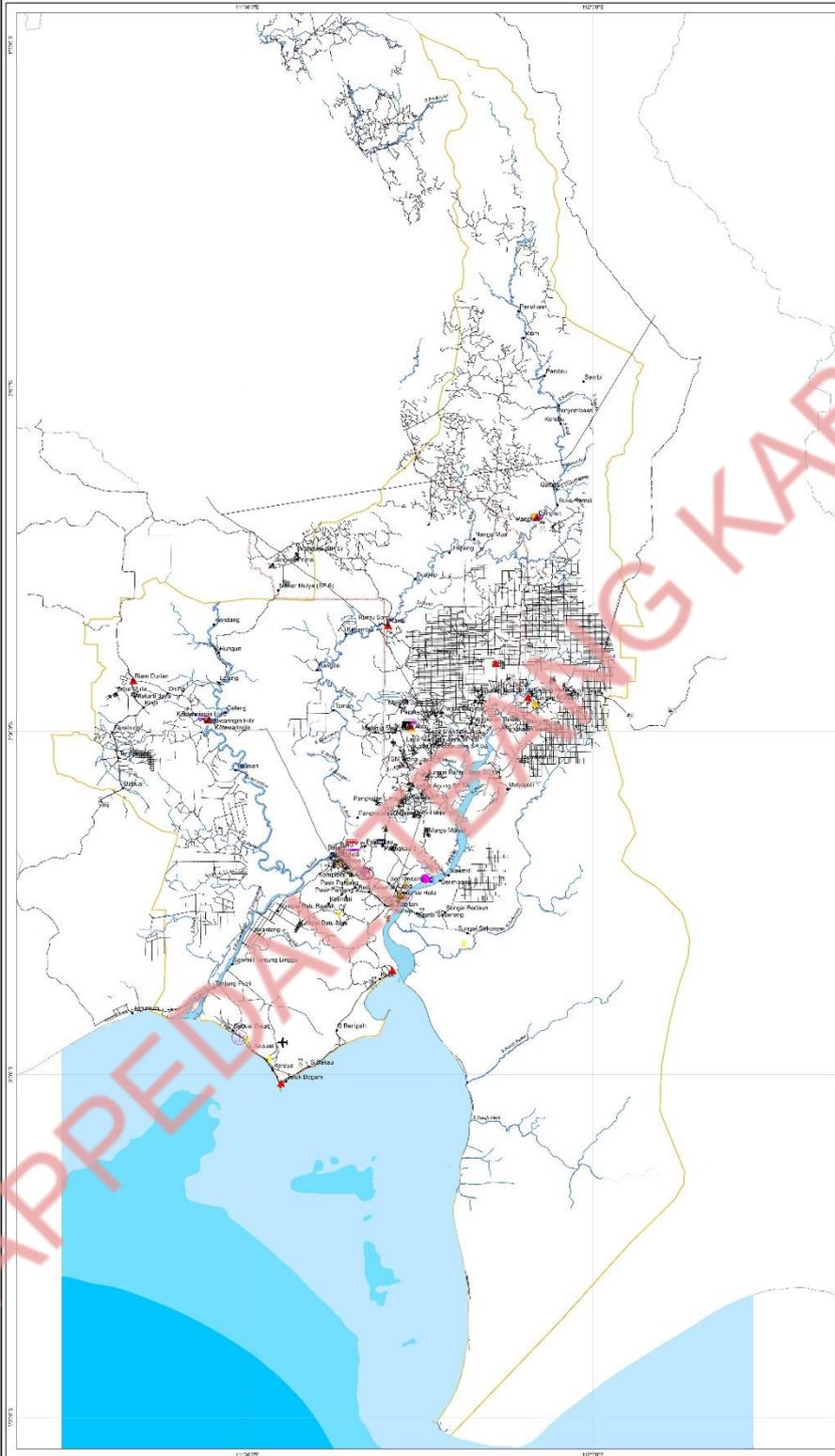
Kebijakan	Arahan
	kamufase dan keselarasan dengan lingkungan, keamanan dan ketertiban lingkungan, estetika dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya serta kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.
<p>c. rencana sistem sumberdaya air</p>	<p>Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Pengelolaan Sumber Daya Air, terdiri atas :</p> <p>a. Wilayah sungai, terdiri atas :</p> <p>wilayah sungai lintas provinsi termasuk wilayah sungai (WS) Jelai – Kendawangan yang meliputi DAS Jelai, DAS Arut, DAS Lamandau, DAS Kumai; wilayah sungai lintas wilayah kabupaten meliputi DAS Buluh Kecil, DAS Cabang</p> <p>b. Danau dan bendungan. Danau meliputi : Danau Gatal, Danau Asam, Danau Seluluk, Danau Masorayan, Danau Sulung, Danau Bakobut, Danau Sekonyer, Danau Purun, Danau Batang Pagar, Danau Liu, Danau Kandang ; sedangkan bendungan meliputi : Bendung Bengaris, Bendung Mulyajadi, Bendung Sagu Suka Mulya, Bendung Karanganyar, Bendung Palih Baru dan Bendung Sungai Tendang (Rawa) di Kabupaten Kotawaringin Barat.</p> <p>c. Daerah irigasi (DI), terdiri atas: Daerah Irigasi kewenangan provinsi di Desa Kumpai Batu Atas di Kecamatan Arut Selatan (Luas Pelayanan 1.500 hektar) Daerah irigasi yang merupakan kewenangan kabupaten berada :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DI Sagu – Kondang (Luas Pelayanan 300 Ha); 2. DI Mulya Jadi (Luas Pelayanan 200 Ha); 3. DI Sei Bamban (Luas Pelayanan 297 Ha); 4. DI Pangkalan Satu (Luas Pelayanan 100 Ha); 5. DI Sei Tendang (Luas Pelayanan 600 Ha); 6. DI Modang Mas (Luas Pelayanan 122 Ha); 7. DI Palih Baru (Luas Pelayanan 300 Ha); <p>d. Daerah Rawa (DR), terdiri atas: daerah rawa kewenangan provinsi dengan luas pelayanan 5.000 hektar (5 lokasi) sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. daerah rawa (DR) Mendawai/Tatakan Pialon 1.000 Ha 2. daerah rawa (DR) Raja Seberang luas pelayanan 1.000 Ha 3. daerah rawa (DR) Mendawai Seberang luas pelayanan 1.000 Ha 4. daerah rawa (DR) Teluk Pulai luas pelayanan 1.000 Ha; 5. daerah rawa (DR) Sekonyer luas pelayanan 1.000 Ha. <p>daerah rawa kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat dengan luas pelayanan 16.895 hektar (48 lokasi) meliputi Kecamatan Arut Selatan, Kecamatan Arut Utara, Kecamatan Kumai, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kecamatan Pangkalan Lada dan Kecamatan Kotawaringin Lama.</p> <p>e. Penanganan pantai, meliputi kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengaman pantai yang berada di pantai di Kabupaten Kotawaringin Barat (Pantai Kubu, pantai sei bakau, Pantai Desa Keraya, Pantai Desa Sebuai, Pantai dan Pantai Teluk Bogam).</p> <p>f. Pengendalian banjir, meliputi kegiatan pembangunan, rehabilitasi, serta operasional dan pemeliharaan (OP) prasarana dan sarana pengendalian banjir meliputi pengendalian banjir dan pengamanan longsoran tebing sungai yang terjadi pada wilayah sungai strategis nasional seperti WS Jelai – Kendawangan meliputi DAS Arut dan DAS Kumai;</p>
Rencana Pengembangan Prasarana Pengelolaan Lingkungan	
<p>a. Sistem jaringan persampahan</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. menyiapkan tempat penampungan sementara (TPS) di setiap kecamatan dan atau fasilitas umum serta tempat pemrosesan akhir (TPA) berada di Pangkalan Bun; b. penyediaan kolam lindi di zona non aktif yang menampung air lindi dari zona non aktif ,dan kolam lindi di zona aktif yang menampung air lindi dari sampah zona aktif; c. penyediaan 3 (tiga) unit sumur pantau di tempat pemrosesan akhir (TPA) yang berada di bagian hilir, di lingkungan TPA dan di bagian hulu;

Kebijakan	Arahan
	<ul style="list-style-type: none"> d. dalam pengolahan pemrosesan akhir menggunakan sistem sanitary landfill; e. sistem sanitary landfill sebagaimana dimaksud pada huruf c harus ditempatkan di bawah air tanah agar tidak dapat menimbulkan polusi air, uap zat kimia beracun, bahan organik dan anorganik beracun serta wabah penyakit; f. teknologi pengolahan sampah mengacu skala prioritas pada pengolahan sampah organik seperti proses bio fertilized, memaksimalkan sistem Reuse, Recycle, Reduce (3R).
<p>b. Sistem jaringan drainase</p>	<p>Prasarana sistem jaringan drainase dengan menyempurnakan dan menata prasarana lingkungan perkotaan, permukiman, lingkungan pusat jasa, dan lingkungan perdesaan termasuk peningkatan kualitas dan pembangunan saluran drainase.</p> <p>Sistem drainase tersebut merupakan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sistem jaringan drainase yang meliputi jaringan primer, jaringan sekunder dan jaringan tersier; b. Sistem jaringan drainase disesuaikan dengan sistem drainase tanah yang ada, dan tingkat peresapan air ke dalam penampang atau profil tanah, serta arah aliran dengan memanfaatkan topografi wilayah; c. Pemeliharaan kelestarian sungai sebagai sistem drainase primer, melalui kegiatan normalisasi sungai dan konservasi sempadan sungai.
<p>c. Sistem jaringan air minum</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. penyediaan dan pengelolaan air minum yang meliputi air permukaan dan air tanah yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan setiap hari sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> 1. Air permukaan meliputi DAS Arut, DAS Lamandau, DAS Kumai, DAS Sungai Hijau, DAS Sungai Nyirih, beserta anak sungai dan danau lainnya; 2. Air yang potensial tersebar pada beberapa cekungan air tanah berada di wilayah Kotawaringin Barat dengan terdapat 9 titik. b. instalasi pengolahan air minum berada di Pangkalan Bun, Desa Kubu, Kecamatan Kumai, Kecamatan Kotawaringin Lama, Desa Kumpai Batu Atas, dan Kecamatan Pangkalan Banteng; c. prasarana sistem jaringan air minum termasuk pengembangan sistem penyediaan air minum (spam) dengan sistem perpipaan dengan kapasitas 200 Liter/detik, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1. penyediaan kebutuhan air minum di pusat kegiatan/aktivitas di sepanjang jalan utama; 2. penyediaan kebutuhan air minum di pusat pengembangan wilayah, meliputi kawasan di sekitar ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan; dan 3. penyediaan kebutuhan air minum di kawasan permukiman, industri, perdagangan dan jasa.
<p>d. Rencana sarana umum dan sosial</p>	<p>Rencana pengembangan sarana umum dan sosial penataannya dilaksanakan secara bertahap melalui peraturan daerah tersendiri.</p>
<p>e. Sistem jaringan air limbah</p>	<p>Prasarana sistem jaringan pengolahan air limbah meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sistem pengolahan air limbah setempat (on-site system); b. sistem pengolahan air limbah terpusat.

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 – 2037

RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2017-2037

Peta Rencana Struktur Ruang



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan HM. Rafli Nomor 3, Pangkalan Bun 74112
Telp/Fax (0532) 21032, PO BOX 1029

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR TAHUN
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2017-2037



0 3.75 7.5 15 22.5 30
Km

1:224,299

SISTEM KOORDINAT : WGS 1984 UTM Zone 49S
PROYEKSI : Transverse Mercator
DATUM : D WGS 1984

- KETERANGAN :**
- Desa/ Kelurahan Lain
 - Desa/ Kelurahan Kecamatan
 - Administrasi Kabupaten
 - Administrasi Kecamatan
 - Sistem Jaringan Irigasi Utama
 - Sistem Jaringan Jalan
 - Arsip
 - Kolektor
 - Salah
 - Jalan Khusus
 - Sistem Perencanaan Laju Lintas
 - Rencana Terminal Tipe B
 - Rencana Terminal Tipe C
 - Rinc. Pelabuhan Kumal
 - Cek Fisik Kewajiban Pengk. Lintas
 - Rumi
 - Sistem Jaringan Transportasi Laut
 - Peabuhan Arut Selatan
 - Peabuhan Kumal
 - Peabuhan Khusus
 - Peabuhan Barang-Hempung
 - Tempat Perencanaan Ikan (TPI)
 - Rencana Peabuhan Samudera
 - Sistem Jaringan Transportasi Perkeretaapian
 - Rencana Jalur Kereta Api
 - Sistem Jaringan Transportasi Udara
 - Bandara Iskandar
 - Renc. Bandara Baru
 - Arut Selatan
 - Arut Utara
 - Kotawaringin Lama
 - Kumal
 - Pangkalan Banting
 - Pangkalan Lada
 - Jaringan Sungai
 - Sungai Kecil
 - Sistem Jaringan Transmisi Listrik
 - Sistem Jaringan Energi
 - PLTD
 - PLTU
 - PLTB
 - Pertamina
 - Dapo BSM
 - Sul 150kV
 - GEPSUN
 - Sistem Jaringan Telekomunikasi
 - BTS
 - STO
 - STRGM
 - Sistem Perencanaan Lingkungan
 - Pengolahan Limbah
 - TPA
 - TPS
 - Rencana Pusat Kegiatan
 - PKW
 - PPK
 - PPI
 - PKlp

PETA SITUASI
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



Pangkalan Bun, Februari 2018

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NURHIDAYAH

- HALAMAN : 67
- SUMBER :
1. Peta Rupa Bumi - Badan Informasi Geospasial, 2013
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Ketentuan Peta Rencana Tata Ruang
 3. SK Menteri Nomor : SK.529/Menhu/II/2012 Tanggal 25 September 2012
 4. Hasil Pengukuran Titik GPS, Tahun 2011
 5. Hasil Rencana 2012
 6. Batas Administrasi Wilayah mengacu pada Perda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang RTRW Provinsi Kalimantan Tengah

Gambar 2. 15
Peta Struktur Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat

2.9.2 Rencana Pola Ruang

Berikut arahan rencana pola ruang Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tabel 2. 8
Rencana Pola Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat

Kebijakan	Arahan
Kawasan Lindung	<p>a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ kawasan bergambut tersebar di Kecamatan Arut Selatan, Kecamatan Kotawaringin Lama dan Kecamatan Kumai; ▪ kawasan hutan lindung dengan luas kurang lebih 182,74 hektar tersebar di Pulau Kelapa, Pulau Samudera Kecil, Pulau Batimbul, Pulau Bengaris, Pulau Seluluk, dan Pulau Terusan Pulau Samudera di Desa Tanjung Putri Kecamatan Arut Selatan. <p>b. kawasan perlindungan setempat</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ kawasan sempadan pantai dengan batas minimum 50 sampai dengan 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat sepanjang pesisir pantai Kabupaten Kotawaringin Barat dengan panjang pantai kurang lebih 304 kilometer sehingga luas perlindungan sempadan pantai kurang lebih 2.309 hektar; ▪ kawasan sempadan sungai 100 meter dari kiri dan kanan sungai besar, dan 50 meter bagi anak sungai diluar permukiman serta apabila sungai dan anak sungai melalui lingkungan permukiman, maka areal perindungannya adalah 10 sampai dengan 50 meter ke kiri kanan sungai luas sempadan sungai kurang lebih 201 kilometer persegi; ▪ kawasan sempadan danau dengan lebar 50 meter sampai 100 meter dari bibir danau ke arah darat meliputi Danau Sulung, Danau Seluluk, Danau Kenambui di Kecamatan Arut Selatan serta Danau Gatal, Masorayan di Kecamatan Kotawaringin Lama; ▪ kawasan lindung spiritual berada di Air Terjun Patih Mambang Desa Keraya Kecamatan Kumai ;dan ▪ kawasan kearifan lokal lainnya meliputi Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan dan Desa Sekonyer Kecamatan Kumai. <p>c. kawasan suaka alam, perlindungan alam dan cagar budaya</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ kawasan suka alam meliputi Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) berada di Kecamatan Kumai seluas kurang lebih 248.298 hektar dan Taman Wisata Alam (TWA) Tanjung Keluang berada di Kecamatan Kumai seluas kurang lebih 2.551 hektar ▪ kawasan pelestarian alam meliputi Suaka Margasatwa Sungai Lamandau dan Suaka Alam Laut seluas kurang lebih 30.453 hektar ; ▪ kawasan cagar budaya meliputi Istana Kuning atau Keraton Lawang Agung Bukit Indera Kencana, Astana Mangkubumi di Kecamatan Arut Selatan, Astana Al-Nursari, Makam Kyai Gede Masjid Kyai Gede dan Makam Raja Kuta Tanah di Kecamatan Kotawaringin Lama. Rumah Adat, Batu Patahan, Tiang Pantar, Balai Pinyang Laman, Batu Dahiang Burung, Sapundu, Rumah Betang Kuning, Batu Lancang, Tempayan Hermaung Yadana dan Monumen Iskandar Sambi di Kecamatan Arut Utara. <p>d. kawasan lindung geologi</p> <p>Kawasan sekitar mata air, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sungai Kumai panjang kurang lebih 175 km (kilometer); ▪ Sungai Lamandau panjang kurang lebih 325 km (kilometer) dan Sungai Arut panjang kurang lebih 250 km (kilometer) <p>e. kawasan rawan bencana</p>

Kebijakan	Arahan
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ kawasan rawan gelombang pasang berada di sepanjang pesisir pantai Kabupaten Kotawaringin Barat meliputi Tanjung Pengujan sampai Tanjung Keluang, Teluk Pulau sampai Teluk Ranggau, Keraya dan Sebuai; ▪ kawasan rawan banjir meliputi Desa Kumpai Batu Bawah, Desa Rangda, Desa Sulung, Desa Kenambui, Desa Umpang, Desa Tanjung Terantang Kelurahan Mendawai, Kelurahan Raja, Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Mendawai Seberang, Kelurahan Raja Seberang di Kecamatan Arut Selatan sedangkan Desa Lalang, Desa Rungun dan Desa Kondang di Kecamatan Kotawaringin Lama; ▪ kawasan rawan kebakaran hutan berada di daerah pesisir dan muara sungai serta hutan disepanjang jalan yang menghubungkan Kota Pangkalan Bun – Kotawaringin Lama; <p>f. kawasan lindung lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ kawasan perlindungan plasma nutfah seluas kurang lebih 87,6 ha meliputi daerah sekitar Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP), daerah sekitar Suaka Margasatwa Sungai Lamandau (SMSL) dan daerah sekitar Taman Wisata Alam (TWA) Tanjung Keluang; ▪ kawasan perlindungan terumbu karang seluas kurang lebih 467 ha berada di perairan laut di dekat Gosong Senggora dan Sepagar Kecamatan Kumai; ▪ kawasan koridor bagi jenis satwa dan biota laut seluas kurang lebih 67.872 ha yang di lindungi pada perairan laut Kabupaten Kotawaringin Barat di Kecamatan Kumai; ▪ kawasan pantai hutan bakau seluas kurang lebih 101 ha berada di sepanjang Sungai Mambang Desa Kubu sampai Desa Sungai Bakau terletak di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat; ▪ kawasan taman hutan kota seluas kurang lebih 4.4 hektar berada di Kecamatan Arut Selatan dan Kecamatan Kumai. ▪ kawasan konservasi perairan sungai atau danau seluas 16.482 hektar meliputi : <ul style="list-style-type: none"> • kawasan konservasi perairan Sungai Arut di Sungai Desa Panahan seluas kurang lebih 1.500 hektar; • kawasan konservasi perairan Danau Seluluk seluas kurang lebih 200 hektar; • kawasan konservasi perairan Danau Gatal seluas kurang lebih 1.500 hektar; • kawasan konservasi perairan Danau Masorayan seluas kurang lebih 250 hektar; dan • kawasan konservasi Gosong Senggora dan perairan laut Kabupaten Kotawaringin Barat kurang lebih 13.032 hektar.
<p>Kawasan Budidaya</p>	<p>a. kawasan peruntukan hutan produksi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ kawasan hutan produksi terbatas (HPT) seluas ± 5.397 hektar; ▪ kawasan hutan produksi tetap (HP) seluas ± 253.178 hektar; dan ▪ kawasan hutan produksi yang dapat di konversi (HPK) seluas ± 147.866 hektar <p>b. kawasan peruntukan hutan rakyat dengan luas ± 478,5 hektar berada di Kecamatan Arut Utara yang meliputi Desa Nanga Mua, Desa Pangkut, Desa Sukarami, Desa Kerabu, dan Desa Gandis</p> <p>c. kawasan peruntukan pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kawasan pertanian tanaman pangan (lahan sawah) dengan luas ± 9.469 hektar tersebar di Kecamatan Pangkalan Banteng, Kecamatan Pangkalan Lada, Kecamatan Arut Utara, Kecamatan Arut Selatan, Kecamatan Kotawaringin Lama dan Kecamatan Kumai; ▪ Kawasan pencadangan lahan tanaman pangan dengan luas ± 21.288 hektar tersebar di Kecamatan Pangkalan Banteng, Kecamatan Pangkalan Lada, Kecamatan Arut <p>Kawasan pertanian tanaman pangan (lahan sawah) dengan luas ± 9.469 hektar tersebar di Kecamatan Pangkalan Banteng, Kecamatan Pangkalan Lada, Kecamatan</p>

Kebijakan	Arahan
	<p>Arut Utara, Kecamatan Arut Selatan, Kecamatan Kotawaringin Lama dan Kecamatan Kumai;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kawasan pencadangan lahan tanaman pangan dengan luas ± 21.288 hektar tersebar di Kecamatan Pangkalan Banteng, Kecamatan Pangkalan Lada, Kecamatan Arut <p>d. kawasan peruntukan perikanan seluas ± 11.496 hektar, terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kawasan peruntukan perikanan tangkap seluas ± 3.930 hektar meliputi perairan laut dan perairan umum (sungai, danau dan rawa) ▪ Kawasan peruntukan budidaya perikanan seluas ± 7.541 hektar, terdapat di wilayah darat dan pesisir meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • kawasan peruntukan perikanan budidaya di laut meliputi : <ul style="list-style-type: none"> ○ budidaya keramba jaring apung pada kawasan Desa Kubu, Sei Penyimping ke arah TWA Tanjung Keluang; ○ budidaya teripang dan rumput laut berada di Desa Sungai Bakau dan Desa Teluk Bogam; ○ budidaya air payau ditambah meliputi kawasan Sungai Ratik Desa Sungai Bakau, kawasan Teluk Ranggau dan Sungai Gumpung di Desa Sungai Cabang Timur dan kawasan Desa Tanjung Putri; dan ○ budidaya air payau di sungai meliputi kawasan dari Tanjung Kalap sampai Desa Sebukat. • kawasan budidaya air tawar meliputi : <ul style="list-style-type: none"> ○ keramba jaring apung meliputi kawasan Karang Anyar sampai Danau Seluluk di Sungai Lamandau dan dari Sungai Tembaga sampai Sungai Bungur di Sungai Arut; ○ kolam ikan meliputi kawasan Desa Natai Kerbau di Kecamatan Pangkalan Banteng, Desa Sagu di Kecamatan Kotawaringin Lama keramba ikan meliputi kawasan Desa Runtu, Desa Kenambui dan Kelurahan Kotawaringin Hulu. • kawasan budidaya ikan di rawa meliputi Desa Sebuai, Tanjung Putri dan Desa Tanjung Terantang. <p>e. kawasan peruntukan pertambangan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kawasan peruntukan pertambangan yang disebut wilayah pertambangan menyebar diseluruh Kabupaten Kotawaringin Barat, yang terdiri dari Kawasan Pertambangan mineral logam dan non logam, mineral radioaktif, batuan dan batubara yang dikelompokkan menjadi wilayah usaha pertambangan (WUP), wilayah pertambangan nasional (WPN), wilayah pertambangan rakyat (WPR) serta kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi. ▪ Kawasan peruntukan pengembangan sumber daya energi di Kabupaten Kotawaringin Barat <p>f. kawasan peruntukan industri seluas kurang lebih 1.580 ha, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kawasan sentra industri kecil dan kawasan industri menengah (sentra IKM) tersebar diseluruh Kabupaten Kotawaringin Barat. ▪ Kawasan industri, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Strategis Industri tersebar sesuai dengan perencanaan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan perencanaan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (mulai dari Kawasan Industri Tanjung Kalap, Kawasan Industri Natai Peramuhan, Kawasan Industri Tempenek seluas ±146 ha dan Kawasan Ekonomi Khusus di Daerah Sebuai) <p>g. kawasan peruntukan pariwisata seluas kurang lebih 25 ha, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ kawasan peruntukan wisata budaya di Kecamatan Arut selatan berupa istana kuning, istana mangkubumi, kolam pemandian putri raja dan makam raja kutaringin

Kebijakan	Arahan
	<p>yang terletak di tengah Kota Pangkalan Bun dan di Kecamatan Kotawaringin Lama berupa istana Al -Nursari, Masjid Kyai Gede dan makam Kyai Gede;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ kawasan peruntukan wisata alam di Kecamatan Kumai berupa Taman Nasional Tanjung Puting, Pantai Kubu, pantai Keraya, Pantai Teluk Bogam, TWA Tanjung Keluang, Pantai Sebuai, Air Terjun Patih Mambang, Gosong Senggora, Suaka Margasatwa Sungai Lamandau, Danau Naruhum, Sungai Sekonyer, dan kawasan wisata sungai Buluh Besar; ▪ kawasan peruntukan wisata buatan berupa kawasan taman hiburan rakyat Pangkalan Bun Park <p>h. kawasan peruntukan permukiman seluas kurang lebih 28.477 hektar terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ kawasan peruntukan permukiman perkotaan meliputi Pangkalan Bun, Kotawaringin, Pandu Sanjaya, Karang Mulya, Kumai, Pangkut; ▪ kawasan peruntukan permukiman perdesaan meliputi desa di Kabupaten Kotawaringin Barat <p>i. kawasan peruntukan lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan meliputi Hutan Kawasan Tertentu Untuk Latihan Militer (HKT-M) seluas kurang lebih 24.440 hektar yang berada di dalam kawasan hutan pada Kecamatan Kumai; ▪ kawasan ruang terbuka hijau seluas kurang lebih 16.014 hektar yang tersebar di Kecamatan Arut Selatan, Kecamatan Arut Utara, Kecamatan Kumai, Kecamatan Pangkalan Banteng dan Kecamatan Pangkalan Lada; ▪ kawasan peruntukan lainnya untuk pertahanan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Komando Distrik Militer (KODIM) 1014/ berada di Pangkalan Bun terletak di Kecamatan Arut Selatan; • Komando Rayon Militer (KORAMIL) berada di 6 (enam) Kecamatan terletak di Kabupaten Kotawaringin Barat • Lanud TNI-AU tipe "D" berada di Pangkalan Bun seluas kurang lebih 3.006 Ha. ▪ kawasan peruntukan evakuasi bencana tersebar di setiap ibukota Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat; ▪ kawasan peruntukan kantor pemerintahan dicadangkan seluas 3.000 ha di Jalan Pangkalan Bun – Kotawaringin; ▪ kawasan pengembangan perumahan pemerintah daerah di Pangkalan Lima Kecamatan Arut Selatan; ▪ kawasan peruntukan bangunan sarang burung walet diarahkan ke sepanjang pesisir pantai Kecamatan Kumai. ▪ Kawasan pengembangan Bandara Baru Pangkalan Bun di Desa Sebuai ▪ Kawasan pengembangan Pelabuhan Laut Dalam di Desa Sebuai dan Tanjung Pandan

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 – 2037

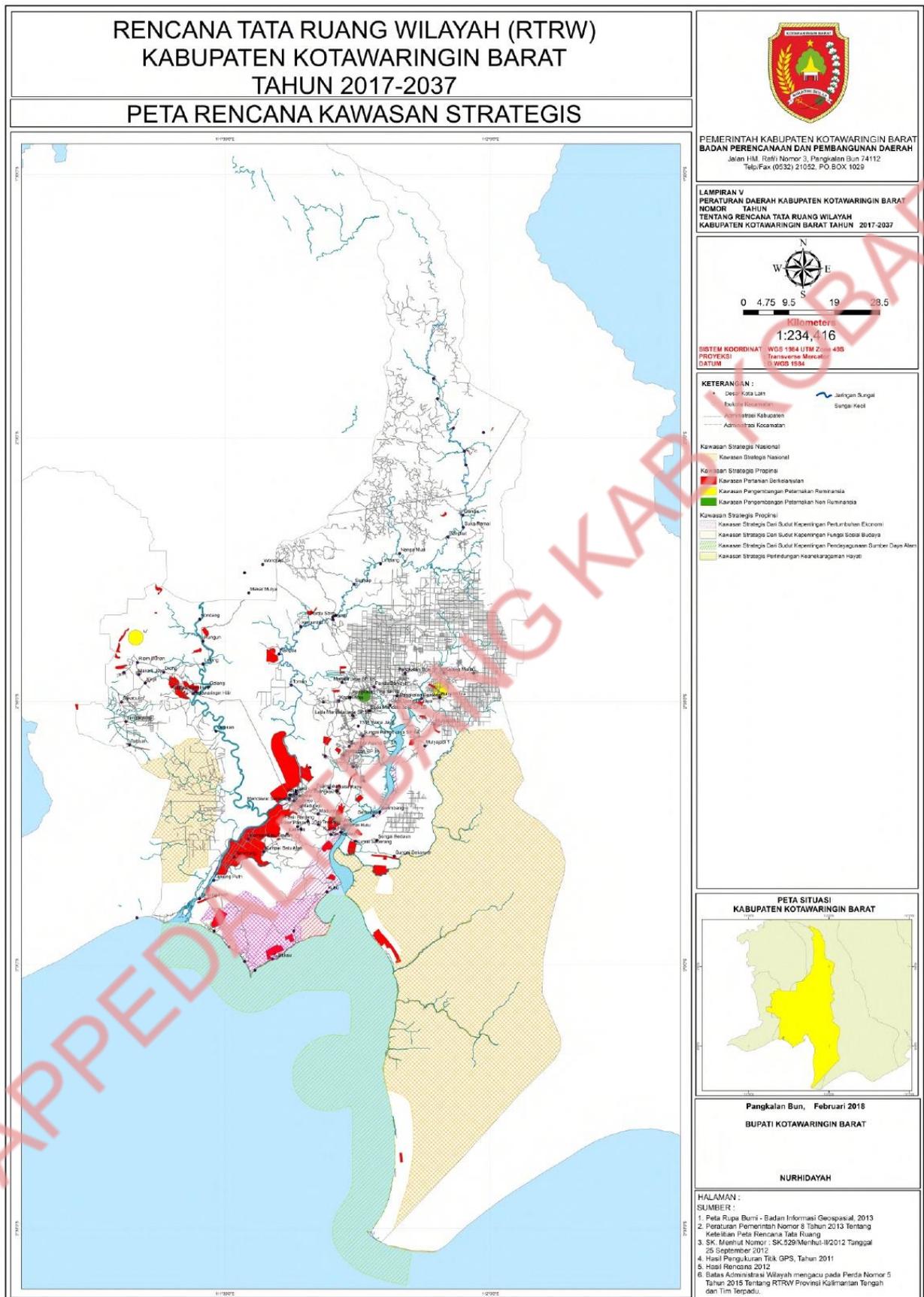
2.9.3 Rencana Kawasan Strategis

Berikut arahan kawasan strategis Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 9
Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Kotawaringin Barat

Kawasan Strategis	Arahan
Kawasan Strategis Nasional (KSN)	Kawasan Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP).
Kawasan Strategis Provinsi (KSP)	<ul style="list-style-type: none"> a. Kawasan pertanian berkelanjutan yang dipaduserasikan dengan pengembangan irigasi teknis di Kabupaten Kotawaringin Barat b. Kawasan pertanian berkelanjutan yang dipaduserasikan dengan pengembangan DR. Pasang Surut, DR. Non Pasang Surut, DR. Lebak berada di Kabupaten Kotawaringin Barat; c. kawasan pengembangan peternakan berupa kawasan peternakan ruminansia dan non ruminansia yang lokasi pengembangan berada di Kecamatan Arut Selatan, Kumai dan Pangkalan Lada dan ayam dan itik berada di Kecamatan Kotawaringin Lama, Arut Selatan, Kumai, Pangkalan Banteng dan Pangkalan Lada.
Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)	<p>Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kawasan perkebunan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1. perkebunan kelapa sawit berada di Kecamatan Kumai, Kecamatan Arut Utara, Kecamatan Arut Selatan, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kecamatan Pangkalan Banteng dan Kecamatan Pangkalan Lada; 2. perkebunan karet berada di Kecamatan Pangkalan Banteng dan Pangkalan Lada; 3. perkebunan lada berada di Kecamatan Pangkalan Lada; 4. perkebunan jagung berada di Kecamatan Pangkalan Lada dan Pangkalan Banteng. b. kawasan terpadu industri, pelabuhan, petikemas dan pergudangan, serta simpul transportasi darat, transportasi laut dan transportasi udara berupa kawasan sentra produksi berada di Pangkalan Bun – Kumai, kawasan sentra produksi Pandu Sanjaya – Karang Mulya (Pakam), kawasan sentra produksi Pangkut, kawasan pelabuhan meliputi : pelabuhan Tanjung Kalap/CPO Bumiharjo dan pelabuhan Ro-ro berada di Kecamatan Kumai, Bandar Udara Iskandar Pangkalan Bun dan rencana pembangunan Bandar Udara baru berada di Desa Sebuai serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Desa Sebuai; c. kawasan strategis ekonomi sektor unggulan agropolitan meliputi <ul style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Pangkalan Lada dengan komoditi unggulan adalah karet dan jagung, komoditi penunjang adalah lada dan ternak sapi 2. Kecamatan Pangkalan Banteng dengan komoditi unggulan adalah karet dan jagung, komoditi penunjang adalah ternak sapi. d. kawasan strategis ekonomi sektor unggulan minapolitan / pusat pengembangan dan pengolahan ikan laut berada di Kecamatan kumai dengan komoditi unggulan adalah udang; e. kota terpadu mandiri di Desa Tanjung Terantang Kecamatan Arut Selatan. <p>Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi sosial budaya, yaitu kawasan strategis sekitar bangunan kerajaan atau kesultanan di Pangkalan Bun dan di Kecamatan Kotawaringin Lama.</p> <p>Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam, yaitu di kawasan andalan laut yang berada di perairan laut sepanjang garis pantai.</p> <p>Kawasan strategis perlindungan keanekaragaman hayati, meliputi Taman Nasional Tanjung Puting, Taman Wisata Alam Tanjung Keluang, Taman Margasatwa Sungai Lamandau, Catchment Area DAS Arut dan Catchment Area DAS Kumai.</p>

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 – 2037



Gambar 2. 17
Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Kotawaringin Barat

2.10 STUDI TERDAHULU

2.10.1 Kajian Pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Kabupaten Kotawaringin Barat

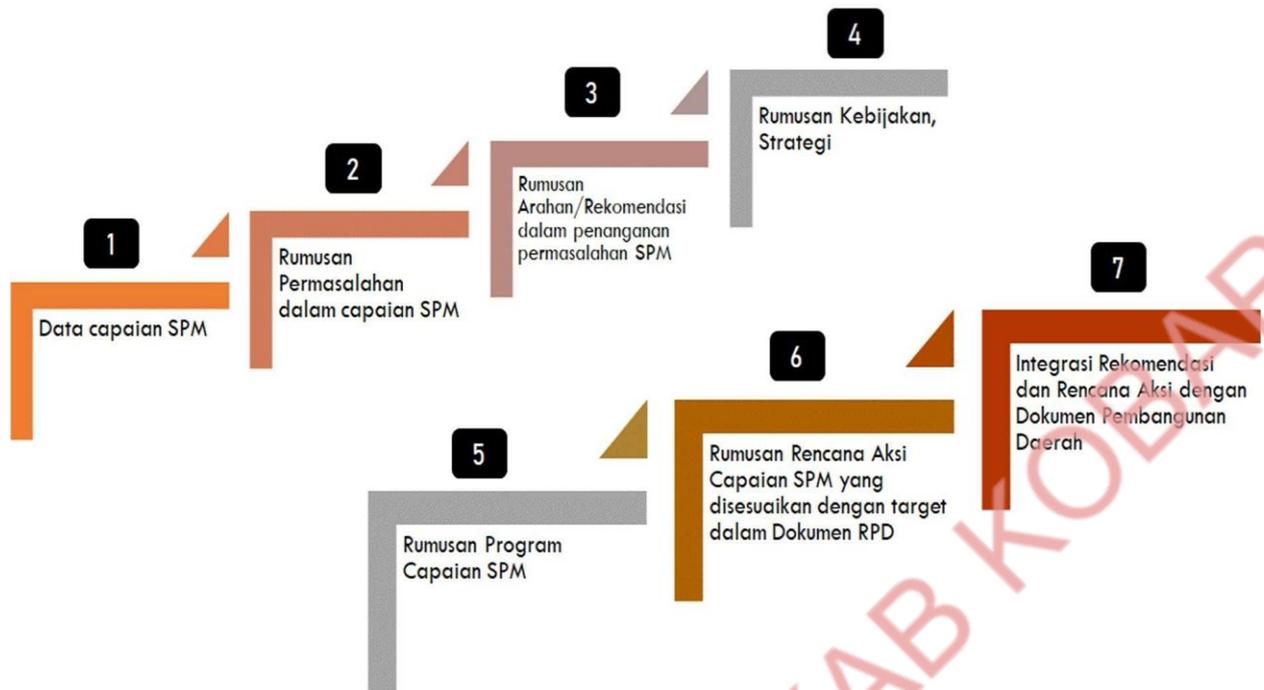
Beberapa permasalahan/kendala umum di dalam penerapan SPM di Kotawaringin Barat diantaranya:

1. Perlu pendataan secara lebih detail dikarenakan data pendukung beberapa masih bersifat global
2. Masih adanya data yang berpotensi overlapping dikarenakan penduduk lintas daerah
3. Masih terdapat masyarakat yang belum terlayani
4. Masih kurang kapasitas SDM dalam melaksanakan standar pelayanan
5. Nomenklatur program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada perencanaan dan penganggaran untuk pemenuhan SPM masih belum sesuai dengan nomenklatur yang tercantum di dalam Aplikasi Laporan SPM Bangda (<https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>) yang memang diperuntukkan secara langsung untuk pemenuhan indikator SPM.
6. Pendataan sesuai form tahapan penerapan SPM yang diatur dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 juga belum dapat menghasilkan data yang lengkap.

Arahan/rekomendasi untuk pencapaian SPM yang disesuaikan dengan kebijakan di Kabupaten Kotawaringin Barat, antara lain sebagai berikut :

1. Sosialisasi secara menyeluruh terkait dengan SPM, baik dari pendataan, pengisian form hingga penerapan
2. Peninjauan SPM pada variabel-variabel yang belum memiliki data yang akurat
3. Pelatihan terkait pengisian form, pemilahan data dan pelatihan terkait SPM secara menyeluruh
4. SPM menjadi salah satu indikator kinerja sehingga dapat menjadi prioritas
5. SPM diharapkan menjadi prioritas dalam penganggaran
6. Penyediaan anggaran untuk pendataan
7. Diperlukan peran aktif Tim SPM dalam mengkoordinasi pelaksanaan SPM dan monev
8. Sosialisasi di level pimpinan sehingga SPM menjadi prioritas di masing-masing dinas pengampu
9. Mengidentifikasi peluang-peluang kerjasama dengan pihak lain/swasta terkait penganggaran dan penanganan program SPM

Berikut *grand desain* pencapaian SPM Kabupaten Kotawaringin Barat serta konsep dan rekomendasi pencapaian SPM Kabupaten Kotawaringin Barat.



Gambar 2. 18
Grand Desain Pencapaian SPM Kabupaten Kotawaringin Barat



Gambar 2. 19
Konsep dan Rekomendasi Pencapaian SPM Kabupaten Kotawaringin Barat

2.10.2 Kajian Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kabupaten Kotawaringin Barat

A. Visi

Dalam Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki visi sebagai berikut:

Terwujudnya Kawasan Ekonomi Khusus Yang Unggul, Mandiri dan Menghadirkan Kawasan Industri Bernilai Tambah Tinggi Yang Terintegrasi Dengan Pelabuhan, Bandara dan Wisata.

B. Misi

Misi dalam mencapai visi yang telah ditetapkan dalam Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kabupaten Kotawaringin Barat, meliputi:

1. Mewujudkan kawasan ekonomi khusus yang inovatif, berbasis teknologi informasi, menjunjung kearifan lokal, dan ramah lingkungan;
2. Mewujudkan kawasan ekonomi khusus yang dinamis dan adaptif terhadap perubahan lingkungan, bisnis dan rencana pengembangan regional dan nasional;
3. Menyediakan kawasan industri yang dilengkapi dengan fasilitas penunjang yang lengkap berupa kawasan komersial dan perumahan untuk kepentingan dan kemudahan semua investor; dan
4. Menyediakan kawasan ekonomi khusus yang ditunjang dengan infrastruktur yang memadai dalam rangka pengembangan kawasan ekonomi khusus penggerak ekonomi.
5. Mewujudkan kawasan wisata yang berdaya saing, unggul dan berkelanjutan
6. Mewujudkan kawasan pelabuhan dan bandara yang handal, berkemampuan tinggi, mempunyai daya saing tinggi untuk menunjang pembangunan nasional dan daerah.

C. Kebijakan dan Strategi Pengembangan KEK

Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kabupaten Kotawaringin Barat diarahkan sesuai dengan kebijakan dan strategi pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 10
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
Kabupaten Kotawaringin Barat

Kebijakan	Strategi
Pembangunan Kawasan Industri sebagai penggerak ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan lahan kawasan industri • Menyediakan kavling siap bangun • Mengembangkan kawasan komersial dan perumahan sebagai penunjang
Penyediaan Infrastruktur penunjang untuk kawasan industri	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan infrastruktur jalan • Menyediakan infrastruktur air bersih • Menyediakan infrastruktur drainase • Menyediakan infrastruktur sanitasi • Menyediakan infrastruktur pengolahan limbah
Penyediaan energi penunjang kawasan industri	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan jaringan listrik • Menyediakan jaringan telekomunikasi • Menyediakan jaringan gas/bahan bakar • Mengupayakan produksi energi terbarukan
Pemanfaatan sumber daya alam	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pemanfaatan bahan baku lokal
Peningkatan angka pendapatan masyarakat dan tingkat pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan sekolah • Menyediakan akademi komunitas

Kebijakan	Strategi
	<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan politeknik Membuka lapangan kerja di kawasan industri
Peningkatan fasilitas transportasi laut dan udara	<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan Pelabuhan Menyediakan Bandara
Peningkatan fasilitas rekreasi	<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan destinasi wisata

Sumber: Dokumen Kajian Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023

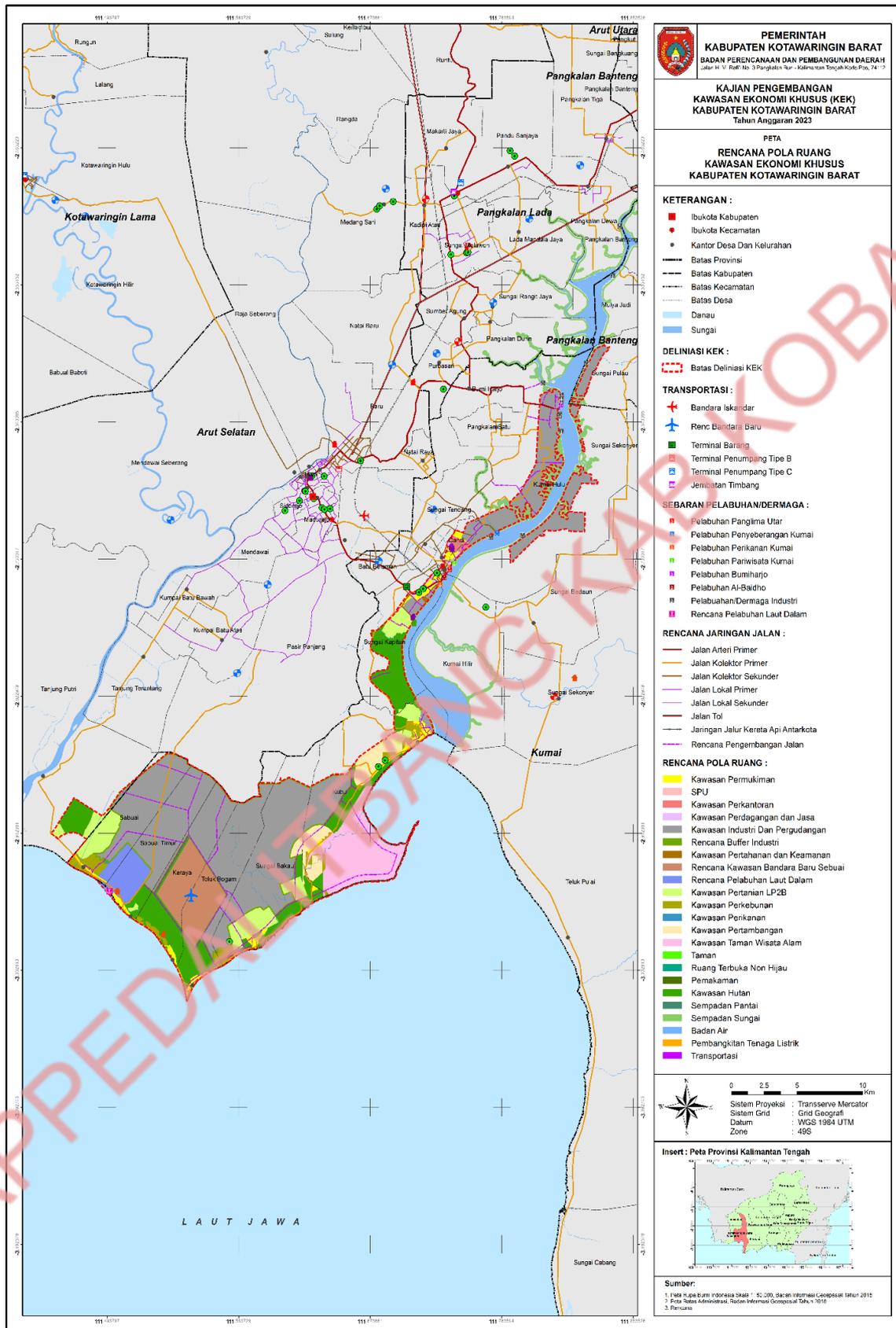
D. Rencana Pengembangan KEK

Rencana pola ruang KEK Kabupaten Kotawaringin Barat adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budi daya. Distribusi rencana pola ruang KEK Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 11
Rencana Pola Ruang KEK Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024-2043

No	Rencana Pola Ruang	Luas Kawasan Inti (Ha)	Luas Kawasan Penghubung (Ha)	Luas Kawasan Penunjang (Ha)
1	Kawasan Permukiman	216,13	195,37	453,21
2	Kawasan Perkantoran	114,69	0	0
3	SPU	7,12	0	0
4	Kawasan Perdagangan dan Jasa	166,90	0	0
5	Kawasan Industri Dan Pergudangan	3470,33	84,71	12055,44
6	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	14,49	0	0
7	Kawasan Pertanian LP2B	15,20	527,63	1533,08
8	Kawasan Perkebunan	0	158,30	590,88
9	Kawasan Hutan	0	1317,52	3262,77
10	Kawasan Pertambangan	0	428,50	695,70
11	Kawasan Taman Wisata Alam	0	0	2482,86
12	Taman	2,21	0	0
13	Ruang Terbuka Non Hijau	0,18	0	0
14	Pemakaman	1,32	0	0
15	Sempadan Sungai	9,26	0	0
16	Badan Air	3,37	0	1,85
17	Pembangkitan Tenaga Listrik	4,36	0	0
18	Transportasi	0,65	0	0
19	Badan Jalan	19,51	0	0
20	Kawasan Bandara Baru	0	0	2058,42
21	Kawasan Pelabuhan Laut Dalam	0	0	967,59
22	Kawasan Perikanan	0	0	6,19
23	Sempadan Pantai	0	49,34	237,54
	Total	4.045,69	2.761,36	24.345,53
	Total Kawasan KEK			31.152,58

Sumber: Dokumen Kajian Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023



Gambar 2. 20
Peta Rencana Pola Ruang KEK Kabupaten Kotawaringin Barat

E. Indikasi Program Pengembangan KEK

Berikut indikasi program pengembangan KEK Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tabel 2. 12
Indikasi Program

No	Indikasi Program	Lokasi	Tahapan			
			I (2024- 2028)	II (2029- 2033)	III (2034- 2038)	IV (2039- 2043)
1	Pembangunan Kawasan Industri sebagai penggerak ekonomi					
	a. Menyediakan lahan kawasan industri	Zona Inti dan Zona Penunjang				
	b. Menyediakan kavling siap bangun	Zona Inti dan Zona Penunjang				
	c. Mengembangkan kawasan komersial sebagai penunjang kawasan	Zona Inti, Zona Penghubung dan Zona Penunjang				
	d. Mengembangkan perumahan sebagai penunjang kawasan	Zona Inti, Zona Penghubung dan Zona Penunjang				
2	Penyediaan Infrastruktur penunjang untuk kawasan industri					
	a. Menyediakan infrastruktur jalan	Zona Inti, Zona Penghubung dan Zona Penunjang				
	b. Menyediakan infrastruktur air bersih	Zona Inti, Zona Penghubung dan Zona Penunjang				
	c. Menyediakan infrastruktur drainase	Zona Inti, Zona Penghubung dan Zona Penunjang				
	d. Menyediakan infrastruktur sanitasi	Zona Inti, Zona Penghubung dan Zona Penunjang				
	e. Menyediakan infrastruktur pengolahan limbah	Zona Inti, Zona Penghubung dan Zona Penunjang				
3	Penyediaan energi penunjang kawasan industri					
	a. Menyediakan jaringan listrik	Zona Inti, Zona Penghubung dan Zona Penunjang				
	b. Menyediakan jaringan telekomunikasi	Zona Inti, Zona Penghubung dan Zona Penunjang				
	c. Menyediakan jaringan gas/bahan bakar	Zona Inti dan Zona Penunjang				
	d. Mengupayakan produksi energi terbarukan	Zona Inti dan Zona Penunjang				
4	Peningkatan angka pendapatan masyarakat dan tingkat pendidikan					

No	Indikasi Program	Lokasi	Tahapan			
			I (2024- 2028)	II (2029- 2033)	III (2034- 2038)	IV (2039- 2043)
	a. Menyediakan sekolah	Zona Inti dan Zona Penunjang				
	b. Menyediakan politeknik	Zona Inti dan Zona Penunjang				
	c. Membuka lapangan kerja di kawasan industri	Zona Inti, Zona Penghubung, dan Zona Penunjang				
5	Peningkatan fasilitas transportasi laut dan udara					
	a. Menyediakan Bandara	Zona Penunjang				
	b. Menyediakan dan Mengembangkan Pelabuhan	Zona Inti dan Zona Penunjang				
6	Peningkatan fasilitas rekreasi					
	a. Menyediakan destinasi wisata	Zona Penunjang				

Sumber: Dokumen Kajian Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023

2.10.3 Kajian Penghitungan Nilai Tambah Ekonomi Kreatif Kabupaten Kotawaringin Barat

Permasalahan utama yang dialami para pelaku ekonomi kreatif sebagian besar adalah pada ketersediaannya bahan baku di Kabupaten Kotawaringin Barat yang masih sangat terbatas sehingga membuat para pelaku ekonomi kreatif membutuhkan modal lebih untuk membeli bahan baku dari supplier dari luar. Harga bahan baku yang tidak stabil, dan tidak semua tersedia di pasar lokal, harus mencari di pusat bahkan sampai ke Jawa, dan ongkos kirim dari Jawa masih tergolong tinggi.

Berikut Rencana aksi pengembangan **ekonomi kreatif berbasis *demand driven***.

1. Kegiatan peningkatan kapasitas SDM ekonomi kreatif dilaksanakan secara rutin, dilaksanakan setiap tahun untuk tiap sub sektor potensial terkait masalah prioritas anggaran;
2. Segera dilakukan penetapan sub sektor unggulan kabupaten sehingga kebijakan teknis anggaran bisa fokus pada sub sektor tertentu;
3. Menyusun peta jalan ekonomi kreatif di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai dasar prioritas pelaksanaan teknis kegiatan peningkatan SDM;
4. Meningkatkan kolaborasi penyelenggaraan *event* terkait ekonomi kreatif sehingga mampu memfasilitasi seluruh sub sektor ekonomi;
5. Membangun komunitas besar dari sub sektor – sub sektor ekonomi kreatif yang mampu mendukung ekosistem ekonomi kreatif di Kabupaten Kotawaringin Barat secara berkelanjutan;
6. Meningkatkan penyelenggaraan eksepsi produk/karya level regional dan nasional secara lebih intensif dan terencana;

7. Menyusun SOP pendampingan produk/karya, pendampingan HKI dan produk dengan indikasi geografis; dan
8. Pemerintah daerah belum menyediakan prasarana untuk pelaku ekonomi kreatif.

2.10.4 Kajian Potensi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

Berdasarkan hasil identifikasi pada dokumen kajian Potensi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, terdapat 9 (sembilan) bidang usaha yang potensial sebagai bidang usaha BUMD baru di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut :

1. Pengolahan Sawit Dan Produk Turunan (Industri Pengolahan)
2. Pengolahan Karet
3. *Property Dan Real Estate*
4. Logistik Terutama Di Sektor Transportasi dan Pergudangan
5. Fasilitas Rekreasi/Pariwisata
6. Perdagangan (Pasar)
7. Pengelolaan Persampahan
8. Pertambangan

Melalui proses analisa, disepakati bahwa BUMD **Industri Pengolahan Sawit dan Produk Turunan** sebagai BUMD Baru di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Program dan unit usaha BUMD Industri Pengolahan Sawit dan Produk Turunan dapat difokuskan pada kegiatan berikut :

1. Fasilitasi penyelesaian tata batas perkebunan rakyat dan perkebunan besar.
2. Fasilitasi teknis pemenuhan program sertifikasi kegiatan perkebunan berkelanjutan.
3. Pengintegrasian data spasial perkebunan (inti, plasma, kebun masyarakat) berdasarkan masa tanam.
4. Transfer pengetahuan dan teknologi terkait :
 - Pengelolaan kebun mulai dari *planting*, pemeliharaan (penanganan penyakit dan *vector* hama), penanganan panen)
 - Fasilitasi pemanfaatan material limbah perkebunan (batang pohon pasca *replanting*) menjadi produk bernilai ekonomi tinggi (gula merah, *flooring - mix decoratif*)
 - Pembinaan pelaku usaha UMKM yang memiliki mutualisme dalam kegiatan perkebunan (pembiasaan sapi untuk pengendalian gulma/rumput di sekitar pohon dan area pembatas)
 - Pembinaan pelaku usaha UMKM untuk pemanfaatan limbah industri pengolahan (pupuk organik)

5. Revitalisasi lahan perkebunan yang mengalami penurunan hasil panen (memasuki masa replanting, faktor stres tanaman)
6. Konservasi sumberdaya alam hayati di area perkebunan :
 - Pengamanan satwa liar dilindungi yang memasuki area perkebunan
 - Pengamanan jenis vegetasi langka pada area rencana planting (proses pematangan lahan)
 - Pembangunan kolam retensi (penampungan air) untuk fungsi pendukung perkebunan (pembatas/ pengaman)
7. Pembangunan unit industri pengolahan fatty alcohol/fatty acyd
8. Pembangunan unit industri pengolahan pakan ternak dari bahan pelepah, solid dan bungkil sawit
9. Peningkatan kapasitas industri pemurnian CPO dan PKO
10. Pengelolaan produk samping industri pengolahan (cangkang, serat dan tandan kosong) menjadi serat selulosa

2.10.5 Kajian Review Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Kotawaringin Barat

RIPPARDA Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki visi pembangunan pariwisata yaitu:

Terwujudnya Kotawaringin Barat Sebagai Pintu Gerbang Pariwisata Kalimantan Tengah Yang Berwawasan Lingkungan.

Rencana Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat terbagi atas:

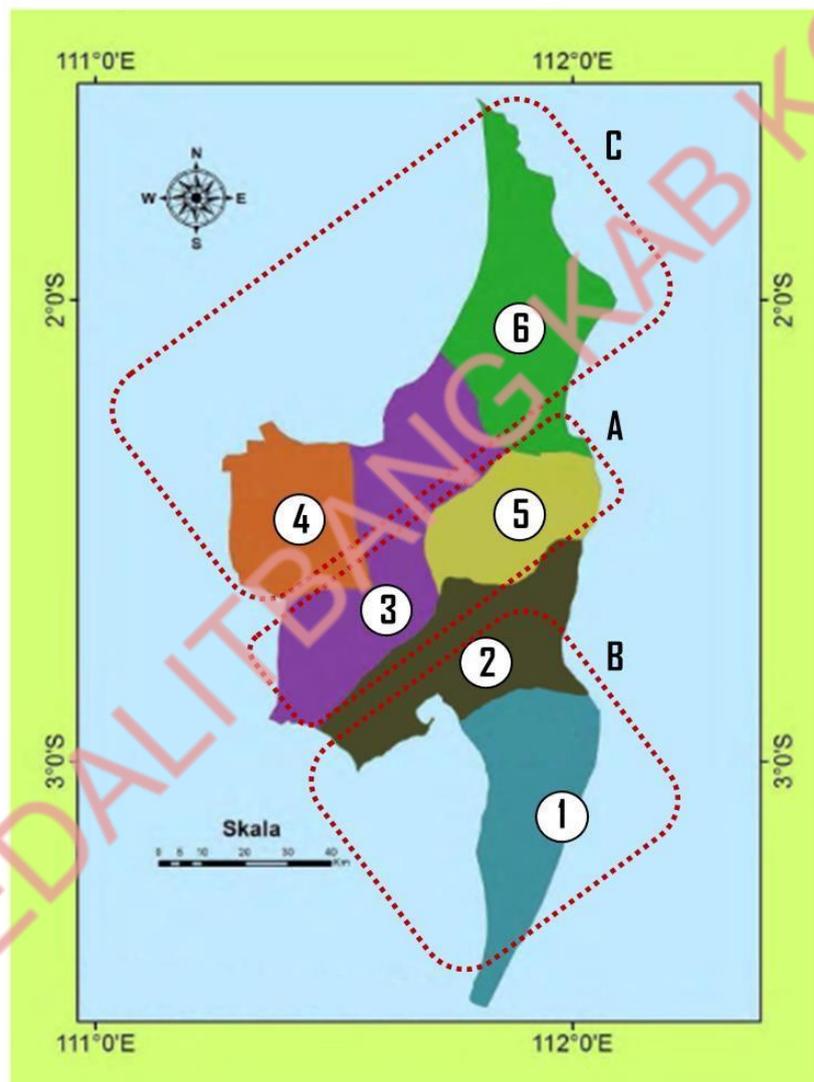
A. KSPK 3 PERWILAYAHAN

1. KSPK Pangkalan Bun dan sekitarnya yang menjadi pintu gerbang udara dan jalur akses penghubung daerah sekitarnya, memiliki daya tarik wisata yaitu : DTW Alam (susur sungai Arut), SM Lamandau (terbatas); DTW Budaya (kawasan Istana Kuning, Rumah Mangkubumi, kawasan Pecinan Seberang); DTW Buatan (Agrowisata yaitu, Integrasi Sawit Sapi, Peternakan Sapi dan Pengolahan Biogas), Pangkalan Bun Park, Palagan Sambu, Bundaran Pancasila, Pusat Kuliner dan Souvenir.
2. KSPK Kumai dan Bugamraya menjadi pintu gerbang laut dan memiliki DTW Alam yaitu kawasan Taman Nasional Tanjung Puting dan sekitarnya serta kawasan pesisir pantai yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa.
3. KSPK Pangkut dan Kotawaringin Lama memiliki DTW Alam berupa keindahan kondisi alam perbukitan, riam dan sungai; DTW Budaya: Peninggalan Sejarah, Budaya dan Religi

B. KPPK 6 PERWILAYAHAN

1. PPK Taman Nasional Tanjung Puting yang memiliki tema pengembangan wisata ekowisata, adventure dan minat khusus.

2. KPPK Tanjung Keluang, Gosong Senggora, Pantai Kubu, Teluk Bogam, Keraya dan Sebuai memiliki tema pengembangan wisata pantai.
3. KPPK kawasan perkotaan Pangkalan Bun memiliki tema pengembangan wisata sejarah dan budaya.
4. KPPK kawasan Kotawaringin Lama memiliki tema pengembangan wisata sejarah dan Religi
5. KPPK Pangkalan Banteng dan Pangkalan Lada memiliki tema pengembangan Agrowisata
6. KPPK Hulu Sungai Arut memiliki tema pengembangan wisata budaya sebagai pusatnya pangkut



Gambar 2. 21
Peta Rencana Perwilayahan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat

1 HUB P. BUN

MICE & CITY TOURISM

- Royal Heritage Palace (Istana Kuning-Rumah Mangkubumi)
- Traditional Riverfront Housing S.Arut
- City Of Cultural Event
- Venue Cultural Event (Rumah Betang, Kaw. Bundaran Pancasila, P.Bun Park)
- Sentra Kuliner, Sentra Oleh-Oleh
- Pusat Akomodasi Wisata
- Wisata Pendukung di Arsel : Kumpai Batu Atas, dsb

2 HUB KOLAM

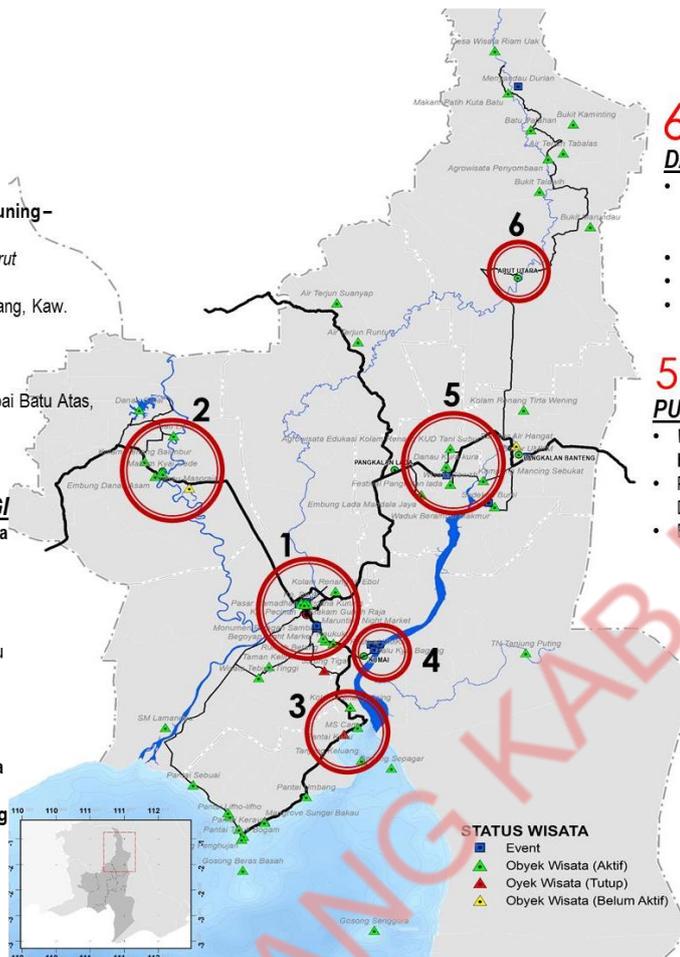
WISATA HERITAGE & RELIGI

- Wisata Sejarah & Heritage Astana Alnursari
- Wisata Religi Masjid & Makam Kyai Gede
- Even Budaya & ekraf
- Wisata Alam (Susur Sungai, Danau Masorayan, Gatal dan Limau)

3 HUB KUBU

WISATA PANTAI

- Pantai Kubu Sebagai Hub Wisata Pantai Bugamraya
- Pengemb. Kaw. Tanjung Keluang
- Even Budaya & Ekraf
- Wisata Gosong Senggora dsk
- Pengembangan Kaw. Pantai Teluk Bogam Dsk



6 HUB PANGKUT

DAYAK RIVERFRONT VILLAGE

- Pengemb Desa Wisata Berbasis Budaya (Permukiman Tepi Sungai Dayak)
- Pertunjukan Seni Kebudayaan
- Event Budaya dan Ekraf
- Wisata Alam Susur Sungai, Hutan & Pegunungan

5 HUB P. LADA

PUSAT WISATA AGRO

- Wisata *Buatan* skala menengah dan besar
- Pengembangan Desa Wisata (Sawah, Danau, Agrowisata, Susur Sungai Kumai)
- Event dan Pertunjukan

4 HUB KUMAI

TRANSIT CITY KUMAI

- Penataan Commercial Strips Kumai (Pedestrian dan aktifitas pendukung wisata)
- Aktivasi Pasar Tj. Putting
- Upscaling Desa Wisata Sekonyer
- Sentra Kuliner Malam Kumai

Gambar 2. 22

Konsep Sistem Perwilayahan Kerangka Pariwisata

Tabel 2. 13

Program dan Rencana Aksi Pariwisata Skala Kabupaten

No	Pilar Pariwisata	Program	Rencana Aksi	Pentahapan Pelaksanaan					
				2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036
V PROGRAM SKALA KABUPATEN									
A	KELEMBAGAAN	A.1. BADAN PROMOSI PARIWISATA KAB KOBAR	a. Pembentukan Badan Promosi Pariwisata dan Ekraf Kobar			■			
			b. Pembentukan Unit Kerja berdasarkan Kluster			■			
			c. Membangun Kerjasama Captive Market Jejaring Kotawaringin			■	■	■	■
		A.2. FORUM BISNIS PARIWISATA	a. Unit Kerja Menyiapkan Business Plan dan Investment Plan Pariwisata Kobar			■	■		

No	Pilar Pariwisata	Program	Rencana Aksi	Pentahapan Pelaksanaan					
				2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036
			b. Pitching Investor dan Kerjasama Investasi Pembangunan Destinasi			■	■	■	■
			c. Chanleing APDB Prov, APBN, CSR, dan Swasta untuk pengembangan pariwisata			■	■	■	■
		A.3. PELIBATAN KOMUNITAS & PERGURUAN TINGGI	a. Pelibatan Genpi dalam promosi pariwisata Kobar	■	■	■	■	■	■
			b. MoU dengan Perguruan Tinggi untuk pelatihan dan pendampingan Hospitaliti	■	■	■	■	■	■
			c. Pengembangan Sekolah Kejuruan, BLK, dan Perguruan Tinggi Pariwisata				■	■	■
B	EVENT	B.1. UPGRADING EVEN	a. Pengembangan even pariwisata yang sudah ada dengan skala yang lebih luas		■	■	■	■	■
			b. Pemngembangan even baru yang dapat mengungkit wisatawan		■	■	■	■	■
			c. Packaging even menjadi lebih salable kepada sponsor		■	■	■	■	■
C	SARANA PRASARANA KOTA	C.1. UPGRADING WAJAH KOTA SEBAGAI KOTA MICE	a. Penyiapan sarana dan prasarana kota menjadi lebih siap dengan event (Pangkalan Bun Park, Monumen Pancasila, Palagan Sambu, dsb)		■	■	■	■	■
			b. Pembangunan Landmark Kota			■	■	■	■

No	Pilar Pariwisata	Program	Rencana Aksi	Pentahapan Pelaksanaan					
				2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036
		C.2. PENINGKATAN PELAYANAN INDUSTRI PENDUKUNG WISATA	a. standarisasi pelayanan fasilitas pendukung wisata	■	■	■	■	■	■

Sumber: Dokumen Kajian Review Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023

2.10.6 Kajian Energi Berkelanjutan di Kabupaten Kotawaringin Barat

Berikut potensi dan masalah dalam pengembangan energi di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tabel 2. 14
Potensi dan Masalah Pengembangan Energi di Kabupaten Kotawaringin Barat

Aspek	Potensi dan Masalah
ENERGI MATAHARI berupa Sistem PLTS	<ul style="list-style-type: none"> Potensi pengembangan PLTS : rumah tangga, bangunan industri, bangunan usaha, bangunan fasilitas umum, perkantoran Potensi lokasi : seluruh kecamatan dan khusus untuk permukiman pada Desa di Kawasan Taman Nasional
ENERGI AIR berupa Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Air/Mikrohidro (PLTMH)	<ul style="list-style-type: none"> Tenaga air menghasilkan sekitar 70% dari sumber terbarukan global untuk pembangkit listrik. Potensi pada lokasi Bendungan, sungai Tidak prioritas untuk dikembangkan dikarenakan minim potensi air pada wilayah dan harus bekerjasama dengan pihak swasta dalam pengembangan
ENERGI ANGIN berupa Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)	<ul style="list-style-type: none"> Ketersediaan data potensi angin dengan kecepatan rata-rata tahunan minimum 4 m/dt pada ketinggian 50 m secara kontinu pada periode 1 tahun Bukan berada pada lokasi lindung dan sesuai dengan peraturan Pemerintah bersedia menyediakan lahan yang dibutuhkan Tidak diprioritaskan pengembangannya di Kabupaten Kotawaringin Barat
ENERGI SAMPAH berupa Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTsa)	<ul style="list-style-type: none"> Potensi pengembangan PLTsa : pada area permukiman sekitar TPA di Kec. Arut Selatan Potensi bekerjasama dengan pihak swasta dan PLN dalam pengembangan jaringan
BIOMASSA berupa Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBM)	<ul style="list-style-type: none"> Biomassa dengan pengolahan sampah menjadi PLTsa Potensi Limbah : limbah ternak dan kelapa sawit

Sumber: Dokumen Kajian Energi Berkelanjutan di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023

KONDISI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ENERGI BERKELANJUTAN DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

❑ Dalam Aspek Kebijakan

- Berdasarkan RTRW terdapat rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bio Massa (PLTBM) di Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Berdasarkan RTRW terdapat rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kabupaten Kotawaringin Barat

3. Berdasarkan RUPTL, di Kotawaringin Barat diarahkan pengembangan PLTS

❑ **Dalam Aspek Empiris**

1. Pengembangan PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) di Kecamatan Arut Sel
2. Pengembangan PLTS dan PLTBm pada desa yang belum mendapatkan pelayanan energi
3. Pengembangan PLTS pada sektor industri, usaha, fasilitas umum dan bangunan pemerintahan

FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT IMPLEMENTASI ENERGI BERKELANJUTAN DI KOTAWARINGIN BARAT

❑ **Pendukung Implementasi Energi Berkelanjutan**

1. Kebijakan yang mendukung EBT
2. Perizinan yang dipermudah
3. Tersedianya Sumber Energi Berkelanjutan berupa Matahari, Hasil Pertanian dan Peternakan, Air Baku dan Sungai, Sampah dan Limbah

❑ **Penghambat Implementasi Energi Berkelanjutan**

1. Kebijakan belum mendukung pencapaian kelayakan pekeekonomian untuk investasi EBT
2. Data potensi EBT belum tersedia dengan baik
3. Kendala dalam keberlanjutan dan kualitas pasokan EBT
4. Penguasaan teknologi masih terbatas
5. Minimnya ketersediaan instrument pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan investasi
6. Proses perizinan yang rumit dan memakan waktu yang lama
7. Insentif untuk pelaksanaan efisiensi energi dan konservasi energi masih terbatas
8. Harga peralatan yang efisien/hemat energi masih mahal

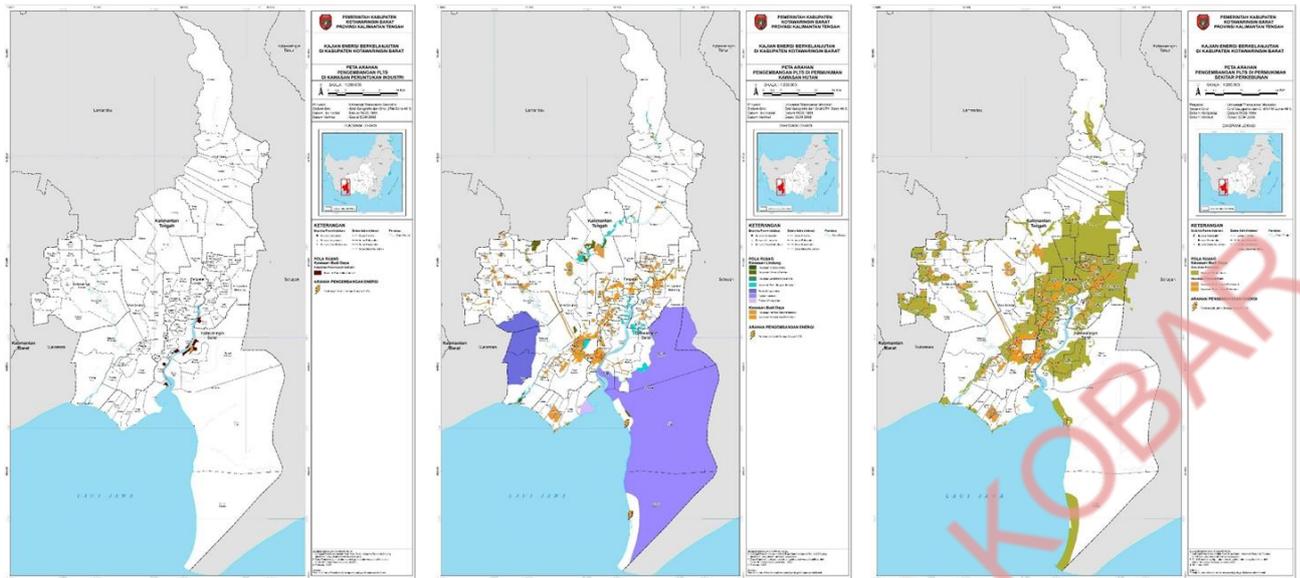
RENCANA PENGEMBANGAN ENERGI BERKELANJUTAN DI KABUPATEN KOTAWARINGIN

- Pengembangan jaringan listrik sesuai dengan roadmap PT. PLN yaitu Desa Kerabu, Desa Penyombaan, Desa Pandau, Desa Riam, Desa Penahan, Desa Nanga Mua, Desa Umpang, Desa Rangda, Desa Teluk Pulau, Desa Sungai Cabang
- Pengembangan Pembangkit Listrik tenaga Biomassa (PLTBm) yaitu pada desa-desa yang berlokasi dekat dengan Kegiatan Usaha dan Perkebunan Kelapa Sawit serta kawasan permukiman yang memiliki olahan limbah ternak. Kecamatan dan Desa yang dapat dikembangkan PLTBm yaitu :
 1. Kecamatan Arut Selatan : Desa Tanjung Putri, Mendawai Seberang
 2. Kecamatan Kotawaringin Lama : Desa Babuai Baboti, Dawak, Ipuh Bangun Jaya, Kinjil, Kondang, Lalang, Patih Baru, Riam Durian, Rungun, Suka Mulya, Sakabulin, Sukajaya, Suka Makmur, Sumber Mukti, Tempayung, Kotawaringin Hilir, Kotawaringin Hulu

3. Kecamatan Arut Utara : Desa Gandis, Kerabu, Nanga Mua, Panahan, Pandau, Penyombaan, Riam, Sukarami, Sungai Dau, Pangkut
 4. Kecamatan Kumai : Sungai Cabang, Sungai Sekonyer, Teluk Pulau
- Pengembangan Pembangkit Listrik tenaga Sampah (PLTSa) yaitu pada desa-desa yang dekat dengan lokasi TPA yaitu pada Kecamatan Arut Selatan.
 - Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) pada desa-desa yang sudah terlayani PLN maupun desa yang terpencil (pada kawasan sekitar hutan). PLTS juga dapat dikembangkan pada bangunan usaha, bangunan permukiman, bangunan industri, bangunan fasilitas umum dan bangunan perkantoran.

Kecamatan dan Desa yang dapat dikembangkan PLTS Atap yaitu :

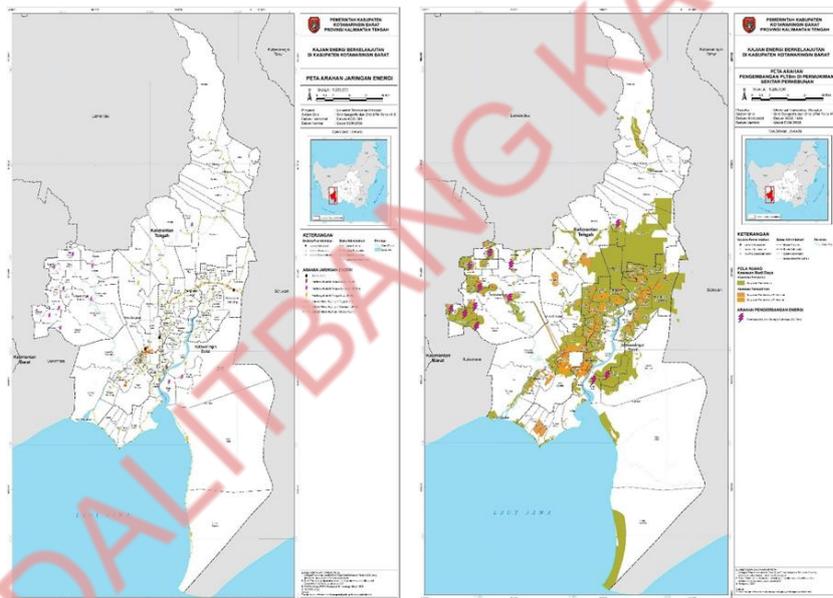
1. Kecamatan Arut Selatan : Desa Kenambui, Kumpai Batu Atas, Medang Sari, Natai Baru, Randa, Runtu, Sulung, Tanjung Putri, Umpang, Baru, Mendawai Seberang, Raja Seberang
 2. Kecamatan Arut Utara : Desa Gandis, Kerabu, Nanga Mua, Panahan, Pandau, Penyombaan, Riam, Sambi, Sukarami, Sungai Dau, Pangkut
 3. Kecamatan Kotawaringin Lama : Desa Babuai Baboti, Dawak, Ipuh Bangun Jaya, Kinjil, Kondang, Lalang, Patih Baru, Riam Durian, Rungun, Suka Mulya, Sakabulin, Sukajaya, Suka Makmur, Sumber Mukti, Tempayung, Kotawaringin Hilir, Kotawaringin Hulu
 4. Kecamatan Kumai : Desa Sungai Cabang, Sungai Sekonyer, Teluk Pulau, Kumai Hilir, Kumai Hulu
 5. Kecamatan Pangkalan Banteng : Desa Arga Mulya, Karang Sari, Kebon Agung, Marga Mulya, Natai Kerbau, Pangkalan Banteng, Sungai Bengkuang, Sungai Pakit
 6. Kecamatan Pangkalan Lada : Desa Pangkalan Durin, Sungai Rangit Jaya
- Kawasan dapat dikembangkan PLTS *Centralized* (Terpusat) yaitu :
 1. Kawasan peruntukan Industri di Desa Kumai Hulu dan dapat terkoneksi dengan jaringan transmisi PT. PLN sehingga dapat melayani desa-desa di sekitarnya
 2. Kawasan permukiman di Desa Teluk Pulai dan Desa Teluk Cabang
 3. Kawasan permukiman di Desa Karaya dan Desa Randa



Pengembangan PLTS Di Kawasan Industri

Pengembangan PLTS Di Kawasan Permukiman Sekitar Hutan

Pengembangan PLTS Terpusat Di Kawasan Permukiman



Pengembangan Jaringan Energi

Pengembangan PLTBm

Gambar 2. 23

Rencana Pengembangan Jaringan Energi Berkelanjutan Di Kabupaten Kotawaringin Barat

2.10.7 Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (Jakstrada SPAM) Kabupaten Kotawaringin Barat

Capaian air minum layak sesuai data RPJMN Tahun 2020-2024 untuk akses air minum layak tahun 2024 mencapai 100%, akses perpipaan mencapai 30% dan akses air minum aman 15%. Sedangkan menurut target SDGs akses air minum layak tahun 2030 mencapai 100%, akses air minum aman 45% dan akses perpipaan 50%. Kabupaten Kotawaringin Barat saat ini telah mencapai akses air minum layak

sebesar 94,05%, dimana terbagi menjadi akses perpipaan sebesar 47,0% dan non perpipaan layak sebesar 47,05%. Dibutuhkan 5,95% untuk mencapai akses air minum layak 100%. Untuk itu perlu peningkatan capaian akses air minum layak 5 (lima) tahun kedepan dengan membuat program atau rencana tindak pelayanan SPAM di Kabupaten Kotawaringin Barat sehingga kebutuhan akan air bersih dapat terpenuhi dan merata di berbagai wilayah yang belum terdapat akses air bersih yang layak.

Melihat hasil perhitungan capaian akses layak air minum dari tahun 2025-2029 mencapai target 98,10%. Diharapkan pemerintah daerah dapat memaksimalkan pelayanan SPAM bagi masyarakat yang belum mendapatkan akses air minum layak, meningkatkan pembangunan infrastruktur Air Minum agar unit-unit SPAM dapat berfungsi untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan akses air minum, memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pengembangan SPAM, dan mengelola sumber pembiayaan SPAM, serta kerjasama antar sektor baik sektor swasta maupun pemerintah dan badan usaha.

Kebijakan dan strategi Penyelenggaraan SPAM di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut:

1. Peningkatan akses air minum layak dan aman bagi seluruh masyarakat di perkotaan melalui jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan, dilakukan dengan strategi:
 - a. Pengembangan pelayanan SPAM di wilayah perkotaan disertai dengan pengaturan wilayah pelayanan antara PDAM dan Pamdes / Pamsimas.
 - b. Pengembangan SPAM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
2. Pemenuhan Kebutuhan Air Baku untuk Air Minum dengan upaya perlindungan dan pelestarian sumber air baku yang dapat menjamin kelestarian secara berkelanjutan, dilakukan dengan strategi:
 - a. Meningkatkan konservasi wilayah daerah aliran sungai dan perlindungan sumber air baku.
 - b. Meningkatkan upaya penyediaan air baku untuk air minum secara berkelanjutan dan dapat diandalkan
 - c. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya air melalui pendekatan berbasis wilayah sungai
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan serta peningkatan profesionalisme PDAM melalui peningkatan kapabilitas/keterampilan pegawai, termasuk menyusun SOP yang diperlukan, dilakukan dengan strategi:
 - a. Memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Pengembangan SPAM.
 - b. Memperkuat peran dan fungsi dinas / instansi / SKPD dalam Pengembangan SPAM.
 - c. Mengembangkan manajemen asset SPAM dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan

4. Pengembangan pendanaan untuk penyelenggaraan SPAM dari berbagai sumber secara optimal sehingga mampu mengejar sasaran peningkatan 100% akses layak dan 15% akses aman, dilakukan dengan strategi:
 - a. Meningkatkan kemampuan financial internal Penyelenggara SPAM.
 - b. Meningkatkan komitmen Pemerintah dalam pendanaan Pengembangan SPAM,
5. Pengembangan dan penerapan peraturan perundangan tentang SPAM sesuai kebutuhan daerah, dilakukan dengan strategi:
 - a. Melengkapi dan menerapkan produk peraturan perundangan dalam penyelenggaraan Pengembangan SPAM

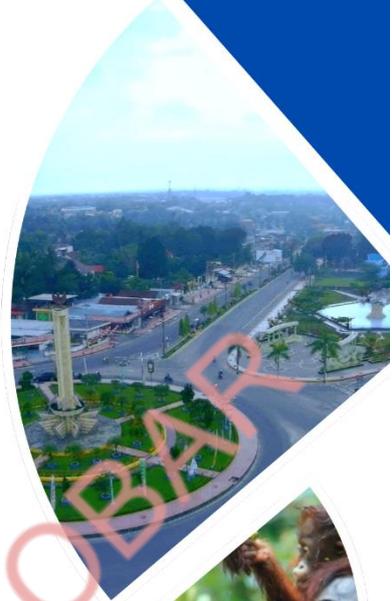
2.10.8 Rencana Induk Pembangunan Transportasi Umum Kabupaten Kotawaringin Barat

Rencana Transportasi Umum Kabupaten Kotawaringin barat diarahkan sebagai berikut:

1. Pengembangan transportasi umum di Kabupaten Kotawaringin Barat tidak hanya didasarkan pada nilai load factor saja, tetapi juga frekuensi, headway, dan perkiraan pertumbuhan penumpang.
2. pengembangan fasilitas transportasi umum yang sesuai dengan standar pelayanan minimum
3. penyediaan transportasi umum yang terintegrasi
4. Menghubungkan Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Negara Lain di Pulau Kalimantan
5. Perlu adanya integrasi antarmoda angkutan umum untuk memfasilitasi wisatawan yang ingin mengunjungi tempat-tempat wisata di Kabupaten Kotawaringin Barat.
6. Sesuai dengan perencanaan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan perencanaan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

BAB 03

Gambaran Umum



3.1 KONDISI WILAYAH

3.1.1 Kondisi Administrasi Dan Geografis

Kabupaten Kabupaten Kotawaringin Barat adalah salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Tengah. Ibu kota kabupaten ini terletak di Pangkalan Bun. Kabupaten Kotawaringin Barat diresmikan pada tanggal 3 Oktober 1959. Kabupaten yang terletak di antara tiga wilayah, yaitu Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, dan Kabupaten Seruyan.

Kabupaten ini memiliki luas wilayah 10.759 km² atau 7,01% dari total luas Provinsi Kalimantan Tengah. Terdiri dari 6 kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat, kecamatan yang terluas yakni terdapat pada Kecamatan Kumai dengan total 1.915,05 km², dan kecamatan dengan luas wilayah terkecil yakni pada Kecamatan Pangkalan Lada seluas 284,73 km².

Secara geografis, Kabupaten ini berada di 111^o 20' - 112^o 6' Bujur Timur dan 1^o 26' - 3^o 33' Lintang Selatan. Batas Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

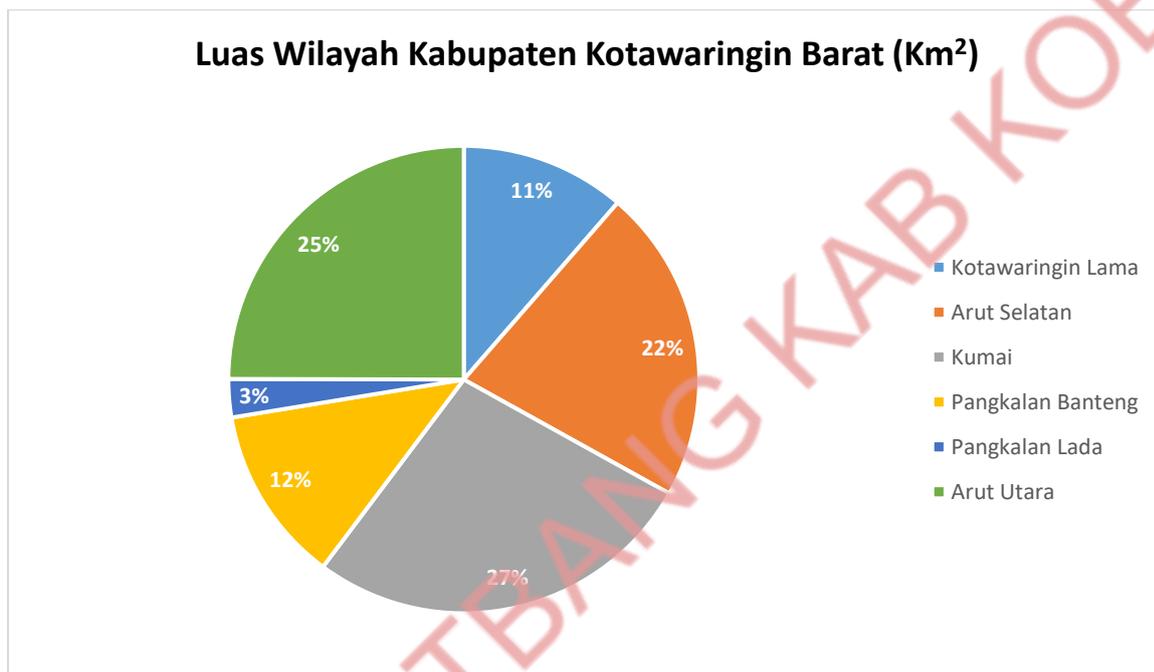
- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lamandau,
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sukamara dan Lamandau,
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Seruyan, dan
- Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa.

Secara administratif Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari 6 Kecamatan, yang melingkupi 13 Kelurahan dan 81 Desa. Lebih jelasnya wilayah administrasi Kabupaten Kotawaringin Barat disajikan pada tabel dan peta berikut ini.

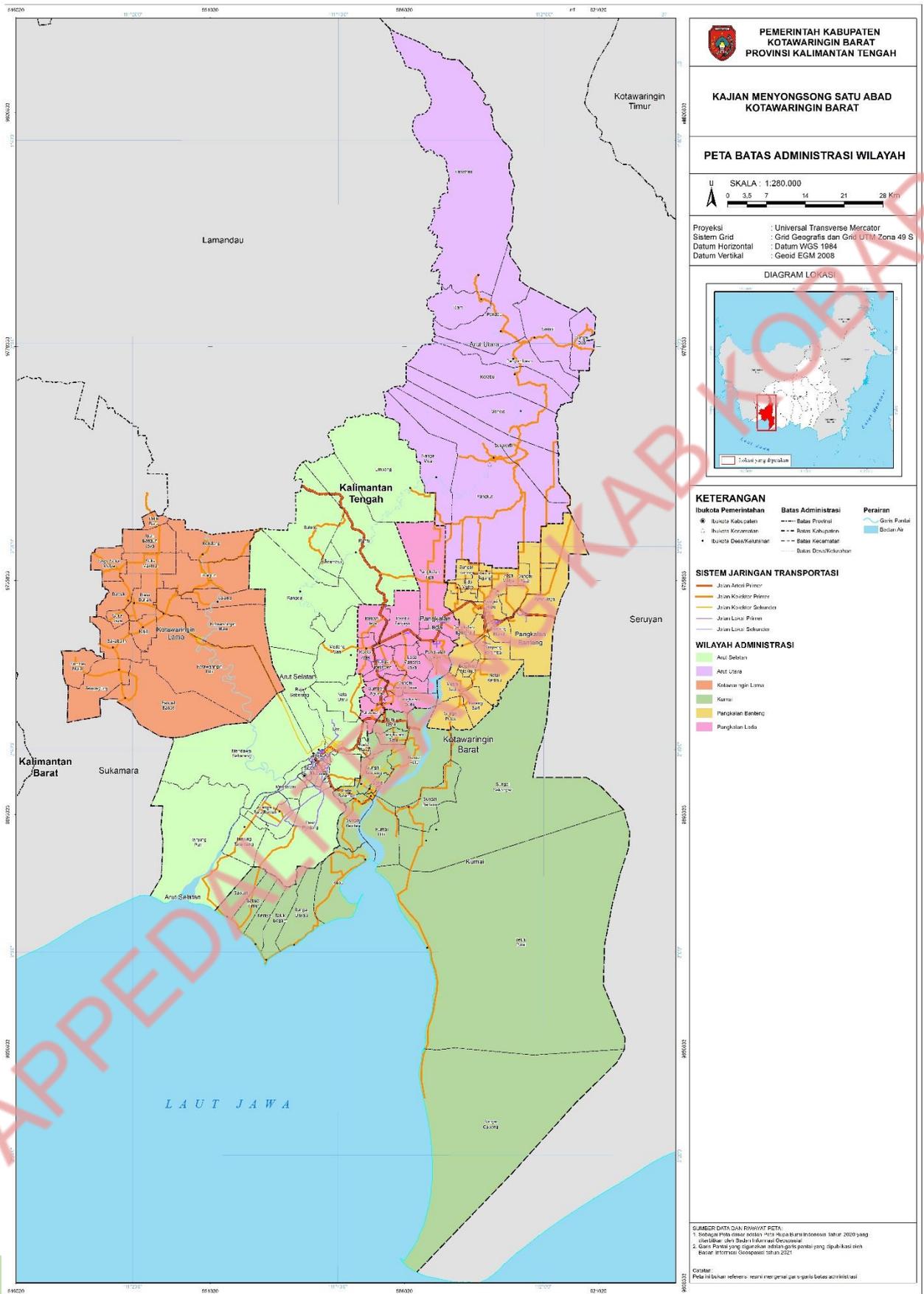
Tabel 3. 1 Luas Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Persentase (%)
1	Kotawaringin Lama	1.219,83	11,32
2	Arut Selatan	2.342,66	21,77
3	Kumai	2.915,05	27,09
4	Pangkalan Banteng	1.311,73	12,19
5	Pangkalan Lada	284,73	2,65
6	Arut Utara	2.685,00	24,96
Kotawaringin Barat		10.759,00	100,00

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2023



Gambar 3. 1 Luas Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat (Km²)



Gambar 3. 2 Peta Administrasi Kabupaten Kotawaringin Barat

3.1.2 Kondisi Fisik Dasar

A. Topografi

Kabupaten Kotawaringin Barat digolongkan menjadi 4 bagian dengan ketinggian antara 0-500 meter dari permukaan laut dan kemiringan antara 0-40%, yaitu dataran, daerah datar berombak, daerah berombak berbukit dan daerah berbukit-bukit. Wilayah daratan dengan ketinggian 0 – 7 meter dari permukaan laut mempunyai area yang cukup luas dan lokasinya menyebar, meliputi seluas 215.644,74 Ha atau 21,86% dari luas wilayah. Wilayah ini mempunyai sifat datar dan dipengaruhi oleh pasang surut. Daerah dengan ketinggian 100 – 500 meter dari permukaan laut juga cukup luas yaitu 142.631,43 Ha atau 14,46% dan lokasinya menyebar. Wilayah dengan ketinggian di atas 500 meter dari permukaan laut dengan luas mencapai 145.327,20 Ha atau 14,37% dari luas wilayah. Pada daerah ini Sebagian besar merupakan daerah perbukitan hingga pegunungan dengan kemiringan lebih dari 40% dan sangat berpotensi terjadinya erosi. Salah satunya Kecamatan Arut Utara yang memiliki ketinggian wilayah lebih dari 25 meter diatas permukaan laut, dengan kemiringan hingga mencapai >40 %.

B. Iklim

Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan daerah yang beriklim hutan hujan tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi setiap tahunnya. Musim kemarau berlangsung antara bulan April hingga bulan Agustus, dan musim hujan antara bulan September hingga bulan Maret. Temperatur udara pada Tahun 2021 rata-rata berkisar antara 26,14 0C hingga 27,53 0C. Suhu maksimum terjadi pada bulan Februari dengan suhu 35,40 0C serta suhu minimum 20,60 terjadi pada bulan Juli. Kelembaban udara berkisar antara 82,00% hingga 88,57%, kelembaban udara minimum terjadi pada bulan Februari sebesar 39% dan kelembaban maksimum rata-rata seluruh bulan mencapai puncak kelembaban sebesar 100%.

Tabel 3. 2 Suhu Udara dan Kelembaban di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023

Bulan	Suhu Udara (°C)			Kelembaban Udara (%)		
	Minimal	Rata-rata	Maksimal	Minimal	Rata-rata	Maksimal
Januari	22,20	26,33	33,90	52,00	86,93	100,00
Februari	22,40	27,53	35,40	39,00	82,00	98,00
Maret	21,40	26,69	34,20	50,00	85,72	100,00
April	22,40	27,20	35,20	44,00	83,77	99,00
Mei	22,00	27,14	34,40	54,00	87,38	100,00
Juni	21,20	26,64	35,00	54,00	86,79	100,00
Juli	20,60	26,75	33,60	52,00	85,26	100,00
Agustus	22,60	26,38	34,00	53,00	88,08	100,00
September	22,40	26,14	33,60	52,00	88,57	100,00
Oktober	22,40	26,95	34,10	52,00	86,28	100,00
November	22,60	26,51	35,00	49,00	87,59	100,00
Desember	21,00	26,44	35,00	51,00	87,85	100,00

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2024

Curah hujan rata-rata pada tahun 2021 mencapai 278,06 mm. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Oktober sebesar 453,40 mm dan curah hujan terendah terjadi pada bulan Februari sebesar 119,20 mm. Sedangkan hari hujan pada tahun 2021 rata-rata sebanyak 18 hari dengan hari hujan tertinggi terjadi pada bulan September sebanyak 24 hari dan hari hujan terendah terjadi pada bulan Februari yaitu sebanyak 10 hari.

Tekanan udara yang ditandai dengan dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. tekanan udara rata-rata 1.006,57 milibar dengan tekanan udara maksimum terjadi pada bulan Oktober sebesar 1.012,40 milibar, sedangkan tekanan udara minimum terjadi pada bulan Januari yaitu sebesar 1.009,40 milibar.

Tabel 3. 3 Jumlah Curah Hujan, Hari Hujan dan Rata-rata Harian Penyinaran Matahari di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Rata-Rata Harian Penyinaran Matahari (%)
Januari	302,30	22	33,31
Februari	119,20	10	58,39
Maret	237,70	19	43,66
April	162,30	14	57,69
Mei	285,80	20	42,89
Juni	261,00	20	46,94
Juli	263,60	13	49,86
Agustus	349,80	19	42,94
September	421,50	24	33,25
Oktober	453,40	17	41,67
November	334,90	20	38,33
Desember	145,30	22	39,83

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2024

C. Hidrogeologi

Potensi hidrogeologi Kabupaten Kotawaringin Barat cukup besar, terutama adanya aliran sungai besar, seperti Sungai Lamandau, Sungai Arut, Sungai Kumai, dan beberapa sungai kecil lainnya. Kondisi sungai - sungai utama di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3. 4 Keadaan Sungai di Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Nama Sungai	Panjang (Km)	Dapat Dilayari (Km)	Rata-rata Kedalaman (m)	Rata-rata Lebar (m)
1	Kumai	175,0	100,0	6,0	300,0
2	Lamandau	300,0	250,0	6,0	200,0
3	Arut	250,0	190,0	4,0	100,0

Sumber: RISPAM Kotawaringin Barat, 2023

Terdapat 4 daerah aliran sungai, yaitu DAS Kotawaringin lokasi lintas provinsi (Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah) yang merupakan DAS yang paling luas. Berikutnya adalah DAS Kumai lokasi Kabupaten Kotawaringin Barat, DAS Bulu Kecil lokasi lintas kabupaten (Kabupaten Kotawaringin Barat dan

Kabupaten Seruyan) dan DAS Cabang lokasi kabupaten (Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan. Nama DAS dan luasnya disajikan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 3. 5 Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Nama Sungai	Luas (Ha)
1	Kotawaringin	13.9030,0
2	Kumai	23.420,0
3	Bulu Kecil	18.540,0
4	Cabang	3.560,0

Sumber: RISPAM Kotawaringin Barat, 2023

D. Jenis Tanah

Secara garis besar, jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 6 Kondisi Jenis Tanah Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Jenis Tanah	Sebaran
1	Podsolik Merah Kuning	Tengah sampai hulu sungai Kecamatan Arut Utara, sebagian kecil Kecamatan Arut
2	Podsolik (Podsolik Merah Kuning- Podsol)	Di tengah Kecamatan Kumai, Kecamatan Arut Selatan dan sedikit Kecamatan Kotawaringin Lama
3	Kompleks Regosol (Podsol)	Bagian timur Kecamatan Kumai
4	Aluvial	Aliran sunga Lamandau, Arut dan Kumai serta di daerah pantai sampai ke bagian tengah kecamatan Kumai
5	Organosol	Kecamatan Kumai dan sedikit di Kecamatan Kotawaringin Lama dan Arut Selatan
6	Okisol (Lateritik)	Bagian atas (hulu) Kecamatan Arut Utara

Sumber : RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat

3.1.3 Penggunaan Lahan

Berdasarkan peta penggunaan lahan eksisting Tahun 2022 wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai luas sebesar 940.102,85 Ha, dengan lahan terluas yaitu kawasan hutan seluas 431.272,83 Ha atau sebesar 45,88% dari total luas wilayah. Kawasan hutan tersebut terbagi menjadi hutan lindung, hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, dan hutan produksi yang dapat dikonversi. Berikut rincian penggunaan lahan eksisting Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022.

Tabel 3. 7 Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase
1	Badan Air	10.329,90	1,10%
2	Hutan Lindung	9.956,88	1,06%
3	Hutan Produksi Terbatas	5.741,56	0,61%
4	Hutan Produksi Tetap	251.661,55	26,77%
5	Hutan Produksi yang dapat Dikonversi	163.912,84	17,44%
6	Ekosistem Mangrove	3.184,50	0,34%
7	Hortikultura	0,10	0,00%
8	Lindung Gambut	10.405,61	1,11%

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase
9	Pariwisata	6,64	0,00%
10	Perikanan Budi Daya	96,87	0,01%
11	Perkebunan	50.728,90	5,40%
12	Perkebunan Rakyat	146.141,33	15,55%
13	Perlindungan Setempat	1.586,76	0,17%
14	Permukiman	9.702,87	1,03%
15	Peruntukan Industri	233,76	0,02%
16	Pertambangan Batubara	531,88	0,06%
17	Suaka Margasatwa	31.161,93	3,31%
18	Taman Nasional	242.132,62	25,76%
19	Taman Wisata Alam	2.586,36	0,28%
Jumlah		940.102,86	100,00%

Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat, 2024

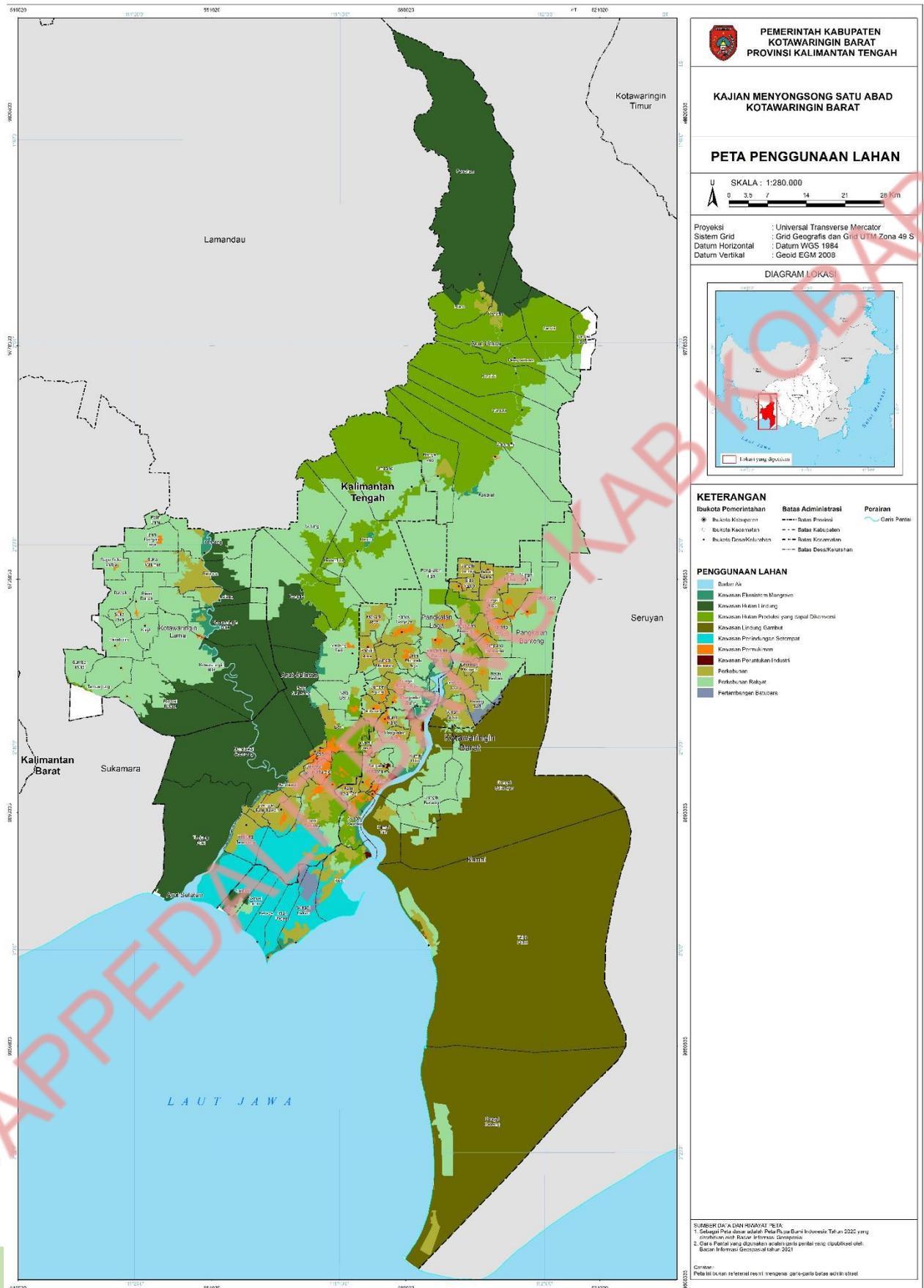
Tabel 3. 8 Penggunaan Lahan Pada Masigh-masing Kecamatan Tahun

No	Penggunaan Lahan	Kecamatan (Ha)					
		Arut Selatan	Arut Utara	Kotawaringin Lama	Kumai	Pangkalan Banteng	Pangkalan Lada
1.	Alang – Alang	65.259	-	-	225.107	83.704	7.356
2.	Hutan Belukar	244.077	162.290	97.567	256.845	64.727	26.530
3.	Hutan Lebat	325.367	290.650	68.985	248.669	66.931	6.755
4.	Kebun Campuran	265.283	75.482	96.242	185.489	-	4.375
5.	Kebun Sejenis	43.746	-	-	49.123	-	16.721
6.	Ladang / Tegalan	85.108	-	-	132.643	20.345	33.755
7.	Perairan	384.553	-	68.691	150.255	22.862	12.157
8.	Perkebunan Besar	88.019	51.657	16.235	106.795	93.313	30.291
9.	Permukiman/Perkampungan	175.781	207.962	66.226	257.806	63.392	33.755
10.	Semak Belukar	108.335	72.291	47.664	246.147	14.421	
	Jumlah	1.785.528	360.332	461.610	1.858.880	429.696	171.694

Sumber: Dokumen Kajian Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)/Human Capital Development Plan (Hcdp) Kabupaten Kotawaringin Barat 2023



Gambar 3. 3 Penggunaan Lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat



Gambar 3. 4 Peta Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Kotawaringin Barat

Sedangkan berdasarkan penguasaan dan kepemilikan lahan, sesuai dengan data Kantor Pertanahan Kotawaringin Barat, jenis penguasaan lahan di Kotawaringin Barat terdiri atas Hak Guna Bangunan, Hak Milik, Hak Pakai, Hak Wakaf, dan Hak Guna Usaha dengan data sebagai berikut:

Tabel 3. 9 Luas Penguasaan Lahan Non HGU dan HGU di Kotawaringin Barat

No	Jenis Penguasaan	Luas (Hektar)
1	Hak Guna Bangunan	651,64
2	Hak Milik	24.139,39
3	Hak Pakai	3.154,34
4	Hak Wakaf	12,49
5	Hak Guna Usaha (HGU)	167.250,50

Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat, 2024

Penguasaan lahan berupa Hak Guna Usaha di Kabupaten Kotawaringin Barat cukup luas sebesar 167.250,50 Hektar karena mayoritas lahan berupa kawasan perkebunan sawit.

3.1.4 Kondisi Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2023 adalah 274.935 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk per Tahun 2022-2023 yaitu 1,24%. Jumlah penduduk terbanyak yaitu Kecamatan Arut Selatan : 123.040 jiwa (43,64%) dengan pertumbuhan penduduk sebesar 1,61%. Lebih detailnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 10 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023

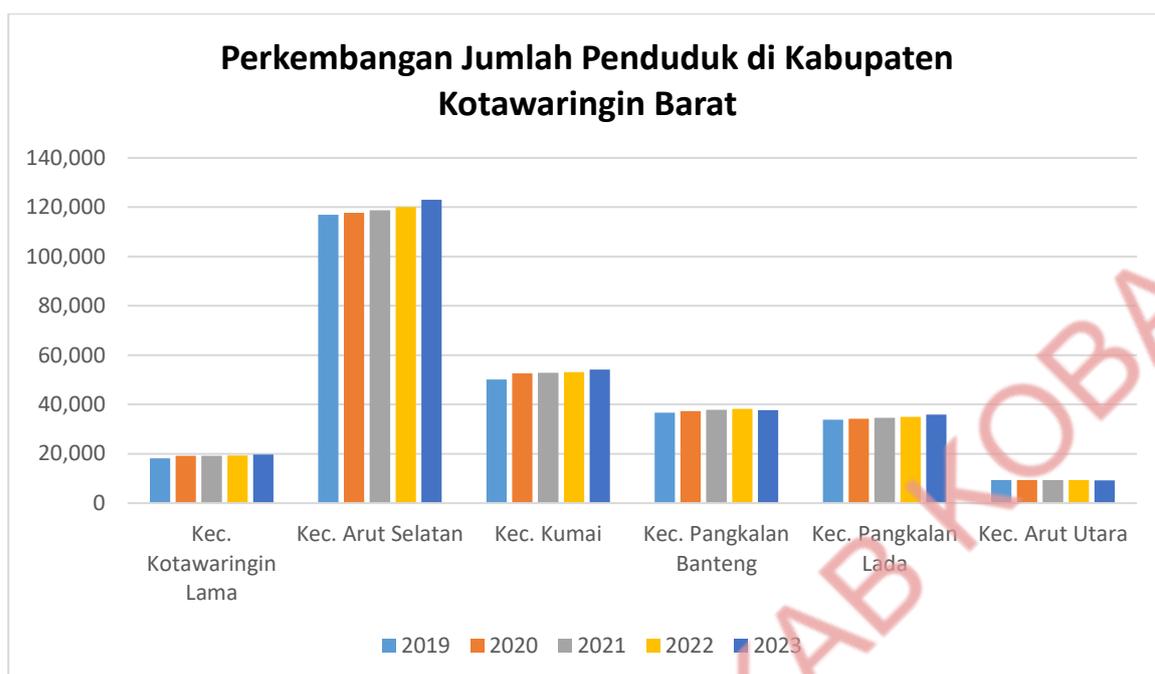
No.	Kecamatan	Penduduk (jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2020 – 2023 (%)
1	Kotawaringin Lama	19.710	1,09
2	Arut Selatan	123.040	1,61
3	Kumai	54.110	1,01
4	Pangkalan Banteng	37.680	0,30
5	Pangkalan Lada	35.930	1,85
6	Arut Utara	9.270	(0,29)
	Jumlah	279.740	1,24

Sumber : BPS-Kabupaten dalam Angka, 2024

Tabel 3. 11 Perkembangan Jumlah Penduduk di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019-2023

Kecamatan	Jumlah Penduduk / Tahun (Jiwa)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kec. Kotawaringin Lama	20.973	19.100	19.220	19.319	19.710
Kec. Arut Selatan	128.896	117.700	118.809	119.988	123.040
Kec. Kumai	59.950	52.600	52.821	53.054	54.110
Kec. Pangkalan Banteng	46.586	37.400	37.784	38.235	37.680
Kec. Pangkalan Lada	36.132	34.200	34.547	34.964	35.930
Kec. Arut Utara	21.022	9.300	9.350	9.375	9.270
Kabupaten Kotawaringin Barat	312.911	270.300	272.531	274.935	279.740

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2020-2024



Gambar 3. 5 Perkembangan Jumlah Penduduk di Kabupaten Kotawaringin Barat

Kepadatan penduduk di Kotawaringin Barat pada tahun 2023 sebesar 26 jiwa/km². Setiap km² wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dihuni sekitar 26 orang. Kepadatan Penduduk tertinggi di Kecamatan Pangkalan Lada yaitu 126,19 jiwa/km².

Tabel 3. 12 Prosentase dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023

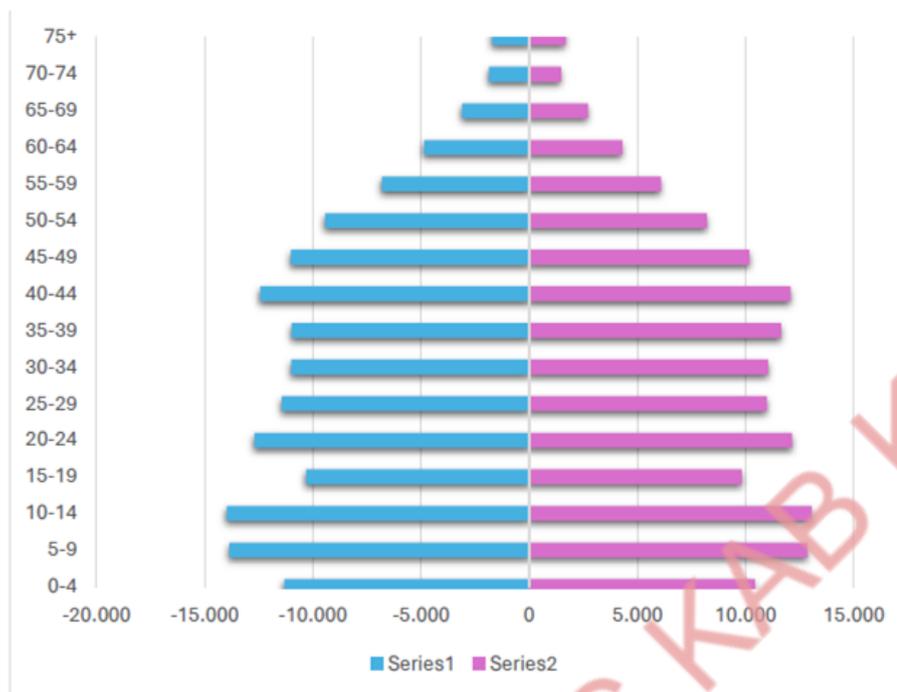
No.	Kecamatan	Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
1	Kotawaringin Lama	19.710	16,16
2	Arut Selatan	123.040	52,52
3	Kumai	54.110	18,56
4	Pangkalan Banteng	37.680	28,73
5	Pangkalan Lada	35.930	126,19
6	Arut Utara	9.270	3,45
	Jumlah	279.740	26,00

Sumber : BPS-Kabupaten dalam Angka, 2024

Secara umum, penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan. Perbandingan tersebut bisa dilihat dari nilai Sex Rasio. Nilai Sex Rasio jenis kelamin laki-laki terhadap perempuan di Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 107,25. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk perempuan, terdapat 107 penduduk laki-laki.

Berdasarkan kelompok umur, pada tahun 2023, 70,13% persen (192.820 jiwa) dari seluruh penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan penduduk yang berusia produktif, yaitu 15-64 tahun. Sedangkan 25,30% (69/552 jiwa) merupakan penduduk berusia 0-14 tahun, dan sisanya sebesar 4,59% (12/620 jiwa) adalah penduduk berusia lebih dari 65 tahun. Jumlah penduduk tertinggi menurut

usia pada umur 10-14 tahun dengan jumlah 27.058 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terendah pada umur 70-74 tahun dengan jumlah 3.313 jiwa.



Gambar 3. 6 Jumlah Penduduk Menurut Usia Di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023

Indikator kualitas penduduk dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia atau IPM merupakan angka indeks yang dibangun dengan tiga dimensi dasar kehidupan manusia yaitu: a) umur panjang dan hidup sehat, b) pengetahuan, dan c) standar hidup layak. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).

Indeks IPM Kabupaten Kotawaringin Barat diukur oleh BPS Kotawaringin Barat ditampilkan sebagai berikut.

Tabel 3. 13 Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kotawaringin Barat

Komponen	Satuan	2019	2020	2021	2022
Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir Kabupaten Kotawaringin Barat	Tahun	70,51	70,59	70,68	70,68
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,71	12,72	12,73	12,73
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,41	8,42	8,53	8,53
Pengeluaran Perkapita	Ribu Rupiah	13.175	13.109	13.117	13.117
IPM Kabupaten Kotawaringin Barat		72,85	72,87	72,87	72,87

Sumber : BPS-Kabupaten dalam Angka, 2023

Perkembangan IPM Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020-2023 semakin meningkat tiap tahunnya dan masuk dalam kategori tinggi di level Provinsi Kalimantan Tengah, serta berada diatas rata-rata IPM Provinsi. Berikut nilai indeks IPM Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020-2023 :

Tabel 3. 14 Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2020-2023

Kabupaten/Provinsi	2020	2021	2022	2023
Kotawaringin Barat	73,95	74,15	74,39	74,92
Provinsi Kalimantan Tengah	72,62	72,81	73,17	73,73

Sumber : Kabupaten Kotawaringin dalam Angka, 2024

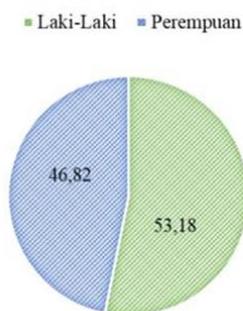


Gambar 3. 7 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kotawaringin Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2023

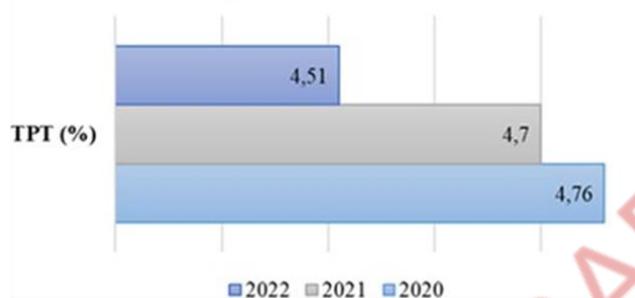
Angka pengangguran perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Angka pengangguran terbanyak adalah pada jenjang SD sebesar 46% atau sebanyak 3.439 jiwa. Jika ditotal, angka pengangguran di Kab Kobar 2022 mencapai 7.535 jiwa.

TPT mengalami penurunan sepanjang tahun 2020-2022. Pada tahun 2020, TPT Kab Kobar sebesar 4,76% dan angka tersebut terus menurun hingga pada tahun 2022 mencapai 4,51%. Selama 3 tahun terakhir, angka TPT di Kab Kobar mengalami penurunan sebanyak 0,25%. Pada tahun 2021, TPT tertinggi berada di tingkat pendidikan SD yaitu sebesar 32,54%.

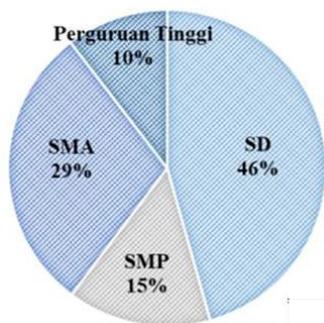
ANGKA PENGANGGURAN BERDASARKAN JENIS KELAMIN TAHUN 2022



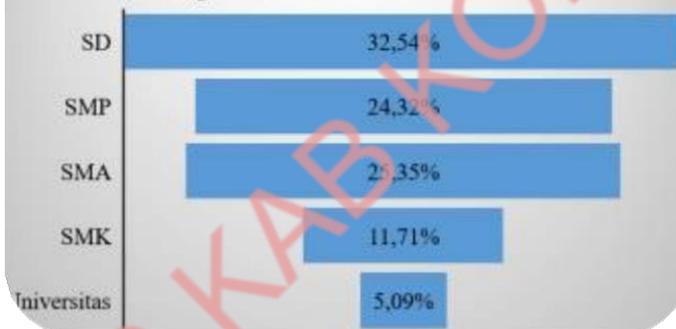
Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kotawaringin Barat Tahun 2020-2022



ANGKA PENGANGGURAN BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN TAHUN 2022



Tingkat Pengangguran Terbuka/ TPT (%) Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2021



Gambar 3. 8 Perkembangan Tingkat Pengangguran Di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020-2022

3.1.5 Kondisi Bidang Pendidikan

Sarana prasarana pendidikan dan kuantitas tenaga pendidik di Kabupaten Kotawaringin Barat mulai tersebar merata di masing-masing Kecamatan. Jumlah sekolah TK di Kabupaten Kotawaringin Barat sebanyak 150 unit sekolah, jumlah sekolah RA banyak 13 unit sekolah. Fasilitas pendidikan tingkat dasar sudah tersebar merata di seluruh kecamatan. Berikut data sekolah, guru dan murid TK serta RA di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023.

Tabel 3. 15 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid TK di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022

No.	Kecamatan	Jumlah Sekolah	Guru	Murid
1	Kotawaringin Lama	10	43	690
2	Arut Selatan	62	326	3.229
3	Kumai	27	116	1.287
4	Pangkalan Banteng	25	113	1.200
5	Pangkalan Lada	16	86	1.169
6	Arut Utara	10	30	452
	Jumlah	150	714	8.027

Sumber : BPS-Kabupaten dalam Angka, 2024 - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Data Semester Ganji

Tabel 3. 16 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Raudatul Athfal (RA) di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022

No.	Kecamatan	Jumlah Sekolah	Guru	Murid
1	Kotawaringin Lama	2	13	96
2	Arut Selatan	4	19	314
3	Kumai	3	19	244
4	Pangkalan Banteng	4	20	348
5	Pangkalan Lada	-	-	-
6	Arut Utara	-	-	-
	Jumlah	13	71	1.002

Sumber : BPS-Kabupaten dalam Angka, 2024- Kementerian Agama, Data Semester Ganjil

Jumlah SD di Kabupaten Kotawaringin Barat sebanyak 197 unit sekolah, jumlah MI sebanyak 16 unit sekolah. Fasilitas pendidikan tingkat menengah sudah tersebar merata di seluruh kecamatan. Berikut data sekolah, guru dan murid SD serta MI di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023.

Tabel 3. 17 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023

No.	Kecamatan	Jumlah Sekolah	Guru	Murid
1	Kotawaringin Lama	24	199	1.800
2	Arut Selatan	72	792	12.301
3	Kumai	36	385	5.598
4	Pangkalan Banteng	26	284	4.163
5	Pangkalan Lada	21	218	4.020
6	Arut Utara	17	149	1.681
	Jumlah	197	2.027	30.563

Sumber : BPS-Kabupaten dalam Angka, 2024 - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sistem Data Pokok Pendidikan, data semester ganjil

Tabel 3. 18 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2023

No.	Kecamatan	Jumlah Sekolah	Guru	Murid
1	Kotawaringin Lama	-	-	-
2	Arut Selatan	8	101	1.667
3	Kumai	5	85	1.178
4	Pangkalan Banteng	3	35	721
5	Pangkalan Lada	-	-	-
6	Arut Utara	-	-	-
	Jumlah	17	221	3.566

Sumber : BPS-Kabupaten dalam Angka, 2024 - Kementerian Agama, EMIS, Data Semester Ganjil

Jumlah SMP di Kabupaten Kotawaringin Barat sebanyak sebanyak 67 unit sekolah, jumlah MTS sebanyak 16 unit sekolah. Berikut data sekolah, guru dan murid SMP dan MTS di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023.

Tabel 3. 19 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023

No.	Kecamatan	Jumlah Sekolah	Guru	Murid
1	Kotawaringin Lama	8	75	849
2	Arut Selatan	25	392	6.009
3	Kumai	12	130	1.550
4	Pangkalan Banteng	11	112	1.574
5	Pangkalan Lada	6	73	1.003

No.	Kecamatan	Jumlah Sekolah	Guru	Murid
6	Arut Utara	5	35	455
	Jumlah	67	817	11.440

Sumber : BPS-Kabupaten dalam Angka, 2024 - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sistem Data Pokok Pendidikan, data semester ganjil

Tabel 3. 20 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023

No.	Kecamatan	Jumlah Sekolah	Guru	Murid
1	Kotawaringin Lama	2	19	102
2	Arut Selatan	4	82	1.136
3	Kumai	6	89	1.161
4	Pangkalan Banteng	2	19	320
5	Pangkalan Lada	2	22	326
6	Arut Utara	-	-	-
	Jumlah	16	231	3.045

Sumber : BPS-Kabupaten dalam Angka, 2024 - Kementerian Agama, EMIS, Data Semester Ganjil

Jumlah SMA di Kabupaten Kotawaringin Barat sebanyak 11 unit sekolah, jumlah SMK sebanyak 17 unit sekolah, jumlah MA sebanyak 12 unit sekolah. Fasilitas pendidikan tingkat atas sudah tersebar merata di seluruh kecamatan. Berikut data sekolah, guru dan murid SMP dan MTS di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023.

Tabel 3. 21 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024

No.	Kecamatan	Jumlah Sekolah	Guru	Murid
1	Kotawaringin Lama	1	27	271
2	Arut Selatan	4	142	2.435
3	Kumai	2	77	1.392
4	Pangkalan Banteng	2	31	577
5	Pangkalan Lada	1	30	631
6	Arut Utara	1	16	145
	Jumlah	11	323	5.451

Sumber : BPS-Kabupaten dalam Angka, 2024 -Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sistem Data Pokok Pendidikan

Tabel 3. 22 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023

No.	Kecamatan	Jumlah Sekolah	Guru	Murid
1	Kotawaringin Lama	1	20	259
2	Arut Selatan	11	270	3.546
3	Kumai	3	51	441
4	Pangkalan Banteng	1	37	726
5	Pangkalan Lada	1	22	226
6	Arut Utara	-	-	-
	Jumlah	17	400	5.198

Sumber : BPS-Kabupaten dalam Angka, 2024 -Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sistem Data Pokok Pendidikan

Tabel 3. 23 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Madrasah Aiyah (MA) di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023

No.	Kecamatan	Jumlah Sekolah	Guru	Murid
1	Kotawaringin Lama	2	20	36
2	Arut Selatan	4	73	654
3	Kumai	2	14	112
4	Pangkalan Banteng	2	16	63
5	Pangkalan Lada	2	23	193
6	Arut Utara	-	-	-
	Jumlah	12	146	1.058

Sumber : BPS-Kabupaten dalam Angka, 2024 - Kementerian Agama, EMIS, Data Semester Ganjil

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi anak sekolah pada suatu kelompok tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

Nilai angka partisipasi murni untuk SD/MI/ sederajat yaitu 98,20 dan angka partisipasi kasar sebesar 103,22. Nilai angka partisipasi murni untuk SMP/MTs/ sederajat yaitu 79,59 dan angka partisipasi kasar sebesar 87,07. Nilai angka partisipasi murni untuk SMA/SMK/MA sederajat yaitu 60,34 dan angka partisipasi kasar sebesar 81,51.

Tabel 3. 24 Angka Partisipasi Murni (APM) & Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2021 dan 2022

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)		Angka Partisipasi Kasar (APK)	
	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023
SD/ MI/ Sederajat	99,41	98,20	104,70	103,22
SMP/ MTs/ Sederajat	78,89	79,59	83,92	87,07
SMA/ SMK/ MA/ Sederajat	61,29	60,34	79,83	81,51

Sumber : BPS-Kabupaten dalam Angka, 2023

Tabel 3. 25 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan ¹⁾	Angkatan Kerja			
	Bekerja	Pengangguran ²⁾	Jumlah Angkatan Kerja	Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja
0	50.539	638	51.177	98,75
1	23.234	460	23.694	98,06
2	49.063	4.103	53.166	92,28
3	11.084	1.043	12.127	91,4
Jumlah	133.920	6.244	140.164	95,55

Sumber : Kabupaten Kotawaringin dalam Angka, 2024

Lanjutan

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 1)	Bukan Angkatan Kerja	Jumlah	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) %
0	28.335	79.512	64,36
1	21.341	45.035	52,61
2	17.925	71.091	74,79
3	897	13.024	93,11
Jumlah	68.498	208.662	67,17

Sumber : Kabupaten Kotawaringin dalam Angka, 2024

Catatan/Note:

- 1
 0. ≤ Sekolah Dasar (SD)
 1. Sekolah Menengah Pertama
 2. Sekolah Menengah Atas
 3. Perguruan Tinggi
- 2
 1. Mencari pekerjaan
 2. Mempersiapkan usaha
 3. Merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan
 4. Sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja

3.1.6 Kondisi Bidang Kesehatan

Jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari dokter sejumlah 130 orang, dokter gigi sejumlah 23 orang, perawat sejumlah 209 orang, bidan sejumlah 245 orang, tenaga kefarmasian sejumlah 5 orang, tenaga gizi sejumlah 32 orang dan ahli teknologi laboratorium medik sejumlah 134 orang. Berikut data kondisi bidang kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat :

Tabel 3. 26 Jumlah tenaga Kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023

No.	Kecamatan	Dokter	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Tenaga Kefarmasian	Tenaga Gizi	Ahli Teknologi Lab. Medik
1	Kotawaringin Lama	7	4	29	40	0	5	17
2	Arut Selatan	99	12	49	64	5	12	48
3	Kumai	6	2	49	50	0	4	25
4	Pangkalan Banteng	10	3	42	41	0	4	17
5	Pangkalan Lada	4	1	21	24	0	4	14
6	Arut Utara	4	1	19	26	0	3	13
	Jumlah	130	23	209	245	5	32	134

Sumber : BPS-Kabupaten dalam Angka, 2024– Dinas Kesehatan

Pada Kabupaten Kotawaringin Barat terdapat 4 rumah sakit, diantaranya RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, Rumah Sakit Citra Husada, RSUD Kutaringin, Rumah Sakit Harapan Insani. Puskesmas, klinik dan posyandu terdapat di masing-masing Kecamatan. Lebih jelasnya pada tabel berikut.

Tabel 3. 27 Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023

No.	Kecamatan	RS Umum	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Klinik Pratama	Posyandu
1	Kotawaringin Lama	1	3	12	1	20
2	Arut Selatan	3	6	17	17	77
3	Kumai	0	3	19	4	30

No.	Kecamatan	RS Umum	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Klinik Pratama	Posyandu
4	Pangkalan Banteng	0	2	17	5	20
5	Pangkalan Lada	0	2	5	1	26
6	Arut Utara	0	2	9	2	14
	Jumlah	4	18	79	30	187

Sumber : BPS-Kabupaten dalam Angka, 2024 – Dinas Kesehatan

Tabel 3. 28 Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022

No.	Nama Fasilitas	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Kelas	Status
1	RSUD. Sultan Imanuddin	Arut Selatan	Madurejo	Rumah Sakit	Negeri
2	RS. Citra Husada	Arut Selatan	Madurejo	Rumah Sakit	Swasta
3	Puskesmas Arut Selatan	Arut Selatan	Raja	Puskesmas	Negeri
4	Puskesmas Natai Palingkau	Arut Selatan	Baru	Puskesmas	Negeri
5	Puskesmas Mendawai	Arut Selatan	Mendawai	Puskesmas	Negeri
6	Puskesmas Madurejo	Arut Selatan	Madurejo	Puskesmas	Negeri
7	Puskesmas Kumpai Batu Atas	Arut Selatan	_ Kumpai Batu Atas	Puskesmas	Negeri
8	Puskesmas Teluk Bogam	Kumai	_ Teluk Bogam	Puskesmas	Negeri
9	Puskesmas Kumai	Kumai	Candi	Puskesmas	Negeri
10	Puskesmas Sungai Rangit	Kumai	Bumi Harjo	Puskesmas	Negeri
11	Puskesmas Pandu Sanjaya	Pangkalan Lada	Pandu Sanjaya	Puskesmas	Negeri
12	Puskesmas Pangkalan Lada	Pangkalan Lada	Pangkalan Dewa	Puskesmas	Negeri
13	Puskesmas Semanggang	Pangkalan Banteng	Semanggang	Puskesmas	Negeri
14	Puskesmas Karang Mulya	Pangkalan Banteng	Karang Mulya	Puskesmas	Negeri
15	Puskesmas Runtu	Arut Selatan	Runtu	Puskesmas	Negeri
16	Puskesmas Kotawaringin Lama	Kotawaringin Lama	Kotawaringin Hulu	Puskesmas	Negeri
17	Puskesmas Riam Durian	Kotawaringin Lama	Riam Durian	Puskesmas	Negeri
18	Puskesmas Ipuh Jaya	Kotawaringin Lama	Ipuh Bangun Jaya	Puskesmas	Negeri
19	Puskesmas Arut Utara	Arut Utara	Pangkut	Puskesmas	Negeri
20	Puskesmas Sambu	Arut Utara	Sambu	Puskesmas	Negeri
21	Pustu Pasir Panjang	Arut Selatan	Pasir Panjang	Pustu	Negeri
22	Pustu Sidorejo	Arut Selatan	Sidorejo	Pustu	Negeri
23	Pustu Pangkalan Bungur	Arut Selatan	Baru	Pustu	Negeri
24	Pustu Kumpai Batu Bawah	Arut Selatan	_ Kumpai Batu Bawah	Pustu	Negeri
25	Pustu Pangkalan Lima	Arut Selatan	Baru	Pustu	Negeri
26	Pustu Natai Baru	Arut Selatan	Natai Baru	Pustu	Negeri
27	Pustu Madurejo	Arut Selatan	Madurejo	Pustu	Negeri
28	Pustu Sulung	Arut Selatan	Sulung	Pustu	Negeri
29	Pustu Mendawai Seberang	Arut Selatan	Mendawai Seberang	Pustu	Negeri
30	Pustu Raja Seberang	Arut Selatan	Raja Seberang	Pustu	Negeri
31	Pustu Tanjung Putri	Arut Selatan	Tanjung Putri	Pustu	Negeri
32	Pustu Kumpai Batu Atas	Arut Selatan	Kumpai Batu Atas	Pustu	Negeri
33	Pustu Tanjung Terantang	Arut Selatan	Tanjung Terantang	Pustu	Negeri
34	Pustu Umpang	Arut Selatan	Umpang	Pustu	Negeri
35	Pustu Natai Raya	Arut Selatan	Natai Raya	Pustu	Negeri
36	Pustu Simpang Berambai	Pangkalan Banteng	Simpang Berambai	Pustu	Negeri
37	Pustu Karang Sari	Pangkalan Banteng	Mulya Jadi	Pustu	Negeri
38	Pustu Pangkalan Banteng	Pangkalan Banteng	Pangkalan Banteng	Pustu	Negeri
39	Pustu Marga Mulya	Pangkalan Banteng	Marga Mulya	Pustu	Negeri
40	Pustu Berambai Makmur	Pangkalan Banteng	Natai Kerbau	Pustu	Negeri
41	Pustu Karang Mulya	Pangkalan Banteng	Amin Jaya	Pustu	Negeri
42	Pustu Natai Kerbau	Pangkalan Banteng	Natai Kerbau	Pustu	Negeri
43	Pustu Sungai Pulau	Pangkalan Banteng	Mulya Jadi	Pustu	Negeri

No.	Nama Fasilitas	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Kelas	Status
44	Pustu Amin Jaya	Pangkalan Banteng	Amin Jaya	Pustu	Negeri
45	Pustu Mulya Jadi	Pangkalan Banteng	Mulya Jadi	Pustu	Negeri
46	Pustu Sungai Kuning	Pangkalan Banteng	Sungai Kuning	Pustu	Negeri
47	Pustu Sungai Bengkuang	Pangkalan Banteng	Sungai Bengkuang	Pustu	Negeri
48	Pustu Sungai Pakit	Pangkalan Banteng	Amin Jaya	Pustu	Negeri
49	Pustu Sidomulyo	Pangkalan Banteng	Sidomulyo	Pustu	Negeri
50	Pustu Sungai Cabang	Kumai	Sungai Cabang	Pustu	Negeri
51	Pustu Sungai Berdaun	Kumai	Sungai Berdaun	Pustu	Negeri
52	Pustu Sungai Tendang	Kumai	Sungai Tendang	Pustu	Negeri
53	Pustu Sungai Sintuk	Kumai	Sungai Kapitan	Pustu	Negeri
54	Pustu Pangkalan Satu	Kumai	Pangkalan Satu	Pustu	Negeri
55	Pustu Sungai Kapitan	Kumai	Sungai Kapitan	Pustu	Negeri
56	Pustu Kumai Hilir	Kumai	Kumai Hilir	Pustu	Negeri
57	Pustu Kumai Hulu	Kumai	Kumai Hulu	Pustu	Negeri
58	Pustu Kubu	Kumai	Kubu	Pustu	Negeri
59	Pustu Sebuai Barat	Kumai	Sebuai	Pustu	Negeri
60	Pustu Sebuai Timur	Kumai	Sebuai	Pustu	Negeri
61	Pustu Keraya	Kumai	Keraya	Pustu	Negeri
62	Pustu Sungai Bakau	Kumai	Sungai Bakau	Pustu	Negeri
63	Pustu Sungai Sekonyer	Kumai	Sungai Sekonyer	Pustu	Negeri
64	Pustu Tran	Kumai	Sungai Sekonyer	Pustu	Negeri
65	Pustu Batu Belaman	Kumai	Batu Belaman	Pustu	Negeri
66	Pustu Teluk Pulau	Kumai	Teluk Pulau	Pustu	Negeri
67	Pustu Teluk Bogam	Kumai	Teluk Bogam	Pustu	Negeri
68	Pustu Sumber Agung	Pangkalan Lada	Sumber Agung	Pustu	Negeri
69	Pustu Sungai Melawen	Pangkalan Lada	Sungai Melawen	Pustu	Negeri
70	Pustu Pangkalan Durin	Pangkalan Lada	Pangkalan Durin	Pustu	Negeri
71	Pustu Sungai Rangit Jaya	Pangkalan Lada	Sungai Rangit Jaya	Pustu	Negeri
72	Pustu Purba Sari	Pangkalan Lada	Purba Sari	Pustu	Negeri
73	Pustu Makarti Jaya	Pangkalan Lada	Makarti Jaya	Pustu	Negeri
74	Pustu Riam Durin	Kotawaringin Lama	Riam Durian	Pustu	Negeri
75	Pustu Lalang	Kotawaringin Lama	Kotawaringin Hulu	Pustu	Negeri
76	Pustu Suka Makmur	Kotawaringin Lama	Suka Makmur	Pustu	Negeri
77	Pustu Sumber Mukti	Kotawaringin Lama	Sumber Mukti	Pustu	Negeri
78	Pustu Desa Sukajaya	Kotawaringin Lama	Sukajaya	Pustu	Negeri
79	Pustu Rungun	Kotawaringin Lama	Rungun	Pustu	Negeri
80	Pustu Diung	Kotawaringin Lama	Kotawaringin Hilir	Pustu	Negeri
81	Pustu Palih Baru	Kotawaringin Lama	Palih Baru	Pustu	Negeri
82	Pustu Sagu Sukamulya	Kotawaringin Lama	Suka Mulya	Pustu	Negeri
83	Pustu Sungai Dau	Arut Utara	Sungai Dau	Pustu	Negeri
84	Pustu Gandis	Arut Utara	Gandis	Pustu	Negeri

Sumber : Dinas Kesehatan, 2024



Gambar 3. 9 Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat

3.1.7 Kondisi Bidang Kebencanaan

Kawasan rawan bencana berdasarkan Dokumen RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat meliputi:

1) Kawasan Rawan Kebakaran.

Di Kabupaten Kotawaringin Barat terdapat 1.122 titik rawan atau seluas 205 km². Kawasan rawan kebakaran hutan berada di daerah pesisir dan muara sungai serta hutan disepanjang jalan yang menghubungkan Kota Pangkalan Bun – Kotawaringin Lama.

2) Kawasan Rawan Gelombang Pasang.

Kawasan rawan gelombang pasang yaitu kawasan yang berada di daerah pantai terutama Tanjung Penghujan Sampai Tanjung Keluang, Teluk Pulai Sampai Teluk Ranggau, Keraya dan Sebuai Kecamatan Kumai.

3) Kawasan Rawan Banjir.

Kawasan rawan banjir meliputi daerah di Kecamatan Arut Selatan yaitu Desa Kumpai Batu Bawah, Rangda, Sulung Kenambui, Umpang, Tanjung Trantang di Kecamatan Kotawaringin Lama yaitu Desa Lalang, Rungun dan Kondang

Berikut data kondisi bidang kebencanaan di Kabupaten Kotawaringin Barat :

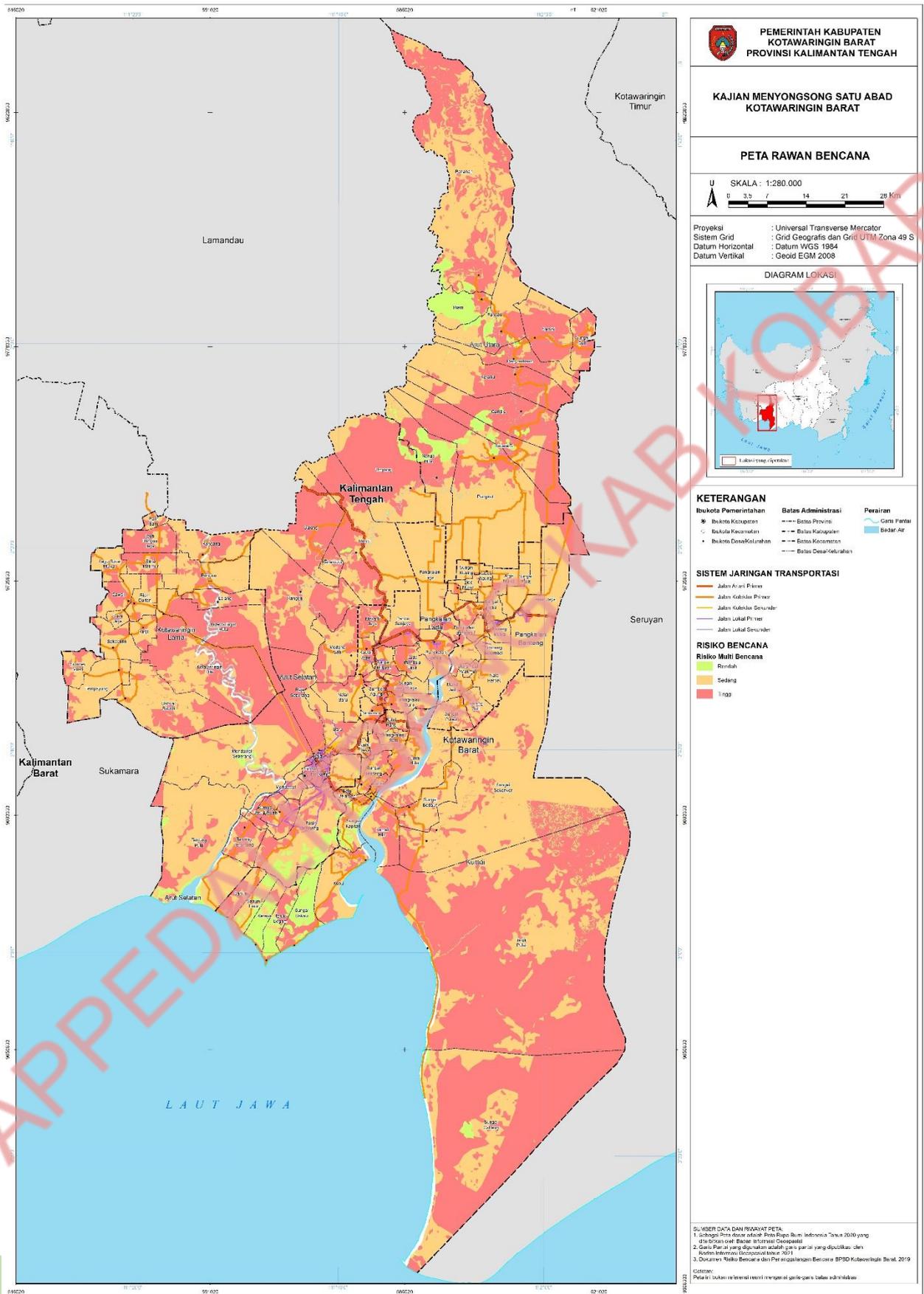
Tabel 3. 29 Banyaknya Korban Bencana Alam menurut Bantuan yang Diberikan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2022

No.	Kecamatan	Jumlah Korban Meninggal	Jumlah Korban menderita	Jumlah Korban	Yang dibantu
1	Kotawaringin Lama	-	4.220	4.220	4.220
2	Arut Selatan	-	21.392	21.392	21.392
3	Kumai	-	157	157	157
4	Pangkalan Banteng	-	445	445	445
5	Pangkalan Lada	-	15	15	15
6	Arut Utara	-	3.326	3.326	3.326
	Jumlah	-	29.555	29.555	29.555

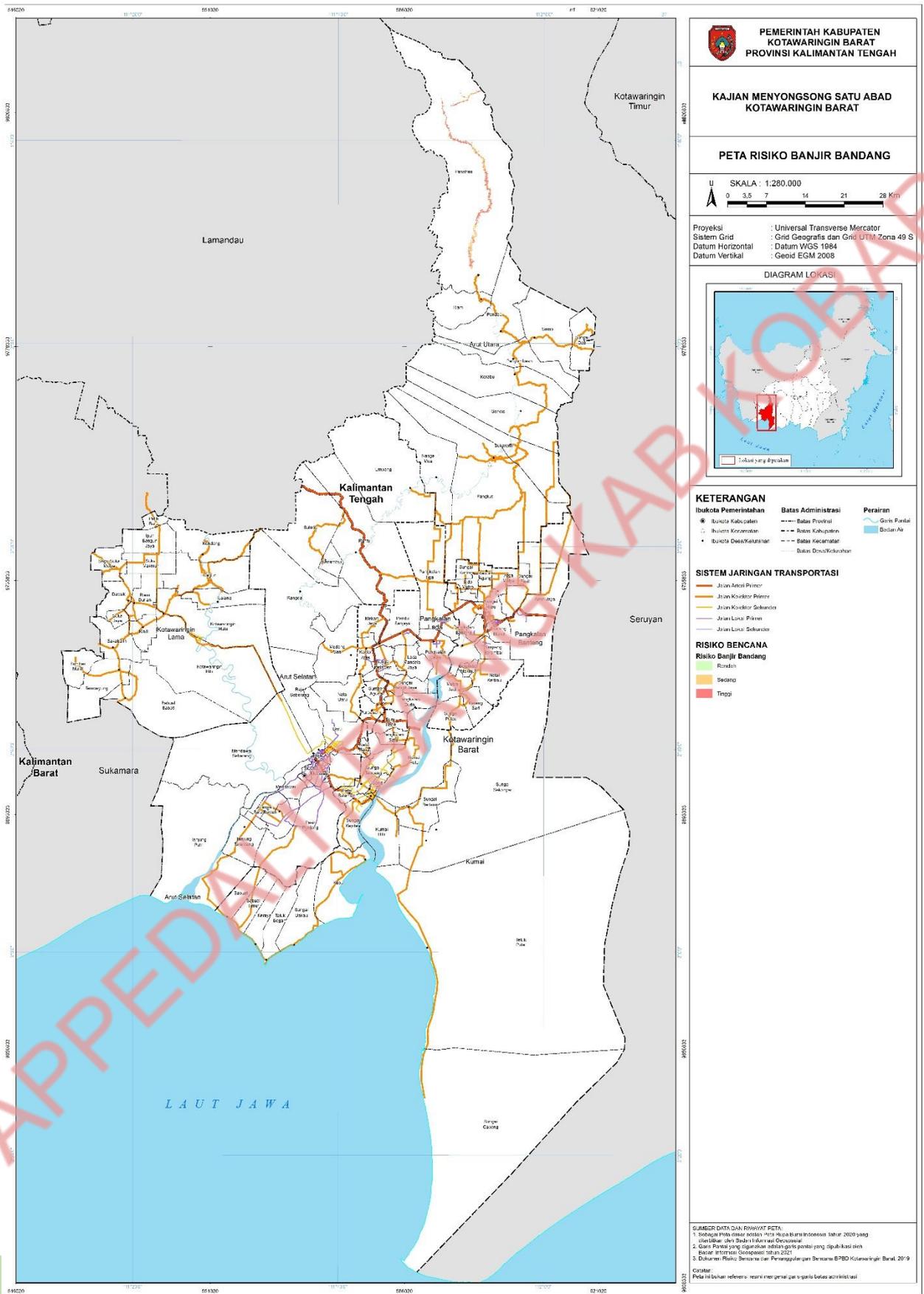
Sumber : BPS-Kabupaten dalam Angka, 2023 – BPBD

Berdasarkan data Inarisk (2022) berikut kondisi kebencanaan di Kabupaten Kotawaringin Barat

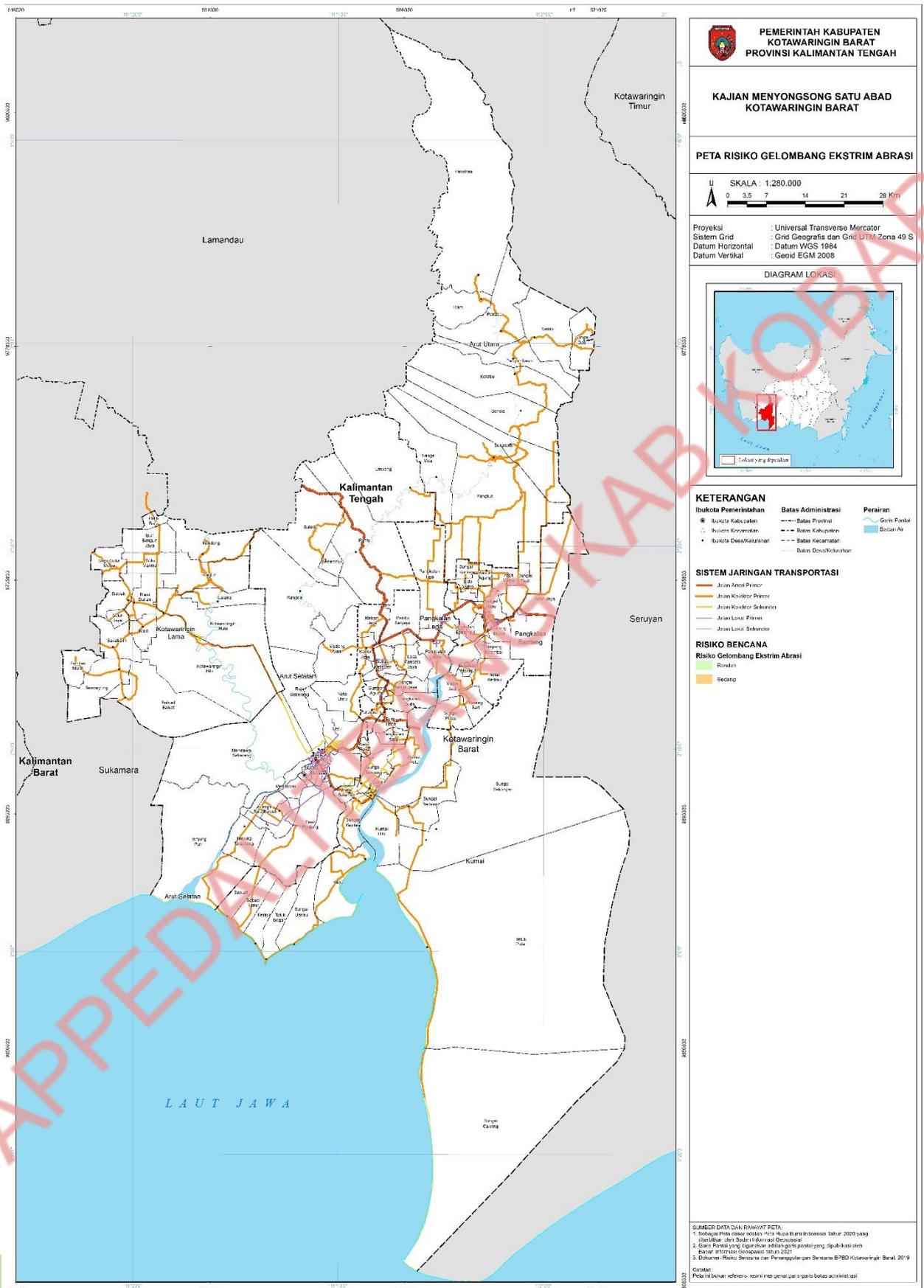
- risiko bencana banjir di Kotawaringin Barat didominasi dengan klasifikasi sedang-rendah,
- risiko bencana cuaca ekstrem didominasi dengan klasifikasi sedang, dan
- risiko bencana gelombang ekstrem dan abrasi disekitar garis pantai didominasi dengan klasifikasi sedang.
- Kemudian, risiko bencana kebakaran hutan dan lahan di Kotawaringin Barat didominasi dengan klasifikasi sedang-tinggi,
- risiko bencana kekeringan didominasi dengan klasifikasi rendah-sedang,
- risiko bencana gempa bumi didominasi dengan klasifikasi rendah, dan
- risiko multi bencana didominasi dengan klasifikasi sedang hingga tinggi.



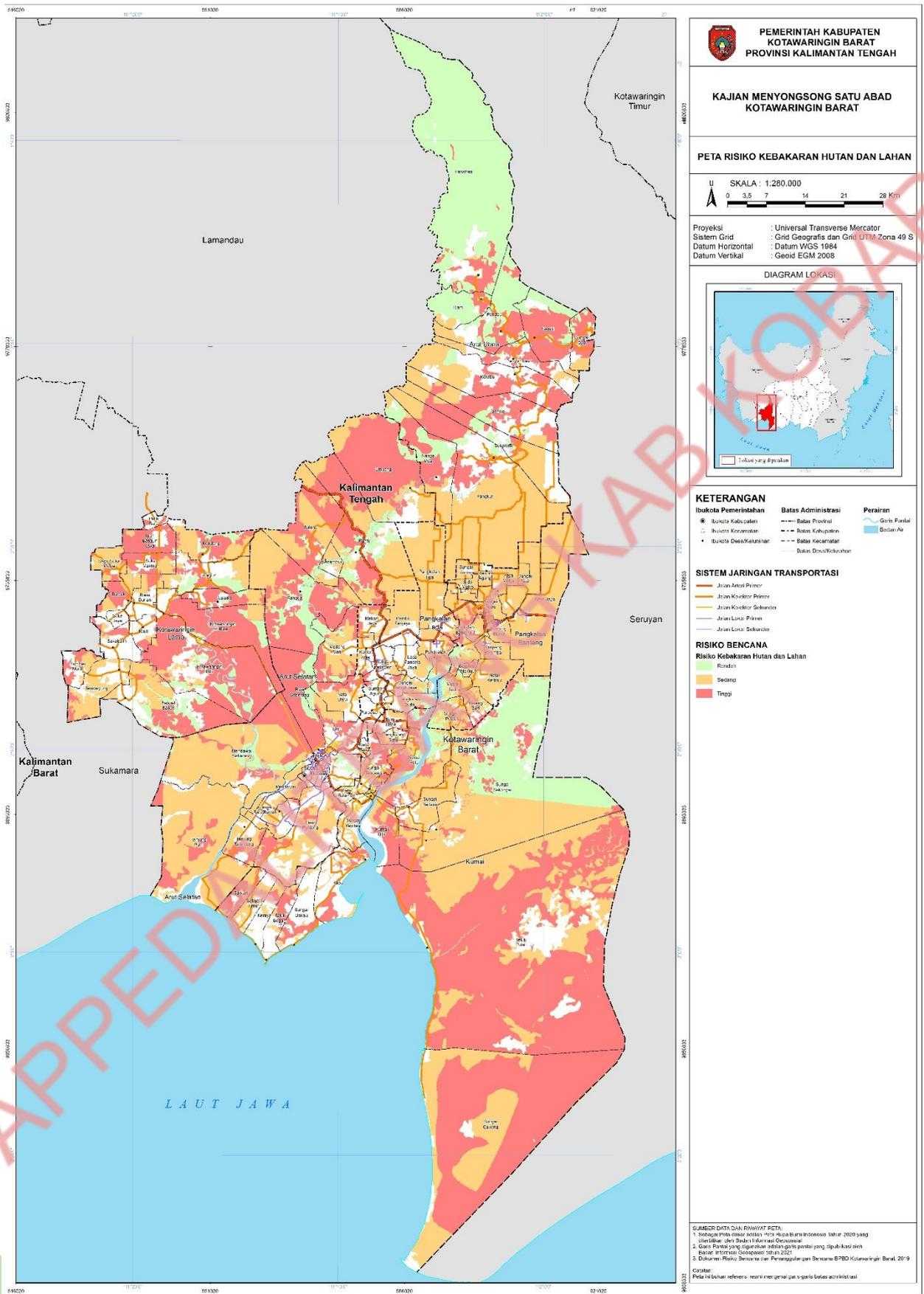
Gambar 3. 10 Peta Risiko Multi Bencana di Kabupaten Kotawaringin Barat



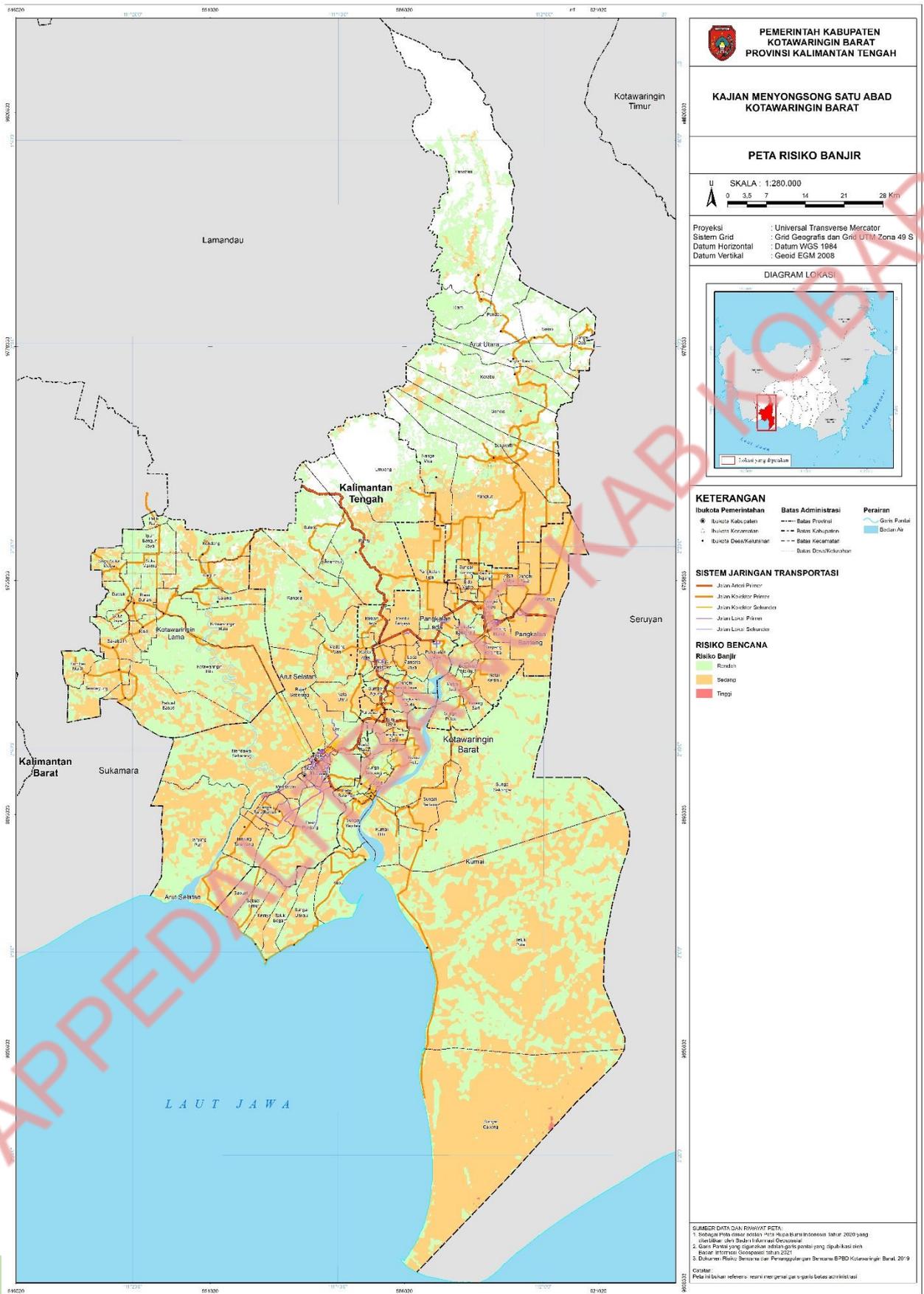
Gambar 3. 11 Peta Risiko Banjir Bandang di Kabupaten Kotawaringin Barat



Gambar 3.12 Peta Risiko Gelombang Ekstrem dan Abrasi di Kabupaten Kotawaringin Barat



Gambar 3.13 Peta Risiko Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat



Gambar 3.14 Peta Risiko Banjir di Kabupaten Kotawaringin Barat

3.1.8 Kondisi Bidang Sosial

Kemiskinan merupakan masalah sosial di Kabupaten Kotawaringin Barat. Prosentase penduduk miskin dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Pada tahun 2018-2022, Garis Kemiskinan di Indonesia, Prov Kalteng dan Kab Kobar terus mengalami peningkatan. Garis Kemiskinan Kobar sendiri mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2021 berada di Rp. 418.388,00 dan pada tahun 2022 meningkat hingga Rp. 476.297,00. Pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin di Kab Kobar meningkat hingga 12,29 ribu jiwa dan mengalami peningkatan lagi pada tahun 2022 menjadi 12,44 ribu jiwa.



Gambar 3. 15 Garis Kemiskinan Nasional, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2018-2022

Pada Tahun 2023 jumlah penduduk miskin sebesar 13.400 penduduk dan dengan prosentase sebesar 4,18% Berikut data kondisi bidang sosial di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tabel 3. 30 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2016-2023

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/ kapita/ bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
2016	319.064	14,1	4,96
2017	338.230	13,3	4,52
2018	344.337	12,9	4,27
2019	360.942	12,8	4,11
2020	397.883	11,5	3,59
2021	418.388	12,3	3,95
2022	476.297	12,4	3,93
2023	513.949	13.4	4,18

Sumber : BPS-Kabupaten dalam Angka, 2024 –Dinas Sosial

Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. $z = \frac{\text{pengeluaran}}{\text{garis kemiskinan}}$. Nilai Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu 0,55. Dari tahun ke tahun semakin baik dengan grafik yang menurun.

Indek keparahan kemiskinan adalah memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. z = garis kemiskinan. Nilai indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu 0,13. Dari tahun ke tahun semakin baik dengan grafik yang menurun. Berikut untuk kedetailan datanya.

Tabel 3. 31 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahannya Kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2016-2023

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahannya Kemiskinan
2016	0,77	0,16
2017	0,57	0,11
2018	0,55	0,12
2019	0,55	0,13
2020	0,40	0,08
2021	0,48	0,09
2022	0,47	0,09
2023	0,55	0,13

Sumber : BPS-Kabupaten dalam Angka, 2024 –Dinas Sosial

Jumlah Kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun 2023 memiliki nilai cukup tinggi yaitu 13,4 (ribu) dibanding Kabupaten lainnya di Provinsi Kalimantan Tengah. Berikut Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.

Tabel 3. 32 Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, 2023

Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk (ribu)
Kotawaringin Barat	13,4
Kotawaringin Timur	26,6
Kapuas	19,2
Barito Selatan	6,7
Barito Utara	7,1
Sukamara	2,7
Lamandau	2,6
Seruyan	15,7
Katingan	8,9
Pulau Pisau	5,9
Gunung Mas	6,6
Barito Timur	8,6
Murung Raya	7,8
Kota Palangka Raya	10,3
Kalimantan tengah	142,2

Sumber : BPS-Kabupaten dalam Angka, 2024

Tabel 3. 33 Persentase Penduduk Miskin Tahun 2023 Pada masing-masing Kecamatan

No	Kecamatan	Kepmensos RI No 69/HUK/2023 Tanggal 17 April 2023		Jumlah Penduduk Kecamatan	Persentase Penduduk Miskin	
		Jiwa	KK		% terhadap Kecamatan	% terhadap Kabupaten
1	Arut Selatan	24.635	9.647	118.809	20,73%	9,04%

No	Kecamatan	Kepmensos RI No 69/HUK/2023 Tanggal 17 April 2023		Jumlah Penduduk Kecamatan	Persentase Penduduk Miskin	
		Jiwa	KK		Jiwa	% terhadap Kecamatan
2	Arut Utara	1.660	699	9.350	17,75%	0,61%
3	Kotawaringin Lama	2.951	1.379	19.220	15,35%	1,08%
4	Kumai	18.701	7.011	52.821	35,40%	6,86%
5	Pangkalan Banteng	6.414	2.582	37.784	16,98%	2,35%
6	Pangkalan Lada	8.301	3.579	34.547	24,03%	3,05%
7	Wilayah Kosong/Null	17	11			
JUMLAH		62.679	24.908	272.531	23,00%	23,00%

3.1.9 Kondisi Bidang Pekerjaan Umum Dan Transportasi

A. Jaringan Listrik

Pelayanan listrik di Kabupaten Kotawaringin Barat dilayani oleh PLN baik daerah perkotaan maupun daerah perdesaan. Pelayanan PLN sejak tahun 2020 sudah menjangkau seluruh desa. Namun di beberapa wilayah yang diperkirakan akan mengalami perkembangan atau pertumbuhan permukiman baru belum ditunjang oleh keberadaan listrik. Pembangkit listrik untuk menyokong perumahan dan industri awalnya dipenuhi melalui Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) berdaya 33,65 MW di Kecamatan Arut Selatan dan Kecamatan Kumai. Kemudian, sekitar tahun 2018 dioperasikan Gardu Induk (GI) Pangkalan Bun 150 kV untuk supply listrik kabupaten. Sistem kelistrikan Pangkalan Bun terhubung (interkoneksi) dengan sistem kelistrikan interkoneksi Barito - Mahakam (Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur) yang saat ini memiliki surplus daya mencapai lebih dari 200 Mega Watt (MW). Dengan beroperasinya Gardu Induk Pangkalan Bun 150 kV PLN dapat menurunkan Biaya Pokok Produksi Penyediaan (BPP) listrik di Kabupaten Kotawaringin Barat yang berasal dari PLTD berbahan bakar High Speed Diesel (HSD). Transmisi listrik ke permukiman disalurkan melalui jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTT), dan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR).

Jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Kotawaringin Barat dari Tahun ke tahun mengalami peningkatan jumlah pelanggan. Berikut lebih detailnya.

Tabel 3. 34 Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Bulan di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2018-2023

Bulan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Januari	71.170	76.516	81.440			
Februari	71.499	77.088	81.910			
Maret	71.605	77.573	82.266			
April	72.172	77.949	82.587			
Mei	72.783	78.434	82.847			
Juni	73.344	78.602	83.212			
Juli	73.879	79.017	83.574			
Agustus	74.397	79.288	83.852			

Bulan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
September	74.655	79.761	84.120			
Oktober	74.914	80.258	84.463			
November	75.659	80.613	84.879			
Desember	76.103	81.069	85.289	90.071	94.232	135.673

Sumber : BPS-Kabupaten dalam Angka, 2024

Tabel 3. 35 Potensi dan Masalah Energi berkelanjutan Di Kabupaten Kotawaringin Barat

Aspek	Potensi dan Masalah
ENERGI MATAHARI berupa Sistem PLTS	Potensi pengembangan PLTS : rumah tangga, bangunan industri, bangunan usaha, bangunan fasilitas umum, perkantoran Potensi lokasi : seluruh kecamatan dan khusus untuk permukiman pada Desa di Kawasan Taman Nasional
ENERGI AIR berupa Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Air/Mikrohidro (PLTMH)	Tenaga air menghasilkan sekitar 70% dari sumber terbarukan global untuk pembangkit listrik. Potensi pada lokasi Bendungan, sungai Tidak prioritas untuk dikembangkan dikarenakan minim potensi air pada wilayah dan harus bekerjasama dengan pihak swasta dalam pengembangan
ENERGI ANGIN berupa Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)	Ketersediaan data potensi angin dengan kecepatan rata-rata tahunan minimum 4 m/dt pada ketinggian 50 m secara kontinu pada periode 1 tahun Bukan berada pada lokasi lindung dan sesuai dengan peraturan Pemerintah bersedia menyediakan lahan yang dibutuhkan Tidak diprioritaskan pengembangannya di Kabupaten Kotawaringin Barat
ENERGI SAMPAH berupa Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTsa)	Potensi pengembangan PLTsa : pada area permukiman sekitar TPA di Kec. Arut Selatan Potensi bekerjasama dengan pihak swasta dan PLN dalam pengembangan jaringan
BIOMASSA berupa Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBM)	Biomassa dengan pengolahan sampah menjadi PLTsa Potensi Limbah : limbah ternak dan kelapa sawit

Sumber: Kajian Energi Berkelanjutan di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023

B. Jaringan Jalan

Sistem jaringan jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri atas jaringan arteri primer, jaringan jalan kolektor primer, jaringan jalan lokal primer, jaringan jalan lokal sekunder, dan jalan lingkungan. Ruas jaringan jalan yang melalui Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 36 Ruas Jaringan Jalan yang Melalui Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Fungsi	Nama Ruas
A.	JALAN ARTERI PRIMER (Jalan Lintas Kalimantan Poros Selatan)	
1.	Jalan Arteri Primer	Kujan – Runtu
2.	Jalan Arteri Primer	Runtu – Simp. Runtu
3.	Jalan Arteri Primer	Bts. Kota Pangkalan Bun – P. Lada
4.	Jalan Arteri Primer	Jln. A. Yani (Pangkalan Bun)
5.	Jalan Arteri Primer	Jln. Pakunegara (Pangkalan Bun)
6.	Jalan Arteri Primer	P. Lada – Asam Baru
B.	JALAN KOLEKTOR PRIMER K1 (Jalan Penghubung Antara Jalan Lintas Kalimantan)	
1.	Jalan Kolektor Primer 1	Jln. Iskandar (Pangkalan Bun)
2.	Jalan Kolektor Primer 1	Jln. Diponegoro (Pangkalan Bun) – Kumai – Batas Kota Pangkalan Bun
C.	JALAN KOLEKTOR PRIMER K2	
1.	Jalan Kolektor Primer 2	Jln. Pangkalan Bun – Kumai – Teluk Bogam
2.	Jalan Kolektor Primer 2	Jln. Teluk Bogam - Sebuai

No.	Fungsi	Nama Ruas
D.	JALAN KOLEKTOR PRIMER K3	
1.	Jalan Kolektor Primer 3	Pangkalan Bun – Kotawaringin Lama – Riam Durian
2.	Jalan Kolektor Primer 3	Pangkalan Bun – Seberang Gajah – Lunci – Kuala Jelai
3.	Jalan Kolektor Primer 3	Sei Kalap – Sei Rangit – Pelabuhan Bumi Hardjo
4.	Jalan Kolektor Primer 3	Sp. Penopa – Riam Durian – Sukamara
5.	Jalan Kolektor Primer 3	Bumi Harjo – Pelabuhan CPO
6.	Jalan Kolektor Primer 3	Natai Raya – Kumai
7.	Jalan Kolektor Primer 3	Sungai Kapitan – Kubu
8.	Jalan Kolektor Primer 3	Semanggang – Pangkut – Sungai Dau – Batas Seruyan
9.	Jalan Kolektor Primer 3	Jln. Iskandar – Bandar Udara Iskandar
10.	Jalan Kolektor Primer 3	Jln. Iskandar – Sungai Tendang
11.	Jalan Kolektor Primer 3	Jln. Purbasari– Pelabuhan Roro –Kumai
12.	Jalan Kolektor Primer 3	Jln. Pangkalan Banteng – Sungai Bedaun – Kumai Sebrang
13.	Jalan Kolektor Primer 3	Jln. Simpang Kotawaringin lama/Pangkalan Bun – Simpang Runtu
14.	Jalan Kolektor Primer 3	Jln. Palih Baru – Kondang – Rungun – Lalang
15.	Jalan Kolektor Primer 3	Jln. Kumpai Batu-Tanjung Puteri-Sebuai
16.	Jalan Kolektor Primer 3	Jln. Pangkalan Bun - Pangkut
E.	JALAN LOKAL PRIMER	
	Kecamatan Arut Selatan	
1.	Jalan Lokal Primer	Jl. Jenderal Sudirman
2.	Jalan Lokal Primer	Sidorejo - Kumpai Batu Bawah
3.	Jalan Lokal Primer	Kumpai Batu Bawah - Tanjung Terantang
4.	Jalan Lokal Primer	Tanjung Terantang - Tanjung Putri
5.	Jalan Lokal Primer	Tanjung Putri - Batas Sebuai Barat
6.	Jalan Lokal Primer	Pasir Panjang - Kumpai Batu Atas - Kumpai Batu Bawah
7.	Jalan Lokal Primer	Jl. HM. Rafi'i
8.	Jalan Lokal Primer	Jl. Bhayangkara
9.	Jalan Lokal Primer	Jl. Ahmad Wongso - Jl. Pramuka
10.	Jalan Lokal Primer	Jl. Sutan Syahrir
11.	Jalan Lokal Primer	Jl. Hasanudin
12.	Jalan Lokal Primer	Jl. PRA. Kesumayuda
13.	Jalan Lokal Primer	Jl. Kawitan
14.	Jalan Lokal Primer	Jl. PKGB. 2
15.	Jalan Lokal Primer	Jl. Pangeran Antasari
16.	Jalan Lokal Primer	Jl. Sukma Aryaningrat
17.	Jalan Lokal Primer	Jl. Udan Said
18.	Jalan Lokal Primer	Jl. GM. Arsyad
19.	Jalan Lokal Primer	Jl. Matnoor
20.	Jalan Lokal Primer	Jl. Simpang Natai Baru - Batas Kadipi Atas
21.	Jalan Lokal Primer	Jl. Dermaga Medang Sari - Batas Kadipi Atas
22.	Jalan Lokal Primer	Jl. Sp. Runtu - Batas Runtu GSDI
23.	Jalan Lokal Primer	Jl. Bukit Sintang - Sulung Kenambui
24.	Jalan Lokal Primer	Jl. Umpang - Simpang Tiga GSDI + Sp. Pangkut
	Kecamatan Arut Utara	
1.	Jalan Lokal Primer	Jl. Pangkut (Maslubih Siak) - Simpang Tiga GSDI+Sp.Umpang
2.	Jalan Lokal Primer	Jl. Sp. Pangkut/SMAN Pangkut - Sp. Sukarami
3.	Jalan Lokal Primer	Jl. Sp. Sukarami – Gandis
4.	Jalan Lokal Primer	Jl. Sp. Gandis – Kerabu
5.	Jalan Lokal Primer	Jl. Sp. Kerabu – Penyombaan
6.	Jalan Lokal Primer	Jl. Sp. Penyombaan – Pandau
7.	Jalan Lokal Primer	Jl. Sp. Pandau – Riam
8.	Jalan Lokal Primer	Jl. Riam – Penahan
9.	Jalan Lokal Primer	Jl. Sp. Penyombaan - Sambi - Simpang Salip

No.	Fungsi	Nama Ruas
10.	Jalan Lokal Primer	Jl. Sp. Salip - Sei Dau
11.	Jalan Lokal Primer	Jl. Pangkut/Bagimang Panji - Aspec Paper
Kecamatan Kumai		
1.	Jalan Lokal Primer	Teluk Bogam - Keraya - Sebuai Timur - Sebuai - Batas Tanjung Putri
2.	Jalan Lokal Primer	Jl. Pemuda
3.	Jalan Lokal Primer	Jl. Kumai Hulu - Sp. Pelabuhan Roro
4.	Jalan Lokal Primer	Jl. Sungai Tendang - Pangkalan Satu
5.	Jalan Lokal Primer	Jl. Sp. Bumi Harjo - Pangkalan Satu
6.	Jalan Lokal Primer	Jl. Sp. Natai Raya - Pelabuhan Roro
7.	Jalan Lokal Primer	Jl. PKGB. 5
8.	Jalan Lokal Primer	Jl. Kumai Hilir - Terminal Sei Kapitan
9.	Jalan Lokal Primer	Jl. Kumai Seberang - Sungai Bedaun
10.	Jalan Lokal Primer	Jl. Sungai Bedaun - Batas Sungai Pulau
11.	Jalan Lokal Primer	Jl. Kumai/Gerilya - Sungai Tendang
12.	Jalan Lokal Primer	Jl. Bendahara
13.	Jalan Lokal Primer	Jl. Bahari
Kecamatan Kotawaringin Lama		
1.	Jalan Lokal Primer	Sp. Danau Gatal – Lalang
2.	Jalan Lokal Primer	Sp. Diung - Danau Gatal
3.	Jalan Lokal Primer	Sp. Lalang – Rungun
4.	Jalan Lokal Primer	Rungun - Kondang - Batas Lamanadau
5.	Jalan Lokal Primer	Jl. Tempayung - Sumber Mukti
6.	Jalan Lokal Primer	Jl. Riam Durian - Dawak - Suka Jaya
Kecamatan Pangkalan Lada		
1.	Jalan Lokal Primer	Jl. Purbasari - Pangkalan Durin - Sungai Rangit Jaya
2.	Jalan Lokal Primer	Jl. Sungai Melawen - Lada Mandala Jaya - Pandu Sanjaya
3.	Jalan Lokal Primer	Jl. Sp. Kadipi Atas - Makarti Jaya
4.	Jalan Lokal Primer	Jl. Sp. Kadipi Atas - Batas Medang Sari
5.	Jalan Lokal Primer	Jl. Sp. Kadipi Atas - Batas Natai Baru
6.	Jalan Lokal Primer	Jl. Pangkalan Dewa - Pelabuhan Teluk Dewa
Kecamatan Pangkalan Banteng		
1.	Jalan Lokal Primer	Jl. Batas Runtu GSDI - Sungai Bengkuang
2.	Jalan Lokal Primer	Jl. Sungai Bengkuang - Sido Mulyo – Semanggang
3.	Jalan Lokal Primer	Jalan Negara KM.53 - Sungai Bengkuang
4.	Jalan Lokal Primer	Jl. Sido Mulya - Sungai Kuning
5.	Jalan Lokal Primer	Jl. Kebon Agung - Sungai Pakit - Sp.Amin Jaya
6.	Jalan Lokal Primer	Jl. Kebon Agung - Simpang Pangkut (GSDI)
7.	Jalan Lokal Primer	Jl. Simpang Dinamika - Pangkalan Banteng
8.	Jalan Lokal Primer	Jl. Simpang Berambai - Natai Kerbau - Mulya Jadi
9.	Jalan Lokal Primer	Jl. Mulya Jadi - Sungai Pulau - Batas Sungai Bedaun
10.	Jalan Lokal Primer	Pangkalan Banteng – sungai bedaun – trans UPT Kumai Seberang
E. JALAN LOKAL SEKUNDER		
Kecamatan Arut Selatan		
1.	Jalan Lokal Sekunder	Kumpai Batu Atas - Kumpai Batu Bawah/Hasanudin
2.	Jalan Lokal Sekunder	Kumpai Batu Atas - Kumpai Batu Bawah/Parit Serong
3.	Jalan Lokal Sekunder	Pasir Panjang - Kumpai Batu Atas - Dukuh Mola
4.	Jalan Lokal Sekunder	Kumpai Batu Atas - Batas Pasir Panjang - Sebuai Barat
5.	Jalan Lokal Sekunder	Kumpai Batu Atas - Karang Anyar
6.	Jalan Lokal Sekunder	Pasir Panjang - Dukuh Mola
7.	Jalan Lokal Sekunder	Pinang Merah – Stadion
8.	Jalan Lokal Sekunder	Stadion - Jl. Hasan Surin
9.	Jalan Lokal Sekunder	Stadion - Cilik Riwut 2
10.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Samari - Stadion - Pinang Merah

No.	Fungsi	Nama Ruas
11.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Pelita
12.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Palagan Sambu
13.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Lijo
14.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Mangga 1
15.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Mangga 2
16.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Salak
17.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. LKMD 2
18.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Pancasila
19.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Yuka / Maid Badir
20.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. H. Mustalim
21.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Delima
22.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Cilik Riwut 4 / Jl. Pemuda
23.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Cilik Riwut 3
24.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Cilik Riwut 2
25.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Cilik Riwut 1
26.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Abdul Ancis
27.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Seroja
28.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Perwira
29.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Edy Suwargono
30.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sultan Imanudin
31.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sudirman. SH
32.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. PKGB. 1
33.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Kasanrejo 1 - SMU 3
34.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Kasanrejo 2
35.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Camar
36.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Rajawali
37.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Zebra
38.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Domba - Jl. Abd. Mahmud
39.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. DAH. Hamzah
40.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Alipandi Sarjan
41.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Abdul Syukur
42.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. H. Mu'an
43.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sembaga Mas - Jl. Mawar
44.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Rangka Santrek
45.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Blimbing Manis
46.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Pasar Saik
47.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Ki Patih Surodilogo
48.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Pangeran Adipati
49.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. R. Mangku
50.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. PKGB. 3
51.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Asam Bubuk
52.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Damai
53.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. H. Kaderi Udan
54.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Kadaiut 2
55.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Lapangan Tugu
56.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Matnoor 1
57.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Brunai - Jl. Belida
58.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Tengadak - Jl. Tebengalan
59.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Padat Karya 1
60.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. M. Idris
61.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Warna Agung
62.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Masjid Al-Hikmah
63.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. J. Lubut

No.	Fungsi	Nama Ruas
64.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Rarait 3
65.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Dermawan
66.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Rarait 9
67.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Baru - Pangkalan Bungur
68.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Tumenggung Cikranegara
69.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Rarait 9 - SLTP 6
70.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Saefudin Kusasi - SLTP 6
71.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Runtu
72.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Patung
73.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Kopong SLTP 6 - Sungai Tatas
74.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sungai Tatas
75.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Desa Runtu
76.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Natai Raya 1
77.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Natai Raya 2
78.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Natai Raya 3
79.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Pabrik Jagung
	Kecamatan Arut Utara	
1.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Tumenggung Kubu - Macan Tali
2.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Tumenggung Kubu 1
3.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Hendrik Dingan
4.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Naun Silih
5.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Riak Sawa
6.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Eden Jeha
7.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Tiupilus Umar
8.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Manjung H
9.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sp. Pangkut/Durian Tunggal - Jl. Sinapati Mamang Sukarami
10.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sp. Aspec Paper - Nanga Mua
11.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sp. Pangkut / PBNA - Batas Amin Jaya/BJAP
12.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sp. Salip - Batas Amin Jaya/BJAP
13.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Bukit Naning - Batas Amin Jaya/Parit Cina
14.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Manjung H1
15.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Balai Antang
	Kecamatan Kumai	
1.	Jalan Lokal Sekunder	Sebuai - Batas Pasir PanjangJl. Pemuda
2.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Natai Tiwadak – Pemancingan
3.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. HM. Idris - Al Huda
4.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Marundau
5.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Masjid
6.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. H. Abdul Azis
7.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Pelita
8.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. An Noor
9.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sirajul Huda - Jl. Pemuda
10.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Nangka - Sp. Pelabuhan Roro
11.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Ampu Candi - Sei Tendang
12.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Berdikari - Jl. Bina Jadi
13.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Meden
14.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sp. Pelabuhan CPO - Pelabuhan Roro
15.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Angkatan Muda
16.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Abd. Hamid - Jl. Pemilu
17.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. HM. Taher
18.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. MIN Kumai Hilir / Jl. Berlian
19.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Rahmat - PKGB 5
20.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Keramat

No.	Fungsi	Nama Ruas
21.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Paigo – Pertamina
22.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Rungun – PLTU
23.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. DPRD
24.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. DPRD 1
25.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Nangka Batu Belaman
26.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Batu Belaman - Sungai Tendang
27.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Batu Belaman - Pabrik Jagung
28.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Pare-Pare
29.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sungai Bedaun - Sungai Sekonyer
30.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Natai Mamis - Tanjung Harapan
31.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Tanjung Harapan - Teluk Pulau - Sei Cabang
32.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sei Cabang - Teluk Ranggau
33.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. DPRD 2 - Sungai Tendang
34.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Bahari Sungai Tendang
Kecamatan Kotawaringin Lama		
1.	Jalan Lokal Sekunder	Sp. Diung – Kinjil
2.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sakabulin - Batas Sukaraja
3.	Jalan Lokal Sekunder	Tempayung - Baboti – Babual
4.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Makarti Jaya - Sp.Suka Jaya
5.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sp.Despot - Sp.Kinjil +Sakabulin
6.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Dawak - Sp. R. Durian+Sagu
7.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sagu Suka Mulya - Batas Pangkalan Muntai
8.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Cilik Riwut 7
9.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Merdeka - Jl. Nasional - Jl. Danau
10.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. P. Suryariansyah
11.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Pangkalan Muntai
12.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Padat Karya
13.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Beji
14.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Pelabuhan
15.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Beringin
16.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. ASDP
17.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Padat Karya 1
18.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. ASDP 1
Kecamatan Pangkalan Lada		
1.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Beringin Sungai Rangit Jaya Kecamatan Pangkalan Banteng
2.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sungai Rangit Jaya - Sungai Melawen
3.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sungai Melawen - Sp. Runtu
4.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Pangkalan Dewa - Sungai Biru
5.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Pangkalan Tiga - Batas Sungai Bengkuang (GSDI)
6.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Pangkalan Tiga - Dermaga Pangkalan Tiga
7.	Jalan Lokal Sekunder	Purba Sari - SMA 2 Bumi Harjo
8.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Banteng Sumber Agung
9.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Patimura - Jl. Renggam SMK 1 Sumber Agung
10.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sungai Rangit Jaya - Pangkalan Durin
Kecamatan Pangkalan Banteng		
1.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Semanggung - Pangkalan Getah
2.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Batas Pangkalan Tiga - Sp. GSDI
3.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Simpang GSDI - Simpang Tiga GSDI+Sp.Umpang+Sp.Pangkut
4.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Simpang Arga Mulya - Simpang Kebon Agung
5.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Simpang Desa 7 - Arga Mulya
6.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Simpang Amin Jaya - Batas Arut Utara (BJAP)
7.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Simpang Amin Jaya 1 - Batas Arut Utara (BJAP)
8.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Simpang Amin Jaya 2 - Batas Arut Utara (Parit Cina)

No.	Fungsi	Nama Ruas
9.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Simpang Margo Mulyo
10.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Mulya Jadi - Pelabuhan Karang Sari
11.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Simpang Karang Sari
12.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Simpang Natai Kerbau
13.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Karang Mulya - Sungai Hijau
14.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Karang Mulya Baru - Sungai Hijau
15.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Karang Mulya - Amin Jaya
F.	JALAN KHUSUS	
1.	Jalan Khusus	Main road timur/ruas A (Nanga Mua – Semanggang)
2.	Jalan Khusus	Main road barat/ruas B (Rangda – Sei Rangit Jaya)
3.	Jalan Khusus	Ruas C (Semanggang – Pabrik Pulp)
4.	Jalan Khusus	Jalan penghubung main road timur dan barat: a. Ruas E (Semanggang – Sei Rangit Jaya) b. Ruas F (Sei Rangit Jaya – Bumi Harjo) c. Ruas A (Jalan masuk dari Seruyan)

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Kotawaringin Barat 2022

Panjang jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat sepanjang 3.108,68 km, dengan kewenangan nasional/negara sepanjang 156,90 km, kewenangan Provinsi sepanjang 56,500 km, kewenangan Kabupaten sepanjang 2.017,630, kewenangan Desa sepanjang 1.034,55 km.

Kondisi kualitas jaringan jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari kondisi jalan baik sepanjang 1.098,676 km, kondisi sedang sepanjang 12.845,559 km, kondisi rusak sebesar 377,338 km, kondisi rusak berat sebesar 314,356 km. Berikut lebih detailnya.

Tabel 3. 37 Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kabupaten Kotawaringin Barat (Km), 2021-2023

Tingkat Kewenangan Pemerintahan	2021	2022	2023
Negara	156,960	156,960	NA
Provinsi	96,420	96,420	56,500
Kabupaten/ Kota	2.017,411	2.017,411	2.017,630
Desa	1.034,550	1.034,550	1.034,550
Khusus	11.374,499	NA	NA
- Industri	243,00	NA	NA
- Perusahaan	11.131,499	NA	NA
Jumlah	14.635,499	3.301,709	3.108,68

Sumber : BPS-Kabupaten dalam Angka, 2024

Tabel 3. 38 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan dan Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023

Tingkat Kewenangan Pemerintahan	Kondisi Jalan				Jumlah
	Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat	
Negara	149,76	7,2	-	-	156,96
Provinsi	42,470	3,020	5,93	3,98	96,42
Kabupaten	865,426	458,09	371,408	310,376	2.005,30
Desa	-	1.002,75	-	-	1.002,75
Khusus	NA	NA	NA	NA	NA
Kotawaringin Barat	1.098,676	12.845,559	377,338	314,356	14.635,929

Sumber : BPS-Kabupaten dalam Angka, 2024 – Dinas PUPR

C. Sistem Penyediaan Air Minum

Untuk memenuhi kebutuhan air minum penduduk di Kabupaten Kotawaringin Barat biasanya menggunakan air tanah, air sungai, mata air dan air hujan. Potensi air baku air minum terbesar adalah air sungai. Air sungai selain sebagai urat nadi transportasi berpotensi untuk air baku air minum. Air tanah yang diambil melalui sumur gali, sumur pompa tangan, dan pompa listrik, masih potensi digunakan oleh warga. Potensi air tanah di Kabupaten Kotawaringin Barat dipasok dari dua jenis akuifer yaitu akuifer ruang antar butir dan rekahan. Air tanah bebas yang biasa dikonsumsi dengan sumur gali dan sumur pantek dengan kedalaman antar 1-6 m, bersifat asam, dengan pH < 6. Wilayah ini tersebar pada dataran Pangkalan Bun, Sidorejo, dan Kumai. Berdasarkan peta geohidrologi akuifer, produktivitas kecil berada di wilayah utara (Kecamatan Arut Utara) dan yang produktif di wilayah selatan. Wilayah akuifer produktif dengan kategori sedang ada di sekitar Pangkalan Bun dan Kumai. Air tanah masih menjadi andalan karena jangkauan pelayanan PDAM masih sulit untuk wilayah yang belum berkembang.

Dalam dokumen RISPAM disebutkan bahwa status capaian kinerja pelayanan air minum Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2014 adalah 70% rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak (Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014). Akses air minum perpipaan di Kabupaten Kotawaringin Barat tercatat untuk daerah perkotaan mencapai 38,49% dan di wilayah perdesaan mencapai 31,51%. Target cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan di Kabupaten Kotawaringin Barat sampai tahun 2014 tercatat 75,80%.

Peningkatan cakupan air minum di wilayah perkotaan disediakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang pelayanan air minum/ bersih. PDAM Tirta Arut Kotawaringin Barat memberikan pelayanan air bersih di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan jumlah pelanggan sampai dengan akhir tahun 2023 adalah sebanyak 26.352 pelanggan dan air disalurkan sebesar 6.475.567 m³. Perkembangan atau penambahan pelanggan/ Sumbangan Rumah dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan yang signifikan.

Tabel 3. 39 Jumlah Pelanggan, Air yang Disalurkan, dan Nilai Air yang Disalurkan di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023

Jenis Konsumen	Pelanggan	Air Disalurkan (m3)	Nilai Air Disalurkan (Rp)
Sosial			
Umum	21	14.275	34.214.000
Khusus	211	130.487	327.097.200
Non Niaga			
Rumah Tangga	22.665	4.929.425	24.381.179.950
Instansi Pemerintah	161	52.778	363.627.700
Niaga			
Kecil	2.867	757.325	5.017.081.950
Besar	176	67.009	596.575.950
Industri			
Kecil	2	304	1.925.200
Besar	-	-	-
Khusus			

Jenis Konsumen	Pelanggan	Air Disalurkan (m ³)	Nilai Air Disalurkan (Rp)
Pelabuhan	4	17.788	444.700.000
Lainnya	245	94.955	228.071.000
Susut/ Hilang	-	411.121	1.619.101
Jumlah	26.352	6.475.567	31.396.092.051

Sumber : BPS-Kabupaten dalam Angka, 2024- PDAM

Tabel 3. 40 Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan PDAM Kotawaringin Barat 2017-2021

Tahun	Pelanggan	Air Disalurkan (m ³)	Nilai (Rp)
2017	19.488	4.158.990	17.446.139.000
2018	21.592	4.745.778	19.707.293.000
2019	23.084	6.378.329	40.557.966.000
2020	23.657	5.224.873	26.269.360.950
2021	24.833	5.703.610	28.136.872.400
2022	26.352	6.475.567	31.396.092.051

Sumber: PDAM Kabupaten Kotawaringin Barat 2018-2023

Kualitas air selalu di bawah pengawasan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat sehingga aman untuk konsumen karena memenuhi baku mutu standard kualitas air minum dari Kementerian Kesehatan sebagaimana Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010. Untuk melayani seluruh pelanggan yang ada saat ini PDAM Kabupaten Kotawaringin Barat memanfaatkan mata air dan air permukaan sungai dalam sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 41 Kapasitas dan Sumber Air Baku PDAM Kabupaten Kotawaringin Barat

Unit	Kapasitas Terpasang (Liter/ Detik)	Kapasitas Produksi (Liter/ Detik)	Kapasitas Distribusi (Liter/ Detik)	Kapasitas Air Terjual (Liter/ Detik)	Kapasitas Belum Terpakai (Liter/ Detik)	Sumbangan Rumah (Unit)	Sumber Air Baku
Pangkalan Bun	155	155	155,00	140,00	0	13.029	Sungai Arut
Kumai	20	20	20,00	17,00	0	1.535	Sungai Arut
Mendawai Sebrang	5	5	5,00	5,00	0	647	Sungai Arut
Kota Waringin Lama	5	5	5,00	5,00	0	557	Sungai Lamandau
Kumpai Batu	15	15	15,00	15,00	0	1.442	Sumber Air
Kubu	5	5	5,00	4,03	0	750	Sungai Pemancingan
Pangkalan Banteng	35	25	18,00	16,00	10	2.991	Sungai Hijau
Pangkalan Lada	25	15	15,00	12,00	10	2.329	Sungai Hijau
IKK Pangkut Arut Utara	10	10	10,00	8,00	0	557	Sungai Arut
Total	275	255	248,00	222,03	20	23.837	

Sumber: PDAM Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023

D. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)

1) Air Limbah Domestik

Air limbah domestik adalah air limbah permukiman (municipial waste water) yang terdiri dari black water yaitu air limbah domestik (rumah tangga) yang berasal dari tinja manusia, urine, air pembersih, air pengelontor dan kertas pembersih serta grey water yaitu air limbah domestik yang berasal dari air cucian dapur dan cucian pakaian. Pengolahan air limbah domestik dengan SPALDS skala individual sistem (On-site System) banyak dijumpai di perkotaan Kabupaten Kotawaringin Barat. Adapun teknologi atau pengolahan yang dipakai pada On-site system ini adalah jamban yang biasanya dibangun di masing-masing rumah atau di tempat-tempat tertentu dan dipakai secara bersama atau kolektif untuk beberapa rumah tangga. Penyediaan jamban ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya faktor ekonomi dan ketersediaan lahan.

Tingkat ekonomi penduduk sedang dan tinggi mampu untuk membuat toilet yang memenuhi syarat di rumah masing-masing, sedangkan untuk masyarakat dengan penghasilan sedikit/rendah biasanya tidak bisa membuat jamban sendiri tetapi mereka mendapatkan fasilitas berupa jamban secara kolektif. Pada kenyataannya sampai saat ini masih sering dijumpai masyarakat ekonomi lemah yang memanfaatkan sungai sebagai tempat mandi dan buang air besar atau pekarangan belakang rumah. Hal ini yang masih dijumpai pada masyarakat di pedesaan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Sistem infrastruktur air limbah domestik Kabupaten Kotawaringin Barat berupa Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat (SPALDS) tergambar dalam tabel berikut.

Tabel 3. 42 Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Infrastruktur SPALDS	Sumber Dana	Tahun Pembangunan	Lokasi	Cakupan Layanan
1.	Septictank komunal + SR	APBD	2016	Ds. Batu Belaman	5 KK
2.	Tanki Septick Individual	APBD + HIBAH	2017-2018	Kel. Kumai Hilir	73 KK
3.	Tanki Septick Individual	APBD + HIBAH	2017-2018	Kel. Kumai Hulu	78 KK
4.	Tanki Septick Individual	APBD + HIBAH	2017	Kel. Candi	16 KK
5.	Tanki Septick Individual	APBD + HIBAH	2017-2018	Kel. Mendawai	71 KK
6.	Tanki Septick Individual	APBD + HIBAH	2017-2018	Kel. Baru	78 KK
7.	Tanki Septick Individual	APBD + HIBAH	2018	Kel. Raja	28 KK
8.	Tanki Septick Individual	APBD + HIBAH	2018	Kel. Madurejo	28 KK
9.	Tanki Septick Individual	APBD + HIBAH	2018	Kel. Sidorejo	28 KK
10.	Tanki Septick Individual	DAK	2018	Ds. Amin Jaya	80 KK
11.	Tanki Septick Individual	DAK	2018	Ds. Pangkalan Banteng	50 KK
12.	Tanki Septick Individual	DAK	2018	Ds. Pandu Sanjaya	75 KK
13.	Tanki Septick Individual	DAK	2018	Ds. Purba Sari	50 KK
14.	Tanki Septick Individual	DAK	2018	Ds. Kadipi Atas	50 KK
15.	Tanki Septick Individual	DAK	2018	Ds. Sungai Melawen	50 KK
16.	Tanki Septick Individual	DAK	2018	Ds. Karang Mulya	80 KK
17.	Tanki Septick Individual	DAK	2018	Ds. Natai Kerbau	85 KK
18.	Tanki Septick Individual	DAK	2018	Ds. Sumber Agung	50 KK
19.	Tanki Septick Individual	DAK	2018	Ds. Sei Rangit Jaya	50 KK
20.	Tanki Septick Individual	DAK	2018	Ds. Pangkalan Tiga	50 KK
21.	Tanki Septick Individual	DAK	2018	Ds. Lada Mandala Jaya	75 KK

No.	Infrastruktur SPALDS	Sumber Dana	Tahun Pembangunan	Lokasi	Cakupan Layanan
22.	Tanki Septick Individual	DAK	2018	Ds. Pangkalan Durin	75 KK
23.	Tanki Septick Individual	DAK	2018	Ds. Pangkalan Dewa	75 KK
24.	Tanki Septick Individual	DAK	2018	Ds. Kebun Agung	70 KK
25.	Tanki Septick Individual	DAK	2018	Ds. Sidomulyo	75 KK
26.	Tanki Septick Individual	DAK	2018	Ds. Arga Mulya	50 KK
27.	Tanki Septick Individual	DAK	2018	Ds. Mulya Jadi	50 KK
28.	Tanki Septick Individual	APBD + HIBAH	2019	Kel. Baru dan Kel. Madurejo	40 KK
29.	Tanki Septick Individual	APBD + HIBAH	2019	Kel. Mendawai dan Kel. Madurejo	40 KK
30.	Tanki Septick Individual	APBD + HIBAH	2019	Kel. Kumai Hilir dan Kel. Kumai Hulu	40 KK
31.	Tanki Septick Individual	DAK	2019	Ds. Marga Mulya	50 KK
32.	Tanki Septick Individual	DAK	2019	Ds. Sungai Hijau	50 KK
33.	Tanki Septick Individual	DAK	2019	Ds. Simpang Berambai	50 KK
34.	Tanki Septick Individual	DAK	2019	Ds. Makarti Jaya	50 KK
35.	Tanki Septick Individual	DAK	2019	Ds. Keraya	50 KK
36.	Tanki Septick Individual	DAK	2019	Ds. Sei Bakau	50 KK
37.	Tanki Septick Individual	DAK	2019	Ds. Teluk Bogam	50 KK
38.	Tanki Septick Individual	DAK	2019	Ds. Natai Raya	50 KK
39.	Tanki Septick Individual	DAK	2020	Ds. Purbasari	68 KK
40.	Tanki Septick Individual	DAK	2020	Ds. Bumi Harjo	112 KK
41.	Tanki Septick Individual	DAK	2020	Ds. Sungai Bengkuang	63 KK
42.	Tanki Septick Individual	DAK	2020	Ds. Sungai Pakit	63 KK
43.	Tanki Septick Individual	DAK	2020	Ds. Sungai Pulau	63 KK
44.	Tanki Septick Individual	DAK	2020	Ds. Berambai Makmur	63 KK
45.	Tanki Septick Individual	DAK	2020	Ds. Sungai Kuning	63 KK
46.	Tanki Septick Individual	DAK	2020	Ds. Karang Sari	63 KK
47.	Tanki Septick Individual	DAK	2020	Ds. Sidomulyo	68 KK
48.	Tanki Septick Individual	DAK	2020	Ds. Kebun Agung	68 KK
49.	Tanki Septick Individual	APBD	2021	Kel. Baru	25 KK
50.	Tanki Septick Individual	APBD	2021	Kel. Raja Seberang	25 KK
51.	Tanki Septick Individual	APBD	2021	Kel. Mendawai	25 KK
52.	Tanki Septick Individual	APBD	2021	Kel. Mendawai Seberang	25 KK
53.	Tanki Septick Individual	APBD	2021	Kel. Raja	25 KK
54.	Tanki Septick Individual	DAK	2021	Ds. Bumi Harjo	56 KK
55.	Tanki Septick Individual	DAK	2021	Ds. Kumpai Batu Atas	46 KK
56.	Tanki Septick Individual	DAK	2021	Ds. Natai Baru	46 KK
57.	Tanki Septick Individual	DAK	2021	Ds. Natai Raya	46 KK
58.	Tanki Septick Individual	DAK	2021	Ds. Pangkalan Satu	51 KK
59.	Tanki Septick Individual	DAK	2021	Ds. Sungai Tendang	53 KK
TOTAL					3.182 KK

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Kotawaringin Barat, 2022

Rekapitulasi akses air limbah domestik dan SPALDS Sub Sistem Pengolahan Setempat (Instrumen SSK tahun 2020, Dinas PU) dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 3. 43 Akses Air Limbah Domestik di Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Sistem	Cakupan Layanan Eksisting (%)
	Wilayah Perkotaan	
A	Akses Aman	1,57%

No.	Sistem	Cakupan Layanan Eksisting (%)
B	Akses Layak (Tidak Termasuk Akses Aman)	
	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Akses Aman)	31,60%
	Akses Layak Bersama	1,20%
C	Akses Belum Layak (BABS Tertutup)	1,60%
D	BABS di Tempat Terbuka	8,00%
Wilayah Perdesaan		
A	Akses Aman	2,06%
B	Akses Layak (Tidak Termasuk Akses Aman)	
	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Akses Aman)	39,60%
	Akses Layak Bersama	3,00%
	Akses Layak Khusus Perdesaan (Leher Angsa – Cubluk)	7,30%
C	Akses Belum Layak (BABS Tertutup)	1,50%
D	BABS di Tempat Terbuka	2%

Sumber: Instrumen SSK 2020

Tabel 3. 44 SPALDS Sub Sistem Pengolahan Setempat

No.	Sistem	Cakupan Layanan Eksisting (%)
1.	Aman	
	Persentase RT menggunakan tangki septik individual aman (yang pernah disedot dan dibuang ke IPLT)	1,03%
	Persentase RT menggunakan tangki septik komunal aman (yang pernah disedot dan dibuang ke IPLT)	1,36%
2.	Layak	
	Persentase RT menggunakan jamban bersama/MCK	2,04%
	Persentase RT terkoneksi ke tangki septik (komunal atau individu) layak	35,55%
3.	Persentase RT menggunakan fasilitas yang belum layak	
4.	Persentase RT yang BABS terselubung	
5.	Persentase RT yang BABS di tempat terbuka	4,89%

Sumber: Instrumen SSK 2020

Selain SPALDS, Kabupaten Kotawaringin Barat juga memiliki sistem pengelolaan limbah terpusat atau Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPALDT) yang terkonsentrasi di Kecamatan Arut Selatan dan Kecamatan Kumai, digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel 3. 45 Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Infrastruktur SPALDT	Sumber Dana	Tahun Pembangunan	Lokasi	Kapasitas	Cakupan Layanan
IPLT						
1.	IPLT Translik	APBN	2014	Ds. Pasir Panjang	28 m ³ /hari	2 Kecamatan
IPAL						
1.	IPAL Komunal + SR	APBN + DAK	2013/2014	Ds. Pasir Panjang	200 KK	200 SR
2.	IPAL Komunal + SR	DAK	2017	Kel. Raja Seberang	50 KK	35 SR
3.	IPAL Komunal (sanimas) + SR	APBN	2017-2020	Kel. Raja Seberang	50 KK	34 SR
4.	IPAL Kombinasi MCK + SR	DAK	2017-2018	Kel. Mendawai Seberang	50 KK	45 SR

No.	Infrastruktur SPALDT	Sumber Dana	Tahun Pembangunan	Lokasi	Kapasitas	Cakupan Layanan
5.	IPAL Komunal 1 + SR	DAK	2017	Kel. Kumai Hilir	50 KK	25 SR
6.	IPAL Komunal 2 + SR	DAK	2017	Kel. Kumai Hilir	50 KK	30 SR
7.	IPAL Komunal 1 + SR	DAK	2017-2018	Kel. Baru	100 KK	88 SR
8.	IPAL Komunal + SR (Griya Citra)	DAK	2018	Ds. Batu Belaman	50 KK	36 SR
9.	IPAL Komunal + SR (Arut Sehat)	DAK	2018	Kel. Madurejo	50 KK	30 SR
10.	IPAL Komunal 2 + SR (Buun Indah)	DAK	2018	Kel. Baru	50 KK	33 SR
11.	IPAL Komunal 2 + SR (Itah Bersama)	DAK	2018	Kel. Mendawai Seberang	50 KK	50 SR
12.	IPAL Komunal + SR (Kumai Hulu)	DAK	2019	Kel. Kumai Hulu	50 KK	45 SR
13.	IPAL Komunal 3 + SR (Mendawai Seberang)	DAK	2019-2020	Kel. Mendawai Seberang	100 KK	100 SR
14.	IPAL Komunal 2 + SR (Raja Seberang)	DAK	2019	Kel. Raja Seberang	50 KK	30 SR
15.	IPAL Komunal 4 + SR (Mendawai Seberang)	DAK	2020	Kel. Mendawai Seberang	50 KK	47 SR
16.	IPAL Komunal 3 + SR (Raja Seberang)	DAK	2020	Kel. Raja Seberang	50 KK	30 SR
17.	IPAL Komunal 2 + SR (Kumai Hulu)	DAK	2020	kel. Kumai Hulu	50 KK	35 SR
TOTAL					1.100 KK	893 SR

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Kotawaringin Barat, 2022

Sarana pembuangan air limbah domestik di Kabupaten Kotawaringin Barat meliputi cubluk/jamban tidak aman, cubluk dengan septiktank, WC jongkok maupun duduk dengan tangki septik aman dan tidak aman, jamban bersama, MCK komunal. MCK dan IPAL Komunal dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Dinas PU Cipta Karya yang tersebar di beberapa desa, IPLT sudah terbangun namun belum berfungsi secara optimal. IPLT di Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu IPLT Translik Pasir Panjang (dibangun tahun 2014) memiliki kapasitas 28 m³/hari. Wilayah cakupan pelayanannya meliputi Kecamatan Kumai dan Kecamatan Arut Selatan. Sistem yang digunakan dalam IPLT ini yaitu bak penerima-pretreatment mekanis mechanical acceptance unit) - tangki imhoff - Kolam anaerob-activated sludge-kolam maturasi-sludge drying bed-pemanfaatan padatan. Saat ini terdapat 1 unit truk tinja dengan kapasitas 4 m³ namun belum dioptimalkan dengan baik.

Cakupan akses dan sistem layanan air limbah domestik dirinci per kecamatan dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 3. 46 Cakupan Akses dan Sistem Layanan Air Limbah Domestik Per Kecamatan

No.	Kecamatan	BABS	Belum Layak	Layak	Terpusat
1.	Kotawaringin Lama	12,4%	0,73%	86,80%	0%
2.	Arut Selatan	17,92%	3,11%	76,59%	2,38%
3.	Kumai	8,49%	0,34%	91,17%	0%

No.	Kecamatan	BABS	Belum Layak	Layak	Terpusat
4.	Pangkalan Banteng	0%	0,88%	99,12%	0%
5.	Pangkalan Lada	0%	10,58%	89,42%	0%
6.	Arut Utara	0,79%	0%	99,21%	0%

Sumber: Instrumen SSK 2020



Gambar 3. 16 Sarana Pengolahan IPLT Translik Pasir Panjang

E. Pengelolaan Persampahan

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (UU Nomor 18 Tahun 2008). Menurut Waste Management (2021), pengelolaan sampah merupakan aktivitas untuk mengelola sampah dari awal hingga pembuangan, meliputi pengumpulan, pengangkutan, perawatan, dan pembuangan, diiringi oleh monitoring dan regulasi manajemen sampah.

Pengelolaan persampahan di Kotawaringin Barat menjadi salah satu isu penting dalam menjaga kebersihan lingkungan, kesehatan masyarakat, dan keindahan daerah, terutama karena wilayah ini mencakup destinasi wisata utama seperti Taman Nasional Tanjung Puting dan Kota Pangkalan Bun. Untuk Kabupaten Kotawaringin Barat, sudah meraih Adipura sebanyak 12 kali. Untuk daerah pinggiran sungai, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat menggunakan klotok sampah sebagai sarana pengangkutan sampah dan dilanjutkan pengangkutannya ke TPA menggunakan dump truk sampah yang ada. Berikut adalah gambaran tentang pengelolaan persampahan di Kotawaringin Barat:

1. Timbulan Sampah Domestik

Berdasarkan jenis kegiatannya timbulan sampah domestik di Kabupaten Kotawaringin Barat masuk dalam jenis kegiatan rumah permanen dengan standar berat 0,4 kg/org/hari.

2. Timbulan Sampah Non Domestik

Timbulan sampah non-domestik Kabupaten Kotawaringin Barat diasumsikan bersumber dari sampah kegiatan sosial dan umum yaitu sebesar 5% dari sampah domestik, sampah kegiatan

perdagangan dan jasa yaitu sebesar 10% dari sampah domestik, sampah jalan raya sebesar 3% dari sampah domestik, dan sampah kepariwisataan sebesar 20% dari sampah domestik.

Tabel 3. 47 Data Timbulan Sampah Domestik Tahun 2023

Deskripsi	Satuan	Jumlah
Timbulan Sampah rumah tangga	ton/hari	46,31
Perkotaan	ton/hari	29,97
Perdesaan	ton/hari	16,34
Data Komposisi Sampah	organik (%)	79,49
	anorganik (%)	20,51

Sumber : Dokumen Pemutakhiran SSK Kotawaringin Barat Tahun 2023-2027

3. Infrastruktur

Untuk pengelolaan sampah perkotaan Kabupaten Kotawaringin Barat, penanganan yang dilakukan telah mencapai 76,4%, pengurangan sampah 0,6% dan sampah tidak terkelola 23%.

Tabel 3. 48 Rekapitulasi Akses Pengelolaan Sampah Perkotaan Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Sistem	Cakupan Layanan Eksisting (%)
Wilayah Perkotaan		
1	Pengurangan Sampah	0,60%
2	Penanganan Sampah	76,40%
3	Sampah Tidak Terkelola	23%
Total		100%

Sumber: Dokumen Pemutakhiran SSK Kotawaringin Barat Tahun 2023-2027

Kegiatan pengumpulan sampah sarana yang dimiliki gerobak motor 16 unit dengan kapasitas 7,5 m3 dan ritase 2 kali/hari. Infrastruktur yang ada masih belum memadai untuk untuk melakukan kegiatan pengumpulan sampah skala perkotaan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tabel 3. 49 Data Infrastruktur Pengumpulan Sampah

No.	Deskripsi	Satuan	Jumlah
1	Jumlah Infrastruktur Pengumpulan		
	Gerobak	unit	170
	Gerobak motor	unit	16
	Pick up	unit	3
	Becak	unit	0
2	Kapasitas angkut total		
	Gerobak	m3	1020
	Gerobak motor	m3	64
	Pick up	m3	4,5
	Becak	m3	0
3	Ritase	Rit/hari	2

Sumber : Dokumen Pemutakhiran SSK Kotawaringin Barat Tahun 2023-2027

Tabel 3. 50 Penampungan Sementara dan Pengangkutan

No.	Deskripsi	Satuan	Jumlah
1	Jumlah TPS		

No.	Deskripsi	Satuan	Jumlah
	Transfer Depo	unit	0
	TPS	unit	13
	Kontainer	unit	3
	Tong Sampah Pejalan Kaki	unit	20
2	Kapasitas TPS		
	Transfer Depo	m3	0
	TPS	m3	6,75
	Kontainer	m3	0
	Tong Sampah Pejalan Kaki	m3	0,24
3	Jumlah Alat Angkut		
	Compactor Truck	unit	0
	Arm roll Truck	unit	2
	Dump Truck	unit	15
	Pick Up	unit	0
4	Kapasitas Alat Angkut		
	Compactor Truck	m3	0
	Arm roll Truck	m3	12
	Dump Truck	m3	48
	Pick Up	m3	0
5	Ritasi Pengangkutan	Rit/Hari	2

Sumber : Dokumen Pemutakhiran SSK Kotawaringin Barat Tahun 2023-2027



Gambar 3. 17 Sarana Pengumpulan Persampahan

Kabupaten Kotawaringin Barat belum memiliki sarana dan prasarana pengolahan seperti TPST, incinerator, maupun digester. Untuk pemrosesan akhir, Kabupaten Kotawaringin Barat hanya memiliki 1 unit TPA menampung persampahan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat. Adapun lokasi TPA ini terletak di Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan dengan luas lahan efektif tersedia seluas 30 Ha dan yang terpakai hanya 20%. Sistem pengelolaan sampah di TPA ini sudah menggunakan metode Sanitary Landfill dengan jumlah sampah yang ditimbun adalah 3.27 ton/hari.

3.1.10 Kondisi Perekonomian

PDRB sebagai ukuran produktivitas mencerminkan seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam satu tahun. Sedangkan pendapatan per kapita mencerminkan tingkat pendapatan masyarakat tiap tahun. PDRB per kapita Kotawaringin Barat menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. PDRB per kapita 2021 sebesar 23.708,75 miliar rupiah naik pada tahun 2022 menjadi sebesar 26.265,06 miliar rupiah. Kenaikan ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di berbagai lapangan usaha Kotawaringin Barat terus berkembang.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021. Beberapa lapangan usaha khususnya bidang jasa kesehatan dan kegiatan sosial mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi. Upaya untuk mengencarkan vaksinasi menjadi salah satu pendorong tingginya pertumbuhan pada kategori tersebut. Kategori lain yang juga mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi adalah kategori Konstruksi dan kategori Administrasi Pemerintahan.

Kontribusi pembentukan PDRB Kotawaringin Barat tahun 2022 didominasi oleh empat lapangan usaha unggulan, yaitu industri pengolahan yaitu sebesar 27,01 persen, disusul pertanian, kehutanan dan perikanan oleh sebesar 26,53 persen, perdagangan dan reparasi sebesar 13,17 persen dan konstruksi sebesar 8,35 persen.

Sektor industri pengolahan menghasilkan PDRB sebesar 7 094,98 miliar rupiah pada tahun 2021 atau memberikan kontribusi 27,01 persen terhadap total PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat. Berikut distribusi prosentase PDRB di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022.

Nilai PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 sudah mencapai 28,55 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 2,29 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2022. Terjadi kenaikan nilai PDRB yang tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi regional dan adanya inflasi.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami kenaikan, dari 14,56 triliun rupiah pada tahun 2022 menjadi 15,45 triliun rupiah pada tahun 2023. Pada tahun 2023, Kabupaten Kotawaringin Barat sudah dapat menjalani aktivitas perekonomiannya seperti sebelum pandemi covid-19 sehingga dapat mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6,10 persen. Pertumbuhan ini meningkat jika

dibandingkan dengan tahun 2022 yang tumbuh sebesar 6,01 persen. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha, tanpa adanya pengaruh inflasi.



Gambar 3. 18 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023

Tabel 3. 51 Perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021-2023

Rincian	Satuan/ Unit	2021	2022	2023
PDRB ADHB	Miliar Rupiah	23.708,8	26.265,1	28.551,7
PDRB ADHK 2010	Miliar Rupiah	12.877,6	13.004,3	13.733,2
Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,61	6,01	6,10

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2024

Tabel 3. 52 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kotawaringin Barat (miliar rupiah), 2019–2023

No.	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022*	2023**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.617,10	5.197,20	6.233,20	6.969,10	7.627,80
B	Pertambangan dan Penggalian	256,3	257,6	265,2	280,8	243,7
C	Industri Pengolahan	4.754,50	5.211,50	6.412,00	7.095,00	7.656,80
D	Pengadaan Listrik dan Gas	10,3	11,5	12,2	13,4	15,5
E	Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	18,1	17,8	20,1	21,3	22,7
F	Konstruksi	1.851,60	1.651,60	1.947,80	2.192,20	2.240,20
G	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	2.664,30	2.881,20	3.110,40	3.459,00	3.789,50
H	Transportasi dan pergudangan	1.734,40	1.600,30	1.721,40	1.915,30	2.222,40
I	Penyediaan akomodasi dan makan minum	267,3	259,9	270,3	291,7	328,7

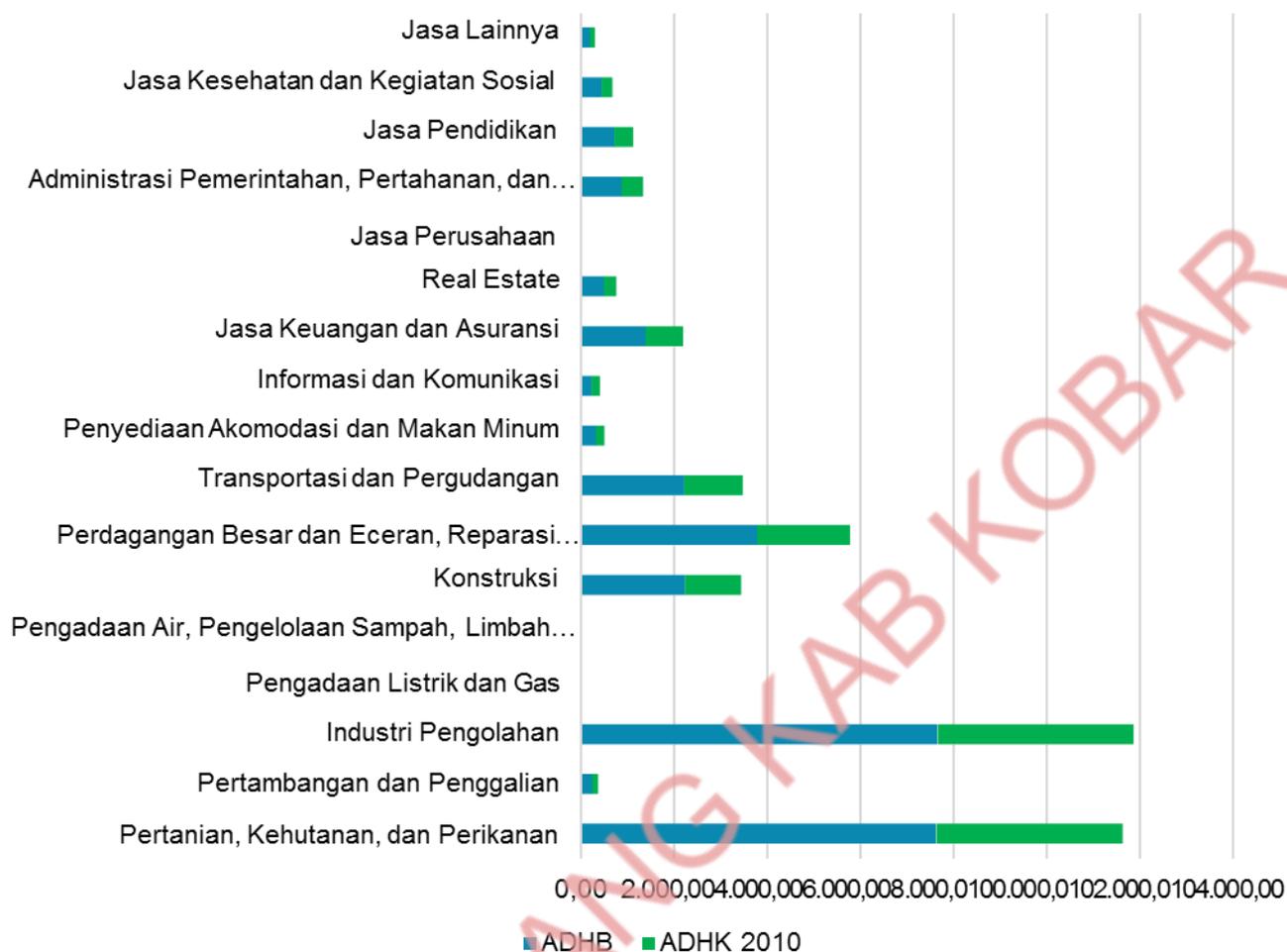
No.	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022*	2023**
J	Informasi dan komunikasi	179	189,2	209,9	227,2	239,4
K	Jasa keuangan dan asuransi	966,2	1.063,70	1.189,10	1.277,50	1.396,80
L	Real estate	386,1	405,9	417	459,2	498
M,N	Jasa Perusahaan	9,5	8,4	8,8	9,7	11,3
O	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial	653,4	743,3	780,8	855,6	877,9
P	Jasa Pendidikan	533,6	583,2	613,2	634	728,6
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan	231,5	301,9	357,7	397,2	452,1
R,S,T,U	Jasa Lainnya	198,9	137,6	139,6	166,9	200,4
	PDRB	19.332,10	20.521,90	23.708,80	26.265,10	28.551,70

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2024

Tabel 3. 53 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kotawaringin Barat (miliar rupiah), 2019–2023

No.	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022*	2023**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.449,80	3.530,50	3.609,50	3.803,60	3.994,90
B	Pertambangan dan Penggalian	158,1	157,8	149,7	153,9	130,9
C	Industri Pengolahan	3.331,10	3.427,10	3.657,50	3.874,30	4.199,30
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,2	8	8,3	8,8	10
E	Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	11,3	10,9	12	12,2	12,7
F	Konstruksi	1.122,50	987,4	1.116,80	1.200,50	1.205,50
G	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	1.596,60	1.644,30	1.743,20	1.866,50	1.992,10
H	Transportasi dan pergudangan	1.088,90	998,3	1.071,80	1.146,70	1.256,50
I	Penyediaan akomodasi dan makan minum	165,9	156,5	160,5	167,4	182,1
J	Informasi dan komunikasi	137,4	147,8	161	171,9	177,9
K	Jasa keuangan dan asuransi	611,6	672,7	723,5	749,8	802,1
L	Real estate	229,4	236,9	242,3	256,7	270,1
M,N	Jasa Perusahaan	5,6	4,9	5,1	5,4	6,1
O	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial	385,1	419,3	436	469,4	467,5
P	Jasa Pendidikan	320,5	346,3	357,8	366,1	399,3
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan	137,6	174,3	199,4	213,8	232,1
R,S,T,U	Jasa Lainnya	119,1	81,2	78,8	91,4	107,7
	PDRB	12.877,60	13.004,30	13.733,20	14.558,40	15.446,60

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2024



Gambar 3. 19 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Dan Atas Dasar Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kotawaringin Barat (Milliar rupiah), 2023

Tabel 3. 54 Distribusi Prosentase PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022

No.	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	23,88	25,33	26,29	26,53	26,72
B	Pertambangan dan Penggalian	1,33	1,26	1,12	1,07	0,85
C	Industri Pengolahan	24,59	25,4	27,01	27,01	26,82
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,06	0,05	0,05	0,05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08
F	Konstruksi	9,58	8,05	8,19	8,35	7,85
G	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	13,78	14,04	13,08	13,17	13,27
H	Transportasi dan pergudangan	8,97	7,8	7,25	7,29	7,78
I	Penyediaan akomodasi dan makan minum	1,38	1,27	1,15	1,11	1,15
J	Informasi dan komunikasi	0,93	0,92	0,87	0,86	0,84
K	Jasa keuangan dan asuransi	5	5,18	4,96	4,86	4,89
L	Real estate	2	1,98	1,8	1,75	1,74
M,N	Jasa Perusahaan	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04

No.	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
O	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial	3,38	3,62	3,46	3,26	3,07
P	Jasa Pendidikan	2,76	2,84	2,57	2,41	2,55
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan	1,2	1,47	1,51	1,51	1,58
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,03	0,67	0,59	0,64	0,7
	PDRB	100	100	100	100	100

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2024

Kabupaten Kobar memiliki perkembangan perekonomian tertinggi setelah pandemi apabila dibandingkan dengan Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, hingga Provinsi Kalimantan Tengah. Saat pandemi, perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat tidak mencapai angka minus seperti Kabupaten Seruyan dan Provinsi Kalimantan Tengah. Sektor pariwisata menjadi nilai strategis dalam kapasitas pembiayaan Kotawaringin Barat.

Tabel 3. 55 PDRB Sektor Pariwisata

PDRB Sektor Pariwisata	Tahun (Miliar Rupiah)					Prosentase dari Total PDRB (Tahun 2022)
	2018	2019	2020	2021	2022	
Secara Langsung*	110,95	119,09	81,20	78,85	91,42	0,63%
Secara Langsung + Pendukung**	1.274,37	1.373,93	1.226,51	1.311,10	1.405,51	9,65%
Total PDRB	12.173,28	12.877,64	12.994,77	13.733,20	14.558,35	-

Sumber: Laporan Kajian RIPPARDA

Tabel 3. 56 PAD Pariwisata

Uraian PAD Pariwisata	Jumlah
PAD Secara Langsung (Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga)	800.000.000
PAD Secara Tidak Langsung (Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan)	10.950.000.000
Total	11.750.000.000

Sumber: Laporan Kajian RIPPARDA

3.1.11 Potensi Wilayah

Kotawaringin Barat sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia. Wilayah ini memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan di berbagai sektor, seperti potensi dalam bidang pertanian, perkebunan, industri, dan perikanan. Berikut adalah beberapa potensi wilayah Kotawaringin Barat:

A. Pertanian

Kawasan peruntukkan pertanian terdiri atas kawasan pertanian tanaman pangan (lahan sawah), kawasan pencadangan lahan tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan peternakan, dan kawasan perkebunan. Kawasan pertanian tanaman pangan (lahan sawah) dengan luas ± 9.469 Ha

Kawasan pencadangan lahan tanaman pangan dengan luas ± 21.288 Ha. Kawasan hortikultura dengan luas ± 8.605 hektar.



Gambar 3. 20 Salah Satu Kawasan Pertanian di Kotawaringin Barat

Tabel 3. 57 Hasil Produksi Pertanian Holtikultura (Tanaman Sayuran) Menurut Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022

No.	Tanaman	Produksi (kuintal)						Total
		Kotawaringin Lama	Arut Selatan	Kumai	Pangkalan Banteng	Pangkalan Lada	Arut Utara	
1	Bawang Daun	26	7341	2593	3738	180		13877
2	Bawang Merah	28	4	15		10		57
3	Cabai Besar	25	3175	726	15		1000	4941
4	Cabai Rawit	338	23497	4637	7494	2243	12	38220
5	Bayam	93	1954	1185	861	110		4204
6	Buncis	95	6895	3393	3373	407	5	14168
7	Jamur	53	2		1775			1830
8	Kacang Panjang	319	17744	7519	5657	448	3	31690
9	Kangkung	408	6679	1488	1389	137		10101
10	Ketimun	351	29422	4864	4077	624	8	39345
11	Melon	2	2400	1290				3692
12	Petsai/ Sawi	27	14328	982	1150	109		16596
13	Semangka	150	2630	28398	38665	690		70533
14	Stroberi		3124					3124
15	Terung	313	12305	11035	2568	1271	5	27497
16	Tomat	158	3585	6724	1433	1204		13103

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Barat dalam Angka, 2023

Tabel 3. 58 Hasil Produksi Pertanian Holtikultura (Tanaman Buah) Menurut Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022

No.	Tanaman	Produksi (kuintal)						Total
		Kotawaringin Lama	Arut Selatan	Kumai	Pangkalan Banteng	Pangkalan Lada	Arut Utara	
1	Alpukat	62	2581	960	4600	81		8284
2	Belimbing	40	814	2511	6792	157	4	10319
3	Duku	35	2007	40		130		2212
4	Durian	173	1845	220	200	151		2589
5	Jambu air	33	1492	3295	16000	204	183	21207
6	Jambu biji	49	3621	4520	16800	136	300	25427
7	Jengkol	54	2041	460	2525	570		5650
8	Jeruk Besar	4	323	500				827
9	Jaruk siam	80	11483	8620	1360	30		21573
10	Mangga	210	8822	2406	250		837	12525
11	Manggis	10	51			11		72
12	Melinjo	49	488	1059	2270	172		4038

No.	Tanaman	Produksi (kuintal)						Total
		Kotawaringin Lama	Arut Selatan	Kumai	Pangkalan Banteng	Pangkalan Lada	Arut Utara	
13	Nangka	270	18896	30538	8248	570	877	59399
14	Nanas	21	5788	1104	3000	235		10148
15	Pepaya	93	15149	6596	7120	1240	115	30313
16	Petai	74	458	938	440	101		2011
17	Pisang	90	104334	103842	42000	1528	211	252005
18	Rambutan	135	14365	389	8100	124		23113
19	Salak	8	29	225	4930	165		5357
20	Sawo	2	4229	2797	5280	610		12918
21	Sirsak	49	1017	827	3850	59	630	6432
22	Sukun	29	1293	7841	4400	66	2078	15707

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Barat dalam Angka, 2023

Dari data hasil produksi pertanian hortikultura, produksi tanaman sayuran paling tinggi adalah semangka (70.533 kuintal), ketimun (39.345 kuintal), cabai rawit (38.220 kuintal), dan kacang panjang (31.690 kuintal). Produksi tanaman buah-buahan paling tinggi adalah pisang (252.005 kuintal) dan nangka (59.399 kuintal).

B. Perkebunan

Kawasan perkebunan dengan luas ± 145.203 hektar tersebar di Kecamatan Pangkalan Banteng, Kecamatan Pangkalan Lada, Kecamatan Arut Utara, Kecamatan Arut Selatan, Kecamatan Kotawaringin Lama dan Kecamatan Kumai. jenis tanaman perkebunan rakyat yang paling luas adalah kelapa sawit yakni sebesar 73,7% dari luas perkebunan rakyat di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Kegiatan perkebunan di Kab Kobar adalah sektor yang menjadi penyumbang terbesar terhadap PDRB. Produksi kelapa sawit pada tahun 2020 mencapai 52.479,52 ton dengan wilayah yang memiliki kontribusi terbesar adalah Kec Kumai dan Pangkalan Banteng. Produksi karet mencapai 5.077,86 ton paling banyak di Kec Pangkalan Banteng.

Tabel 3. 59 Produktivitas Kelapa Sawit Tahun 2022

Luas Areal Pengusaha (Ha)		Produksi (ton)	
Kelapa Sawit	Karet	Kelapa Sawit	Karet
277.622,93	17.345	937.606,04	11.878,27

Sumber : Kalimantan Tengah dalam Angka, 2023

Tabel 3. 60 Daftar Nama Perusahaan Besar Sawit di Kotawaringin Barat

No.	Nama Perusahaan	Kecamatan
1	PT. Agro Menara Rahmat	Arut Selatan
2	PT. Bangun Jaya Alam Permai	Pangkut
3	PT. Bumilanggeng Perdana Trada	Kumai
4	PT. Bumitama Gunajaya Abadi	Kotawaringin Lama
5	PT. Gunung Sejahtera Dua Indah	Pangkalan Banteng
6	PT. Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi	Pangkalan Lada
7	PT. Gunung Sejahtera Puti Pesona	Pangkalan Banteng
8	PT. Gunung Sejahtera Yoli Makmur	Pangkalan Banteng
9	PT. Kalimantan Sawit Abadi	Arut Selatan
10	PT. Meta Epsi Agro	Pangkalan Lada

No.	Nama Perusahaan	Kecamatan
11	PT. Mitra Mendawai Sejati	Arut Selatan
12	PTP. Nusantara XIII	Pangkalan Banteng
13	PT. Persada Bina Nusantara Abadi	Arut Utara
14	PT. Primasentosa Pratama Putra	Pangkalan Lada
15	PT. Satya Kisma Usaha	Pangkalan Lada
16	PT. Sawit Sumbermas Sarana	Arut Selatan
17	PT. Surya Indah Nusantara Pagi	Arut Selatan
18	PT. Surya Sawit Sejati	Pangkalan Lada
19	PT. Andalan Sukses Makmur	Kumai
20	PT. Arut Sawit Mandiri	Pangkut
21	PT. Usaha Agro Indonesia	Kotawaringin Lama

Sumber : RPJP Kalimantan Tengah, 2017



Gambar 3. 21 Salah satu Perkebunan Sawit di Kotawaringin Barat

C. Industri

Sektor industri di Kabupaten Kotawaringin Barat masih didominasi oleh usaha kecil dan menengah, dimana jenis usaha seperti ini sangat berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja. Jumlah unit usaha pada tahun 2018 sebanyak 546 unit dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.542 orang. Pada tahun 2019 bertambah menjadi 576 unit dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.817 orang.

D. Pertambangan

Sektor pertambangan di Kotawaringin Barat merupakan salah satu sektor strategis yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah. Wilayah ini memiliki berbagai sumber daya tambang yang berpotensi untuk dieksplorasi dan dikelola.

1. Sumber Daya Tambang yang Berpotensi

• Batu Bara

Kotawaringin Barat memiliki cadangan batu bara yang cukup melimpah. Batu bara ini umumnya digunakan untuk kebutuhan energi, baik domestik maupun ekspor. Kawasan tambang batu bara sebagian besar berada di daerah pedalaman dan dikelola oleh perusahaan besar maupun swasta lokal.

- **Pasir Kuarsa**

Sumber daya pasir kuarsa di wilayah ini memiliki kualitas tinggi dan berpotensi digunakan dalam industri kaca, keramik, hingga bahan bangunan.

- **Zircon dan Bahan Mineral Lain**

Zircon, salah satu bahan tambang berharga, juga ditemukan di Kotawaringin Barat, meskipun skalanya belum sebesar batu bara. Potensi ini memiliki peluang untuk dikembangkan lebih lanjut dalam sektor industri.

2. Lokasi dan Daerah Potensial

Wilayah dengan aktivitas pertambangan umumnya tersebar di beberapa kecamatan, terutama di sekitar:

- Kecamatan Kumai
- Kecamatan Arut Selatan
- Kecamatan Arut Utara

Lokasi-lokasi ini didukung oleh infrastruktur yang memadai, seperti pelabuhan di Kumai untuk distribusi hasil tambang.

Tabel 3. 61 Jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Luas Lahan (Ha) Menurut Jenis Barang Tambang di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021

No.	Izin Usaha Pertambangan (IUP)	IUP	Luas (Ha)
IUP Eksplorasi			
1	Pasir Kuarsa	4	3362,01
IUP Produksi			
1	Batu Bara	1	2940
2	Zircon	3	1839,8
3	Emas	2	22.605
4	Pasir	3	780
5	Pasir Kuarsa	5	9571,23

Sumber : Provinsi Kalimantan Tengah dalam Angka, 2022

E. Peternakan

Sektor peternakan di Kotawaringin Barat memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan sebagai salah satu pilar ekonomi daerah. Wilayah ini memiliki lahan yang luas, ekosistem yang mendukung, serta permintaan pasar yang terus meningkat, baik untuk konsumsi lokal maupun peluang ekspor.

Tabel 3. 62 Populasi ternak Tahun 2018-2022 (Ekor)

No.	Jenis Ternak	2018	2019	2020	2021	2022
1	Sapi	25.770	27.983	25.530	23.155	17.328
2	Kambing	3.035	3.238	3.989	5.549	4.220
3	Babi	6.084	6.394	7.229	7.646	3.598
4	Ayam Buras	424.742	445.129	483.717	500.484	432.414
5	Ayam Ras Pedaging	4.995.104	6.530.140	5.747.269	6.153.021	6.555.256
6	Ayam Ras Petelur	173.820	180.920	180.940	177.598	165.155

No.	Jenis Ternak	2018	2019	2020	2021	2022
7	Itik	45.008	47.366	48.341	49.589	34.617
Total Populasi (ekor)		5.673.563	7.241.170	6.497.015	6.917.042	7.212.577

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat - Diolah, 2023

F. Perikanan

Perkembangan perikanan di Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Kegiatan perikanan budidaya di Kabupaten Kotawaringin Barat tersebar di seluruh kecamatan. Sedangkan kegiatan perikanan tangkap berada di kecamatan pesisir, yaitu Kecamatan Arut Selatan dan Kecamatan Kumai.

Tabel 3. 63 Hasil Produksi Perikanan Tahun 2018-2022

No.	Komoditas	Kabupaten Kotawaringin Barat (Ton)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jambal/ Patin	347.645	1799	1097	1089	1400
2	Gabus	454	4	54	89	54
3	Toman	720	6	625	486	1173
4	Mas	45.506	227	344	513	324
5	Nila & Mujair	632.120	2760	2397	4580	4665
6	Bawal	22.200	168	138	196	142
7	Lele	80.459	463	675	899	665
8	Gurame	156	4	71	74	82
9	Baung	1.350	10	153	193	235
10	Jelawat	1.200	7			
11	Lais			20	7	28
12	Udang	64.350	340	109	105	138
13	Kakap			7	1	12
14	Ikan Lainnya (belanak, dll)	5.054	48	6	7	9
15	Bandeng	244.500	388	1800	1338	1686
Jumlah		12.173	12878	13004	13733	14558

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat - Diolah, 2023

3.1.12 Pariwisata

Wisata di Kabupaten Kotawaringin Barat:

1. Wisata Sejarah

- Astana Al Nursari di Kotawaringin Lama. Berdiri Tahun 1867
- Masjid dan Makam Kyai Gede di Kotawaringin Lama. Berdiri Tahun 1632
- Makam Gubah Raja/Gubah Bosar Makam Kesultanan. merupakan kompleks pemakaman raja pendiri Pangkalan Bun/ Kotawaringin Barat
- Makam Kuta Tanah di Kotawaringin Lama. merupakan tempat dimakamkannya Sultan XII dan keluarga sultan sebelumnya
- Istana Kuning di Pangkalan Bun. Berdiri Tahun 1814
- Istana/Rumah Pangeran Mangkubumi di Kecamatan Arut Selatan. Berdiri Tahun 1850

- Batu Petahan di Kecamatan Arut Utara merupakan symbol dari sejarah perjanjian antara pangeran Adipati Antakusuma dengan masyarakat Dayak.

2. Wisata Alam

- Taman Nasional Tanjung Puting seluas 414.040 Ha terdiri dari suaka margasatwa dan kutan produksi serta perairan
- Suaka Margastwa Lamandau merupakan kawasan konservasi dengan ekosistem hutan rawa gambut yang terletak di Kalimantan Tengah. Sebagai salah satu lokasi konservasi Orangutan Kalimantan
- Taman Wisata Hutan Jurung Tiga seluas 40 Ha di Kecamatan Arut Selatan
- Pantai Anum, Pantai Keraya, Pantai Lifho-lifho, Pantai Kubu, Pantai Sebuai, Pantai Sebuai Timur, Pantai Tanjung Penghujan, Gosong Beras Basah, Gosong Senggora, Tanjung Keluang
- Bukit Marundau, Bukit Talawih, Tebing Tinggi, Bukit Kaminting/Maninting
- Air Trejun Patih Mamabng, Air Terjun Suayap, Danau Limau, Danau Gatal, Danau Kura-kura, Danau Masoraian, Mangrove Sungai Bakau

3. Wisata Budaya

- Pawai Nasi Adab merupakan kegiatan rutin tahunan yang selalu digelar dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Festival Marunting Batu Aji. Festival yang diadakan setiap tahun yang bertujuan sebagai sarana melestarikan kebudayaan lokal dan sebagai daya tarik wisata.
- Ritual Babarasih Banua. Ritual adat Babarasih Banua rutin dilaksanakan masyarakat di Kecamatan Kumai. Tradisi ini merupakan wujud sikap berserah diri pada Tuhan, karena apapun yang terjadi di dunia ini sepenuhnya atas kuasa Tuhan Yang Maha Esa.
- R Adat Suku Dayak / Rumah Adat Betang (Pasir Panjang). Rumah asli suku Dayak yang tidak memiliki sekat-sekat sehingga menyerupai aula
- Kampung Pecinan. Terletak di Kelurahan Raja Seberang Kecamatan Arut Selatan kampung Pecinan yang sudah berdiri sejak tahun 905 Masehi pada zaman Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit.
- Kampung Segu. Kata Segu memiliki arti "cantik". Daya tarik wisata Kampung Segu pemandangan Sungai arut dan sunset. Kampung Segu terletak di Kelurahan Mendawai, Kecamatan Arut Selatan Berada di tepian Sungai Arut.
- Ritual Tiwah / Pesta Orang Mati. Ritual Tiwah bertujuan sebagai ritual untuk meluruskan perjalanan roh atau arwah roh orang yang sudah meninggal menuju Lewu Tatau (Surga)
- Kesenian dan Tarian : Tari Hadrah, tari pesisir, tari pedalaman,

3.2 SEJARAH PERKEMBANGAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Sejarah Kabupaten Kotawaringin Barat dibagi dalam beberapa masa yang terdiri dari:

1. MASA SEBELUM MASEHI

Kawasan Kotawaringin Barat telah dihuni sejak tahun **2500 SM** oleh ras Proto-Melayu yang mendatangi Pulau Kalimantan. Ras ini dianggap sebagai leluhur dari suku Dayak. Kemudian pada tahun **1500 SM**, ras Melayu Deutero mendatangi Pulau Kalimantan.

2. MASA KERAJAAN MAJAPAHIT

Pada tahun 1400, Patih Gajah Mada dari Majapahit menaklukkan Kotawaringin (Lama).

3. MASA KERAJAAN KOTAWARINGIN

- **1637**: Berdirinya Kerajaan Kotawaringin dengan raja pertama Pangeran Dipati Anta-Kasuma, putera Sultan Banjar IV Mustain Billah.
- **1806**: Pemindahan ibu kota kerajaan Kotawaringin dari Kotawaringin Lama (Astana Alnursary) ke Pangkalan Bun (Istana Kuning).
- **1890**: Seorang Iban bernama Passa melakukan perjalanan dari Paku di Sekundong ke Kotawaringin, wilayah Kesultanan Banjarmasin.

4. MASA HINDIA BELANDA

Pada tanggal 12 Juni 1936, Pemerintah Hindia Belanda menetapkan Tanjung Puting sebagai cagar alam dan suaka margasatwa.

5. MASA INDONESIA

- Pada tanggal **19 Agustus 1945**, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan rapat yang memutuskan pembentukan delapan provinsi di Indonesia. Salah satunya ialah Provinsi Kalimantan.
- Pasukan payung Indonesia melakukan penerjunan pertama di Desa Sambu, Arut Utara, Kotawaringin Barat pada **17 Oktober 1947**.
- Sejak pengakuan kedaulatan oleh Belanda tanggal **27 Desember 1949** dengan dasar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1949 lahirlah Kabupaten Kotawaringin dengan ibukota Sampit dan dikepalai oleh Bupati Kepala Daerah yang dijabat oleh Tjilik Riwut.
- **Tahun 1955** : Pangkalan Bun ikut menyelenggarakan PEMILU PERTAMA
- Pada tanggal **7 Desember 1956**, Kotawaringin menjadi bagian dari wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
- Tanggal **23 Mei 1957**, wilayah Kotawaringin dan Dayak Besar membentuk provinsi Kalimantan Tengah.
- Pada tanggal **3 Oktober 1959** bertempat di Balai Sembaga Mas Pangkalan Bun dalam suatu upacara resmi, dengan **C. Mihing** sebagai **Bupati Kepala Daerah** dan lahirlah Kabupaten

Kotawaringin Barat yang diresmikan oleh Gubernur Tjilik Riwut yang bertindak atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Pembentukan Kotawaringin Barat diawali dengan terbentuknya Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor: Up.34/41/24, tanggal 28 Desember 1957 dan SK. Nomor: Des.52/12/2.206, tanggal 22 Desember 1959 Tentang Pembagian Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Kotawaringin Barat. Pada tanggal 3 Oktober 1959 secara resmi ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Kotawaringin Barat. Selanjutnya pada Tahun 1960an di Kabupaten Kotawaringin Barat, Suku Banjar bermukim di sekitar Sukamara. Perkembangan kabupaten Kotawaringin begitu pesat. Bupati C.Mihing mengakhiri tugasnya sebagai Bupati di Kotawaringin Barat pada tanggal 22 Maret 1960 dan dipindahkan sebagai Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit. Sebagai penggantinya oleh Pemerintah Pusat diangkatlah J.C Rangkap (1960-1962). Selanjutnya digantikan oleh Drs. F.A.D. Patianom (1962-1965) yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Kantor Persiapan Pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah. Pada Tahun 1969-1979 saat dipimpin oleh Letkol. Inf. H. M. Rafii, Rencana Tata Ruang Kota pertama kali diusulkan dan dibuat dengan bantuan Kementerian Pusat.

Pada saat kepemimpinan Bupati Letkol. Czi. H. Mas Soetarso (1979-Juni 1983), Rencana Tata Ruang Kota yang telah dibuat sebelumnya tidak dilaksanakan. Namun, Bupati membuat Rencana Tata Ruang Kota yang baru. Pada tanggal 12 Mei 1984, Menteri Kehutanan Republik Indonesia. menetapkan Taman Nasional Tanjung Puting. Tahun 1984-1989, Bupati Kol. Inf. N. Imam Maestoer, mulai melaksanakan Rencana Tata Ruang kota yang telah dibuat sebelumnya dan memulai melakukan pembangunan wilayah, meliputi:

- 1) Pemindahan Makam Pahlawan
- 2) Pembangunan GOR di Sambit
- 3) Pelaksanaan Program Transmigrasi
- 4) Pembukaan Akses jalan
- 5) Pembuatan rencana jaringan jalan (tidak terlaksana karena tidak ada anggaran)
- 6) Pembangunan pasar Saik, pasar Inpres
- 7) Pangkalan Bun
- 8) Pemindahan pasar ke kampung baru
- 9) Pembangunan Pasar Di Kumai, Nanga Bulik, dan Sukamara

Tahun 1989-1994, Bupati Letkol. Inf. Darman, terjadi pembangunan dan pengembangan wilayah, antara lain:

- 1) Pada Tahun 1989, Awal pelebaran jalan Trans kalimantan Ke sampit – Sungai rangit Kotawaringin Barat

2) Pembangunan 13 unit Rumah Pegawai pada **Tahun 1990an** dengan Luas lahan 10 ha dan Anggaran 200jt namun tidak dapat dilanjutkan karena tidak disetujui DPRD untuk diperjualbelikan/ disewakan. Sisa lahan dialihfungsikan sebagai fasilitas Umum yaitu sekolah dan perkantoran.

3) Pembangunan Taman Hiburan (THR) dengan luas 10 Ha untuk mendukung Pariwisata Seni Daerah
Pada tahun **1990an** juga telah diadakan konferensi “Orang utan Sedunia” dan menghasilkan Deklarasi Tanjung Puting dimana menyatakan bahwa Taman Nasional Tanjung Puting sebagai Tempat Observasi Orang Utan Sedunia.

Kemudian melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 yang diterbitkan pada tanggal 10 April 2003, sebagian wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dimekarkan menjadi Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Sukamara. Kabupaten Lamandau beribu kota di Nanga Bulik, sedangkan Kabupaten Sukamara beribu kota di Kecamatan Sukamara. Berikut perkembangan Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2004 sampai 2023.

- **TAHUN 2004**

Kabupaten Kotawaringin terdiri dari 6 Kecamatan, 15 Kelurahan, dan 45 Desa

Jumlah Penduduk : 198.367 jiwa

Kepadatan Penduduk : 18,44 jiwa/km²

Rata-rata Pertumbuhan 5 th : 3,06 %

Sex ratio : 109

- **TAHUN 2005**

Kabupaten Kotawaringin terdiri dari 6 Kecamatan, 13 Kelurahan, dan 44 Desa

Jumlah Penduduk : 202.071 jiwa

Kepadatan Penduduk : 18,78 jiwa/km²

Rata-rata Pertumbuhan 5 th : 3,95 %

Sex ratio : 108

- **TAHUN 2014**

Kabupaten Kotawaringin terdiri dari 6 Kecamatan, 13 Kelurahan, dan 81 Desa

Luas Wilayah : 10.759 km²

Jumlah Penduduk : 269.629 jiwa

Kepadatan Penduduk : 25,06 jiwa/km²

Laju Pertumbuhan 2013-2014 : 3,23 %

Sex ratio : 112,5

Pertumbuhan Ekonomi : 6,95%

Sektor unggulan : Pertanian Sub sektor perkebunan sawit

- **TAHUN 2015**

Kabupaten Kotawaringin terdiri dari 6 Kecamatan, 13 Kelurahan, dan 81 Desa

Luas Wilayah : 10.759 km²

Jumlah Penduduk : 278.141 jiwa

Kepadatan Penduduk : 25,06 jiwa/km²

Laju Pertumbuhan 2014-2015 : 3,16 %

Sex ratio : 113

Pertumbuhan Ekonomi : 7,30%

Sektor unggulan : Pertanian Sub sektor perkebunan sawit

- **TAHUN 2023**

Kabupaten Kotawaringin terdiri dari 6 Kecamatan, 13 Kelurahan, dan 81 Desa

Luas Wilayah : 10.759 km²

Jumlah Penduduk : 279.740 jiwa

Kepadatan Penduduk : 25,06 jiwa/km²

Laju Pertumbuhan 2020-2023 : 1,24 %

Sex ratio : 107

Pertumbuhan Ekonomi : 6,10%

Sektor unggulan : industri pengolahan, wisata

Permukiman awal di Kalimantan Tengah tidak bisa dilepaskan dari daerah aliran sungai. Di Kabupaten Kotawaringin Barat terdapat empat sungai besar yakni Sungai Jelai, Sungai Arut, Sungai Lamandau, Sungai Kumai, dan puluhan anak sungai. Permukiman penduduk sejak berabad-abad yang lalu tumbuh di sepanjang sungai ini. Sungai ini selain menjadi tempat mencari ikan untuk kebutuhan makanan sehari-hari, juga tempat mandi dan transportasi.

Penduduk asli yang tinggal di daerah ini adalah suku Dayak. Tahun 1960 an sejak semaraknya pergerakan sebutan "Kalimantan" sebagai pengganti "Borneo" dahulu, tumbuhlah perkembangan baru dan lahir suatu sebutan terhadap penduduk asal Banjarmasin -- Hulu Sungai dengan nama "orang Banjar". Sejarah mereka merupakan suatu persekutuan hidup dengan pembawaan hidupnya sendiri (groepgemeenschap), mungkin dinobatkan pada nama pintu gerbang Kalimantan Selatan selama beberapa zaman, yaitu Banjarmasin (Riwut, 1993:194). Di Kotawaringin Borrata Suku Banjar bermukim di sekitar Sukamara. Mereka adalah para pedagang yang tangguh yang datang dari Sumatera dan pulau-pulau Melayu lainnya.



BAPPEDALITBANG KAB. KOTAWARINGIN BARAT

BAPPEDALITBANG KAB KOBAR

BAB 04

Analisis



Bagian ini bertujuan untuk menganalisis data yang tersedia mengenai berbagai aspek Kabupaten Kotawaringin Barat, termasuk ekonomi, demografi dan kependudukan, lingkungan, serta infrastruktur. Hasil analisis bertujuan untuk mendukung perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Kotawaringin Barat.

4.1 SINTESIS KEBIJAKAN

Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan segala potensi dan tantangannya, berada dalam fase penting perencanaan jangka panjang untuk menyongsong abad baru pembangunan yang berkelanjutan. Penyusunan sintesis kebijakan ini bertujuan untuk memberikan arahan strategis berdasarkan berbagai dokumen perencanaan nasional, provinsi, dan kabupaten, termasuk RPJPN, RPJMN, RTRW, RPJPD, dan RPJMD. Pendekatan ini memastikan bahwa arah kebijakan sejalan dengan prioritas pembangunan nasional sekaligus mampu menangkap keunikan dan kebutuhan spesifik wilayah.

Adapun secara rinci nilai-nilai yang dapat diadaptasi dari setiap dokumen kebijakan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 1. Nilai Adaptasi Kebijakan untuk Pengembangan Kotawaringin Barat

Kebijakan	Nilai Adaptasi
RPJPN	<ul style="list-style-type: none">• Transformasi Sosial dan Ekonomi: Fokus pada peningkatan SDM, hilirisasi SDA, dan pembangunan ekonomi berbasis teknologi dan keberlanjutan. Ini cocok dengan potensi pertanian, perkebunan, dan pariwisata di Kobar.• Sarana Prasarana Ramah Lingkungan: Kobar dapat mendorong pembangunan infrastruktur ramah lingkungan, termasuk transportasi dan energi berkelanjutan.• Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi: Kobar yang memiliki kawasan konservasi seperti Taman Nasional Tanjung Puting, harus melestarikan ekosistem dan budaya lokal.

Kebijakan	Nilai Adaptasi
RPJMN	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan: Kobar dapat meningkatkan kualitas pendidikan vokasional dan layanan kesehatan, terutama di bidang pertanian dan perkebunan yang menjadi sektor unggulan. Pengembangan Industri Berbasis SDA Lokal: Hilirisasi produk unggulan daerah seperti kelapa sawit, karet, dan perikanan dapat dioptimalkan. Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan: Potensi pariwisata alam seperti eco-tourism di Taman Nasional Tanjung Puting harus dikembangkan sebagai daya tarik ekonomi berkelanjutan.
RTRW Provinsi Kalimantan Tengah	<ul style="list-style-type: none"> Pertanian Berorientasi Agribisnis: Kobar dapat menjadi pusat agroindustri yang berkelanjutan, mengoptimalkan sektor pertanian dan perkebunan. Lumbung Pangan dan Energi: Kobar berpotensi sebagai pusat lumbung pangan dan energi, terutama energi terbarukan seperti bioenergi dan PLTS. Pengelolaan Lingkungan: Dengan luas kawasan hutan dan perkebunan, pembangunan harus memperhatikan daya dukung lingkungan dan menjaga keseimbangan ekologi.
RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat	<ul style="list-style-type: none"> Keamanan dan Ketertiban: Mewujudkan masyarakat yang aman dan damai adalah prioritas untuk meningkatkan kualitas hidup dan mendukung investasi. Pengembangan Agribisnis dan Agroindustri: Fokus pada pembangunan sektor agribisnis, pertanian, perkebunan, dan perikanan sebagai penopang ekonomi lokal. Pendidikan dan Kesehatan Berkualitas: Meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan untuk menciptakan SDM yang unggul dan kompetitif.
RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat	<ul style="list-style-type: none"> Kemandirian Ekonomi Berbasis Pertanian dan Perikanan: Dengan fokus pada pertanian, kelautan, dan pengelolaan sumber daya alam, pembangunan di Kobar harus diarahkan pada peningkatan daya saing ekonomi berbasis potensi lokal. Pelestarian Budaya dan Pariwisata: Melestarikan budaya lokal dan mengembangkan pariwisata berbasis budaya dan alam seperti Taman Nasional Tanjung Puting serta destinasi wisata sejarah dan religi. Infrastruktur Berkelanjutan: Pembangunan infrastruktur yang mendukung ekonomi dan transportasi lokal dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.
RPD Kabupaten Kotawaringin Barat	<ul style="list-style-type: none"> Pertumbuhan Ekonomi Sektor Potensial: Fokus pada pengembangan sektor-sektor unggulan seperti perkebunan, pertanian, industri, dan pariwisata harus menjadi prioritas jangka panjang. Pembangunan Berbasis Lingkungan: Pengembangan infrastruktur harus berorientasi pada lingkungan berkelanjutan, khususnya di sektor energi terbarukan seperti PLTS dan biomassa. Peningkatan SDM: Strategi peningkatan pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat menjadi kunci dalam pengembangan jangka panjang.
RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat	<ul style="list-style-type: none"> Ruang Wilayah yang Berkelanjutan: Perencanaan tata ruang yang aman, nyaman, dan produktif berbasis pada sumber daya pertanian, perikanan, kehutanan, dan pariwisata. Pengembangan Kawasan Strategis: Kobar harus mengembangkan kawasan strategis ekonomi seperti kawasan perkebunan, agropolitan, dan minapolitan yang ada di Kecamatan Kumai dan Pangkalan Lada. Perlindungan Kawasan Lingkungan Hidup: Kawasan konservasi seperti Taman Nasional Tanjung Puting harus dilindungi, dengan pengelolaan yang berbasis konservasi dan ekowisata.

Sumber : Hasil Sintesis, 2024

Secara garis besar, sintesis kebijakan berupaya untuk menyelaraskan elemen-elemen penting seperti transformasi sosial dan ekonomi, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, serta penguatan infrastruktur dan sumber daya manusia. Kabupaten Kotawaringin Barat dapat mengadopsi pendekatan pembangunan tematik dengan fokus utama diarahkan pada beberapa area prioritas berikut:

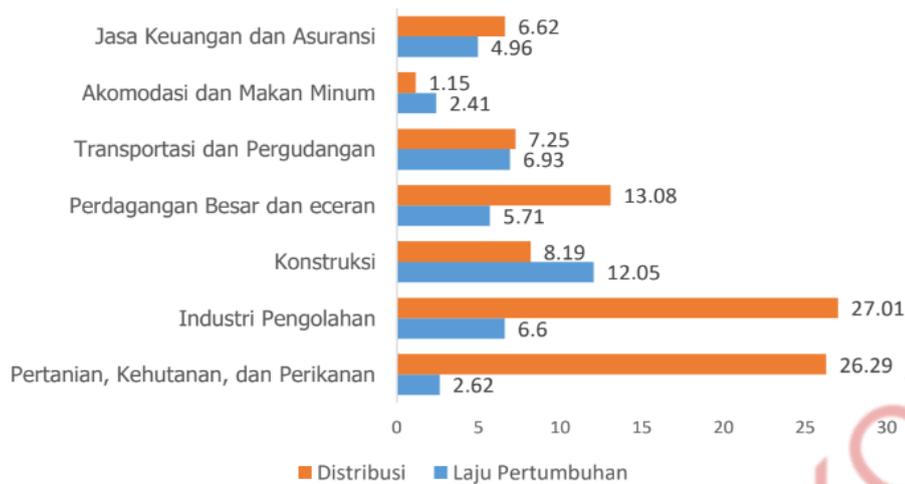
1. **Pengembangan Ekonomi Berbasis Agribisnis dan Agroindustri:** Sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan sebagai pilar ekonomi lokal harus dikembangkan melalui hilirisasi dan teknologi.
2. **Pariwisata Berkelanjutan dan Ekowisata:** Dengan potensi alam seperti Taman Nasional Tanjung Puting, Kobar harus mengembangkan pariwisata berbasis alam dan budaya, menarik wisatawan sambil menjaga kelestarian lingkungan.
3. **Energi Terbarukan:** Pembangunan energi terbarukan seperti PLTS dan biomassa sesuai dengan potensi SDA di daerah pedesaan dan perkebunan.
4. **Pembangunan Infrastruktur Berkualitas:** Pembangunan infrastruktur dasar dan transportasi untuk mengoptimalkan konektivitas wilayah, mendukung sektor-sektor unggulan, serta mendukung daya saing ekonomi daerah.
5. **Peningkatan Kualitas SDM:** Fokus pada pendidikan, kesehatan, dan teknologi, sejalan dengan prioritas nasional dalam transformasi sosial dan ekonomi.

Sintesis kebijakan ini dirancang tidak hanya untuk mengoptimalkan potensi yang ada, tetapi juga untuk menghadapi tantangan-tantangan strategis yang meliputi perubahan iklim, dinamika ekonomi global, dan kebutuhan akan pembangunan inklusif. Dengan pendekatan yang integratif dan berbasis data, dokumen ini diharapkan mampu menjadi landasan yang kuat bagi pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat menuju 1 abad yang berdaya saing dan berkelanjutan.

4.2 ANALISIS EKONOMI

4.2.1 Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha

Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2022 tumbuh 6,01 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi pada lapangan usaha industri pengolahan sebesar 27,01 persen, diikuti pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 26,29 persen. Berikut ini peranan dan laju pertumbuhan beberapa lapangan usaha di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2021:



Gambar 4. 1. Peranan dan Laju Pertumbuhan Beberapa Lapangan Usaha di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2021 (persen)

Sumber: BPS Kabupaten Kotawaringin Barat 2023; Kajian Penghitungan Nilai Tambah Ekonomi Kreatif Kabupaten Kotawaringin Barat 2023

Perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2021 tumbuh sebesar 5,05 persen. Dari sisi produksi, semua lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif. Laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha kategori Konstruksi sebesar 12,05 persen dan diikuti jasa transportasi dan pergudangan sebesar 6,93 persen dan industri pengolahan sebesar 6,60 persen. Sementara laju pertumbuhan terendah dimiliki oleh lapangan usaha kategori penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 2,41 persen, kategori pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 2,62 persen.

1. Konstruksi mencatat laju pertumbuhan tertinggi sebesar 12,05%, yang mencerminkan adanya peningkatan investasi dalam pembangunan infrastruktur. Ini menjadi indikasi bahwa sektor konstruksi memiliki peran vital dalam mendukung kebutuhan fasilitas dan aksesibilitas wilayah.
2. Transportasi dan Pergudangan menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi sebesar 6,93%. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan yang semakin meningkat akan transportasi dan logistik seiring dengan pertumbuhan sektor perdagangan dan peningkatan aktivitas ekonomi secara keseluruhan.
3. Industri Pengolahan juga memiliki kontribusi besar dengan laju pertumbuhan 6,60%. Industri pengolahan, terutama yang berbasis pada hasil-hasil pertanian dan perkebunan seperti kelapa sawit, berpotensi untuk mendukung hilirisasi produk lokal dan meningkatkan nilai tambah ekonomi bagi daerah.

Struktur perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat menurut lapangan usaha tahun 2021 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu lapangan usaha kategori Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 27,01 persen, kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan

kontribusi sebesar 26,29 persen, serta kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,08 persen.

4.2.2 Sektor/Sub Sektor Unggulan

1. Analisis Location Quotient (LQ)

Analisis Location Quotient (LQ) merupakan analisis untuk mengetahui sektor basis di suatu wilayah. Analisis ini digunakan untuk menganalisis sektor yang berpotensi untuk diekspor ke luar wilayah sedangkan sektor non basis merupakan sektor yang tidak berpotensi untuk diekspor atau hanya dapat mencukupi kebutuhan wilayahnya sendiri. Tabel 4.1 menjelaskan hasil penghitungan LQ di Kabupaten Kotawaringin Barat. Pada tabel ini menjelaskan bahwa nilai PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2021 mengalami peningkatan dibanding tahun 2018. Ketersediaan publikasi data PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat tersedia series tahun 2017-2021 sedangkan PDRB Provinsi Kalimantan Tengah tersedia series tahun 2018 – 2022 dipilih berdasarkan asumsi analisis 4 tahunan yang diasumsikan perekonomian dalam 4 tahun tersebut relatif telah terjadi beberapa perubahan untuk tahun yang akan dianalisis atau relatif lebih stabil bila dibandingkan dengan analisis 1 tahun/tahun sebelumnya. Oleh karena itu, analisis LQ untuk periode 2018 dan 2021 dijelaskan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 juga menjelaskan sektor lapangan usaha yang bernilai LQ > 1 merupakan sektor basis (sektor yang berpotensi diekspor ke luar wilayah). Dari Tabel 0.1, terdapat 7 (tujuh) sektor basis di Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu Industri Pengolahan, Jasa Keuangan dan Asuransi, Pertanian Kehutanan dan Perikanan, Transportasi dan Pergudangan, Jasa Perusahaan, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Daur Ulang. Serta terdapat 11 sektor non basis yaitu Konstruksi, Real estate, Informasi dan Komunikasi, Jasa lainnya, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Kesehatan, Pengadaan Listrik dan Gas, Jasa Pendidikan, Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib serta Pertambangan dan Penggalian.

Tabel 4. 2. Hasil Perhitungan LQ Kabupaten Kotawaringin Barat

NO	LAPANGAN USAHA	2018	2019	2020	2021	RATA-RATA LQ	KETERANGAN
1	Industri Pengolahan	1.67	1.69	1.70	1.69	1.68	Basis
2	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.50	1.51	1.48	1.45	1.48	Basis
3	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.20	1.17	1.16	1.15	1.17	Basis
4	Transportasi dan Pergudangan	1.29	1.31	1.22	1.26	1.27	Basis
5	Jasa Perusahaan	1.17	1.16	1.12	1.15	1.15	Basis
6	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	1.06	1.04	1.05	1.07	1.05	Basis

NO	LAPANGAN USAHA	2018	2019	2020	2021	RATA-RATA LQ	KETERANGAN
7	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.08	1.10	0.98	0.98	1.03	Basis
8	Konstruksi	1.00	0.97	0.98	1.00	0.99	Non Basis
9	Real Estate	0.89	0.91	0.92	0.91	0.91	Non Basis
10	Informasi dan Komunikasi	0.80	0.81	0.80	0.79	0.80	Non Basis
11	Jasa Lainnya	0.94	0.95	0.92	0.95	0.94	Non Basis
12	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.75	0.75	0.72	0.77	0.75	Non Basis
13	Jasa Kesehatan	0.60	0.62	0.70	0.70	0.66	Non Basis
14	Pengadaan Listrik dan Gas	0.65	0.65	0.57	0.59	0.62	Non Basis
15	Jasa Pendidikan	0.55	0.58	0.58	0.57	0.57	Non Basis
16	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0.50	0.51	0.52	0.52	0.51	Non Basis
17	Pertambangan dan Penggalan	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	Non Basis

Sumber : Dokumen Kajian KEK Kotawaringin Barat, 2023

Tujuh sektor unggulan (leading sectors) yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan sektor-sektor yang dapat dijadikan prioritas bagi perekonomian Kotawaringin Barat terutama sektor pertanian dan sektor industri pengolahan yang memiliki hubungan aktif positif serta sektor lainnya yang saling berhubungan.

Sektor Industri Pengolahan merupakan sektor dengan nilai rata-rata LQ tertinggi (1,68), artinya sektor Industri pengolahan. Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki beberapa perusahaan besar pada sektor ini. Salah satu output dari sektor ini yang paling dominan di Kotawaringin Barat adalah CPO (Crude Palm Oil) yang merupakan bahan baku pembuatan minyak nabati dan turunannya. Industri ini merupakan industri yang cukup besar di Kalimantan Tengah sehingga menyebabkan sektor industri pengolahan menjadi sektor yang perlu diprioritaskan di Kotawaringin Barat. Sektor ini juga menjadi sector basis sejak tahun 2018 hingga tahun 2021.

Sektor jasa keuangan dan asuransi juga memiliki nilai rata-rata LQ (1,48) tertinggi kedua. Hal ini juga menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat pada sektor jasa keuangan dan asuransi meskipun sektor ini memberikan share yang kecil terhadap PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat. Sektor jasa keuangan dan asuransi menjadi sektor basis dikarenakan Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki perusahaan perkreditan yang cukup besar se-Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu BPR Lingga Sejahtera, BPR Marunting, dan BPR Pelangi. Ketiga perusahaan perkreditan ini cukup mendominasi perusahaan perkreditan lainnya yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah.

Sektor tertinggi ketiga adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan serta sektor Transportasi dan Pergudangan. Tingginya nilai rata-rata LQ (1,26) sektor pertanian sejalan dengan Tabel 4.2 yang menjelaskan distribusi tiap sektor terhadap PDRB, sehingga dapat disimpulkan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memiliki peran yang cukup besar terhadap PDRB dan memberikan multiplier effect bagi sektor lainnya. Sektor ini di Kabupaten Kotawaringin Barat bertumpu pada tanaman perkebunan dan komoditas kelapa sawit (masuk ke dalam sektor A). Sektor transportasi dan pergudangan juga memiliki nilai LQ yang sama dengan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, dapat menjadi sektor dengan nilai LQ tertinggi (sektor unggulan) di Kabupaten Kotawaringin Barat dikarenakan adanya pabrik pengolahan kelapa sawit yang didirikan di wilayah ini sehingga sector transportasi dan pergudangan share terhadap PDRB tiap tahun selalu meningkat.

2. Analisis Shift Share

Dari perhitungan diatas diperoleh bahwa : Proportional Shift (S_p) untuk total PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 218.489.200.000,00 Ini berarti bahwa Kabupaten Kotawaringin Barat berkonsentrasi pada sektor-sektor yang pertumbuhannya cepat secara Provinsi. Seluruh sektor-sektor pembentuk PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat pertumbuhannya cepat secara Provinsi.

Differential Shift (S_d) untuk total PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap PDRB Kalimantan Timur sebesar 323.310.310.000,00 Ini berarti bahwa Kabupaten Kotawaringin Barat secara keseluruhan berhasil tumbuh lebih cepat dari kabupaten/kota lainnya seKalimantan Tengah. Hanya sektor pertanian Kehutanan dan Perkebunan, Pengadaan listrik dan Gas, Pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang, Transportasi dan pergudangan, Penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi serta Jasa lainnya yang pertumbuhannya lambat.

Tabel 4. 3. Perhitungan Shift Share Kabupaten Kotawaringin Barat Terhadap Provinsi Kalimantan Tengah

NO	LAPANGAN USAHA	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT			PROVINSI KALIMANTAN TENGAH		
		2018	2021	PERUBAHAN	2018	2021	PERUBAHAN
		Ai0	Ai1	Ci = Ai1/Ai0	Bi0	Bi1	Di = Bi1/Bi0
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,326,474.50	3,623,269.40	1.09	19,824,600.00	22,049,300.00	1.11
B	Pertambangan dan Penggalian	146,521.00	149,739.10	1.02	14,754,100.00	14,439,100.00	0.98
C	Industri Pengolahan	3,162,383.50	3,653,988.30	1.16	14,736,800.00	16,163,400.00	1.10
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,546.00	8,275.80	1.26	78,800.00	105,500.00	1.34

NO	LAPANGAN USAHA	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT			PROVINSI KALIMANTAN TENGAH		
		2018	2021	PERUBAHAN	2018	2021	PERUBAHAN
		Ai0	Ai1	Ci = Ai1/Ai0	Bi0	Bi1	Di = Bi1/Bi0
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10,333.90	11,909.00	1.15	74,500.00	90,900.00	1.22
F	Konstruksi	1,047,401.20	1,106,366.00	1.06	7,994,900.00	8,417,700.00	1.05
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	1,500,562.70	1,738,206.20	1.16	11,241,100.00	12,150,700.00	1.08
H	Transportasi dan Pergudangan	1,007,390.80	1,067,949.60	1.06	6,051,200.00	6,480,200.00	1.07
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	156,031.60	160,317.70	1.03	1,608,700.00	1,687,300.00	1.05
J	Informasi dan Komunikasi	127,043.30	158,783.70	1.25	1,147,900.00	1,568,400.00	1.37
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	573,308.30	715,749.30	1.25	2,972,300.00	3,683,900.00	1.24
L	Real Estate	215,235.10	242,255.00	1.13	1,874,900.00	1,997,300.00	1.07
M,N	Jasa Perusahaan	5,255.50	5,057.20	0.96	35,000.00	32,800.00	0.94
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	353,945.00	460,523.30	1.30	5,514,100.00	5,928,700.00	1.08
P	Jasa Pendidikan	296,118.60	353,363.50	1.19	4,098,400.00	4,641,200.00	1.13
Q	Jasa Kesehatan	127,782.10	199,385.40	1.56	1,646,800.00	2,140,200.00	1.30
R,S,T,U	Jasa Lainnya	110,947.70	78,847.50	0.71	912,200.00	904,900.00	0.99
	TOTAL	12,173,280.80	13,733,984.00	1.13	94,566,300.00	102,481,500.00	1.08

Sumber : Dokumen Kajian KEK Kotawaringin Barat, 2023

Tabel 4. 4. Perhitungan Shift Share Kabupaten Kotawaringin Barat Terhadap Provinsi Kalimantan Tengah

NO	SEKTOR	G	R	S	Sp	Sd
		(Ai1 - Ai0)	(Ai0 * Di - Ai0)	(G - R)	[Ai0 * (Di-Dt)]	[Ai0 * (Ci-Di)]
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	296,794.90	373,294.18	-76,499.28	94,868.24	(76,499.28)
B	Pertambangan dan Penggalian	3,218.10	-3,128.22	6,346.32	(15,392.03)	6,346.32
C	Industri Pengolahan	491,602.80	306,135.41	185,467.39	41,443.89	185,467.39

NO	SEKTOR	G	R	S	Sp	Sd
		(Ai1 - Ai0)	(Ai0 * Di - Ai0)	(G - R)	[Ai0 * (Di-Dt)]	[Ai0 * (Ci-Di)]
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,729.80	2,218.00	-488.20	1,670.10	(-488.20)
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,575.10	2,274.85	-699.75	1,409.90	(-699.75)
F	Konstruksi	58,964.80	55,390.46	3,574.34	(32,277.02)	3,574.34
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	237,643.50	121,421.55	116,221.95	(-4,175.55)	116,221.95
H	Transportasi dan Pergudangan	60,558.80	71,419.00	-10,860.20	(-12,899.62)	(-10,860.20)
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,286.10	7,623.60	-3,337.50	(-5,436.25)	(-3,337.50)
J	Informasi dan Komunikasi	31,740.40	46,538.64	-14,798.24	35,905.12	(-14,798.24)
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	142,441.00	137,256.06	5,184.94	89,270.15	5,184.94
L	Real Estate	27,019.90	14,051.30	12,968.60	(3,963.88)	12,968.60
M, N	Jasa Perusahaan	-198.30	-330.35	132.05	(770.23)	132.05
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	106,578.30	26,612.79	79,965.51	(3,012.41)	79,965.51
P	Jasa Pendidikan	57,244.90	39,218.52	18,026.38	14,433.39	18,026.38
Q	Jasa Kesehatan	71,603.30	38,284.97	33,318.33	27,589.61	33,318.33
R, S, T, U	Jasa Lainnya	-32,100.20	-887.87	-31,212.33	(10,174.20)	(-31,212.33)
TOTAL		1,560,703.20	1,018,903.69	541,799.51	218,489.20	323,310.31

Sumber : Dokumen Kajian KEK Kotawaringin Barat, 2023

Tabel 4. 5. Perhitungan Klassen Kabupaten Kotawaringin Barat Terhadap Provinsi Kalimantan Tengah

NO	LAPANGAN USAHA	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT		PROVINSI KALIMANTAN TENGAH		POSISI
		RATA-RATA PANGSA	RATA-RATA PERTUMBUHAN	RATA-RATA PANGSA	RATA-RATA PERTUMBUHAN	
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	24.87	6.77	19.97	7.08	Sektor Potensial (Kuadran III)
B	Pertambangan dan Penggalian	1.27	4.25	11.88	-0.29	Sektor Maju tapi Tertekan (Kuadran II)
C	Industri Pengolahan	25.54	7.52	15.70	5.11	Sektor Maju dan Tumbuh dengan Pesat (Kuadran I)
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.05	7.36	0.08	9.01	Sektor Relatif Tertinggal (Kuadran IV)

NO	LAPANGAN USAHA	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT		PROVINSI KALIMANTAN TENGAH		POSISI
		RATA-RATA PANGSA	RATA-RATA PERTUMBUHAN	RATA-RATA PANGSA	RATA-RATA PERTUMBUHAN	
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.09	7.00	0.09	8.56	Sektor Relatif Tertinggal (Kuadran IV)
F	Konstruksi	9.11	5.00	9.74	1.68	Sektor Maju tapi Tertekan (Kuadran II)
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	13.26	7.44	12.86	11.21	Sektor Potensial (Kuadran III)
H	Transportasi dan Pergudangan	8.59	8.22	7.13	8.24	Sektor Potensial (Kuadran III)
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.36	5.74	1.89	6.96	Sektor Relatif Tertinggal (Kuadran IV)
J	Informasi dan Komunikasi	0.90	2.96	0.99	8.25	Sektor Relatif Tertinggal (Kuadran IV)
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4.92	2.17	3.18	2.13	Sektor Maju dan Tumbuh dengan Pesat (Kuadran I)
L	Real Estate	1.93	6.25	2.24	8.59	Sektor Relatif Tertinggal (Kuadran IV)
M, N	Jasa Perusahaan	0.05	4.98	0.04	7.79	Sektor Potensial (Kuadran III)
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.24	-0.26	6.38	7.27	Sektor Relatif Tertinggal (Kuadran IV)
P	Jasa Pendidikan	2.65	6.97	4.74	8.47	Sektor Relatif Tertinggal (Kuadran IV)
Q	Jasa Kesehatan	1.17	5.98	1.99	8.57	Sektor Relatif Tertinggal (Kuadran IV)
R, S, T, U	Jasa Lainnya	1.00	7.80	1.07	8.38	Sektor Relatif Tertinggal (Kuadran IV)
TOTAL		100.00	6.48	100.00	5.61	

Sumber : Dokumen Kajian KEK Kotawaringin Barat, 2023

3. Analisis Topologi Klassen

Hasil analisa menggunakan metode klassen di atas didapatkan informasi sebagai berikut :

- 1) Sektor Industri Pengolahan serta Jasa Keuangan dan Asuransi merupakan sector maju dan tumbuh dengan pesat,

- 2) Sektor industri pengolahan serta sector konstruksi merupakan sector maju dan tapi tertekan,
- 3) Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan sepeda, Sektor Transportasi dan Pergudangan serta Sektor Jasa Perusahaan merupakan sector potensial,
- 4) Sektor Pengadaan Listrik dan Gas, Sektor Pengadaan Air, Pengolahan Sampah Limbah dan Daur Ulang, Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Sektor Informasi dan Komunikasi, Sektor Real Estate, Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Sektor Jasa Pendidikan, Sektor Jasa Kesehatan, Sektor Jasa Lainnya merupakan Sektor Relatif Tertinggal.

Secara umum dari analisa LQ, Shift share dan tipologi kelas di atas gambaran dari Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel dibawah, dimana untuk sector basis Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan analisa data PDRB tahun 2018 hingga tahun 2021 adalah sektor Industri Pengolahan, Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, Sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan, Sektor Transportasi dan Pergudangan, Sektor Jasa Perusahaan, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda, Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang. Proportional Shift (Sp), seluruh sector pembentuk PDRB pada Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki nilai tambah bruto lebih baik jika dibandingkan dengan sector-sector pembentuk PDRB dari Propinsi Kalimantan Tengah. Differential Shift (Sd), sektor Pertambangan dan Pengalihan; sektor Industri Pengolahan, Sektor Konstruksi, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda, Sektor Kasa Keuangan dan Asuransi, Sektor Real Estate, Sektor Jasa Perusahaan, Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial, Sektor Jasa Pendidikan, Sektor Jasa Kesehatan memiliki pertumbuhan ekonomi daerah dan nilai tambah bruto lebih cepat dibandingkan dengan sector yang sama pada Provinsi.

Tabel 4. 6. Analisa Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Aspek	Parameter	Makna
1	Tipologi Klassen	Kuadran 1	Sektor Industri Pengolahan serta Jasa Keuangan dan Asuransi
2	LQ	LQ > 1 Sektor Basis	Sektor Industri Pengolahan, Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, Sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan, Sektor Transportasi dan Pergudangan, Sektor Jasa Perusahaan, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda, Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
3	Proportional Shift (Sp)	Positif	Tumbuh cepat di Provinsi Pada Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Sektor Industri Pengolahan, Sektor Pengadaan Listrik dan Gas, Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Sektor Informasi dan Komunikasi, Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, Sektor Jasa Pendidikan, Sektor Jasa Kesehatan

No	Aspek	Parameter	Makna
4	Differential Shift (Sd)	Positif	Pertumbuhan lebih cepat dibanding Provinsi pada Sektor Industri Pengolahan, Sektor Konstruksi, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda, Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, Sektor Real Estate, Sektor Jasa Perusahaan, Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial, Sektor Jasa Pendidikan, Sektor Jasa Kesehatan

Sumber : Dokumen Kajian KEK Kotawaringin Barat, 2023

4.2.3 Komoditas Unggulan

1) Analisa Komoditas Pangan

Kebutuhan paling mendasar bagi sumber daya manusia adalah pangan. Ketersediaan pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup, diperlukan dalam mencapai ketahanan pangan. Faktor lain yang merupakan faktor penting dalam mencapai ketahanan pangan adalah tersedianya dan terdistribusinya pangan yang terjangkau.

➤ Analisa Komoditas Tanaman Pangan

Analisa Komoditas tanaman pangan terdiri analisa Komoditas unggulan, analisa laju pertumbuhan serta analisa typologi klassen. Berikut ini analisa Komoditas unggulan.

➤ Analisa Komoditas Unggulan Tanaman Pangan

Perhitungan terkait komoditas menggunakan metode LQ. Metode LQ adalah instrument perhitungan untuk melihat komoditas unggulan disuatu wilayah.

$$LQ = \frac{vi/vt}{Vi/Vt}$$

vi =Jumlah produksi komoditas pertanian i di kecamatan j

vt =Total seluruh komoditas pertanian di kecamatan

Vi =Jumlah produksi komoditas pertanian i di Kabupaten Kotawaringin Barat

Vt =Total seluruh komoditas pertanian di Kabupaten Kotawaringin Barat

Berikut ini hasil perhitungan LQ Tanaman Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat

Tabel 4. 7. Analisa Komoditas Unggulan Tanaman Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap Propinsi Kalimantan Tengah (Ton) Tahun 2023

No	Komoditas	2018	2019	2020	2021	2022	Jumlah	Rata-rata
1	Padi	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,03	0,01
2	Jagung	0,00	0,05	0,04	0,01	0,11	0,21	0,04
3	Kedelai	0,00	0,02	0,02	0,01	0,00	0,06	0,01
4	Ubi Kayu	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,02	0,00
5	Ubi Jalar	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00

Sumber: Dokumen Kajian Pengembangan Food Estate di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023

Keterangan:

LQ < 1 Sektor Non basis (Potensial Dikembangkan)

LQ > 1 Sektor Basis (Unggulan)

Jika nilai LQ suatu komoditas >1 , maka komoditas tersebut dapat dikatakan sebagai komoditas unggulan. Jika nilai LQ suatu komoditas <1 , maka komoditas tersebut bukan komoditas unggulan tapi sebagai penunjang. Komoditas unggulan Kabupaten kotawaringin Barat secara keseluruhan jika di bandingkan dengan hasil komoditas Provinsi Kalimantan Tengah merupakan sektor non basis. Sektor non basis ini bukan merupakan sektor unggulan namun potensial untuk dikembangkan.

➤ **Analisa Laju Pertumbuhan Komoditas Tanaman Pangan**

Perubahan laju pertumbuhan komoditas pada kurun waktu tertentu dapat diuji melalui Dynamic Location Quotient (DLQ) sehingga perubahan tersebut dapat diketahui. Naik turunnya LQ dapat dilihat untuk sektor tertentu pada dimensi waktu yang berbeda. Nilai DLQ > 1 maka potensi perkembangan sektor i di suatu daerah lebih cepat jika disbanding dengan sektor yang sama dalam lingkup nasional. Sebaliknya, jika DLQ < 1 , maka potensi perkembangan komoditas i di daerah lebih rendah jika dibanding nasional secara keseluruhan. Berikut ini hasil analisa DLQ komoditas tanaman pangan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tabel 4. 8. Analisa Laju Pertumbuhan (DLQ) komoditas tanaman pangan Kotawaringin Barat Tahun 2023

No	Komoditas	2018 - 2019	2020 - 2019	2021 - 2020	2022 - 2021	Jumlah	Rata-rata
1	Padi	-1,00	7,49	11,48	1,68	19,65	4,91
2	Jagung	-5,66	-0,05	-47,10	1,19	-51,61	-12,90
3	Kedelai	0,33	2,72	-28,08	-0,31	-25,33	-6,33
4	Ubi Kayu	-1,16	-5,12	-0,91	32,28	25,10	6,27
5	Ubi Jalar	-2,32	0,00	0,00	0,00	-2,32	-0,58

Sumber: Dokumen Kajian Pengembangan Food Estate di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023

Keterangan:

DLQ < 1 Sektor Non basis (Potensial Dikembangkan)

DLQ > 1 Sektor Basis (Unggulan)

Jika nilai DLQ suatu komoditas >1 , maka komoditas tersebut dapat dikatakan sebagai komoditas unggulan. Jika nilai DLQ suatu komoditas <1 , maka komoditas tersebut bukan komoditas unggulan tapi sebagai penunjang. Komoditas unggulan Kabupaten kotawaringin Barat secara keseluruhan jika di bandingkan dengan hasil komoditas Propinsi Kalimantan Tengah merupakan sektor non basis. Sektor unggulan pada Analisa DLQ terdiri dari Padi dan Ubi Kayu.

➤ **Analisa Typologi Klassen Komoditas Tanaman Pangan**

Analisa typologi klassen digunakan untuk mengetahui pertumbuhan serta kontribusi komoditas. Komoditas tersebut terbagi menjadi beberapa klaster. Hasil analisa typologi klassen membagi menjadi 4 kuadran, dimana kuadran I merupakan komoditas prima, kuadran II (Komoditas

Berkembang), kuadran III (Komoditas Potensial) dan kuadran IV (Komoditas tidak berkembang). Lebih jelas pada tabel berikut.

Tabel 4. 9. Analisa Proporsi Kontribusi Tanaman Pangan Kotawaringin Barat Tahun 2023

NO	Komoditas	Rata-Rata Kontribusi (Kij)	Rata-Rata Pertumbuhan (Rij)
1	Padi	0,045	-30,41
2	Jagung	0,045	-54,19
3	Kedelai	0,000	-73,09
4	Ubi Kayu	0,004	-230,47
5	Ubi Jalar	0,000	20,83

Sumber: Dokumen Kajian Pengembangan Food Estate di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023

Keterangan:

- Rata-rata kontribusi Komoditas maupun Progress Pertumbuhan di Kab. Kobar lebih besar terhadap rata-rata kontribusi Komoditas & Progress Pertumbuhan Prop Kalteng (**Kij > Kin**) & (**Rij > Rin**)
- Rata-rata kontribusi Komoditas di Kab. Kobar lebih besar terhadap rata-rata kontribusi Komoditas Propinsi Kalteng, namun Progress Pertumbuhan lebih kecil terhadap rata-rata Progress Pertumbuhan Prop Kalteng (**Kij > Kin**) & (**Rij < Rin**)
- Rata-rata kontribusi Komoditas di Kab. Kobar lebih kecil terhadap rata-rata kontribusi Komoditas Propinsi Kalteng, namun Progress Pertumbuhan lebih besar terhadap rata-rata Progress Pertumbuhan Prop Kalteng (**Kij < Kin**) & (**Rij > Rin**)
- Rata-rata kontribusi Komoditas & Progress Pertumbuhan di Kab. Kobar lebih kecil terhadap rata-rata kontribusi Komoditas & Progress Pertumbuhan Prop Kalteng (**Kij < Kin**) & (**Rij < Rin**)

Berdasarkan hasil Pendekatan Tipologi Klassen diperoleh hasil bahwa Komoditas yang termasuk dalam subsektor potensial yaitu subsektor tanaman hortikultura dan peternakan dan perikanan (bandeng). Untuk Komoditas tanaman pangan berada pada kuadran IV yakni komoditas tidak berkembang.

Subsektor tanaman pangan masih bisa ditingkatkan menjadi subsektor dengan kategori berkembang maupun prima tetapi harus diimbangi dengan upaya peningkatan mutu serta pemenuhan infrastruktur penunjang pertanian serta menitikberatkan pada sumber daya yang ada terutama sumberdaya manusia bidang subsektor pertanian tanaman pangan dengan jiwa entrepreneur. Untuk lebih jelas kuadran hasil pertanian pada tabel berikut:

Tabel 4. 10. Kuadran Hasil Analisa Typologi Klassen Tanaman Pangan Kotawaringin Barat Tahun 2023



Sumber: Dokumen Kajian Pengembangan Food Estate di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023

Tanaman pangan yang masuk dalam kategori komoditas berkembang adalah ubi jalar, sedangkan padi, jagung, ubi kayu dan kedelai adalah komoditas tidak berkembang.

2) Analisa Komoditas Tanaman Hortikultura

Analisa Komoditas tanaman hortikultura terdiri analisa Komoditas unggulan, analisa laju pertumbuhan serta analisa typologi klassen. Berikut ini analisa Komoditas unggulan.

➤ Analisa Komoditas Unggulan Tanaman Hortikultura

Perhitungan terkait komoditas menggunakan metode LQ. Metode LQ adalah instrument perhitungan untuk melihat komoditas unggulan disuatu wilayah.

$$LQ = \frac{vi/vt}{Vi/Vt}$$

vi =Jumlah produksi komoditas hortikultura i di kecamatan j

vt =Total seluruh komoditas hortikultura di kecamatan

Vi =Jumlah produksi komoditas hortikultura i di Kabupaten Kotawaringin Barat

Vt =Total seluruh komoditas hortikultura di Kabupaten Kotawaringin Barat

Berikut ini hasil perhitungan LQ Hortikultura Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tabel 4. 11. Analisa Komoditas Unggulan Tanaman Hortikultura Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap Propinsi Kalimantan Tengah (Ton) Tahun 2023

No	Komoditas	2018	2019	2020	2021	2022	Jumlah	Rata-rata
1.	Bandeng			0,22	0,07		0,29	0,14
2.	Bawang Merah	0,17	0,20	0,14	0,48	0,30	1,29	0,26
3.	Bawang Daun	0,42	0,49	0,43	0,68	0,60	2,63	0,53
4.	Petsai/Sawi	0,26	0,19	0,37	0,60	0,52	1,95	0,39
5.	Kacang Panjang	0,12	0,13	0,21	0,25	0,20	0,92	0,18
6.	Cabai Besar	0,39	0,16	0,12	0,36	0,39	1,43	0,29

No	Komoditas	2018	2019	2020	2021	2022	Jumlah	Rata-rata
7.	Cabai Rawit	1,07	0,16	0,15	0,31	0,27	1,95	0,39
8.	Tomat	0,18	0,18	0,24	0,19	0,12	0,92	0,18
9.	Terung	0,11	0,15	0,20	0,18	0,16	0,79	0,16
10.	Buncis	0,26	0,19	0,24	0,31	0,35	1,34	0,27
11.	Ketimun	0,06	0,09	0,15	0,23	0,22	0,75	0,15
12.	Kangkung	0,13	0,12	0,30	0,24	0,21	1,00	0,20
13.	Bayam	0,10	0,10	0,16	0,41	0,35	1,12	0,22
14.	Melon	0,34	0,18	0,40	0,31	0,22	1,46	0,29
15.	Semangka	0,73	0,35	0,35	0,40	0,46	2,29	0,46
16.	Alpukat	0,92	0,82	0,75	0,37	0,39	3,26	0,65
17.	Belimbing	0,15	0,13	0,17	0,39	0,79	1,62	0,32
18.	Duku/Langsat	0,04	0,25	0,17	0,28	0,42	1,15	0,23
19.	Durian	0,10	0,08	0,02	0,02	0,04	0,26	0,05
20.	Jambu Biji	0,31	0,38	0,16	0,29	0,86	1,99	0,40
21.	Jambu Air	0,53	0,50	0,19	0,37	0,56	2,15	0,43
22.	Jeruk Siam/Kepron	0,13	0,15	0,14	0,18	0,33	0,93	0,19
23.	Mangga	0,08	0,15	0,06	0,12	0,99	1,40	0,28
24.	Manggis	0,02	0,06	0,05	0,03	0,24	0,40	0,08
25.	Nangka/Cempedak	0,16	0,14	0,13	0,22	0,65	1,30	0,26
26.	Nenas*)	0,12	0,07	0,03	0,64	0,32	1,19	0,24
27.	Pepaya	0,40	0,39	0,29	0,64	0,50	2,22	0,44
28.	Pisang*)	0,24	0,21	0,18	0,49	0,42	1,54	0,31
29.	Rambutan	0,07	0,13	0,10	0,10	0,54	0,93	0,19
30.	Salak*)	0,24	0,09	0,02	0,36	0,79	1,51	0,30
31.	Sawo	0,27	0,34	0,29	0,68	0,86	2,44	0,49
32.	Markisa/Konyal	0,50	0,67	0,55	-	-	1,71	0,34
33.	Sirsak	0,33	0,30	0,22	0,59	0,68	2,13	0,43
34.	Sukun	0,33	0,25	0,26	0,17	3,46	4,47	0,89
35.	Melijo	0,80	0,43	0,17	0,41	0,55	2,36	0,47
36.	Petai	0,26	0,17	0,15	0,10	2,57	3,25	0,65
37.	Jengkol	0,19	0,10	0,17	0,19	1,55	2,20	0,44
38.	Jahe	0,07	0,05	0,01	0,01	0,02	0,16	0,03
39.	Laos / Lengkuas	0,08	0,06	0,01	0,01	0,03	0,20	0,04
40.	Kencur	0,12	0,10	0,04	0,02	0,02	0,31	0,06
41.	Kunyit	0,08	0,07	0,02	0,01	0,07	0,25	0,05
42.	Lempuyang	0,02	0,02	-	0,01	0,04	0,09	0,02
43.	Temulawak	0,16	0,14	0,01	0,03	0,02	0,35	0,07
44.	Temu Ireng	0,25	0,06	0,03	0,07	0,06	0,47	0,09
45.	Temu Kunci	0,48	1,44	1,13	0,10	1,04	4,18	0,84

No	Komoditas	2018	2019	2020	2021	2022	Jumlah	Rata-rata
46.	Mengkudu / Pace	0,17	0,13	0,02	0,00	0,01	0,33	0,07
47.	Mahkota Dewa *)	0,24	0,17	0,01	-	0,00	0,43	0,09
48.	Lidah Buaya	0,05	0,14	1,09	-	0,04	1,32	0,26

Sumber: Dokumen Kajian Pengembangan Food Estate di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023

Keterangan:

LQ < 1 Sektor Non basis (Potensial Dikembangkan)

LQ > 1 Sektor Basis (Unggulan)

Jika nilai LQ suatu komoditas >1, maka komoditas tersebut dapat dikatakan sebagai komoditas unggulan. Jika nilai LQ suatu komoditas <1, maka komoditas tersebut bukan komoditas unggulan tapi sebagai penunjang. Komoditas unggulan Kabupaten kotawaringin Barat secara keseluruhan jika di bandingkan dengan hasil komoditas Propinsi Kalimantan Tengah merupakan sektor non basis. Sektor non basis ini bukan merupakan sektor unggulan namun potensial untuk dikembangkan.

➤ Analisa Laju Pertumbuhan Komoditas Tanaman Hortikultura

Perubahan laju pertumbuhan komoditas pada kurun waktu tertentu dapat diuji melalui Dynamic Location Quotient (DLQ) sehingga perubahan tersebut dapat diketahui. Naik turunnya LQ dapat dilihat untuk sektor tertentu pada dimensi waktu yang berbeda. Nilai DLQ > 1 maka potensi perkembangan sektor i di suatu daerah lebih cepat jika disbanding dengan sektor yang sama dalam lingkup nasional. Sebaliknya, jika DLQ < 1, maka potensi perkembangan komoditas i di daerah lebih rendah jika dibanding nasional secara keseluruhan. Berikut ini hasil analisa DLQ komoditas hortikultura kKabupaten Kotawaringin Barat.

Tabel 4. 12. Analisa Laju Pertumbuhan (DLQ) Komoditas Hortikultura Kotawaringin Barat Tahun 2023

No	Komoditas	2018 - 2019	2019 - 2020	2020 - 2021	2021- 2022	Jumlah	Rata-rata
1.	Bawang Merah	1,25	7,67	-0,57	0,23	8,58	2,14
2.	Bawang Daun	3,05	0,45	1,49	2,06	7,04	1,76
3.	Petsai/Sawi	4,64	0,83	3,13	2,13	10,73	2,68
4.	Kacang Panjang	1,49	1,32	2,12	2,59	7,53	1,88
5.	Cabai Besar	-4,70	-3,04	3,06	1,56	-3,11	-0,78
6.	Cabai Rawit	-5,34	-0,63	4,32	2,31	0,66	0,16
7.	Tomat	0,70	0,72	2,76	4,02	8,20	2,05
8.	Terung	1,89	1,05	2,45	2,08	7,47	1,87
9.	Buncis	0,33	0,80	1,53	1,18	3,84	0,96

No	Komoditas	2018 - 2019	2019 - 2020	2020 - 2021	2021- 2022	Jumlah	Rata-rata
10.	Ketimun	1,93	1,95	1,68	1,73	7,29	1,82
11.	Kangkung	1,95	1,39	3,85	2,09	9,29	2,32
12.	Bayam	1,50	1,97	-12,49	3,97	-5,05	-1,26
13.	Melon	-2,77	0,53	3,02	3,49	4,27	1,07
14.	Semangka	-6,71	0,71	2,85	0,67	-2,47	-0,62
15.	Alpukat	0,49	2,22	0,15	0,87	3,73	0,93
16.	Belimbing	-0,32	-2,15	0,55	-0,53	-2,45	-0,61
17.	Duku/Langsat	0,71	3,75	1,29	0,91	6,65	1,66
18.	Durian	-1,72	15,94	1,38	-0,08	15,52	3,88
19.	Jambu Biji	1,53	-5,61	0,60	-3,33	-6,81	-1,70
20.	Jambu Air	0,58	-4,68	0,40	-0,36	-4,06	-1,01
21.	Jeruk Siam/Kepron	0,25	1,65	1,01	-0,31	2,60	0,65
22.	Mangga	72,93	9,16	1,06	-4,30	78,85	19,71
23.	Manggis	1,35	2,90	0,12	-1,31	3,06	0,77
24.	Nangka/Cempedak	-0,56	1,76	3,57	-1,06	3,71	0,93
25.	Nenas*)	4,94	-0,01	16,04	5,91	26,89	6,72
26.	Pepaya	1,52	-0,05	0,97	3,25	5,69	1,42
27.	Pisang*)	-5,29	-0,32	1,62	3,80	-0,18	-0,05
28.	Rambutan	-1729,73	3,38	0,49	-1,85	-1727,71	-431,93
29.	Salak*)	10,25	-3,99	1,43	-0,57	7,13	1,78
30.	Sawo	-2,87	2,60	1,52	0,68	1,92	0,48
31.	Markisa/Konyal	0,47	0,00	0,00	0,00	0,47	0,12
32.	Sirsak	0,14	14,22	0,60	1,14	16,10	4,02
33.	Sukun	-3,03	0,73	0,24	-1,46	-3,53	-0,88
34.	Melinjo	-2,60	-0,34	1,70	-1,24	-2,48	-0,62
35.	Petai	-30,75	22,89	0,23	-3,64	-11,26	-2,82
36.	Jengkol	0,05	-0,20	0,46	-9,01	-8,71	-2,18
37.	Jahe	0,00	-394,42	0,34	9,71	-384,37	-96,09
38.	Laos / Lengkuas	0,00	-2,24	2,28	-16,36	-16,32	-4,08
39.	Kencur	0,00	-2,32	4,69	1,04	3,41	0,85
40.	Kunyit	0,00	-5,38	7,87	-50,84	-48,35	-12,09
41.	Lempuyang	0,00	0,00	0,79	0,29	1,08	0,27
42.	Temulawak	0,00	-3,99	0,21	-96,67	-100,46	-25,12
43.	Temu Ireng	0,00	4,77	2,25	-2,18	4,84	1,21
44.	Temu Kunci	0,00	2,72	-23,54	-1,68	-22,50	-5,63
45.	Mengkudu / Pace	0,00	-26,69	36,70	-1,45	8,56	2,14
46.	Mahkota Dewa *)	0,00	-2288,21	0,00	1,18	-2287,03	-571,76
47.	Lidah Buaya	0,00	0,03	0,00	0,56	0,59	0,15

Sumber: Dokumen Kajian Pengembangan Food Estate di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023

Keterangan:

DLQ < 1 Sektor Non basis (Potensial Dikembangkan)

DLQ > 1 Sektor Basis (Unggulan)

Jika nilai DLQ suatu komoditas >1, maka komoditas tersebut dapat dikatakan sebagai komoditas unggulan. Jika nilai DLQ suatu komoditas <1, maka komoditas tersebut bukan komoditas unggulan tapi sebagai penunjang. Komoditas unggulan Kabupaten kotawaringin Barat secara keseluruhan jika di bandingkan dengan hasil komoditas Propinsi Kalimantan Tengah merupakan sektor non basis. Sektor unggulan pada Analisa DLQ terdiri dari Bawang Merah, Bawang Daun, Petsai/Sawi, Kacang Panjang, Tomat, Terung, Ketimun, Kangkung, Melon, Duku/Langsar, Durian, Mangga, Nenas, Pepaya, Salak, Sirsak, Temu Ireng, dan Mengkudu / Pace.

➤ **Analisa Typologi Klassen Komoditas Tanaman Hortikultura**

Analisa typologi klassen digunakan untuk mengetahui pertumbuhan serta kontribusi komoditas. Komoditas tersebut terbagi menjadi beberapa klaster. Hasil analisa typologi klassen membagi menjadi 4 kuadran, dimana kuadran I merupakan komoditas prima, kuadran II (Komoditas Berkembang), kuadran III (Komoditas Potensial) dan kuadran IV (Komoditas tidak berkembang). Lebih jelas pada tabel berikut.

Tabel 4. 13. Analisa Proporsi Kontribusi Tanaman Hortikultura Kotawaringin Barat Tahun 2023

NO	Komoditas	Rata-Rata Kontribusi (Kij)	Rata-Rata Pertumbuhan (Rij)
1.	Bawang Merah	0,007	-145,73
2.	Bawang Daun	0,091	13,21
3.	Petsai/Sawi	0,111	2,60
4.	Kacang Panjang	0,138	0,44
5.	Cabai Besar	0,044	-31,23
6.	Cabai Rawit	0,232	-80,43
7.	Tomat	0,083	-24,28
8.	Terung	0,135	3,70
9.	Buncis	0,068	18,38
10.	Ketimun	0,119	22,50
11.	Kangkung	0,073	-7,29
12.	Bayam	0,043	18,55
13.	Melon	0,033	-70,01
14.	Semangka	0,686	-13,04
15.	Alpukat	0,027	15,50

NO	Komoditas	Rata-Rata Kontribusi (Kij)	Rata-Rata Pertumbuhan (Rij)
16.	Belimbing	0,041	28,91
17.	Duku/Langsar	0,067	-39,45
18.	Durian	0,074	-185,65
19.	Jambu Biji	0,150	16,03
20.	Jambu Air	0,088	-2,90
21.	Jeruk Siam/Kepron	0,179	9,63
22.	Mangga	0,101	-85,04
23.	Manggis	0,004	11,98
24.	Nangka/Cempedak	0,453	7,44
25.	Nenas*)	0,341	-59,65
26.	Pepaya	0,263	1,90
27.	Pisang*)	1,409	8,02
28.	Rambutan	0,278	-4,24
29.	Salak*)	0,031	-76,88
30.	Sawo	0,095	8,03
31.	Markisa/Konyal	0,000	-4,17
32.	Sirsak	0,042	0,06
33.	Sukun	0,104	26,71
34.	Melinjo	0,048	0,30
35.	Petai	0,119	13,76
36.	Jengkol	0,130	40,23
37.	Jahe	0,002	-99,11
38.	Laos / Lengkuas	0,002	-61,03
39.	Kencur	0,001	-54,62
40.	Kunyit	0,001	-48,09
41.	Lempuyang	0,000	19,77

Sumber: Dokumen Kajian Pengembangan Food Estate di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023

Keterangan:

 Rata-rata kontribusi Komoditas maupun Progress Pertumbuhan di Kab. Kobar lebih besar terhadap rata-rata kontribusi Komoditas & Progress Pertumbuhan Prop Kalteng (**Kij > Kin**) & (**Rij > Rin**)

 Rata-rata kontribusi Komoditas di Kab. Kobar lebih besar terhadap rata-rata kontribusi Komoditas Propinsi Kalteng, namun Progress Pertumbuhan lebih kecil terhadap rata-rata Progress Pertumbuhan Prop Kalteng (**Kij > Kin**) & (**Rij < Rin**)

 Rata-rata kontribusi Komoditas di Kab. Kobar lebih kecil terhadap rata-rata kontribusi Komoditas Propinsi Kalteng, namun Progress Pertumbuhan lebih besar terhadap rata-rata Progress Pertumbuhan Prop Kalteng (**Kij < Kin**) & (**Rij > Rin**)

 Rata-rata kontribusi Komoditas & Progress Pertumbuhan di Kab. Kobar lebih kecil terhadap rata-rata kontribusi Komoditas & Progress Pertumbuhan Prop Kalteng (**Kij < Kin**) & (**Rij < Rin**)

Berdasarkan hasil Pendekatan Tipologi Klassen diperoleh hasil bahwa Komoditas yang termasuk dalam subsektor potensial yaitu subsektor tanaman hortikultura dan peternakan dan perikanan (bandeng). Untuk Komoditas hortikultura tidak berada pada kuadran IV yakni komoditas tidak berkembang. Subsektor hortikultura sebagian besar merupakan komoditas prima. Untuk lebih jelas kuadran hasil phortikultura pada tabel berikut:

Tabel 4. 14. Kuadran Hasil Analisa Typologi Klassen Tanaman Hortikultura Kotawaringin Barat Tahun 2023

Duku/Langsap Jeruk Siam/Kepronk Manggis Nangka/Cempedak Sawo Markisa/Konyal I (Komoditas Prima)		- II (Komoditas Berkembang)	
III (Komoditas Potensial)		IV (Komoditas tidak berkembang)	
Kedelai Daging Babi Daging Itik Telur Ayam Buras Telur Itik Bandeng Bawang Merah Bawang Daun Petsai/Sawi Kacang Panjang Cabai Besar Cabai Rawit Tomat Terung Buncis Ketimun Kangkung Bayam Melon Semangka	Alpukat Belimbing Durian Jambu Biji Jambu Air Mangga Nenas*) Pepaya Pisang*) Rambutan Salak*) Sirsak Sukun Melinjo Petai Jengkol Jahe Laos / Lengkuas Kencur Kunyit Lempuyang	-	

Sumber: Dokumen Kajian Pengembangan Food Estate di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023

Komoditas prima subsektor hortikultura adalah Duku/Langsap, Jeruk Siam/Kepronk, Manggis, Nangka/Cempedak, Sawo dan Markisa/Konyal, sedangkan komoditas lainnya adalah komoditas potensial.

3) Analisa Komoditas Peternakan

Analisa Komoditas peternakan terdiri analisa Komoditas unggulan, analisa laju pertumbuhan serta analisa typologi kelas. Berikut ini analisa Komoditas unggulan.

➤ Analisa Komoditas Unggulan Peternakan

Perhitungan terkait komoditas menggunakan metode LQ. Metode LQ adalah instrument perhitungan untuk melihat komoditas unggulan disuatu wilayah.

$$LQ = \frac{vi/vt}{Vi/Vt}$$

vi =Jumlah produksi komoditas peternakan i di kecamatan j

vt =Total seluruh komoditas peternakan di kecamatan

Vi =Jumlah produksi komoditas peternakan i di Kabupaten Kotawaringin Barat

Vt =Total seluruh komoditas peternakan di Kabupaten Kotawaringin Barat

Berikut ini hasil perhitungan LQ Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tabel 4. 15. Analisa Komoditas Unggulan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap Propinsi Kalimantan Tengah (Ton) Tahun 2023

No	Komoditas	2018	2019	2020	2021	2022	Jumlah	Rata-rata
1.	Daging Sapi		0,19	0,16	0,22	0,22	0,79	0,20
2.	Daging Kambing		0,17	0,16	0,20	0,29	0,83	0,21
3.	Daging Babi		0,10	0,08	0,05	0,08	0,30	0,07
4.	Daging Ayam Buras		0,14	0,15	0,27	0,21	0,77	0,19
5.	Daging Ayam Ras		0,16	0,25	0,25	0,21	0,86	0,22
6.	Daging Itik		0,19	0,16	0,10	0,08	0,53	0,13
7.	Telur Ayam Buras		0,16	0,16	0,17	0,15	0,63	0,16
8.	Telur Ayam Ras		0,45	0,66	0,56		1,67	0,56
9.	Telur Itik		0,17	0,17	0,13	0,12	0,58	0,15

Sumber: Dokumen Kajian Pengembangan Food Estate di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023

Keterangan:

LQ < 1 Sektor Non basis (Potensial Dikembangkan)

LQ > 1 Sektor Basis (Unggulan)

Jika nilai LQ suatu komoditas >1, maka komoditas tersebut dapat dikatakan sebagai komoditas unggulan. Jika nilai LQ suatu komoditas <1, maka komoditas tersebut bukan komoditas unggulan tapi sebagai penunjang. Komoditas unggulan Kabupaten kotawaringin Barat secara keseluruhan jika di bandingkan dengan hasil komoditas Propinsi Kalimantan Tengah merupakan sektor non basis. Sektor non basis ini bukan merupakan sektor unggulan namun potensial untuk dikembangkan.

➤ Analisa Laju Pertumbuhan Peternakan

Perubahan laju pertumbuhan komoditas pada kurun waktu tertentu dapat diuji melalui Dynamic Location Quotient (DLQ) sehingga perubahan tersebut dapat diketahui. Naik turunnya LQ dapat dilihat untuk sektor tertentu pada dimensi waktu yang berbeda. Nilai DLQ > 1 maka potensi

perkembangan sektor i di suatu daerah lebih cepat jika dibandingkan dengan sektor yang sama dalam lingkup nasional. Sebaliknya, jika $DLQ < 1$, maka potensi perkembangan komoditas i di daerah lebih rendah jika dibanding nasional secara keseluruhan. Berikut ini hasil analisa DLQ komoditas peternakan kKabupaten Kotawaringin Barat.

Tabel 4. 16. Analisa Laju Pertumbuhan (DLQ) Komoditas Peternakan Kotawaringin Barat Tahun 2023

No	Komoditas	2018 - 2019	2019 - 2020	2021 - 2020	2022 - 2021	Jumlah	Rata-rata
1.	Daging Sapi		-1,51	-4,68	0,82	-5,37	-1,79
2.	Daging Kambing		0,20	10,38	54,87	65,44	21,81
3.	Daging Babi		0,03	-30,15	-0,74	-30,86	-10,29
4.	Daging Ayam Buras		0,71	23,51	-0,11	24,11	8,04
5.	Daging Ayam Ras		-0,14	1,35	0,22	1,43	0,48
6.	Daging Itik		-0,17	-32,76	0,44	-32,48	-10,83
7.	Telur Ayam Buras		0,97	12,17	-9,81	3,32	1,11
8.	Telur Ayam Ras		0,01	-6,31	0,00	-6,30	-2,10
9.	Telur Itik		-0,29	-4,88	-8,84	-14,01	-4,67

Sumber: Dokumen Kajian Pengembangan Food Estate di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023

Keterangan:

DLQ < 1 Sektor Non basis (Potensial Dikembangkan)

DLQ > 1 Sektor Basis (Unggulan)

Jika nilai DLQ suatu komoditas >1 , maka komoditas tersebut dapat dikatakan sebagai komoditas unggulan. Jika nilai DLQ suatu komoditas <1 , maka komoditas tersebut bukan komoditas unggulan tapi sebagai penunjang. Komoditas unggulan Kabupaten kotawaringin Barat secara keseluruhan jika di bandingan dengan hasil komoditas Propinsi Kalimantan Tengah merupakan sektor non basis. Sektor unggulan pada Analisa DLQ terdiri dari Daging Kambing, Daging Ayam Buras, Telur Ayam Buras.

➤ Analisa Typologi Klassen Komoditas Peternakan

Analisa typologi klassen digunakan untuk mengetahui pertumbuhan serta kontribusi komoditas. Komoditas tersebut terbagi menjadi beberapa klaster. Hasil analisa typologi klassen membagi menjadi 4 kuadran, dimana kuadran I merupakan komoditas prima, kuadran II (Komoditas Berkembang), kuadran III (Komoditas Potensial) dan kuadran IV (Komoditas tidak berkembang). Lebih jelas pada tabel berikut.

Tabel 4. 17. Analisa Proporsi Kontribusi Peternakan Kotawaringin Barat Tahun 2023

NO	Komoditas	Rata-Rata Kontribusi (Kij)	Rata-Rata Pertumbuhan (Rij)
1.	Daging Sapi	0,012	10,03
2.	Daging Kambing	0,001	14,23

NO	Komoditas	Rata-Rata Kontribusi (Kij)	Rata-Rata Pertumbuhan (Rij)
3.	Daging Babi	0,003	-7,69
4.	Daging Ayam Buras	0,006	10,08
5.	Daging Ayam Ras	0,104	4,96
6.	Daging Itik	0,000	-8,93
7.	Telur Ayam Buras	0,006	-0,01
8.	Telur Ayam Ras	0,037	2,19
9.	Telur Itik	0,004	-7,50

Sumber: Dokumen Kajian Pengembangan Food Estate di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023

Keterangan:

- Rata-rata kontribusi Komoditas maupun Progress Pertumbuhan di Kab. Kobar lebih besar terhadap rata-rata kontribusi Komoditas & Progress Pertumbuhan Prop Kalteng (**Kij > Kin**) & (**Rij > Rin**)
- Rata-rata kontribusi Komoditas di Kab. Kobar lebih besar terhadap rata-rata kontribusi Komoditas Propinsi Kalteng, namun Progress Pertumbuhan lebih kecil terhadap rata-rata Progress Pertumbuhan Prop Kalteng (**Kij > Kin**) & (**Rij < Rin**)
- Rata-rata kontribusi Komoditas di Kab. Kobar lebih kecil terhadap rata-rata kontribusi Komoditas Propinsi Kalteng, namun Progress Pertumbuhan lebih besar terhadap rata-rata Progress Pertumbuhan Prop Kalteng (**Kij < Kin**) & (**Rij > Rin**)
- Rata-rata kontribusi Komoditas & Progress Pertumbuhan di Kab. Kobar lebih kecil terhadap rata-rata kontribusi Komoditas & Progress Pertumbuhan Prop Kalteng (**Kij < Kin**) & (**Rij < Rin**)

Subsektor peternakan masih bisa ditingkatkan menjadi subsektor dengan kategori potensial menjadi prima tetapi harus diimbangi dengan upaya peningkatan mutu serta pemenuhan infrastruktur penunjang peternakan Untuk lebih jelas kuadran hasil, peternakan serta perikanan pada tabel berikut:

Tabel 4. 18. Kuadran Hasil Analisa Typologi Klassen Komoditas Peternakan Kotawaringin Barat Tahun 2023

Daging Sapi Daging Kambing Daging Ayam Buras Daging Ayam Ras Telur Ayam Ras I (Komoditas Prima)	II (Komoditas Berkembang)
III (Komoditas Potensial)	IV (Komoditas tidak berkembang)
Daging Babi Daging Itik Telur Ayam Buras Telur Itik	

Sumber: Dokumen Kajian Pengembangan Food Estate di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023

Komoditas peternakan yang masuk dalam kategori komoditas potensial adalah daging babi, daging itik, telur ayam buras, dan telur itik, sedangkan daging sapi, daging kambing, daging ayam buras, daging ayam ras serta telur ayam ras merupakan komoditas prima.

4) Analisa Komoditas Perikanan

Analisa Komoditas perikanan terdiri analisa Komoditas unggulan, analisa laju pertumbuhan serta analisa typologi klassen. Berikut ini analisa Komoditas unggulan.

➤ Analisa Komoditas Unggulan Perikanan

Perhitungan terkait komoditas menggunakan metode LQ. Metode LQ adalah instrument perhitungan untuk melihat komoditas unggulan disuatu wilayah.

$$LQ = \frac{vi/vt}{Vi/Vt}$$

vi =Jumlah produksi komoditas perikanan i di kecamatan j

vt =Total seluruh komoditas perikanan di kecamatan

Vi =Jumlah produksi komoditas perikanan i di Kabupaten Kotawaringin Barat

Vt =Total seluruh komoditas perikanan di Kabupaten Kotawaringin Barat

Berikut ini hasil perhitungan LQ Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tabel 4. 19. Analisa Komoditas Unggulan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap Propinsi Kalimantan Tengah (Ton) Tahun 2023

No	Komoditas	2018	2019	2020	2021	2022	Jumlah	Rata-rata
1.	Jambal/Patin			0,03	0,03		0,06	0,03
2.	Mas			0,03	0,23		0,25	0,13
3.	Nila			0,08	0,65		0,73	0,37
4.	Lele			0,05	0,23		0,29	0,14
5.	Udang			0,02	0,03		0,05	0,02
6.	Bandeng			0,22	0,07		0,29	0,14

Sumber: Dokumen Kajian Pengembangan Food Estate di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023

Keterangan:

LQ < 1 Sektor Non basis (Potensial Dikembangkan)

LQ > 1 Sektor Basis (Unggulan)

Jika nilai LQ suatu komoditas >1, maka komoditas tersebut dapat dikatakan sebagai komoditas unggulan. Jika nilai LQ suatu komoditas <1, maka komoditas tersebut bukan komoditas unggulan tapi sebagai penunjang. Komoditas unggulan Kabupaten kotawaringin Barat secara keseluruhan jika di bandingan dengan hasil komoditas Propinsi Kalimantan Tengah merupakan sektor

non basis. Sektor non basis ini bukan merupakan sektor unggulan namun potensial untuk dikembangkan.

➤ **Analisa Laju Pertumbuhan Perikanan**

Perubahan laju pertumbuhan komoditas pada kurun waktu tertentu dapat diuji melalui Dynamic Location Quotient (DLQ) sehingga perubahan tersebut dapat diketahui. Naik turunnya LQ dapat dilihat untuk sektor tertentu pada dimensi waktu yang berbeda. Nilai DLQ > 1 maka potensi perkembangan sektor i di suatu daerah lebih cepat jika disbanding dengan sektor yang sama dalam lingkup nasional. Sebaliknya, jika DLQ < 1, maka potensi perkembangan komoditas i di daerah lebih rendah jika dibanding nasional secara keseluruhan. Berikut ini hasil analisa DLQ komoditas perikanan kKabupaten Kotawaringin Barat.

Tabel 4. 20. Analisa Laju Pertumbuhan (DLQ) Komoditas Perikanan Kotawaringin Barat Tahun 2023

No	Komoditas	2018 - 2019	2019 - 2020	2021 - 2020	2022 - 2021	Jumlah	Rata-rata
1.	Jambal/Patin			-3,49		-3,49	-3,49
2.	Mas			0,00		0,00	0,00
3.	Nila			-0,59		-0,59	-0,59
4.	Lele			-0,46		-0,46	-0,46
5.	Udang			0,00		0,00	0,00
6.	Bandeng			-1,05		-1,05	-1,05

Sumber: Dokumen Kajian Pengembangan Food Estate di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023

Keterangan:

DLQ < 1 Sektor Non basis (Potensial Dikembangkan)

DLQ > 1 Sektor Basis (Unggulan)

Jika nilai DLQ suatu komoditas >1, maka komoditas tersebut dapat dikatakan sebagai komoditas unggulan. Jika nilai DLQ suatu komoditas <1, maka komoditas tersebut bukan komoditas unggulan tapi sebagai penunjang. Komoditas unggulan Kabupaten kotawaringin Barat secara keseluruhan jika di bandingkan dengan hasil komoditas Propinsi Kalimantan Tengah merupakan sektor non basis. Sektor unggulan pada Analisa DLQ tidak ada yang merupakan sektor unggulan, namun sektor potensial dikembangkan yang terdiri dari ikan jambal, mas, nila, lele, udang dan bandeng.

➤ **Analisa Typologi Klassen Komoditas Perikanan**

Analisa typologi klassen digunakan untuk mengetahui pertumbuhan serta kontribusi komoditas. Komoditas tersebut terbagi menjadi beberapa klaster. Hasil analisa typologi klassen membagi menjadi 4 kuadran, dimana kuadran I merupakan komoditas prima, kuadran II (Komoditas Berkembang), kuadran III (Komoditas Potensial) dan kuadran IV (Komoditas tidak berkembang). Lebih jelas pada tabel berikut.

Tabel 4. 21. Analisa Proporsi Kontribusi Perikanan Kotawaringin Barat Tahun 2023

NO	Komoditas	Rata-Rata Kontribusi (Kij)	Rata-Rata Pertumbuhan (Rij)
1.	Jambal/Patin	0,006	-2,42
2.	Mas	0,003	0,00
3.	Nilu	0,018	11,57
4.	Lele	0,004	7,57
5.	Udang	0,001	0,00
6.	Bandeng	0,009	-18,17

Sumber: Dokumen Kajian Pengembangan Food Estate di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023

Keterangan:

- Rata-rata kontribusi Komoditas maupun Progress Pertumbuhan di Kab. Kobar lebih besar terhadap rata-rata kontribusi Komoditas & Progress Pertumbuhan Prop Kalteng (**Kij > Kin**) & (**Rij > Rin**)
- Rata-rata kontribusi Komoditas di Kab. Kobar lebih besar terhadap rata-rata kontribusi Komoditas Propinsi Kalteng, namun Progress Pertumbuhan lebih kecil terhadap rata-rata Progress Pertumbuhan Prop Kalteng (**Kij > Kin**) & (**Rij < Rin**)
- Rata-rata kontribusi Komoditas di Kab. Kobar lebih kecil terhadap rata-rata kontribusi Komoditas Propinsi Kalteng, namun Progress Pertumbuhan lebih besar terhadap rata-rata Progress Pertumbuhan Prop Kalteng (**Kij < Kin**) & (**Rij > Rin**)
- Rata-rata kontribusi Komoditas & Progress Pertumbuhan di Kab. Kobar lebih kecil terhadap rata-rata kontribusi Komoditas & Progress Pertumbuhan Prop Kalteng (**Kij < Kin**) & (**Rij < Rin**)

Subsektor perikanan masih bisa ditingkatkan menjadi subsektor dengan kategori berkembang maupun prima tetapi harus diimbangi dengan upaya peningkatan mutu serta pemenuhan infrastruktur penunjang perikanan. Untuk lebih jelas kuadran hasil peternakan serta perikanan pada tabel berikut:

Tabel 4. 22. Kuadran Hasil Analisa Typologi Klassen Perikanan Kotawaringin Barat Tahun 2023

Mas Nilu Lele	Udang Mas
I (Komoditas Prima)	II (Komoditas Berkembang)
III (Komoditas Potensial)	IV (Komoditas tidak berkembang)
Bandeng	Jambal/Patin

Sumber: Dokumen Kajian Pengembangan Food Estate di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023

5) Analisa Komoditas Yang Dikembangkan

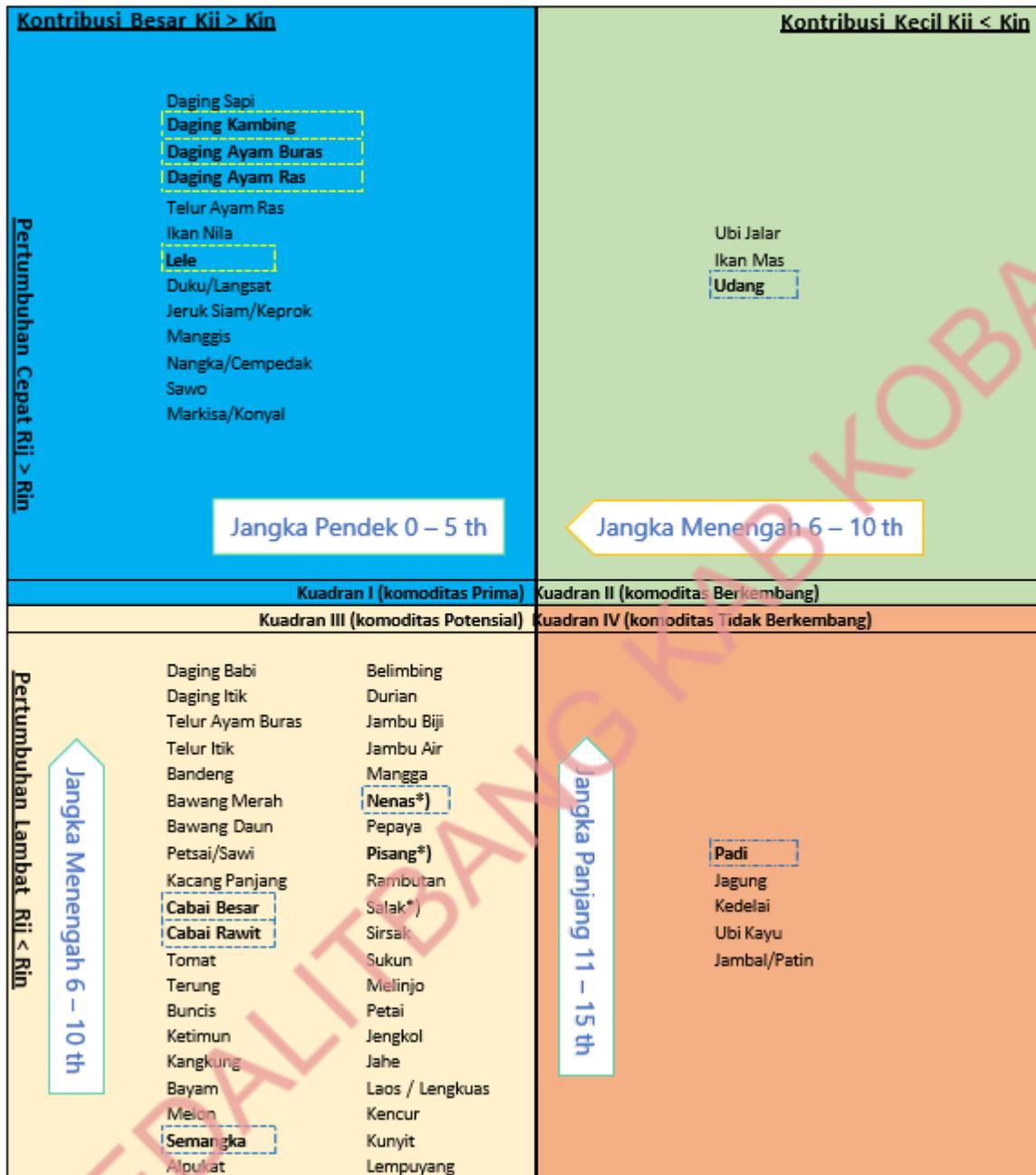
Dari hasil typologi kelas masing-masing komoditas sektor pangan didapatkan empat kuadran komoditas dengan kategori komoditas prima, Komoditas berkembang, komoditas potensial

dan komoditas tidak berkembang. Berikut gambar kuadaran komoditas dan rencana tahapan pengembangan komoditas.

Pertumbuhan Cepat Rij > Rin	Kontribusi Besar Kij > Kin	Kontribusi Kecil Kij < Kin
	Daging Sapi Daging Kambing Daging Ayam Buras Daging Ayam Ras Telur Ayam Ras Ikan Nila Lele Duku/Langsar Jeruk Siam/Keprak Manggis Nangka/Cempedak Sawo Markisa/Konyal	Ubi Jalar Ikan Mas Udang
Kuadran I (komoditas Prima)		Kuadran II (komoditas Berkembang)
Pertumbuhan Lambat Rij < Rin	Kuadran III (komoditas Potensial)	Kuadran IV (komoditas Tidak Berkembang)
	Daging Babi Daging Itik Telur Ayam Buras Telur Itik Bandeng Bawang Merah Bawang Daun Petsai/Sawi Kacang Panjang Cabai Besar Cabai Rawit Tomat Terung Buncis Ketimun Kangkung Bayam Melon Semangka Alpukat	Belimbing Durian Jambu Biji Jambu Air Mangga Nenas* Pepaya Pisang* Rambutan Salak* Sirsak Sukun Melinjo Petai Jengkol Jahe Laos / Lengkuas Kencur Kunyit Lempuyang

Gambar 4. 2. Kuadaran Komoditas Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat

Sumber: Dokumen Kajian Pengembangan Food Estate di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023



Gambar 4. 3. Kuadran Rencana Pengembangan Komoditas Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat

Sumber: Dokumen Kajian Pengembangan Food Estate di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023

4.3 PROYEKSI DAN PREDIKSI

4.3.1 Proyeksi Penduduk

Proyeksi penduduk adalah perhitungan yang dilakukan berdasarkan komponen-komponen laju pertumbuhan penduduk, seperti kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk (migrasi) Hasil dari analisis kependudukan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perencana dalam merumuskan rekomendasi rencana mengingat pentingnya faktor penduduk sebagai obyek perencanaan. Pada Kabupaten Kotawaringin Barat Analisa kependudukan dilakukan dengan Model

regresi linier. Proyeksi jumlah penduduk merupakan perkiraan jumlah penduduk di masa mendatang. Perhitungan proyeksi jumlah penduduk sangat penting dilakukan untuk memprediksi kebutuhan sarana dan prasarana di suatu wilayah, khususnya Kabupaten Kotawaringin Barat dalam kurun waktu tertentu. Dalam melakukan perhitungan harus memperhatikan perkembangan jumlah penduduk masa lampau, kecenderungan, arahan tata guna lahan, dan ketersediaan lahan untuk menampung perkembangan jumlah penduduk. Metode yang digunakan adalah regresi linier (berdasarkan hasil pengujian dengan hasil simpangan terkecil). Model linier digunakan dengan asumsi, tingkat pertumbuhan penduduk jumlahnya selalu konstan dari tahun ketahun. Bentuk matematis model linier adalah:

$$P(t+q) = P_t + b(q)$$

dimana:

$P(t+q)$: Jumlah penduduk tahun proyeksi

P_t : Jumlah penduduk tahun dasar

b : Selisih tahun dari tahun dasar ke tahun $t+q$

q : Rata-rata tambahan jumlah penduduk tiap tahun.

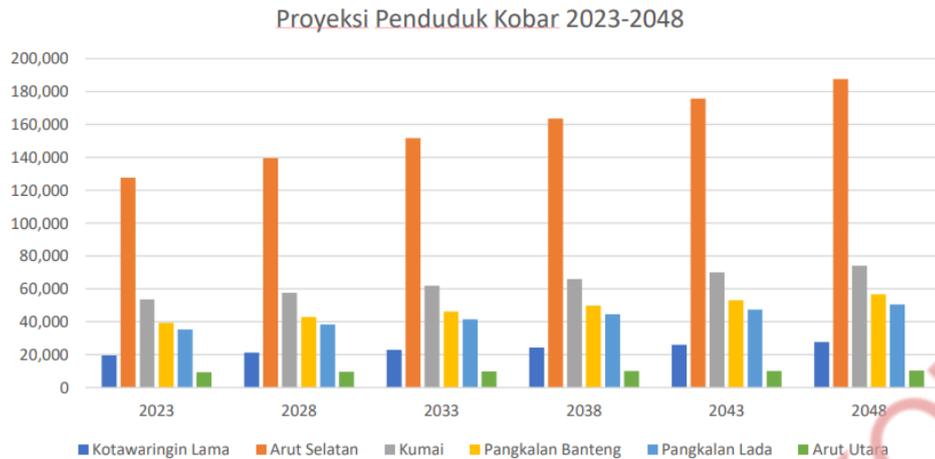
Berdasarkan hasil Analisa kependudukan Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2023-2048 di prediksi jumlah penduduk tahun 2048 Kotawaringin Barat adalah 407.190 jiwa. Diprediksi terjadi kenaikan jumlah penduduk yang signifikan dari 284.813 jiwa menjadi 407.190 jiwa dengan persentase kenaikan jumlah penduduk mencapai 30,05% dalam jangka waktu 25 tahun atau kenaikan pertahun adalah 1,2% dari total jumlah kenaikan jumlah penduduk.

Kecamatan Arut Selatan masih memiliki jumlah penduduk tertinggi yaitu 187.604 jiwa atau 46,07% dari total jumlah penduduk di Kabupaten Kotawaringin Barat. Berikut hasil analisis proyeksi penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat :

Tabel 4. 23. Proyeksi Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2048

Kecamatan	Jumlah Penduduk / Tahun (Jiwa)					
	2023	2028	2033	2038	2043	2048
Kec. Kotawaringin Lama	19.614	21.233	22.851	24.469	26.087	27.705
Kec. Arut Selatan	127.584	139.588	151.592	163.596	175.600	187.604
Kec. Kumai	53.723	57.787	61.850	65.914	69.977	74.040
Kec. Pangkalan Banteng	39.385	42.859	46.332	49.805	53.279	56.753
Kec. Pangkalan Lada	35.218	38.305	41.392	44.479	47.566	50.653
Kec. Arut Utara	9.228	9.517	9.746	9.975	10.204	10.403
KAB. KOTAWARINGIN BARAT	284.813	309.288	333.763	358.238	382.714	407.190

Sumber: Hasil analisis



Gambar 4. 4. Diagram Proyeksi Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat

Terkait perkembangan penduduk berdasarkan umur hingga tahun 2048. Berdasarkan proyeksi penduduk berdasarkan umur diketahui bahwasanya pada tahun 2048 sebagian besar penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat berada pada usia 10-14 tahun hal ini tentunya sebagai bonus demografi yang baik akan diterima oleh Kabupaten Kotawaringin barat. Berikut jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan kelompok umur.

Tabel 4. 24. Proyeksi Penduduk berdasarkan umur di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2048

Usia	Jumlah Penduduk / Tahun (Jiwa)				
	2028	2033	2038	2043	2048
> 74 Thn	3.017	3.205	3.393	3.581	3.769
70 - 74 Thn	3.252	3.594	3.936	4.278	4.620
65 - 69 Thn	5.267	5.531	5.795	6.059	6.323
60 - 64 Thn	8.677	9.062	9.447	9.832	10.217
55 - 59 Thn	12.358	12.733	13.108	13.483	13.858
50 - 54 Thn	17.277	18.227	19.177	20.127	21.077
45 - 49 Thn	20.734	21.303	21.872	22.441	23.010
40 - 44 Thn	24.160	24.958	25.756	26.554	27.352
35 - 39 Thn	23.010	22.753	22.496	22.239	21.982
30 - 34 Thn	21.849	22.134	22.419	22.704	22.989
25 - 29 Thn	22.669	23.383	24.097	24.811	25.525
20 - 24 Thn	24.369	25.496	26.623	27.750	28.877
15 - 19 Thn	20.630	21.512	22.394	23.276	24.158
10 - 14 Thn	28.448	30.387	32.326	34.265	36.204
5 - 9 Thn	27.176	28.245	29.314	30.383	31.452
0 - 4 Thn	21.701	22.775	23.849	24.923	25.997
KAB. KOTAWARINGIN BARAT	284.594	295.298	306.002	316.706	327.410

Sumber: Hasil analisis

Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan

bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Berdasarkan hasil Analisa di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2023 rasio ketergantungan memiliki nilai 44 artinya 100 Penduduk produktif menanggung 44 penduduk usia non produktif.

Tabel 4. 25. Proyeksi Rasio Ketergantungan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2048

Usia	Rasio Ketergantungan (<i>Dependency Ratio</i>)					
	2023	2028	2033	2038	2043	2048
0-14 Thn + > 65 Thn	83.985	87.651	91.318	94.984	98.650	102.317
15-64 Thn	189.905	197.229	204.554	211.878	219.202	226.527
	44 %	44 %	44 %	44 %	44 %	44 %

Sumber: Hasil analisis

Indek Pembangunan Manusia untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan layak. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angkharapan hidup waktulahir

IPM tahun 2022 adalah 71,63, sedangkan pada tahun 2021 adalah 73,07 adanya penurunan IPM dari tahun 2021-2022, hal tersebut dipengaruhi oleh faktor kesehatan dan Pendidikan yang mengalami penurunan.

Dalam penentuan target IPM diperlukannya proyeksi dari indeks pembangunan manusia hingga tahun 2048, berikut tabel proyeksi indeks pembangunan manusia tahun 2048.

Tabel 4. 26. Proyeksi Indek Pembangunan Manusia di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2048

INDIKATOR	2028	2033	2038	2043	2048
Indeks Pembangunan Manusia	74,15	76,75	78,11	79,07	81,21

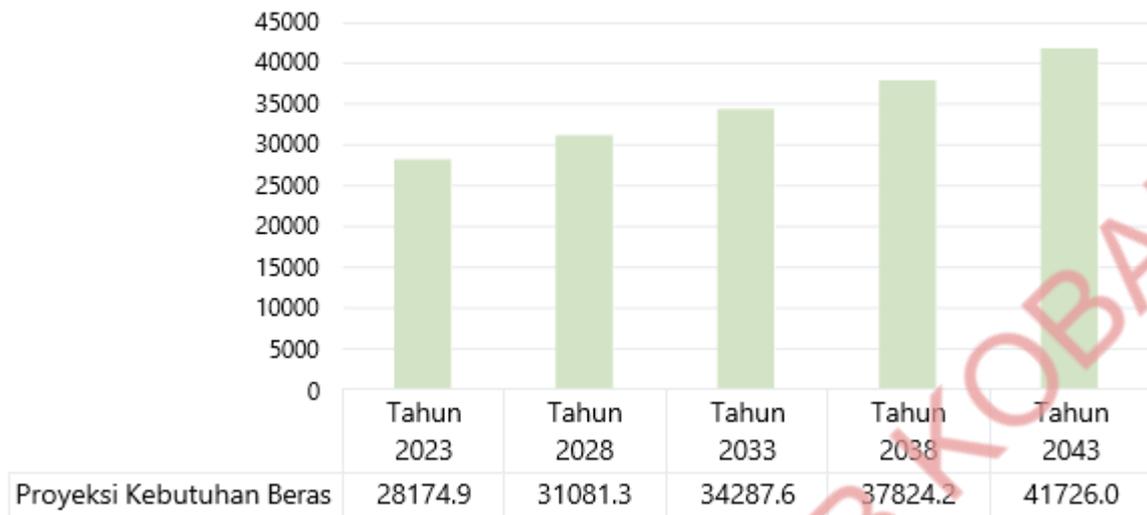
Sumber: Hasil analisis

Berdasarkan tabel diatas di ketahui bahwasannya IPM tahun 2048 adalah 81,21, sedangkan pada tahun 2022 adalah 71,63 peningkatan IPM di barengi dengan proyeksi kesehatan dan Pendidikan tahun 2048 yang terus meningkat.

4.3.2 Proyeksi Kebutuhan Pangan

Setelah didapatkan hasil proyeksi penduduk, dilanjutkan untuk melakukan analisa kebutuhan pangan hingga tahun 2043. Asumsi yang digunakan adalah 318 gram/ kapita per hari. Berikut ini hasil analisa kebutuhan beras hingga tahun 2043.

Proyeksi Kebutuhan Beras Kabupaten Kotawaringin Barat (Ton)



Sumber: Dokumen Kajian Pengembangan Food Estate di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023

Perhitungan proyeksi 20 kedepan digunakan untuk mengetahui perkiraan pada masa mendatang, dan menggunakan asumsi konsumsi beras per orang/hari adalah 318 gram per org/hari (BRIN, 2022). Jumlah hasil produksi beras di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah 2.094,53 Ton pada Tahun 2022. Berdasarkan proyeksi kebutuhan beras pada Tahun 2023 adalah 28.174.9 Ton, dan produksi beras pada Tahun 2.094,53 Ton, maka terdapat kekurangan/defisit kebutuhan beras adalah 26.080 ton. Kebutuhan beras per hari perkapita Kabupaten Kotawaringin Barat adalah 77 Ton, sehingga produksi beras dalam Tahun 2022 sebesar 2.094,53 Ton, dengan perbandingan tersebut dapat mencukupi kebutuhan pangan kabupaten selama 27 hari.

Selain perhitungan kebutuhan pangan berdasarkan proyeksi jumlah penduduk, kebutuhan pangan dapat dipertimbangkan berdasarkan ketersediaan lahan pangan (LP2B). Berikut ini Jumlah Luas Lahan yang Harus Diamankan untuk Ketahanan Pangan:

$$\frac{\text{Jumlah Defisit Kebutuhan}}{\text{Produktivitas Padi Kobar Ton/Ha}}$$

Produktivitas i Kobar Ton/Ha : 2.87 Ton/Ha *

Luas Lahan Usulan LP2B : 4333.68 Ha*

Asumsi kemampuan Lahan LP2B dalam

Produksi Tanaman Pangan : 14248.28 Ton/Tahun **

Kebutuhan Pangan Penduduk Kobar 2023 : 28174.90 Ton/Tahun ***

Jumlah Defisit (Kebutuhan-Produksi LP2B) 2023 : 13926.62 Ton/Tahun

Keterangan

* Data Dinas Pertanian Kobar, 2023

** Diasumsikan 2x Panen

*** Berdasarkan Hasil Proyeksi

Tabel 4. 27. Analisa Kebutuhan Lahan Berdasarkan Proyeksi Kebutuhan Pangan

Tahun	Lahan yang Harus Diamankan
2023	1149.68 Ha
2024	1344.33 Ha
2025	1542.86 Ha
2026	1745.33 Ha
2027	1951.80 Ha
2028	2162.37 Ha
2029	2377.13 Ha
2030	2596.12 Ha
2031	2819.45 Ha
2032	3047.21 Ha
2033	3279.53 Ha
2034	3516.42 Ha
2035	3757.99 Ha
2036	4004.34 Ha
2037	4255.60 Ha
2038	4511.80 Ha
2039	4773.15 Ha
2040	5039.65 Ha
2041	5311.45 Ha
2042	5588.63 Ha
2043	5871.32 Ha

Sumber: Dokumen Kajian Pengembangan Food Estate di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023

Berdasarkan hasil perhitungan, untuk memenuhi ketersediaan pangan hingga 20 tahun kedepan, maka lahan yang harus diamankan seluas 5.871,32 Ha.

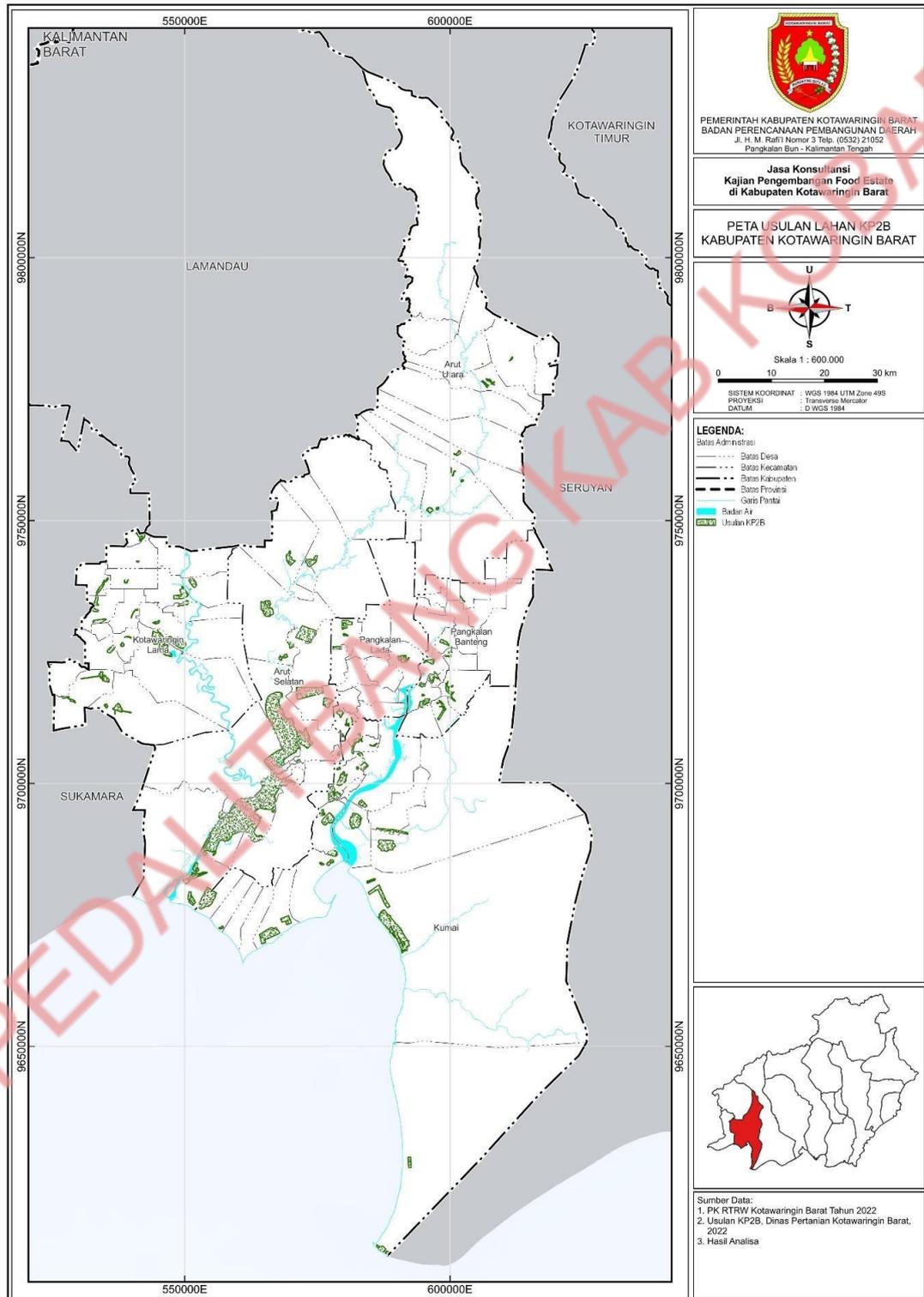
4.3.3 Potensi Pengembangan Kawasan Food Estate

A. Analisis Potensi Lahan Pengembangan Kawasan Food Estate

Suatu wilayah dapat dikembangkan menjadi suatu kawasan Food Estate membutuhkan lahan yang sesuai dengan komoditi yang menjadi kebutuhan pemenuhan pangan, karena berdasar pada tujuan Food Estate dapat menjadi wilayah yang mandiri dan berketahanan pangan yang baik. Lokasi potensial pengembangan food estate didapatkan dari hasil overlay dari lokasi usulan KP2B, wilayah hutan yang tidak mendominasi, tidak berada dalam Kawasan TORA, serta tidak berada pada lahan konsensi perkebunan sawit. Berikut ini arahan lokasi pengembangan berdasarkan:

1. Diprioritaskan Pada Lokasi Usulan KP2B (Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan)

Lokasi pengembangan kawasan food estate diprioritaskan berada pada usulan lahan KP2B. Luas usulan lahan KP2B di Kotawaringin Barat sebesar 28.697,2 Ha dengan lokasi terbanyak di Kecamatan Arut Selatan. Berikut tabel dan peta sebaran lokasi KP2B.



Gambar 4. 5. Peta Usulan Lokasi KP2B Kabupaten Kotawaringin Barat
 Sumber: Dokumen Kajian Pengembangan Food Estate di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023

Tabel 4. 28. Luas Lokasi Usulan KP2B Per Kecamatan

No	Kecamatan	Luas	Prosentase
1	Arut Selatan	16846.4	58.7%
2	Arut Utara	247.0	0.9%
3	Kotawaringin Lama	3060.6	10.7%
4	Kumai	6957.2	24.2%
5	Pangkalan Banteng	1184.4	4.1%
6	Pangkalan Lada	401.6	1.4%
Total		28697.2	100%

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat-Diolah, 2022

2. Wilayah Hutan Tidak Mendominasi

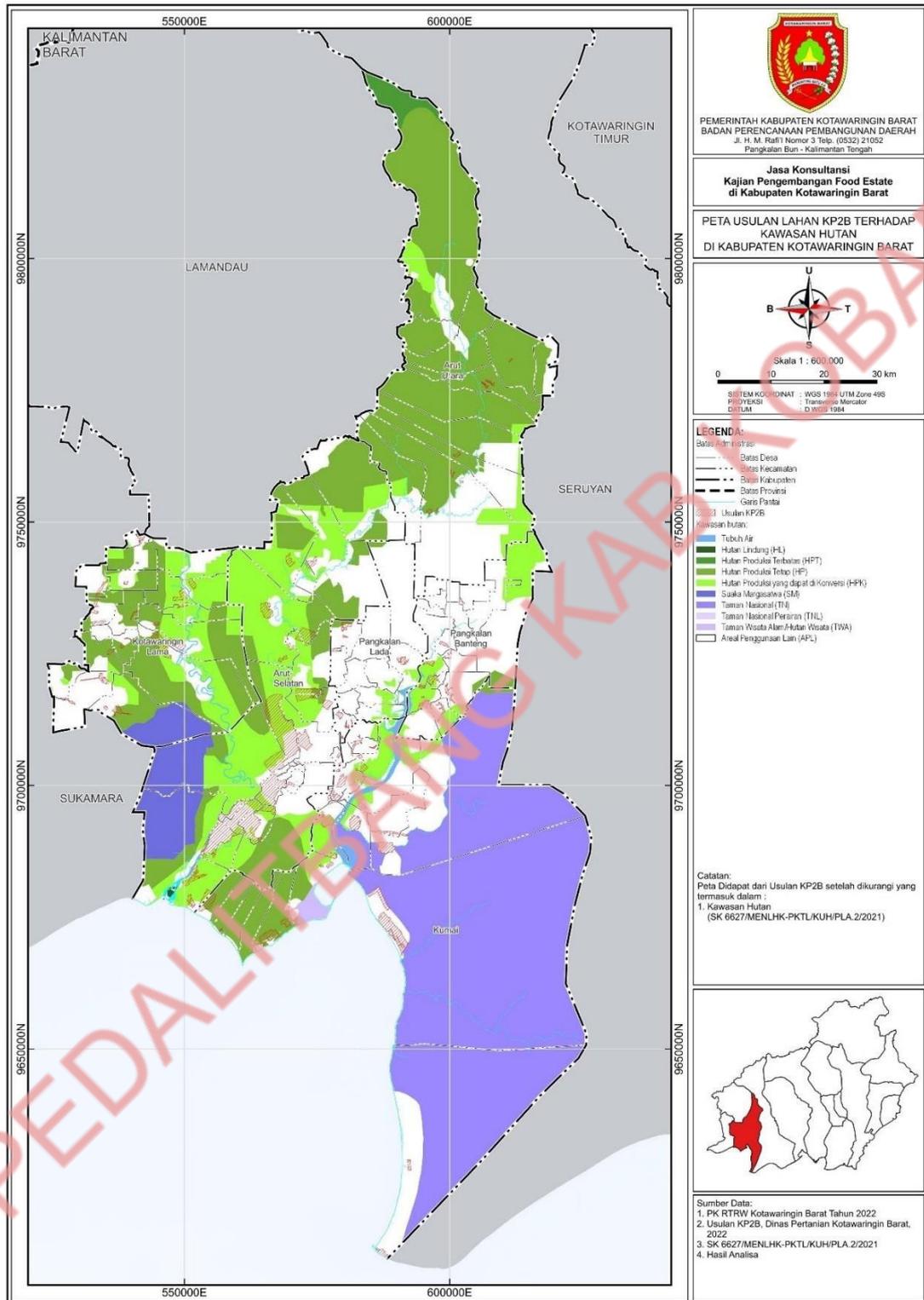
Kawasan hutan merupakan kawasan lindung sehingga wilayah hutan tidak menjadi lokasi pengembangan, sehingga dibutuhkan overlay antara kawasan hutan dan KP2B. Kawasan Hutan di Kotawaringin Barat mengacu pada Mengacu pada SK MENLHK No 6627 Tahun 2021. Berikut tabel luas kawasan hutan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tabel 4. 29. Luas Hutan di Kabupaten Kotawaringin Barat

NO	KETERANGAN	LUAS HA
1	Hutan Lindung (HL)	181.49
2	Suaka Margasatwa (SM)	31138.76
3	Taman Nasional (TN)	251284.56
4	Taman Nasional Perairan (TNL)	107.99
5	Taman Wisata Alam/Hutan Wisata (TWA)	2579.84
6	Hutan Produksi Tetap (HP)	255450.13
7	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	5793.88
8	Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK)	146524.32
9	Areal Penggunaan Lain (APL)	250258.10
10	Tubuh Air	9574.43
TOTAL		952893.50

Sumber: Dokumen Kajian Pengembangan Food Estate di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023

Jumlah luasan hutan 952893.50 Ha, sedangkan lokasi usulan KP2B terakomodir dalam peta dengan penanda yang berbeda untuk melihat secara spasial lokasi yang dapat menjadi usulan. Lebih jelas dilampirkan dalam overlay peta usulan KP2B dan wilayah hutan tidak mendominasi sebagai berikut:



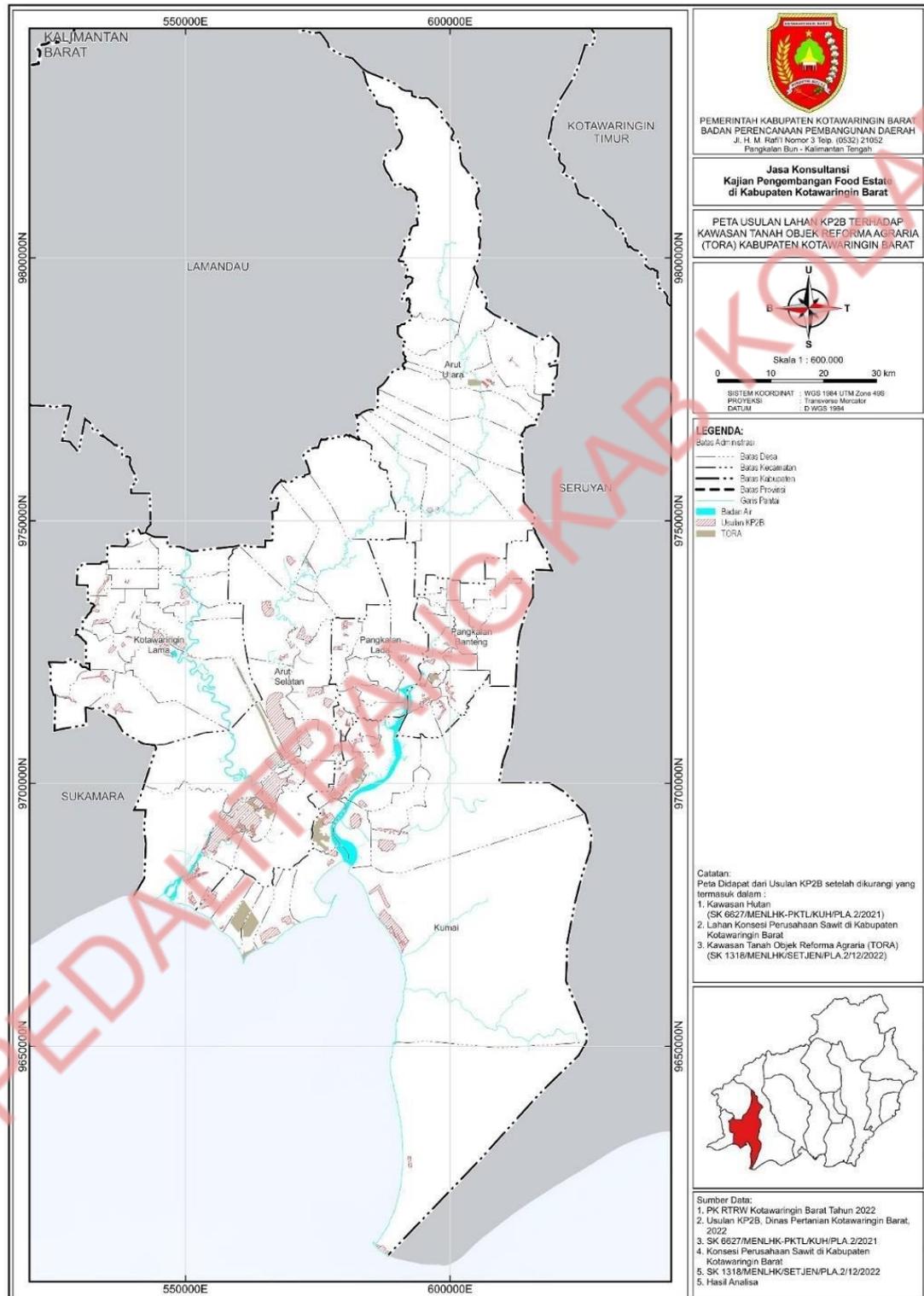
Gambar 4. 6. Peta Overlay Usulan Lokasi KP2B dan Wilayah Hutan Kabupaten Kotawaringin Barat

Sumber: Dokumen Kajian Pengembangan Food Estate di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023

3. Tidak Berada Pada Kawasan TORA

Berdasarkan SK Menteri LH dan Kehutanan no 1318 Tahun 2022 tentang TORA, lokasi potensial pengembangan food estate tidak berada pada Kawasan TORA. Berikut ini hasil

overlay Lahan KP2B, Hutan tidak mendominasi, Lahan Konsesi Perkebunan Sawit dan Kawasan TORA sebagai berikut:

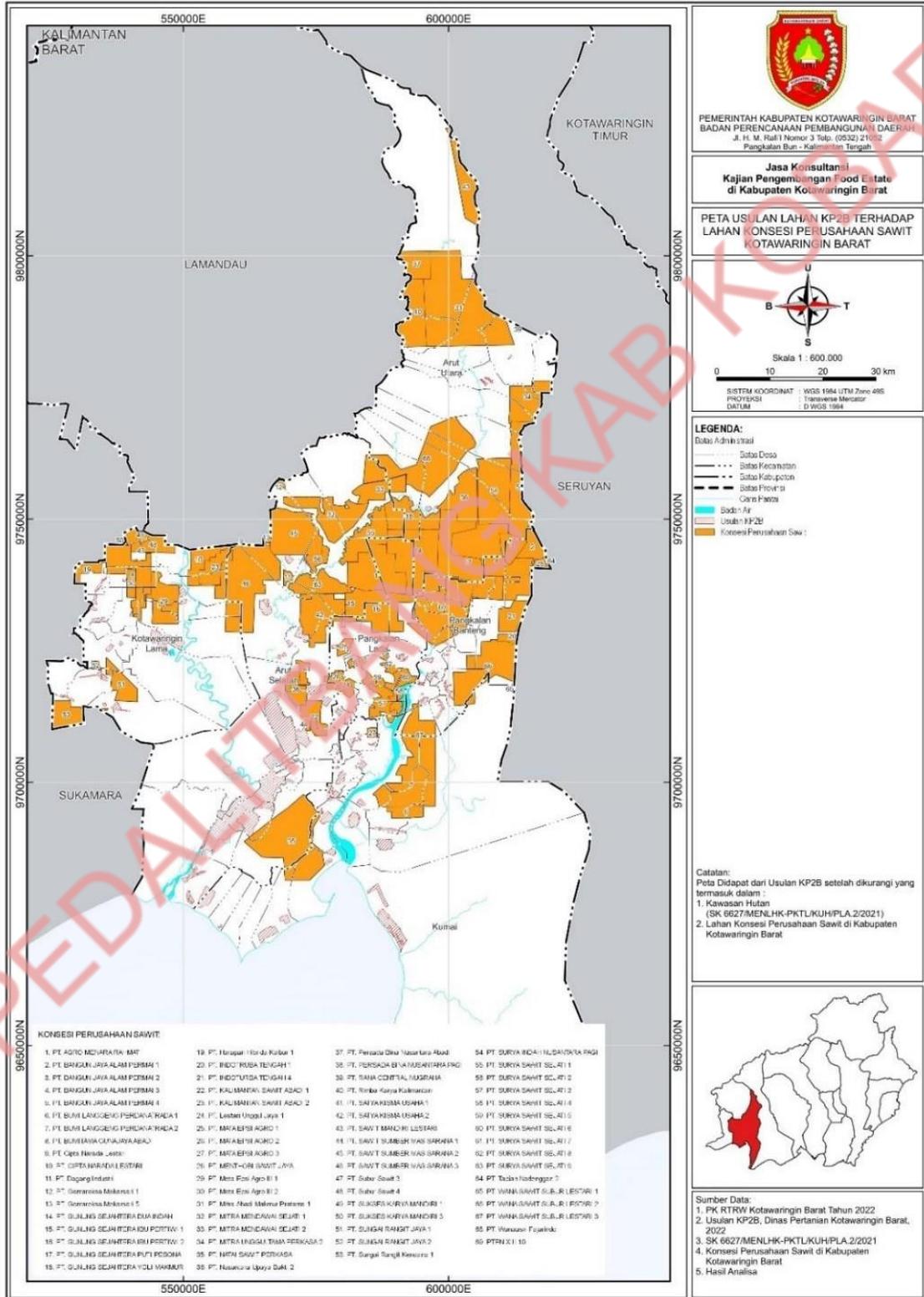


Gambar 4. 7. Peta Overlay Usulan Lokasi KP2B dengan Kawasan TORA Kabupaten Kotawaringin Barat

Sumber: Dokumen Kajian Pengembangan Food Estate di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023

4. Tidak Berada Pada Lahan Konsesi Perkebunan Sawit

Selanjutnya dilakukan overlay dengan konsesi perkebunan sawit agar memastikan tidak terjadi tumpang tindih penggunaan lahan. Berikut hasil overlay Lahan KP2B, Hutan tidak mendominasi dan Lahan Konsesi Perkebunan Sawit sebagai berikut:



Gambar 4. 8. Peta Overlay Usulan Lokasi KP2B, Wilayah Hutan dan Konsesi Perkebunan Sawit Kabupaten Kotawaringin Barat

Sumber: Dokumen Kajian Pengembangan Food Estate di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023

Dari hasil overlay Lahan KP2B dengan Kawasan Hutan, Kawasan TORA dan Konsesi Lahan sawit didapatkan potensi lahan sebagai berikut:

Tabel 4. 30. Potensi Pengembangan Food Estate Per Kecamatan

No	Kecamatan	Luas
1	Arut Selatan	15255,3
2	Arut Utara	156,4
3	Kotawaringin Lama	2567,2
4	Kumai	6344,9
5	Pangkalan Banteng	700,1
6	Pangkalan Lada	548,5
Total		25572,5

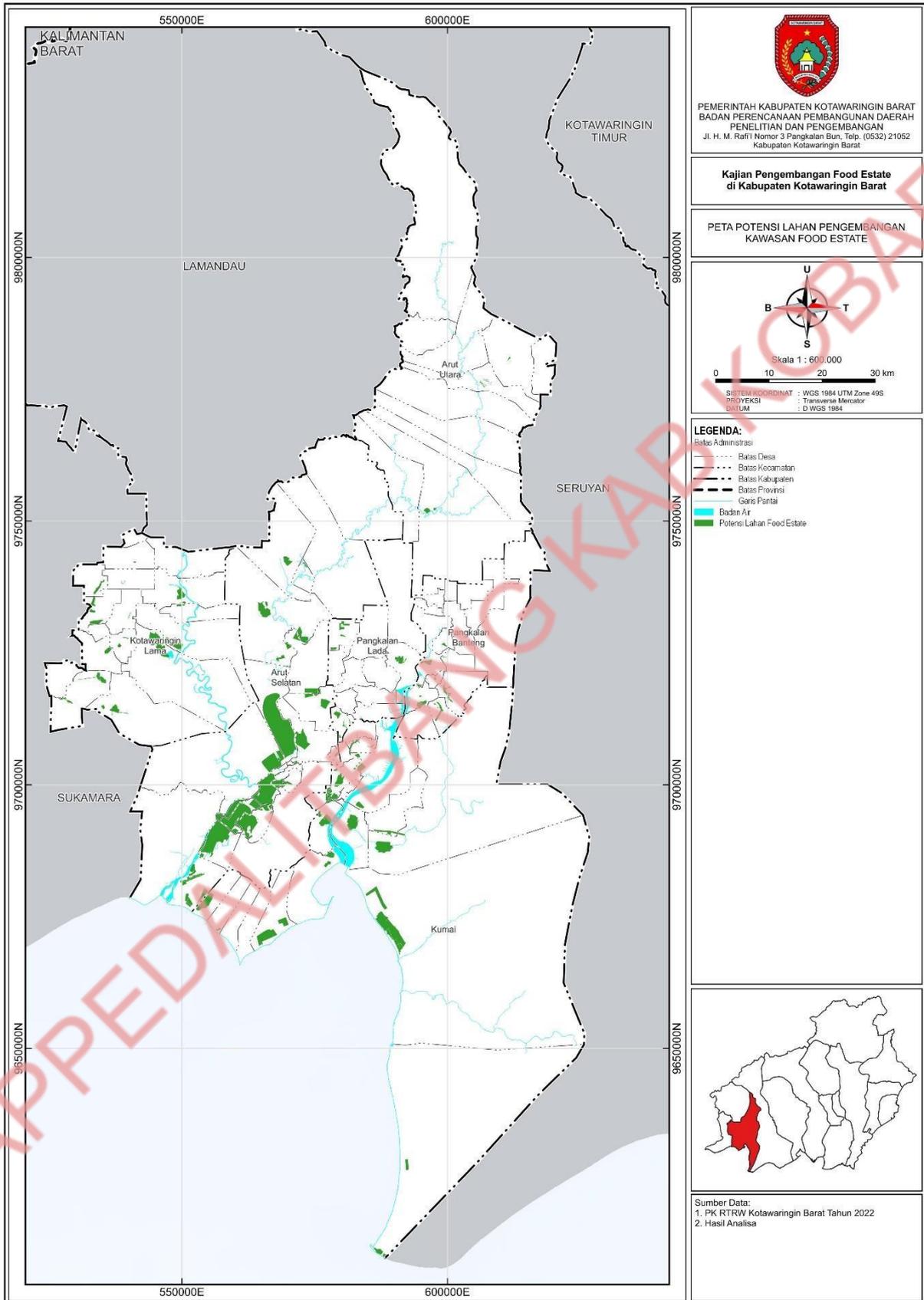
Sumber: Dokumen Kajian Pengembangan Food Estate di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023

Dari total 28.697,2 Ha lahan usulan KP2B. Lahan yang berpotensi untuk pengembangan food estate sebesar 25.572, 5 Ha. Berikut gambaran eksisting lokasi lahan potensi pengembangan food estate dan peta potensi lahan food estate.



Gambar 4. 9. Dokumentasi Eksisting Lahan Potensial Pengembangan Food Estate

Sumber: Dokumen Kajian Pengembangan Food Estate di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023



Gambar 4. 10. Peta Potensi Lahan Pengembangan Food Estate

Sumber: Dokumen Kajian Pengembangan Food Estate di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023

B. Rencana Pengembangan Kawasan Food Estate

Perkembangan kawasan food estate tidak terlepas dari pemilihan lokasi yang akan dikembangkan, karena keberhasilan pengembangan kawasan food estate dipengaruhi oleh beberapa faktor/variabel di lokasi setempat. Dengan dikembangkannya kawasan food estate akan memberikan dampak terhadap berbagai aspek di sekitar lokasi. Oleh sebab itu, kriteria yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan lokasi food estate antara lain:

1. Lokasi berada pada satu kawasan pertanian yang sudah ditetapkan oleh Kementan atau Pemda dan merupakan satu kesatuan kawasan dalam satu wilayah dengan luasan minimal (tanaman pangan 5000 ha; sayur strategis dan buah tahunan minimal 2.500 ha, dan sayur non-strategis dan buah semusim minimal 1.000 ha; tanaman perkebunan minimal 3.000 ha; dan ternak besar minimal 500 ekor, ternak kecil minimal 5.000 ekor, dan unggas minimal 50.000 ekor) atau lokasinya terpencar tetapi berdekatan dan sudah memiliki prasarana transportasi penghubung yang memadai antar-lokasi.
2. Karakteristik dan kondisi lahan sesuai untuk pengembangan komoditas pangan, sudah biasa diusahakan, dan potensial untuk ditingkatkan indeks pertanaman, populasi ternak, dan produktivitas maupun kualitas hasil dengan penerapan teknologi maju dan modern.
3. Status lahan clear dan clean, tidak dalam sengketa, dengan status kepemilikan yang jelas, dan tidak ada ganti rugi lahan untuk kegiatan pengembangan food estate.
4. Sudah tersedia prasarana dan sarana atau infrastruktur dasar pertanian (jaringan tata air, transportasi sarana produksi, mobilitas alsintan dan hasil usahatani) dan lembaga pengelola yang memadai. Hal ini penting artinya karena tujuan pengembangan food estate dapat tercapai lebih cepat.
5. Lokasi dan lahan sudah tertata cukup baik yang memungkinkan inovasi teknologi maju dan modern dapat diterapkan pelaku pengembangan food estate.
6. Secara teknis, areal yang ada sesuai untuk penerapan mekanisasi pertanian (alsintan pra dan pascapanen), baik dari aspek biofisik lahan, mobilitas alsintan, maupun prasarana penunjang dan lembaga pengelolanya.
7. Sudah ada informasi karakteristik biofisik lahan, iklim, prasarana dan sarana (peta lahan, iklim, sistem usahatani, infrastruktur dan kelembagaan pertanian) karena sudah pernah dilakukan pemetaan lahan dan karakterisasi wilayah.
8. Lokasi cukup strategis dari segi jarak ke pusat ekonomi daerah seperti ibukota kecamatan, kabupaten, dan provinsi maupun aksesibilitas dan kemudahan menjangkau serta sudah tersedia prasarana transportasi yang cukup baik.
9. Mayoritas kelompok tani atau Gapoktan berminat dan mau berpartisipasi aktif dalam

mengembangkan kawasan food estate dengan penerapan inovasi teknologi maju dan modern.

10. Ada dukungan industri komoditas pangan sebagai basis investasi dan pasar komoditas pangan yang dihasilkan di lokasi tersebut.
11. Terdapat Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang sudah memiliki prasarana dan sarana serta melaksanakan fungsi Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Kostratani).
12. Sudah pernah menjadi lokasi dan melaksanakan program pengembangan komoditas pangan terutama dari Kementan (sebelumnya atau sedang) dan dinilai berhasil atau memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi.
13. Ada perhatian dan dukungan Pemda terhadap lokasi tersebut yang ditunjukkan oleh program atau kegiatan pembangunan pertanian sebelumnya atau yang sedang berlangsung dengan pembiayaan dari APBD.
14. Ada sumber dan proporsi pembiayaan yang menjadi komitmen Pemda Provinsi dan Kabupaten untuk pelaksanaan program atau kegiatan pengembangan kawasan food estate.

➤ **Rencana Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan**

Komoditas tanaman pangan yang dapat dikembangkan pada kawasan food estate di lahan food estate Kabupaten Kotawaringin Barat yang paling sesuai adalah tanaman padi. Varietas padi yang dipilih diutamakan varietas yang unggul dan adaptif terhadap karakteristik dan kondisi lahan rawa terutama lahan pasang surut, sesuai dengan preferensi petani dan konsumen, dan diutamakan varietas padi yang telah bersertifikat. Benih yang digunakan adalah benih bersertifikat aktif (tidak kadaluwarsa). Penanaman padi bisa dilakukan dengan cara tanam pindah dan sebar langsung serta menggunakan sistem jajar legowo 2:1, 1 benih/bibit per titik tanam. Apabila dengan cara tanam pindah, umur bibitnya 15-20 hari setelah semai dan kebutuhan benihnya 20-30 kg/ha, sedangkan bila dengan cara tanam benih sebar langsung kebutuhan benihnya 40-60 kg/ha. Sebelum benih disemai atau ditanam disarankan diberi perlakuan benih (seed treatment) dengan pupuk hayati yang dosis dan caranya disesuaikan dengan spesifikasi produk.

Komoditas tanaman pangan akan dikembangkan pada lahan seluas 5.763,553 Ha yang terletak di Kecamatan Arut Selatan tepatnya di desa Raja Seberang, Desa Seberang dan Desa Baru. Perlindungan tanaman dilaksanakan dengan menerapkan:

- a) Sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT);
- b) Gerakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan; dan

- c) Pengawasan dan Pendampingan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)

➤ **Rencana Pengembangan Kawasan Tanaman Hortikultura**

Komoditas hortikultura yang dapat dikembangkan pada kawasan food estate di lahan food estate Kabupaten Kotawaringin Barat mencakup tanaman buah, sayuran, dan tanaman hortikultura lainnya. Pengembangan komoditas buah dan sayuran tersebut dapat dilakukan dengan alternatif pilihan lahan pada lahan pekarangan, atau tegalan/ pematang saluran irigasi, atau pada lahan hamparan dengan tipe luapan C. Pengembangan tanaman hortikultura juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan atau menata surjan yang sudah ada dan/atau membuat surjan yang baru.

Pemilihan komoditas sayuran, difokuskan pada komoditas sayuran yang cepat berproduksi dan dapat segera dipasarkan untuk meningkatkan pendapatan petani. Tanaman sayuran yang bisa dibudidayakan adalah sayuran semusim. Sedangkan untuk tahun berikutnya, dapat dipertimbangkan pemilihan jenis sayuran lainnya.

Komoditas tanaman hortikultura akan dikembangkan pada lahan seluas 4.657,276 Ha yang terletak di kecamatan Arut Selatan tepatnya di desa Tanjung teratang, dan Kumpai Batu Atas.

Untuk tanaman buah, komoditas yang dapat dikembangkan adalah yang sesuai dengan agroklimat dan agroekosistem. Pada saat pertanaman yang menjadi perhatian adalah akar tanaman tidak boleh tergenang air. Selain itu, untuk mengurangi tingkat kemasaman dan memperbaiki struktur tanah, pemberian kapur pertanian mutlak dilakukan. Dosis kapur pertanian disesuaikan dengan kondisi lahan, dan kebutuhan kapur pertanian untuk lahan rawa jauh lebih besar dibandingkan dengan lahan lain.

Untuk menjaga mutu produk yang dihasilkan, benih buah dan sayuran yang digunakan adalah benih bersertifikat dan memenuhi Persyaratan Teknis Minimal (PTM). Selain itu, dalam mengembangkan tanaman buah dan sayuran di lahan rawa dilakukan dengan menerapkan sistem budidaya yang baik sesuai Good Agricultural Practices (GAP).

➤ **Rencana Pengembangan Kawasan Peternakan**

Pemilihan komoditas peternakan difokuskan pada ternak kambing dan ayam ras yang memiliki laju pertumbuhan komoditas tertinggi. Selain itu, ternak kambing dan ternak ayam ras memiliki beberapa kelebihan dan potensi ekonomi, tubuhnya relatif kecil, cepat mencapai kelamin dewasa, mudah cara pemeliharaannya. Usaha ternak kambing sangat mudah, tidak membutuhkan lahan yang luas, investasi modal usaha relatif kecil, mudah dipasarkan dan modal usaha cepat berputar.

Kegiatan pengembangan usaha ternak kambing melalui beberapa tahapan diantaranya:

- a) Peningkatan produksi ternak kambing melalui perbanyak bibit atau induk dan jantan produktif.
- b) Penerapan bioteknologi pakan dan reproduksi untuk mendukung sentra pembibitan ternak kambing.
- c) Usaha pengembangan ternak kambing, di area perkebunan yang mempunyai jalinan kerjasama usaha.
- d) Kerjasama dapat dilakukan dengan perusahaan swasta, perkebunan, investor, lembaga penelitian dan instansi-instansi lintas lembaga dan lintas instansi lainnya.

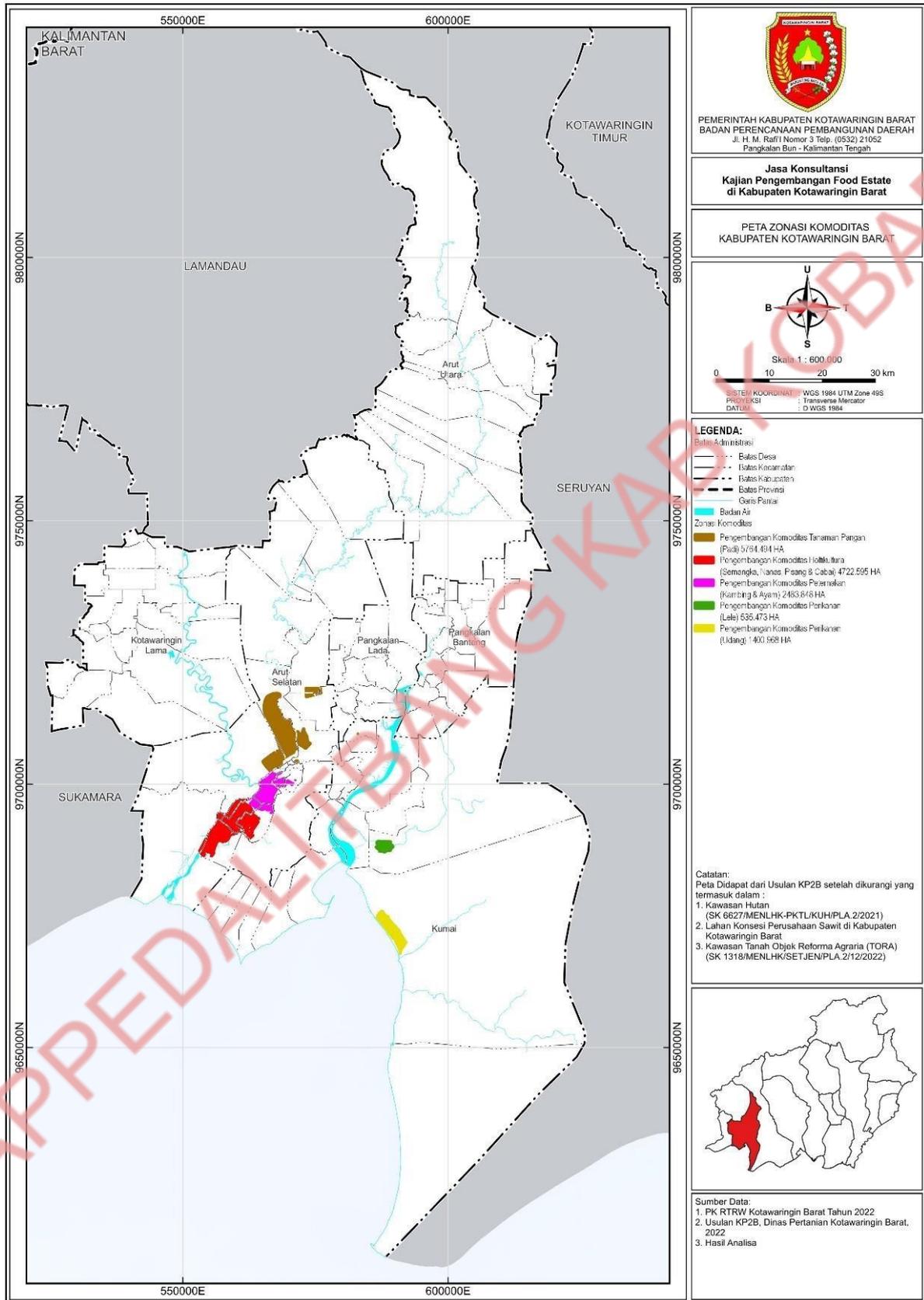
Komoditas peternakan akan dikembangkan pada lahan seluas 2.483,846 Ha yang terletak di Kecamatan Arut Selatan tepatnya di Desa Mendawai dan Desa Sidorejo.

➤ **Rencana Pengembangan Kawasan Perikanan**

Pemilihan komoditas perikanan difokuskan pada komoditas ikan lele dan udang yang memiliki laju pertumbuhan komoditas tertinggi. Selain itu, lele dan udang memiliki beberapa kelebihan dan potensi ekonomi, pengembangan ternak lele lebih cepat dipanen dan dapat dilakukan pada media yang mudah didapat, dan udang memiliki pasar ekspor.

Komoditas Perikanan komoditas ikan lele akan dikembangkan pada lahan seluas 533,66 Ha yang terletak di Kecamatan Kumai tepatnya di Desa Sungai Sekonyer, sedangkan untuk pengembangan perikanan komoditas udang akan dikembangkan dengan luas lahan 1.366,875 Ha di Desa Teluk Pulau Kecamatan Kumai.

Untuk lebih jelas, zonasi komoditas di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut:



Gambar 4. 11. Peta Zonasi Komoditas Pengembangan Food Estate Kabupaten Kotawaringin Barat

Sumber: Dokumen Kajian Pengembangan Food Estate di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023

C. Rencana Pengembangan Infrastruktur Pendukung Kawasan Food Estate

➤ Rencana Pengembangan Sapropdi Pendukung Kawasan Food Estate

Sektor produksi komoditas food estate, dimulai dari tahapan pertanian, kemudian pemrosesan pasca panen sampai dengan penyimpanan

- ✓ Pertanian: Meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan tanaman, pengendalian hama dan penyakit, serta penggunaan teknik pertanian yang efisien.
- ✓ Pemrosesan: Merupakan tahap pengolahan setelah panen, seperti pemisahan biji dari kulit, penggilingan, pengeringan, dan penggilingan menjadi tepung atau minyak.
- ✓ Penyimpanan: Melibatkan penyimpanan biji yang telah dipanen dalam kondisi yang tepat agar tetap segar dan dapat dipertahankan kualitasnya sebelum dijual atau diproses lebih lanjut.

Mengingat keterbatasan tenaga kerja untuk produksi tanaman pangan di kawasan food estate Kota Waringin Barat, perlu dikembangkan Alat Produksi Pertanian (alsintan) yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayahnya. Pada umumnya semua kegiatan produksi tanaman pangan baik pra panen maupun pascapanen memerlukan dukungan pemanfaatan alsintan. Untuk optimalisasi pemanfaatannya, alsintan tersebut bisa dimobilisasi ke blok/lokasi lain yang jadwal waktu pelaksanaan kegiatannya berbeda sehingga waktu kerja pemanfaatannya bisa ditingkatkan dan kebutuhannya untuk satu klaster 1.000 hektar dapat ditekan. Oleh karena itu, perlu disusun jenis dan jadwal kerja kegiatan pemanfaatan alsintan.

Pengelolaan alsintan di kawasan food estate di Kabupaten Kota Waringin Barat ini dapat dilakukan oleh Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) sehingga harus dibentuk dan merupakan bagian dari usaha atau bisnis korporasi petani. Oleh karena itu, perlu dipersiapkan organisasi dan tata kelola UPJA serta SDM pengelola dan operator alsintannya yang kompeten. Selain itu, perlu dipersiapkan garasi atau bengkel alsintan supaya alsintan tersimpan dan terawat dengan baik. Sedangkan tata laksana pengoperasian dan pemeliharaan alsintan mengacu kepada brosur atau buku petunjuk alsintannya

➤ Rencana Pengembangan infrastruktur Manajemen Pengelolaan Air

Salah satu kunci utama keberhasilan pengembangan food estate adalah pengelolaan air sesuai dengan karakteristik lahannya. Tujuan utama kegiatan peningkatan dan pengembangan prasarana tata air adalah air dapat tersedia dan dikelola dengan baik sesuai dengan kebutuhan usaha tani tanaman pangan.

Rencana kebutuhan pengelolaan air untuk mendukung pengembangan Food Estate meliputi:

- ✓ Rehabilitasi jaringan tata air yang sudah ada yang meliputi pembersihan dan perbaikan saluran yang dangkal serta pintu-pintu air yang rusak agar dapat berfungsi mengendalikan tata air sesuai kebutuhan tanaman sekaligus untuk mendukung peningkatan produktivitas lahan dan intensitas pertanaman.
- ✓ Pengembangan long storage atau embung untuk meningkatkan ketersediaan air terutama pada musim kemarau.
- **Rencana Pengembangan Infrastruktur Pendukung Pasca Panen & Industri Pengolahan**

Sektor Konsumsi: melibatkan kegiatan pemrosesan nilai tambah komoditas sesuai dengan permintaan konsumen

 - ✓ Industri Makanan: Melibatkan penggunaan sebagai bahan baku dalam industri makanan untuk menghasilkan berbagai produk seperti tahu, tempe, susu, dan produk olahan lainnya.
 - ✓ Konsumen Akhir: Merupakan individu atau rumah tangga yang mengkonsumsi produk-produk berbahan sebagai bagian dari makanan sehari-hari.

➤ **Rencana Pengembangan infrastruktur jalan dan pendukung System Transportasi**

Salah satu kunci utama keberhasilan pengembangan food estate adalah transportasi antar wilayah yang efektif dan efisien. Tujuan utama kegiatan peningkatan dan pengembangan prasarana transportasi adalah Transportasi sarana produksi dan hasil usaha tani lancar dan efisien.

Rencana kebutuhan prasarana transportasi untuk mendukung pengembangan Food Estate meliputi:

- ✓ Peningkatan dan pengembangan prasarana transportasi termasuk jalan usahatani untuk memperlancar pengangkutan sarana produksi dan hasil pertanian serta mobilitas alsintan.
- **Rencana Pengembangan infrastruktur pendukung Sektor Logistik dan Sektor Pemasaran**

Pengembangan infrastruktur pendukung Sektor Logistik dan Sektor Pemasaran dari suatu kawasan food estate :

 - ✓ Pengangkutan: Merupakan kegiatan transportasi dari produsen ke pihak-pihak yang terkait dalam rantai pasok, seperti pengangkutan dari petani ke pabrik pengolahan atau dari pabrik pengolahan ke gudang penyimpanan.
 - ✓ Logistik: Melibatkan perencanaan, pengelolaan, dan koordinasi aliran barang, termasuk pengaturan pengiriman, pergudangan, dan pemantauan inventaris.
 - ✓ Pemasaran: Melibatkan kegiatan promosi, penjualan, dan distribusi kepada

pengecer, pedagang grosir, atau produsen makanan yang menggunakan sebagai bahan baku.

➤ **Rencana Pengembangan Infrastruktur Pendukung Pengembangan SDM**

A) Riset dan Pengembangan untuk Inovasi Produk :

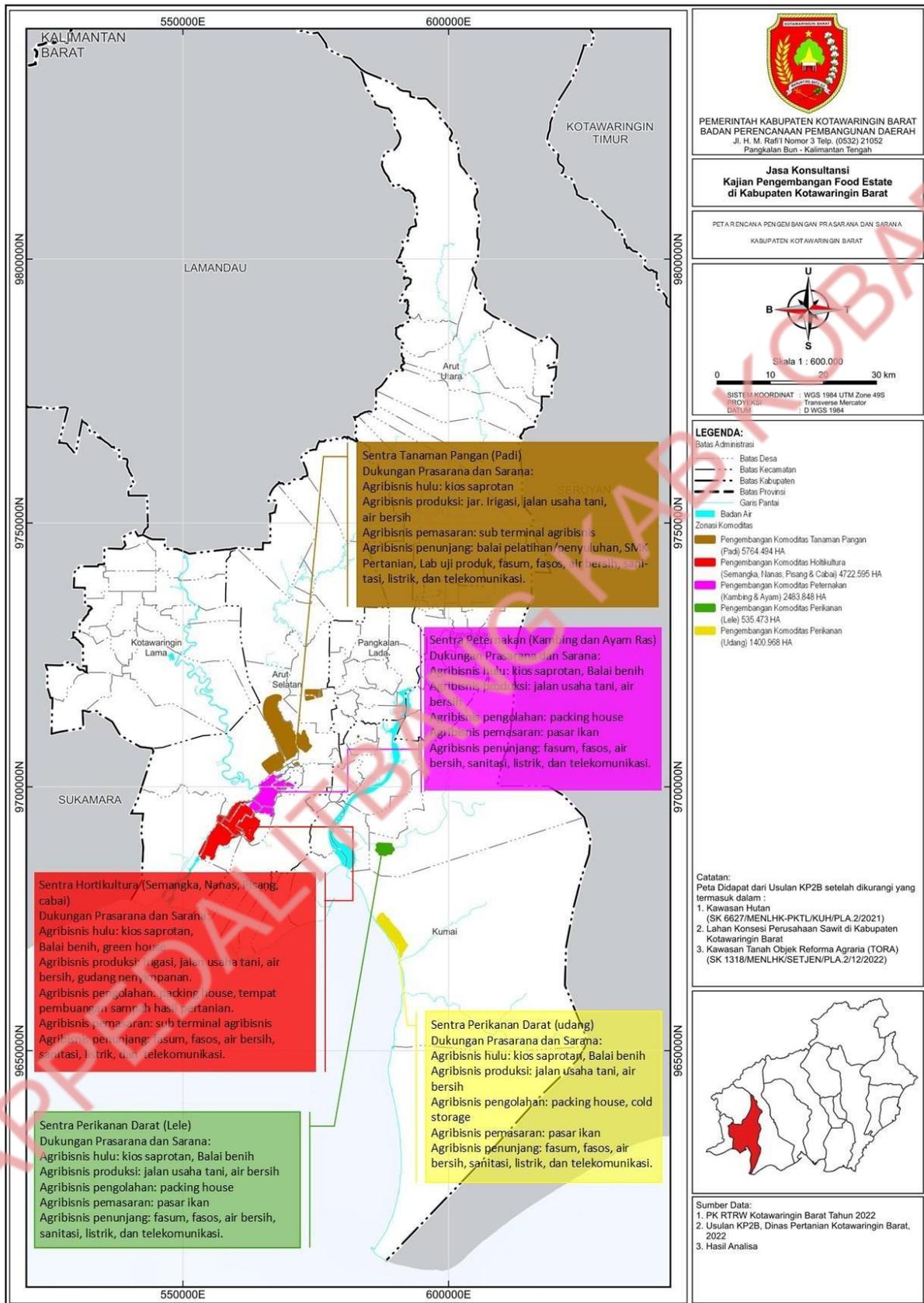
- ✓ Riset: Melibatkan penelitian ilmiah dan eksperimen yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas, misalnya dalam hal pengembangan varietas unggul, teknik pertanian yang lebih efisien, dan pemrosesan yang lebih baik.
- ✓ Pengembangan Produk: Merupakan kegiatan untuk menciptakan inovasi dan pengembangan produk berbasis , seperti produk makanan baru, bahan pangan fungsional, atau penggunaan dalam produk non-pangan seperti biofuel atau pakan ternak.

B) Regulasi dan Kebijakan Pemerintah terkait Produksi dan Perdagangan :

- ✓ Regulasi Pertanian: Melibatkan aturan dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah terkait produksi, pengolahan, dan penjualan , termasuk persyaratan izin usaha, standar kualitas, perlindungan lingkungan, dan kesehatan masyarakat.
- ✓ Kebijakan Harga dan Subsidi: Pemerintah dapat menetapkan kebijakan harga atau subsidi yang berpengaruh terhadap harga jual , baik bagi petani sebagai produsen maupun bagi konsumen sebagai pengguna produk berbasis .
- ✓ Kebijakan Perdagangan: Termasuk aturan impor dan ekspor , pengenaan tarif, kuota, dan perjanjian perdagangan internasional yang berhubungan dengan komoditas .

C) Lembaga Keuangan yang Menyediakan Dukungan Keuangan kepada Pelaku Tata Niaga :

- ✓ Bank dan Lembaga Pembiayaan: Menyediakan pinjaman, kredit, atau pembiayaan modal kerja kepada petani, pabrik pengolahan, distributor, atau pedagang yang terlibat dalam tata niaga .
- ✓ Lembaga Asuransi: Menyediakan jaminan atau perlindungan asuransi terhadap risiko yang mungkin terjadi dalam produksi, transportasi, atau penyimpanan, seperti kerusakan akibat bencana alam atau kehilangan akibat kebakaran.
- ✓ Lembaga Investasi: Memberikan dukungan keuangan melalui investasi modal atau modal ventura untuk pengembangan bisnis yang berhubungan dengan, seperti perusahaan pengolahan atau inovasi produk



Gambar 4. 12. Peta Pengembangan Prasarana dan Sarana Pengembangan Food Estate Kabupaten Kotawaringin Barat

Sumber: Dokumen Kajian Pengembangan Food Estate di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023

4.3.4 Proyeksi Industri Kecil dan Menengah

Industri Kecil dan Menengah (IKM) adalah sektor strategis dalam perekonomian daerah maupun nasional, karena memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memacu perkembangan ekonomi lokal. IKM mencakup berbagai jenis usaha yang memiliki skala kecil hingga menengah, beragam dari sektor pangan, sandang, kerajinan, hingga logam dan mesin. Proyeksi IKM menjadi alat penting untuk melihat potensi pertumbuhan serta kebutuhan sumber daya manusia dan sarana pendukung ke depan. Dalam konteks ini, proyeksi dilakukan untuk Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan fokus pada unit usaha dan tenaga kerja dalam beberapa tahun mendatang.

1. Proyeksi Jumlah Unit Usaha IKM

Tabel 4. 31. Proyeksi Jumlah Unit Usaha IKM

No.	Jenis Industri	Tahun (Unit)					Rasio	Proyeksi (Unit)				
		2018	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025	2026	2027
1	Industri Pangan	249	259	304	635	726	0,143	830	934	1038	1142	1246
2	Sandang	20	21	21	21	21	0,012	21	22	22	22	22
3	Kimia dan Bahan Bangunan	212	216	212	195	200	0,026	205	210	215	221	226
4	Kerajinan	52	57	89	89	84	0,137	95	107	118	130	141
5	Logam, Mesin dan Elektronika	16	7	16	16	18	0,125	20	23	25	27	29

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dalam direktori IKM tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022; Dokumen Kajian Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023

- o **Industri Pangan** memiliki pertumbuhan yang signifikan dari 726 unit pada tahun 2022 menjadi 830 unit di tahun 2023 dan diproyeksikan terus meningkat hingga mencapai 1.246 unit pada 2027. Industri pangan menunjukkan rasio pertumbuhan sebesar 0,143, mengindikasikan sektor ini sebagai yang paling dominan di antara semua jenis industri.
- o **Industri Sandang** menunjukkan pertumbuhan minimal, dari 21 unit pada tahun 2022 hingga diproyeksikan hanya menjadi 22 unit pada tahun 2027. Rasio pertumbuhan sebesar 0,012 mencerminkan stabilitas tanpa ekspansi signifikan.
- o **Industri Kimia dan Bahan Bangunan** tumbuh dari 200 unit di tahun 2022 menjadi 205 unit pada 2023, dengan proyeksi mencapai 226 unit pada 2027. Rasio sebesar 0,026 menunjukkan potensi pertumbuhan yang moderat.

- **Industri Kerajinan** bertambah dari 84 unit pada 2022 menjadi 95 unit di 2023 dan diproyeksikan mencapai 141 unit pada 2027. Rasio pertumbuhan sebesar 0,137 menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan.
- **Industri Logam, Mesin, dan Elektronika** meningkat dari 16 unit pada 2022 menjadi 20 unit di 2023, dengan proyeksi mencapai 29 unit pada 2027. Rasio pertumbuhan sebesar 0,125 menunjukkan pertumbuhan yang stabil.

2. Proyeksi Tenaga Kerja IKM

Tabel 4. 32. Proyeksi Tenaga Kerja IKM

No.	Jenis Industri	Tahun (Orang)					Rasio	Proyeksi (Orang)				
		2018	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025	2026	2027
1	Industri Pangan	772	796	907	1617	1622	0,003	1627	1632	1637	1642	1647
2	Sandang	55	56	56	56	56	0,005	56	57	57	57	57
3	Kimia dan Bahan Bangunan	792	810	785	677	693	0,024	709	726	742	759	775
4	Kerajinan	69	77	129	77	77	0,028	79	81	83	86	88
5	Logam, Mesin dan Elektronika	23	36	85	85	93	0,094	102	111	119	128	137

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dalam direktori IKM tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022; Dokumen Kajian Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023

- **Industri Pangan** menunjukkan jumlah tenaga kerja dari 1.622 orang pada 2022 menjadi 1.627 orang pada 2023, dan diproyeksikan mencapai 1.647 orang pada 2027. Rasio pertumbuhan sebesar 0,003 mengindikasikan stabilitas tenaga kerja dengan penambahan yang perlahan.
- **Industri Sandang** memiliki jumlah tenaga kerja yang stagnan, yakni dari 56 orang pada 2022 hingga diproyeksikan tetap 57 orang pada 2027. Rasio pertumbuhan sebesar 0,005 mencerminkan tingkat pertumbuhan yang sangat kecil.
- **Industri Kimia dan Bahan Bangunan** mengalami peningkatan tenaga kerja dari 693 orang pada 2022 menjadi 709 orang di 2023, dengan proyeksi mencapai 775 orang pada 2027. Rasio pertumbuhan sebesar 0,024 mencerminkan pertumbuhan moderat.
- **Industri Kerajinan** tumbuh dari 77 orang pada 2022 menjadi 79 orang pada 2023 dan diproyeksikan menjadi 88 orang pada 2027. Rasio pertumbuhan sebesar 0,028 menunjukkan potensi peningkatan yang cukup baik.

- o **Industri Logam, Mesin, dan Elektronika** bertambah dari 93 orang pada 2022 menjadi 102 orang di 2023 dan diproyeksikan mencapai 137 orang pada 2027. Rasio sebesar 0,094 mengindikasikan pertumbuhan tenaga kerja yang signifikan.

4.3.5 Kebutuhan Lahan Permukiman dan Sarana Pendukung

➤ Permukiman

Sistem permukiman Kotawaringin Barat mengikuti arahan Rencana Sistem Permukiman RTRW Kotawaringin Barat. Dalam Revisi RTRW Kotawaringin Barat Tahun 2023, sistem permukiman Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 33. Rencana Sistem Permukiman

No	Pusat Kegiatan	Fungsi
1	Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	
	Perkotaan Pangkalan Bun	pusat pemerintahan dan pelayanan publik, perekonomian dan regional, pusat distribusi dan koleksi barang dan jasa, pusat jaspengukung kegiatan perekonomian (pengolahan dan pemasaran), pusat kegiatan pendidikan, kesehatan, peribadatan, danpermukiman
2	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	
	Kumai	pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, pelayananmasyarakat, dan permukiman
3	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	
	IKK Kotawaringin Lama	pusat pemerintahan, pelayanan sosial, permukiman, danperkebunan
	IKK Pangkalan Banteng	Pusat pemerintahan, produksi pertanian dan perkebunan (<i>agropolitan area</i>) dengan skala pelayanan beberapa kecamatan,dan permukiman
	IKK Pangkalan Lada	pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, serta permukiman
	IKK Arut Utara	pusat pemerintahan, produksi perkebunan dengan skala pelayananbeberapa kecamatan, dan permukiman
	Desa Runtu, Arut Selatan	pelayanan sosial, perkebunan, dan permukiman
	Desa TelukBogam, Kumai	pelayanan sosial, dan permukiman
	Desa Kubu, Kumai	pelayanan sosial, perdagangan dan jasa dan permukiman
	Desa Sidomulyo, Pangkalan Banteng	pelayanan sosial, dan permukiman
	Desa Riam Durian, KotawaringinLama	pelayanan sosial, dan permukiman
4	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	
	Seluruh desa	Pusat pengembangan penunjang pelayanan desa

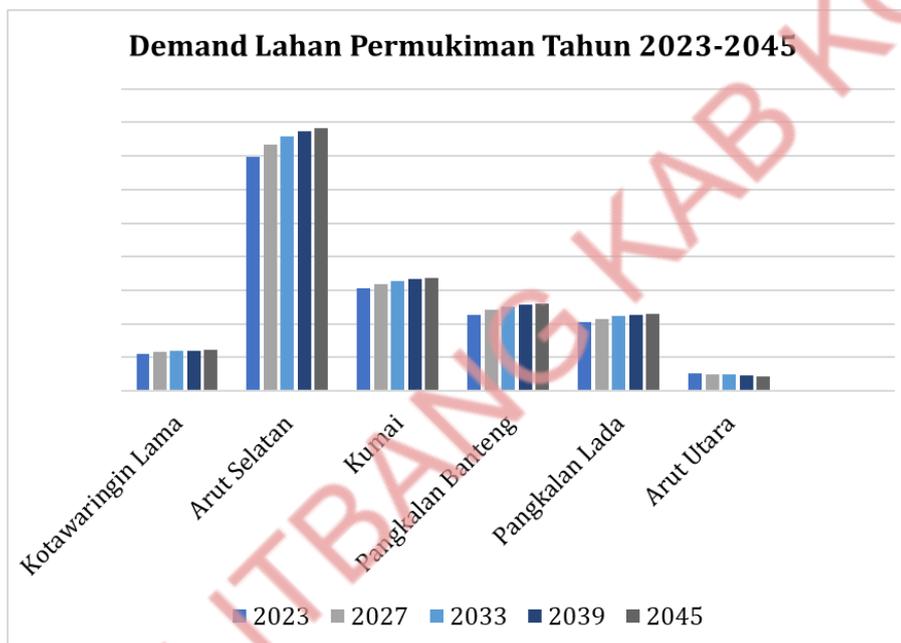
Sumber: Sumber: Revisi RTRW Kotawaringin Barat, 2023; Dokumen Kajian Pengembangan Kawasan Kotawaringin Barat Tahun 2045

Kebutuhan perumahan dianalisis berdasarkan proyeksi jumlah penduduk. Berikut adalah proyeksi tambahan permintaan lahan untuk kawasan permukiman dan sarana pendukungnya.

Tabel 4. 34. Proyeksi Permintaan Lahan Kawasan Permukiman dan Sarana Pendukungnya (Ha) Tahun 2023-2045

No	Kecamatan	Tambahannya Permintaan Lahan Kawasan Permukiman dan Sarana Pendukungnya per 5 Tahun (ha)					Jumlah
		2023	2027	2033	2039	2045	
1	Kotawaringin Lama	111,52	116,03	118,87	120,54	121,72	588,67
2	Arut Selatan	698,34	735,43	758,84	772,53	782,24	3747,39
3	Kumai	306,64	319,66	327,87	332,67	336,08	1622,92
4	Pangkalan Banteng	225,25	241,39	251,57	257,52	261,75	1237,48
5	Pangkalan Lada	203,91	215,39	222,62	226,86	229,86	1098,64
6	Arut Utara	52,33	50,75	48,47	46,29	44,54	242,37
	Jumlah	1597,99	1678,64	1728,24	1756,41	1776,20	8537,48

Sumber: Dokumen Kajian Pengembangan Kawasan Kotawaringin Barat Tahun 2045



Gambar 4. 13. Demand Lahan Kawasan Permukiman dan Sarana Pendukungnya Tahun 2023-2045

Sumber: Dokumen Kajian Pengembangan Kawasan Kotawaringin Barat Tahun 2045

➤ **Sarana Pendidikan**

Kebutuhan sarana pendidikan yang diproyeksikan yaitu hingga tahun berdasarkan proyeksi jumlah penduduk dan standar pelayanan berdasarkan SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Di Perkotaan.

Tabel 4. 35. Standar Pelayanan Sarana Pendidikan Di Lingkungan Perkotaan

No	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Pendukung (jiwa)	Kebutuhan Per Satuan Sarana		Standar (m ² /jiwa)	Kriteria		Keterangan
			Luas Lantai Min (m ²)	Luas Lahan Min (m ²)		Radius Pencapaian	Lokasi dan Penyelesaian	
1	Taman Kanak-kanak	1250	216 termasuk rumah penjaga	500	0,28	500 m ²	Di tengah kelompok warga, tidak menyeberang	2 rombongan prabelajar @60 murid dapat

No	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Pendukung (jiwa)	Kebutuhan Per Satuan Sarana		Standar (m ² /jiwa)	Kriteria		Keterangan
			Luas Lantai Min (m ²)	Luas Lahan Min (m ²)		Radius Pencapaian	Lokasi dan Penyelesaian	
			36 m ²				jalan raya, bergabung dengan taman	bersatu dengan sarana lain
2	Sekolah Dasar	1600	633	2000	1,25	1000 m ²	sehingga terjadi pengelompokan kegiatan	Kebutuhan harus berdasarkan perhitungan dengan rumus 2,3,dan 4, Dapat digabung dengan sarana pendidikan lain misal SD, SMP, SMA dalam satu kompleks
3	SLTP	4800	2282	9000	1,88		Dapat dijangkau dengan kendaraan umum, disatukan dengan lapangan olahraga, tidak selalu harus di pusat lingkungan	
4	SMU	4800	4800	12500	2,6		Di tengah kelompok warga tidak menyebabkan jalan lingkungan	
5	Taman Bacaan	2500	72	150	0,09			

Sumber: SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Di Perkotaan

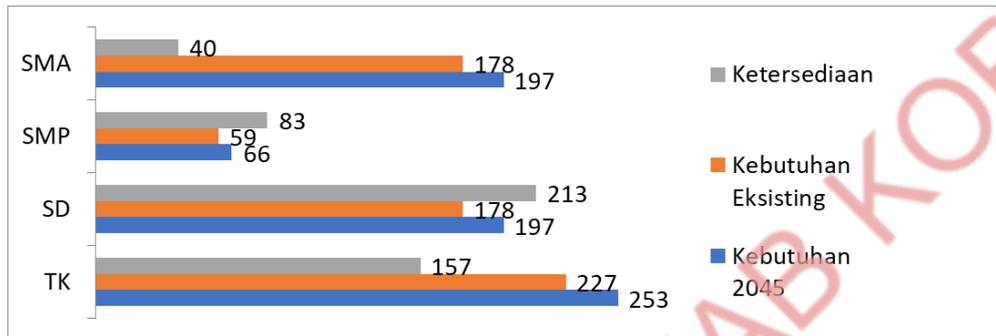
Sehingga proyeksi kebutuhan pelayanan pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2045 adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 36. Proyeksi Kebutuhan Pelayanan Pendidikan Tahun 2023-2045

Kecamatan	Total Kebutuhan Sarana Pendidikan									
	TK					SD				
	2023	2027	2033	2039	2045	2023	2027	2033	2039	2045
Kotawaringin Lama	16	17	17	17	17	12	13	13	13	14
Arut Selatan	99	105	108	110	111	78	82	84	86	87
Kumai	44	45	47	47	48	34	36	36	37	37
Pangkalan Banteng	32	34	36	37	37	25	27	28	29	29
Pangkalan Lada	29	31	32	32	33	23	24	25	25	26
Arut Utara	7	7	7	7	6	6	6	5	5	5
Total	227	239	246	250	253	178	187	192	195	197
Kecamatan	SMP					SMA				
	2023	2027	2033	2039	2045	2023	2027	2033	2039	2045
Kotawaringin Lama	4	4	4	4	5	12	13	13	13	14
Arut Selatan	26	27	28	29	29	78	82	84	86	87
Kumai	11	12	12	12	12	34	36	36	37	37
Pangkalan Banteng	8	9	9	10	10	25	27	28	29	29
Pangkalan Lada	8	8	8	8	9	23	24	25	25	26
Arut Utara	2	2	2	2	2	6	6	5	5	5
Total	59	62	64	65	66	178	187	192	195	197
Perguruan Tinggi						Taman Bacaan				

Kecamatan	2023	2027	2033	2039	2045	2023	2027	2033	2039	2045
Kotawaringin Lama	0	0	0	0	0	8	8	8	9	9
Arut Selatan	2	2	2	2	2	50	52	54	55	56
Kumai	1	1	1	1	1	22	23	23	24	24
Pangkalan Banteng	1	1	1	1	1	16	17	18	18	19
Pangkalan Lada	1	1	1	1	1	15	15	16	16	16
Arut Utara	0	0	0	0	0	4	4	3	3	3
Total	4	4	4	4	5	114	119	123	125	126

Sumber: Dokumen Kajian Pengembangan Kawasan Kotawaringin Barat Tahun 2045



Gambar 4. 14. Gap Ketersediaan dan Kebutuhan Layanan Pendidikan

Sumber: Dokumen Kajian Pengembangan Kawasan Kotawaringin Barat Tahun 2045

Berdasarkan hasil analisis tersebut diketahui bahwa kebutuhan akan layanan pendidikan hingga tahun 2045 terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Kotawaringin Barat. Selain itu, terdapat ketidakseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan layanan pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

➤ Sarana Kesehatan

Kebutuhan sarana kesehatan yang diproyeksikan yaitu hingga tahun 2045 berdasarkan proyeksi jumlah penduduk dan standar pelayanan berdasarkan SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Di Perkotaan.

Tabel 4. 37. Standar Pelayanan Sarana Kesehatan Di Lingkungan Perkotaan

No	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Pendukung (jiwa)	Kebutuhan Per Satuan Sarana		Standar (m ² /jiwa)	Kriteria		Keterangan
			Luas Lantai Min (m ²)	Luas Lahan Min (m ²)		Radius Pencapaian	Lokasi dan Penyelesaian	
1	Posyandu	1.250	36	60	0,048	500	Di tengah kelompok tetangga tidak menyeberang jalan raya	Dapat bergabung dengan balai warga atau sarana hunian/ rumah
2	Balai Pengobatan Warga	2.500	150	300	0,12	1.000 m ²	Di tengah kelompok tetangga tidak menyeberang	Dapat bergabung dalam lokasi balai warga

No	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Pendukung (jiwa)	Kebutuhan Per Satuan Sarana		Standar (m ² /jiwa)	Kriteria		Keterangan
			Luas Lantai Min (m ²)	Luas Lahan Min (m ²)		Radius Pencapaian	Lokasi dan Penyelesaian	
							jalan raya	
3	BKIA/Klinik Persalinan	30.000	1500	3000	0,1	4.000 m ²	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum	
4	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	30.000	150	300	0,006	1.500 m ²	-idem-	Dapat bergabung dalam lokasi kantor kelurahan
5	Puskesmas dan Balai Pengobatan	120.000	420	1000	0,008	3.000 m ²	-idem-	Dapat bergabung dalam lokasi kantor kecamatan
6	Tempat Praktek Dokter	5.000	18	-	-	1.500 m ²	-idem-	Dapat bersatu dengan rumah tinggal/ tempat usaha/ apotik
7	Apotik/ Rumah Obat	30.000	120	250	0,025	1.500 m ²	-idem-	

Sumber: SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Di Perkotaan

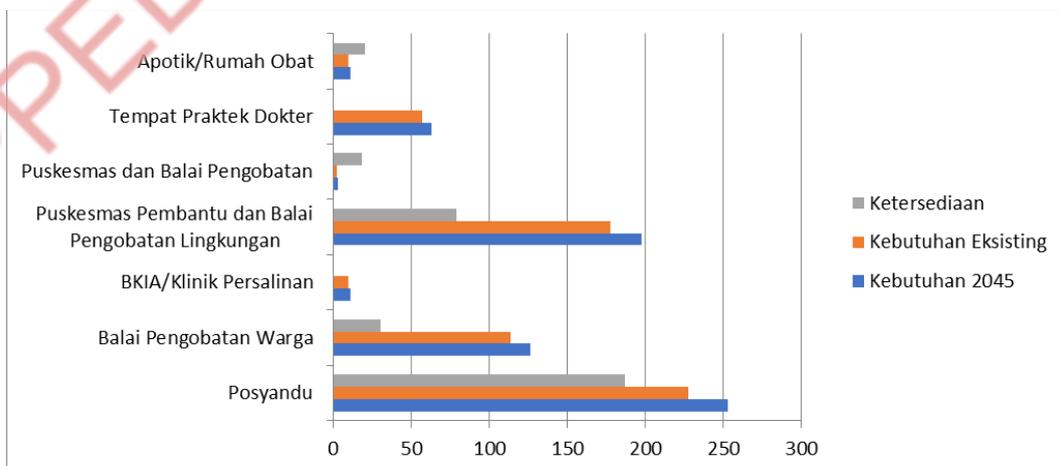
Sehingga proyeksi kebutuhan pelayanan kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2045 adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 38. Proyeksi Kebutuhan Pelayanan Kesehatan Tahun 2023-2045

Kecamatan	Posyandu	Balai Pengobatan Warga	BKIA/ Klinik Persalinan	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	Puskesmas dan Balai Pengobatan	Tempat Praktek Dokter	Apotik/ Rumah Obat
TAHUN 2023							
Kotawaringin Lama	16	8	1	1	0	4	1
Arut Selatan	99	50	4	78	1	25	4
Kumai	44	22	2	34	0	11	2
Pangkalan Banteng	32	16	1	25	0	8	1
Pangkalan Lada	29	15	1	23	0	7	1
Arut Utara	7	4	0	6	0	2	0
Total	227	114	9	178	2	57	9
TAHUN 2027							
Kotawaringin Lama	17	8	1	13	0	4	1
Arut Selatan	105	52	4	82	1	26	4
Kumai	45	23	2	36	0	11	2
Pangkalan Banteng	34	17	1	27	0	9	1

Kecamatan	Posyandu	Balai Pengobatan Warga	BKIA/Klinik Persalinan	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	Puskesmas dan Balai Pengobatan	Tempat Praktek Dokter	Apotik/ Rumah Obat
Pangkalan Lada	31	15	1	24	0	8	1
Arut Utara	7	4	0	6	0	2	0
Total	239	119	10	187	2	60	10
TAHUN 2033							
Kotawaringin Lama	17	8	1	13	0	4	1
Arut Selatan	108	54	4	84	1	27	4
Kumai	47	23	2	36	0	12	2
Pangkalan Banteng	36	18	1	28	0	9	1
Pangkalan Lada	32	16	1	25	0	8	1
Arut Utara	7	3	0	5	0	2	0
Total	246	123	10	192	3	61	10
TAHUN 2039							
Kotawaringin Lama	17	9	1	13	0	4	1
Arut Selatan	110	55	5	86	1	27	5
Kumai	47	24	2	37	0	12	2
Pangkalan Banteng	37	18	2	29	0	9	2
Pangkalan Lada	32	16	1	25	0	8	1
Arut Utara	7	3	0	5	0	2	0
Total	250	125	10	195	3	62	10
TAHUN 2045							
Kotawaringin Lama	17	9	1	14	0	4	1
Arut Selatan	111	56	5	87	1	28	5
Kumai	48	24	2	37	0	12	2
Pangkalan Banteng	37	19	2	29	0	9	2
Pangkalan Lada	33	16	1	26	0	8	1
Arut Utara	6	3	0	5	0	2	0
Total	253	126	11	197	3	63	11

Sumber: Dokumen Kajian Pengembangan Kawasan Kotawaringin Barat Tahun 2045



Gambar 4. 15. Gap Ketersediaan dan Kebutuhan Layanan Kesehatan

Sumber: Dokumen Kajian Pengembangan Kawasan Kotawaringin Barat Tahun 2045

Berdasarkan hasil analisis tersebut diketahui bahwa kebutuhan akan layanan kesehatan hingga tahun 2045 terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Kotawaringin Barat. Selain itu, terdapat ketidakseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan layanan kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

➤ **Sarana Olahraga dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)**

Kebutuhan sarana olahraga dan RTH diproyeksikan berdasarkan standar yang berlaku yaitu SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Di Perkotaan.

Tabel 4. 39. Kebutuhan dan Jangkauan Sarana Olahraga dan RTH

Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Pendukung (jiwa)	Kebutuhan Luas Lahan Min. (m2)	Standar (m2/jiwa)	Kriteria		Keterangan
				Radius Pencapaian	Lokasi dan Penyelesaian	
Taman dan Lapangan Olahraga	30000	9000	0,3	1000 m2	Sedapat mungkin berkelompok dengan sarana pendidikan	2 rombongan prabelajar @60murid dapat bersatu dengan sarana lain
Taman dan Lapangan Olahraga	120000	24000	0,2		Terletak di jalan utama. Sedapat mungkin berkelompok dengan sarana pendidikan	Kebutuhan harus berdasarkan perhitungan dengan rumus 2, 3, dan 4, Dapat digabung dengan sarana pendidikan lain misal SD, SMP, SMA dalam satu komplek

Sumber: SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Di Perkotaan

Tabel 4. 40. Proyeksi Kebutuhan Sarana Olahraga dan RTH Tahun 2023-2045

Kecamatan	Taman dan Lapangan Olahraga Tipe 1					Taman dan Lapangan Olahraga Tipe 2				
	2023	2027	2033	2039	2045	2023	2027	2033	2039	2045
Kotawaringin Lama	0,66	0,69	0,70	0,71	0,72	0,17	0,17	0,18	0,18	0,18
Arut Selatan	4,14	4,36	4,50	4,58	4,64	1,03	1,09	1,12	1,14	1,16
Kumai	1,82	1,89	1,94	1,97	1,99	0,45	0,47	0,49	0,49	0,50
Pangkalan Banteng	1,33	1,43	1,49	1,53	1,55	0,33	0,36	0,37	0,38	0,39
Pangkalan Lada	1,21	1,28	1,32	1,34	1,36	0,30	0,32	0,33	0,34	0,34
Arut Utara	0,31	0,30	0,29	0,27	0,26	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07
Total	9,47	9,95	10,24	10,41	10,52	2,37	2,49	2,56	2,60	2,63

Sumber: Dokumen Kajian Pengembangan Kawasan Kotawaringin Barat Tahun 2045

4.3.6 Kebutuhan Infrastruktur

Untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur pada tahun 2045, maka dilakukan analisis proyeksi kebutuhan infrastruktur berdasarkan proyeksi jumlah penduduk hingga tahun 2045 mendatang. Berikut adalah proyeksi kebutuhan infrastruktur Kotawaringin Barat yang meliputi sarana dan prasarana umum.

➤ Transportasi

Transportasi berdasarkan Revisi RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 direncanakan sebagai berikut:

Tabel 4. 41. Rencana Pengembangan Jaringan Jalan

Status Jalan	Ruas Jalan	
Arteri Primer	<ul style="list-style-type: none"> • Ruas Kujan - Runtu • Ruas Runtu - Sp. Runtu • Ruas Bts. Kota Pangkalan Bun - P. Lada • Ruas P. Lada - Asam Baru • Ruas Bts. Kota Pangkalan Bun - Kumai • Ruas Jln. Diponegoro (Pangkalan Bun) • Ruas Jln. Iskandar (Pangkalan Bun) • Ruas Akses Pelabuhan Tanjung Kalap/ Bumi Harjo 	
Kolektor Primer Dua (JKP-2)	<ul style="list-style-type: none"> • Ruas Sp.Kenawan – Riam Durian • Ruas Riam Durian – Sukamara 	
Kolektor Primer Tiga (JKP-3)	<ul style="list-style-type: none"> • Ruas Pangkalan Bun – Kotawaringin Lama • Ruas Riam Durian – Kotawaringin Lama 	
Kolektor (Jalan Provinsi dan Jalan Strategis Provinsi Rencana	<ul style="list-style-type: none"> • Ruas Kumai – Kubu sepanjang • Ruas Pangkalan Lima – Kumai sepanjang • Ruas Natai Arahan – Malijo sepanjang 	
Lokal Sekunder	<ul style="list-style-type: none"> • Jl. Jenderal Sudirman • Sidorejo - Kumpai Batu Bawah • Kumpai Batu Bawah - Tanjung Terantang • Tanjung Terantang - Tanjung Putri • Tanjung Putri - Batas Sebuai Barat • Pasir Panjang - Kumpai Batu Atas - Kumpai Batu Bawah • Kumpai Batu Atas - Kumpai Batu Bawah/Hasanudin • Kumpai Batu Atas - Kumpai Batu Bawah/Parit Serong • Pasir Panjang - Kumpai Batu Atas - Dukuh Mola • Kumpai Batu Atas - Batas PasirPanjang - Sebuai Barat • Kumpai Batu Atas - Karang Anyar • Pasir Panjang - Dukuh Mola • Jl. HM. Rafi'i • Jl. Bhayangkara • Pinang Merah - Stadion • Stadion - Jl. Hasan Surin • Stadion - Cilik Riwut 2 	<ul style="list-style-type: none"> • Jl. Nangka Batu Belaman • Jl. Batu Belaman - SungaiTendang • Jl. Batu Belaman - Pabrik Jagung • Jl. Pare-Pare • Jl. Kumai Seberang - Sungai Bedaun • Jl. Sungai Bedaun - SungaiSekonyer • Jl. Natai Mamis - Tanjung Harapan • Jl. Sungai Bedaun - Batas Sungai Pulau • Jl. Tanjung Harapan - TelukPulai - Sei Cabang • Jl. Sei Cabang - Teluk Ranggau • Jl. DPRD 2 - Sungai Tendang • Jl. Bahari Sungai Tendang • Jl. Pangkalan Satu - Sp. Pelabuhan CPO • Jl. Kumai - Kubu • Jl. Kotawaringin Lama - Batas Arut Selatan • Sp. Danau Gatal – Lalang

Status Jalan	Ruas Jalan
	<ul style="list-style-type: none"> • Jl. Samari - Stadion - Pinang Merah • Jl. Ahmad Wongso - Jl. Pramuka • Jl. Pelita • Jl. Palagan Sambu • Jl. Lijo • Jl. Mangga 1 • Jl. Mangga 2 • Jl. Salak • Jl. LKMD 2 • Jl. Pancasila • Jl. Yuka / Maid Badir • Jl. H. Mustalim • Jl. Delima • Jl. Cilik Riwut 4 / Jl. Pemuda • Jl. Cilik Riwut 3 • Jl. Cilik Riwut 2 • Jl. Cilik Riwut 1 • Jl. Abdul Ancis • Jl. Abdul Ancis 1 • Jl. Seroja • Jl. Perwira • Jl. Sutan Syahrir • Jl. Edy Suwargono • Jl. Sultan Imanudin • Jl. Sudirman. SH • Jl. PKGB. 1 • Jl. Kasanrejo 1 - SMU 3 • Jl. Kasanrejo 2 • Jl. Camar • Jl. Rajawali • Jl. Hasanudin • Jl. Zebra • Jl. Domba - Jl. Abd. Mahmud • Jl. DAH. Hamzah • Jl. Alipandi Sarjan • Jl. Abdul Syukur • Jl. H. Mu'an • Jl. Sembaga Mas - Jl. Mawar • Jl. PRA. Kesumayuda • Jl. Rangka Santrek • Jl. Blimbing Manis • Jl. Pasar Saik • Jl. Ki Patih Surodilogo • Jl. Pangeran Adipati • Jl. R. Mangku • Jl. Kawitan • Jl. PKGB. 2 • Jl. PKGB. 3 • Jl. Asam Bubuk • Jl. Damai • Jl. H. Kaderi Udang • Jl. Kadaiut 2 • Jl. Lapangan Tugu • Jl. Pangeran Antasari • Jl. Sukma Aryaningrat
	<ul style="list-style-type: none"> • Sp. Diung - Danau Gatal • Sp. Lalang - Rungun • Rungun - Kondang - Batas Lamanadau • Sp. Diung - Kinjil • Jl. Sakabulin - Batas Sukaraja • Jl. Tempayung - Sumber Mukti • Tempayung - Baboti - Babual • Jl. Riam Durian - Dawak - Suka Jaya • Jl. Makarti Jaya - Sp.Suka Jaya • Jl. Sp.Despot - Sp.Kinjil +Sakabulin • Jl. Dawak - Sp R. Durian+Sagu • Jl. Sagu Suka Mulya - Batas Pangkalan Muntai • Jl. Sp.Sagu Suka Mulya - Suka Makmur - Ipuh Bangun Jaya - Palih Baru - Batas Kenawan • Jl. Cilik Riwut 7 • Jl. Merdeka - Jl. Nasional - Jl. Danau • Jl. P. Suryariansyah • Jl. Pangkalan Muntai • Jl. Padat Karya • Jl. Beji • Jl. Pelabuhan • Jl. Beringin • Jl. ASDP • Jl. Padat Karya 1 • Jl. ASDP 1 • Jl. Purbasari - Pangkalan Durin - Sungai Rangit Jaya • Jl. Beringin Sungai Rangit Jaya Kecamatan Pangkalan Banteng • Jl. Sungai Rangit Jaya - Sungai Melawen • Jl. Sungai Melawen - Lada Mandala Jaya - Pandu Sanjaya • Jl. Sungai Melawen - Sp. Runtu • Jl. Sp. Kadipi Atas - MakartiJaya • Jl. Sp. Kadipi Atas - Batas Medang Sari • Jl. Sp. Kadipi Atas - BatasNatai Baru • Jl. Pangkalan Dewa - SungaiBiru • Jl. Pangkalan Dewa - Pelabuhan Teluk Dewa • Jl. Pangkalan Tiga - Batas Sungai Bengkuang (GSDI) • Jl. Pangkalan Tiga - Dermaga Pangkalan Tiga • Purba Sari - SMA 2 Bumi Harjo

Status Jalan	Ruas Jalan
<ul style="list-style-type: none"> • Jl. Udan Said • Jl. GM. Arsyad • Jl. Matnoor • Jl. Matnoor 1 • Jl. Brunai - Jl. Belida • Jl. Tengadak - Jl. Tebengalan • Jl. Padat Karya 1 • Jl. Padat Karya • Jl. M.Idris • Jl. Warna Agung • Jl. Masjid Al-Hikmah • Jl. J. Lubut • Jl. Rarait 3 • Jl. Dermawan • Jl. Rarait 9 • Jl. Baru - Pangkalan Bungur • Jl. Tumenggung Cikranegara • Jl. Rarait 9 - SLTP 6 • Jl. Saefudin Kusasi - SLTP 6 • Jl. Runtu • Jl. Patung • Jl. Kopong SLTP 6 - Sungai Tatas • Jl. Sungai Tatas • Jl. Pangkalan Bun - Batas Kotawaringin Lama • Jl. Simpang Natai Baru - Batas Kadipi Atas • Jl. Dermaga Medang Sari - Batas Kadipi Atas • Jl. Sp. Runtu - Batas Runtu GSDI • Jl. Desa Runtu • Jl. Bukit Sintang - Sulung Kenambui • Jl. Umpang - Simpang Tiga GSDI + Sp. Pangkut • Jl. Natai Raya 1 • Jl. Natai Raya 2 • Jl. Natai Raya 3 • Jl. Natai Raya - Batas Sungai Tendang • Jl. Pabrik Jagung • Jl. Iskandar - Sei Tendang (AURI) • Jl. Natai Arah • Jl. Pasanah • Jl. Malijo • Jl. Sport Center - Jl. Jendr. Sudirman • Jl. Tumenggung Kubu - Macan Tali • Jl. Tumenggung Kubu 1 • Jl. Hendrik Dingan • Jl. Naun Silih • Jl. Riak Sawa • Jl. Eden Jeha • Jl. Tiupilus Umar • Jl. Manjung H 	<ul style="list-style-type: none"> • Jl. Banteng Sumber Agung • Jl. Patimura - Jl. Renggam SMK1 Sumber Agung • Jl. Sungai Rangit Jaya - Pangkalan Durin • Jl. Batas Runtu GSDI - Sungai Bengkuang • Jl. Sungai Bengkuang - Sido Mulyo - Semanggang • Jl. Semanggang - Pangkalan Getah • Jalan Negara KM.53 - Sungai Bengkuang • Jl. Batas Pangkalan Tiga - Sp. GSDI • Jl. Simpang GSDI - Simpang Tiga • GSDI+Sp.Umpang+Sp.Pangkut • Jl. Sido Mulya - Sungai Kuning • Jl. Kebon Agung - Sungai Pakit - Sp.Amin Jaya • Jl. Kebon Agung - Simpang Pangkut (GSDI) • Jl. Simpang Arga Mulya - Simpang Kebon Agung • Jl. Simpang Desa 7 - Arga Mulya • Jl. Simpang Amin Jaya - Batas Arut Utara (BJAP) • Jl. Simpang Amin Jaya 1 - Batas Arut Utara (BJAP) • Jl. Simpang Amin Jaya 2 - Batas Arut Utara (Parit Cina) • Jl. Simpang Dinamika - Pangkalan Banteng • Jl. Simpang Margo Mulyo • Jl. Simpang Berambai - Natai Kerbau - Mulya Jadi • Jl. Mulya Jadi - Sungai Pulau - Batas Sungai Bedaun • Jl. Mulya Jadi - Pelabuhan Karang Sari • Jl. Simpang Karang Sari • Jl. Simpang Natai Kerbau • Jl. Simpang Berambai Makmur • Jl. Simpang Sungai Hijau • Jl. Karang Mulya - Sungai Hijau • Jl. Karang Mulya Baru - Sungai Hijau • Jl. Karang Mulya - Amin Jaya • Jl. Natai Tiwadak - Pemancingan

Status Jalan	Ruas Jalan
	<ul style="list-style-type: none"> Jl. Pangkut (Maslubih Siak) - Simpang Tiga GSDI+Sp.Umpang Jl. Sp. Pangkut/Durian Tunggal - Jl. Sinapati Mamang Sukarami Jl. Sp. Pangkut/SMAN Pangkut - Sp. Sukarami Jl. Sp. Sukarami – Gandis Jl. Sp. Gandis – Kerabu Jl. Sp. Kerabu – Penyombaan Jl. Sp. Penyombaan – Pandau Jl. Sp. Pandau – Riam Jl. Riam – Penahan Jl. Sp. Penyombaan - Sambu - Simpang Salip Jl. Sp. Salip - Sei Dau Jl. Pangkut/Bagimang Panji - Aspec Paper Jl. Sp. Aspec Paper - Nanga Mua Jl. Sp. Pangkut / PBNA - Batas Amin Jaya/BJAP Jl. Sp. Salip - Batas Amin Jaya/BJAP Jl. Bukit Naning - Batas Amin Jaya/Parit Cina Jl. Manjung H1 Jl. Balai Antang Jl. Sp. Pangkut - Korintiga / Camp UCK Jl. Pangkut Seberang Kubu - Sungai Bakau - Teluk Bogam Teluk Bogam - Keraya - Sebuai Timur - Sebuai - Batas Tj. Putri Sebuai - Batas Pasir Panjang Jl. Bendahara Jl. HM. Idris - Al Huda Jl. Marundau Jl. Bahari Jl. Masjid Jl. H. Abdul Azis Jl. Pemuda
Lingkungan Primer & Sekunder	<ul style="list-style-type: none"> Jl. Sirajul Huda - Jl. Pemuda Jl. Pelita Jl. An Noor Jl. Kumai Hulu - Sp. Pelabuhan Roro - Sp. Pelabuhan CPO Jl. Nangka - Sp. Pelabuhan Roro Jl. Ampu Candi - Sei Tendang Jl. Berdikari - Jl. Bina Jadi Jl. Meden Jl. Sungai Tendang - Pangkalan Satu Jl. Sp. Bumi Harjo - Pelabuhan CPO Jl. Sp. Bumi Harjo - Pangkalan Satu Jl. Sp. Pelabuhan CPO - Pangkalan Satu Jl. Sungai Tendang - Batas Natai Raya Jl. Sp. Sungai Tendang - Pelabuhan Roro Jl. Angkatan Muda Jl. Sp. Natai Raya - Pelabuhan Roro Jl. PKGB. 5 Jl. Abd. Hamid - Jl. Pemilu Jl. HM. Taher Jl. MIN Kumai Hilir / Jl. Berlian Jl. Rahmat - PKGB 5 Jl. Keramat Jl. Paigo – Pertamina Jl. Kumai/Gerilya - Sungai Tendang Jl. Kumai Hilir - Terminal Sei Kapitan Jl. Rungun – PLTU Jl. DPRD Jl. DPRD 1
Jalan Tol	<ul style="list-style-type: none"> Di seluruh kecamatan
	<ul style="list-style-type: none"> ruas Pangkalan Bun – Lamandau; dan ruas Pangkalan Bun – Sampit.

Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023

Arahan pengembangan terminal penumpang di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Revisi RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 antara lain:

- a. Pengoptimal terminal penumpang tipe B Natai Suka
- b. Pengaktifan kembali 4 (empat) unit terminal penumpang tipe C yaitu:
 1. Terminal Simpang Runtu

2. Terminal Kotawaringin Lama
 3. Terminal Pangkut
 4. Terminal di Kecamatan Pangkalan Banteng
- c. Pengoptimalan trayek angkutan umum perkotaan dan perdesaan

Sedangkan arahan pengembangan terminal barang di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Terminal Barang Bumi Harjo. Selanjutnya untuk arahan pengembangan jembatan timbang di Kabupaten Kotawaringin Barat meliputi Jembatan Timbang Runtu di Kecamatan Pangkalan Lada. Arahan pengembangan jembatan di Kabupaten Kotawaringin Barat meliputi:

- a. Jembatan Kotawaringin Lama di Kabupaten Kotawaringin Barat
- b. Jembatan Sei Arut di Kabupaten Kotawaringin Barat
- c. Jembatan Pile Slab H. Sugianto Sabran di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Selain pengembangan-pengembangan tersebut, juga terdapat pengembangan jaringan kereta api yang meliputi:

A - Jaringan Jalur Kereta Api

Rencana jalur kereta api di Kabupaten Kotawaringin Barat meliputi:

1. Sistem jaringan jalur kereta api utama Provinsi yaitu pada jalur kereta api berupa:
 - Jalur Tumbang Samba - Rantau Pulut - Nanga yang melintasi wilayah Kecamatan Pangkalan Banteng dan Pangkalan Lada
 - Jalur Kudangan - Nanga Bulik – Kumai yang melintasi Kecamatan Arut Selatan, Kumai, dan Pangkalan Lada
2. Sistem jaringan jalur kereta api antar kota yaitu ruas jalan kereta api Buntok –Palangka Raya, Palangka Raya – Sampit – Pangkalan Bun, Pangkalan Bun – Sanggau.

B - Stasiun Kereta Api

Arahan pengembangan stasiun penumpang di Kabupaten Kotawaringin Barat berupa:

1. Pengembangan Stasiun Perkotaan Pangkalan Bun, Kumai.
2. Pengembangan Stasiun Pangkalan Bun dan Kumai.

Rencana sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan berdasarkan Revisi RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 meliputi:

A - Lintas Penyeberangan Antar Provinsi

Berupa Lintas penyeberangan Tempenek - Kendal

B - Pelabuhan Sungai Dan Danau

Pelabuhan sungai dan danau meliputi:

- | | | | |
|---|---|----|----------------|
| 1 | Rencana pengembangan Pelabuhan Pangkalan Lada | 10 | Dermaga Rungun |
|---|---|----|----------------|

2	Rencana pengembangan Pelabuhan Pandau	11	Dermaga LLSADP Sebukat
3	Pelabuhan Kotawaringin Lama	12	Dermaga LLSADP Karang Sari
4	Pelabuhan Pangkalan Bun	13	Dermaga Nangamua
5	Pelabuhan Kumai	14	Dermaga Pandau
6	Pelabuhan Pasar Indrasari	15	Dermaga Kumai Hilir
7	Pelabuhan Pasar Saik	16	Dermaga Sei Cabang
8	Dermaga LLASDP Kotawaringin Lama	17	Dermaga Tanjung Putri
9	Dermaga LLASDP Kumai	18	Dermaga Telur Pulai
		19	Dermaga Sungai Sekonyer

C - Pelabuhan Penyeberangan

Berupa Pelabuhan penyeberangan Kumai

Rencana sistem jaringan transportasi laut berdasarkan Revisi RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 berdasarkan berupa:

A - Pelabuhan Pengumpul

Pelabuhan pengumpul di Kabupaten Kotawaringin Barat meliputi Pelabuhan Kumai

B - Pelabuhan Pengumpan

Pelabuhan pengumpan di Kotawaringin Barat berupa Pelabuhan Pengumpan Regional. Rencana pengembangan pelabuhan pengumpan di Kabupaten Kotawaringin Barat berupa:

1. Pengoptimalan Pelabuhan Pangkalan Bun
2. Pengembangan Pelabuhan Sebuai.

C - Pelabuhan Perikanan

Rencana pelabuhan perikanan di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan pada Pelabuhan Perikanan Kumai.

Untuk jaringan transportasi udara, pada kondisi eksisting Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki satu bandara udara pengumpul yaitu Bandar Udara Iskandar. Pengembangan pada bandara tersebut terus ditingkatkan. Selain itu, terdapat rencana pengembangan bandara khusus berupa Bandar Udara Sebuai, Kecamatan Kumai.

➤ **Energi/ Listrik**

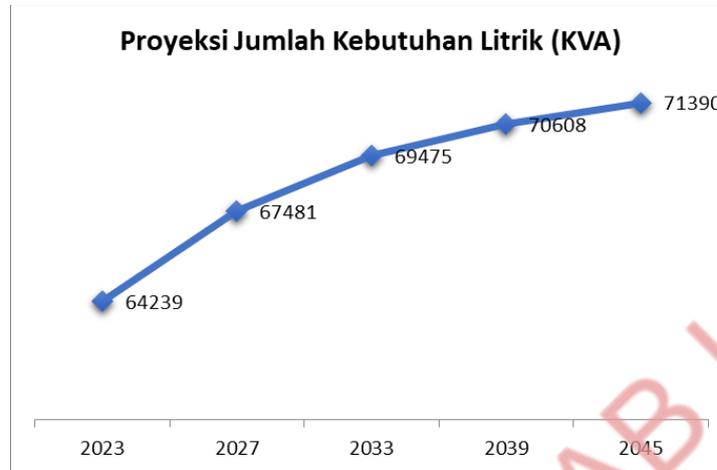
Kebutuhan energi/ listrik yang diproyeksikan meliputi kebutuhan rumah tangga, perdagangan dan industri, fasilitas umum, perkantoran, penerangan jalan, dan cadangan. Proyeksi hingga tahun 2045 dihitung berdasarkan proyeksi jumlah penduduk. Kebutuhan energi/ listrik di Kotawaringin Barat hingga tahun 2045 diperkirakan mencapai 71.390 KVA dan meningkat tiap tahunnya. Dimana kebutuhan listrik terbesar adalah untuk kebutuhan rumah tangga. Berikut adalah proyeksi kebutuhan energi/ listrik di Kotawaringin Barat tahun 2023 – 2045.

Tabel 4. 42. Proyeksi Jumlah Kebutuhan Listrik Tahun 2023 - 2045

Kecamatan	Jumlah Kebutuhan Listrik (KVA)						Total
	Rumah Tangga	Perdagangan dan Industri	Fasilitas Umum	Perkantoran	Penerangan Jalan	Cadangan	
TAHUN 2023	31.960	22.372	4.794	3.196	320	1.598	64.239
Kotawaringin Lama	2.230	1.004	335	223	22	112	3.925
Arut Selatan	13.967	9.777	2.095	1.397	140	698	28.073
Kumai	6.133	4.293	920	613	61	307	12.327
Pangkalan Banteng	4.505	3.154	676	451	45	225	9.055
Pangkalan Lada	4.078	2.855	612	408	41	204	8.197
Arut Utara	1.047	733	157	105	10	52	2.104
TAHUN 2027	33.573	23.501	5.036	3.357	336	1.679	67.481
Kotawaringin Lama	2.321	1.624	348	232	23	116	4.664
Arut Selatan	14.709	10.296	2.206	1.471	147	735	29.564
Kumai	6.393	4.475	959	639	64	320	12.850
Pangkalan Banteng	4.828	3.379	724	483	48	241	9.704
Pangkalan Lada	4.308	3.015	646	431	43	215	8.658
Arut Utara	1.015	710	152	101	10	51	2.040
TAHUN 2033	34.565	24.195	5.185	3.456	346	1.728	69.475
Kotawaringin Lama	2.377	1.664	357	238	24	119	4.779
Arut Selatan	15.177	10.624	2.277	1.518	152	759	30.505
Kumai	6.557	4.590	984	656	66	328	13.180
Pangkalan Banteng	5.031	3.522	755	503	50	252	10.113
Pangkalan Lada	4.452	3.117	668	445	45	223	8.950
Arut Utara	969	679	145	97	10	48	1.948
TAHUN 2039	35.128	24.590	5.269	3.513	351	1.756	70.608
Kotawaringin Lama	2.411	1.688	362	241	24	121	4.846
Arut Selatan	15.451	10.815	2.318	1.545	155	773	31.056
Kumai	6.653	4.657	998	665	67	333	13.373
Pangkalan Banteng	5.150	3.605	773	515	52	258	10.352
Pangkalan Lada	4.537	3.176	681	454	45	227	9.120
Arut Utara	926	648	139	93	9	46	1.861
TAHUN 2045	35.517	24.862	5.328	3.552	355	1.776	71.390
Kotawaringin Lama	2.434	1.704	365	243	24	122	4.893
Arut Selatan	15.645	10.951	2.347	1.564	156	782	31.446
Kumai	6.722	4.705	1.008	672	67	336	13.510
Pangkalan Banteng	5.235	3.664	785	523	52	262	10.522
Pangkalan Lada	4.597	3.218	690	460	46	230	9.241

Kecamatan	Jumlah Kebutuhan Listrik (KVA)						Total
	Rumah Tangga	Perdagangan dan Industri	Fasilitas Umum	Perkantoran	Penerangan Jalan	Cadangan	
Arut Utara	884	619	133	88	9	44	1.777

Sumber: Dokumen Kajian Pengembangan Kawasan Kotawaringin Barat Tahun 2045



Tabel 4. 43. Proyeksi Jumlah Kebutuhan Listrik Kotawaringin Barat Tahun 2023 – 2045

Sumber: Dokumen Kajian Pengembangan Kawasan Kotawaringin Barat Tahun 2045

➤ Telekomunikasi

Kebutuhan telekomunikasi yang diproyeksikan meliputi perkiraan jumlah pengguna seluler, trafik (Erlang), dan Base Transceiver Tower (BTS). Proyeksi hingga tahun 2045 dihitung berdasarkan proyeksi jumlah penduduk tahun 2045. Jumlah pengguna seluler pada tahun 2045 di Kotawaringin Barat diperkirakan mencapai 226.110 pengguna sehingga kebutuhan telekomunikasi di Kotawaringin Barat hingga tahun 2045 diperkirakan mencapai 3.769 trafik (Erlang) dan 84 BTS. Berikut adalah proyeksi telekomunikasi di Kotawaringin Barat tahun 2023 – 2045.

Tabel 4. 44. Perkiraan Jumlah Pengguna Seluler Tahun 2023-2045

Tahun	Kotawaringin Lama	Arut Selatan	Kumai	Pangkalan Banteng	Pangkalan Lada	Arut Utara
2023	14.199	88.915	39.043	28.680	25.963	6.663
2027	14.773	93.639	40.700	30.735	27.424	6.462
2033	15.135	96.619	41.746	32.031	28.346	6.171
2039	15.347	98.362	42.357	32.789	28.885	5.893
2045	15.498	99.599	42.791	33.327	29.267	5.628

Sumber: Dokumen Kajian Pengembangan Kawasan Kotawaringin Barat Tahun 2045

Tabel 4. 45. Jumlah Pengguna, Total Trafik (Erlang), dan Kebutuhan BTS

Tahun	Jumlah Pengguna	Total Trafik (Erlang)	Kebutuhan BTS
2023	203.463	3.391	76
2027	213.732	3.562	80
2033	220.047	3.667	82
2039	223.634	3.727	83
2045	226.110	3.769	84

Sumber: Dokumen Kajian Pengembangan Kawasan Kotawaringin Barat Tahun 2045

➤ **Air Bersih (Air Minum)**

Kebutuhan air bersih (air minum) yang diproyeksikan meliputi kebutuhan rumah tangga, fasos dan perkantoran, komersial, industri, dan cadangan kebocoran. Proyeksi hingga tahun 2045 dihitung berdasarkan proyeksi jumlah penduduk tahun 2045. Kebutuhan air bersih (air minum) pada tahun 2045 di Kotawaringin Barat diperkirakan mencapai 91.752.694 liter/hari. Berikut adalah proyeksi air bersih (air minum) di Kotawaringin Barat tahun 2023 – 2045.

Tabel 4. 46. Proyeksi Kebutuhan Air Bersih (Air Minum) Tahun 2023 - 2045

Desa/ Kelurahan	Rumah Tangga	Fasos dan Perkantoran	Komersial	Industri	Cadangan Kebocoran	Total
TAHUN 2023	53.266.306	7.989.946	10.653.261	5.326.631	5.326.631	82.562.774
Kotawaringin Lama	3.717.179	557.577	743.436	371.718	371.718	5.761.627
Arut Selatan	23.277.924	3.491.689	4.655.585	2.327.792	2.327.792	36.080.782
Kumai	10.221.365	1.533.205	2.044.273	1.022.137	1.022.137	15.843.116
Pangkalan Banteng	7.508.407	1.126.261	1.501.681	750.841	750.841	11.638.031
Pangkalan Lada	6.797.055	1.019.558	1.359.411	679.706	679.706	10.535.435
Arut Utara	1.744.376	261.656	348.875	174.438	174.438	2.703.782
TAHUN 2027	55.954.660	8.393.199	11.190.932	5.595.466	5.595.466	86.729.724
Kotawaringin Lama	3.867.538	580.131	773.508	386.754	386.754	5.994.684
Arut Selatan	24.514.471	3.677.171	4.902.894	2.451.447	2.451.447	37.997.430
Kumai	10.655.234	1.598.285	2.131.047	1.065.523	1.065.523	16.515.612
Pangkalan Banteng	8.046.255	1.206.938	1.609.251	804.626	804.626	12.471.696
Pangkalan Lada	7.179.515	1.076.927	1.435.903	717.951	717.951	11.128.248
Arut Utara	1.691.648	253.747	338.330	169.165	169.165	2.622.054
TAHUN 2033	57.607.972	8.641.196	11.521.594	5.760.797	5.760.797	89.292.357
Kotawaringin Lama	3.962.404	594.361	792.481	396.240	396.240	6.141.727
Arut Selatan	25.294.645	3.794.197	5.058.929	2.529.465	2.529.465	39.206.700
Kumai	10.928.974	1.639.346	2.185.795	1.092.897	1.092.897	16.939.910
Pangkalan Banteng	8.385.600	1.257.840	1.677.120	838.560	838.560	12.997.680
Pangkalan Lada	7.420.820	1.113.123	1.484.164	742.082	742.082	11.502.271
Arut Utara	1.615.529	242.329	323.106	161.553	161.553	2.504.070
TAHUN 2039	58.546.931	8.782.040	11.709.386	5.854.693	5.854.693	90.747.742
Kotawaringin Lama	4.017.898	602.685	803.580	401.790	401.790	6.227.741
Arut Selatan	25.751.018	3.862.653	5.150.204	2.575.102	2.575.102	39.914.077
Kumai	11.089.102	1.663.365	2.217.820	1.108.910	1.108.910	17.188.108
Pangkalan Banteng	8.584.104	1.287.616	1.716.821	858.410	858.410	13.305.361
Pangkalan Lada	7.561.974	1.134.296	1.512.395	756.197	756.197	11.721.060
Arut Utara	1.542.835	231.425	308.567	154.284	154.284	2.391.395
TAHUN 2045	59.195.286	8.879.293	11.839.057	5.919.529	5.919.529	91.752.694
Kotawaringin Lama	4.057.271	608.591	811.454	405.727	405.727	6.288.770
Arut Selatan	26.074.819	3.911.223	5.214.964	2.607.482	2.607.482	40.415.970
Kumai	11.202.715	1.680.407	2.240.543	1.120.271	1.120.271	17.364.208
Pangkalan	8.724.945	1.308.742	1.744.989	872.494	872.494	13.523.664

Desa/ Kelurahan	Rumah Tangga	Fasos dan Perkantoran	Komersial	Industri	Cadangan Kebocoran	Total
Banteng						
Pangkalan Lada	7.662.125	1.149.319	1.532.425	766.212	766.212	11.876.293
Arut Utara	1.473.413	221.012	294.683	147.341	147.341	2.283.789

Sumber: Dokumen Kajian Pengembangan Kawasan Kotawaringin Barat Tahun 2045



Gambar 4. 16. Proyeksi Jumlah Kebutuhan Air Minum (liter/hari)

Sumber: Dokumen Kajian Pengembangan Kawasan Kotawaringin Barat Tahun 2045

➤ Persampahan

Proyeksi yang dihitung meliputi jumlah timbulan sampah (liter/hari) dan kebutuhan sarana persampahannya. Proyeksi hingga tahun 2045 dihitung berdasarkan proyeksi jumlah penduduk. Timbulan sampah pada tahun 2045 di Kotawaringin Barat diperkirakan mencapai 947.124,58 liter/hari. Sedangkan kebutuhan sarana persampahan hingga tahun 2045 meliputi wadah komunal (1.579 unit), komposter komunal (3.157 unit), gerobak sampah (493 unit), container amroll truck (59 unit), TPS (140 unit), dan bangunan pendaur ulang sampah skala lingkungan (105 unit). Berikut adalah proyeksi jumlah timbulan sampah dan kebutuhan sarana persampahan di Kotawaringin Barat tahun 2023 – 2045.

Tabel 4. 47. Proyeksi Jumlah Timbulan Sampah (liter/hari) Tahun 2023 - 2045

Kecamatan	2023	2027	2033	2039	2045
Kotawaringin Lama	59.474,86	61.880,61	63.398,47	64.286,36	64.916,33
Arut Selatan	372.446,79	392.231,53	404.714,32	412.016,28	417.197,11
Kumai	163.541,85	170.483,74	174.863,59	177.425,63	179.243,43
Pangkalan Banteng	120.134,51	128.740,09	134.169,60	137.345,66	139.599,11
Pangkalan Lada	108.752,88	114.872,23	118.733,12	120.991,59	122.594,00
Arut Utara	27.910,01	27.066,36	25.848,46	24.685,36	23.574,60
Total	852.260,90	895.274,57	921.727,56	936.750,89	947.124,58

Sumber: Dokumen Kajian Pengembangan Kawasan Kotawaringin Barat Tahun 2045

Tabel 4. 48. Kebutuhan Sarana Persampahan Tahun 2023-2045

Kecamatan	Wadah Komunal	Komposter Komunal	Gerobak Sampah	Container Amroll Truk	TPS			Bangunan pendaur ulang sampah skala lingkungan
					Tipe I	Tipe II	Tipe III	
TAHUN 2023	1.420	2.841	444	53	114	9	2	95
Kotawaringin Lama	99	198	31	4	8	1	0	7
Arut Selatan	621	1.241	194	23	50	4	1	41
Kumai	273	545	85	10	22	2	0	18
Pangkalan Banteng	200	400	63	8	16	1	0	13
Pangkalan Lada	181	363	57	7	15	1	0	12
Arut Utara	47	93	15	2	4	0	0	3
TAHUN 2027	1.492	2.984	466	56	119	10	2	99
Kotawaringin Lama	103	206	32	4	8	1	0	7
Arut Selatan	654	1.307	204	25	52	4	1	44
Kumai	284	568	89	11	23	2	0	19
Pangkalan Banteng	215	429	67	8	17	1	0	14
Pangkalan Lada	191	383	60	7	15	1	0	13
Arut Utara	45	90	14	2	4	0	0	3
TAHUN 2033	1.536	3.072	430	58	123	10	3	102
Kotawaringin Lama	106	211	33	4	8	1	0	7
Arut Selatan	675	1.349	211	25	54	4	1	45
Kumai	291	583	91	11	23	2	0	19
Pangkalan Banteng	224	447	70	8	18	1	0	15
Pangkalan Lada	198	396	62	7	16	1	0	13
Arut Utara	43	86	13	2	3	0	0	3
TAHUN 2039	1.561	3.123	488	59	125	10	3	104
Kotawaringin Lama	107	214	33	4	9	1	0	7
Arut Selatan	687	1.373	215	26	55	5	1	46
Kumai	296	591	92	11	24	2	0	20
Pangkalan Banteng	229	458	72	9	18	2	0	15
Pangkalan Lada	202	403	63	8	16	1	0	13
Arut Utara	41	82	13	2	3	0	0	3
TAHUN 2045	1.579	3.157	493	59	126	11	3	105
Kotawaringin Lama	108	216	34	4	9	1	0	7
Arut Selatan	695	1.391	217	26	56	5	1	46
Kumai	299	597	93	11	24	2	0	20
Pangkalan Banteng	233	465	73	9	19	2	0	16

Kecamatan	Wadah Komunal	Komposter Komunal	Gerobak Sampah	Container Amroll Truk	TPS			Bangunan pendaur ulang sampah skala lingkungan
					Tipe I	Tipe II	Tipe III	
Pangkalan Lada	204	409	64	8	16	1	0	14
Arut Utara	39	79	12	1	3	0	0	3

Sumber: Dokumen Kajian Pengembangan Kawasan Kotawaringin Barat Tahun 2045

➤ Air Limbah

Jumlah air limbah yang diproyeksikan meliputi air limbah yang dihasilkan dari rumah tangga, fasos dan perkantoran, komersial, dan industri. Proyeksi hingga tahun 2045 dihitung berdasarkan proyeksi jumlah penduduk. Air limbah yang dihasilkan pada tahun 2045 di Kotawaringin Barat diperkirakan mencapai 68.666.532 liter/hari. Berikut adalah proyeksi air limbah di Kotawaringin Barat tahun 2023 – 2045.

Tabel 4. 49. Proyeksi Jumlah Air Limbah (liter/hari) Tahun 2023-2045

Kecamatan	Rumah Tangga	Fasos dan Perkantoran	Komersial	Industri	Total
TAHUN 2023	42.613.045	6.391.957	8.522.609	4.261.304	61.788.915
Kotawaringin Lama	2.973.743	446.061	594.749	297.374	4.311.927
Arut Selatan	18.622.339	2.793.351	3.724.468	1.862.234	27.002.392
Kumai	8.177.092	1.226.564	1.635.418	817.709	11.856.784
Pangkalan Banteng	6.006.726	901.009	1.201.345	600.673	8.709.752
Pangkalan Lada	5.437.644	815.647	1.087.529	543.764	7.884.584
Arut Utara	1.395.501	209.325	279.100	139.550	2.023.476
TAHUN 2027	44.763.728	6.714.559	8.952.746	4.476.373	64.907.406
Kotawaringin Lama	3.094.031	464.105	618.806	309.403	4.486.344
Arut Selatan	19.611.577	2.941.737	3.922.315	1.961.158	28.436.786
Kumai	8.524.187	1.278.628	1.704.837	852.419	12.360.071
Pangkalan Banteng	6.437.004	965.551	1.287.401	643.700	9.333.656
Pangkalan Lada	5.743.612	861.542	1.148.722	574.361	8.328.237
Arut Utara	1.353.318	202.998	270.664	135.332	1.962.311
TAHUN 2033	46.086.378	6.912.957	9.217.276	4.608.638	66.825.248
Kotawaringin Lama	3.169.924	475.489	633.985	316.992	4.596.389
Arut Selatan	20.235.716	3.035.357	4.047.143	2.023.572	29.341.788
Kumai	8.743.179	1.311.477	1.748.636	874.318	12.677.610
Pangkalan Banteng	6.708.480	1.006.272	1.341.696	670.848	9.727.296
Pangkalan Lada	5.936.656	890.498	1.187.331	593.666	8.608.151
Arut Utara	1.292.423	193.863	258.485	129.242	1.874.013
TAHUN 2039	46.837.544	7.025.632	9.367.509	4.683.754	67.914.439
Kotawaringin Lama	3.214.318	482.148	642.864	321.432	4.660.761
Arut Selatan	20.600.814	3.090.122	4.120.163	2.060.081	29.871.180

Kecamatan	Rumah Tangga	Fasos dan Perkantoran	Komersial	Industri	Total
Kumai	8.871.282	1.330.692	1.774.256	887.128	12.863.358
Pangkalan Banteng	6.867.283	1.030.092	1.373.457	686.728	9.957.560
Pangkalan Lada	6.049.579	907.437	1.209.916	604.958	8.771.890
Arut Utara	1.234.268	185.140	246.854	123.427	1.789.689
TAHUN 2045	47.356.229	7.103.434	9.471.246	4.735.623	68.666.532
Kotawaringin Lama	3.245.817	486.872	649.163	324.582	4.706.434
Arut Selatan	20.859.855	3.128.978	4.171.971	2.085.986	30.246.790
Kumai	8.962.172	1.344.326	1.792.434	896.217	12.995.149
Pangkalan Banteng	6.979.956	1.046.993	1.395.991	697.996	10.120.936
Pangkalan Lada	6.129.700	919.455	1.225.940	612.970	8.888.065
Arut Utara	1.178.730	176.810	235.746	117.873	1.709.159

Sumber: Dokumen Kajian Pengembangan Kawasan Kotawaringin Barat Tahun 2045

➤ Sistem Jaringan Drainase

Sistem jaringan drainase yang diproyeksikan yaitu air buangan (liter/hari). Proyeksi hingga tahun 2045 dihitung berdasarkan proyeksi jumlah penduduk tahun 2045 dan air bersih (air minum). Air buangan yang mengalir dalam saluran drainase pada tahun 2045 di Kotawaringin Barat diperkirakan mencapai 64.226.885,69 liter/hari atau 743,37 liter/detik. Berikut adalah proyeksi air buangan pada saluran drainase di Kotawaringin Barat tahun 2023 – 2045.

Tabel 4. 50. Proyeksi Jumlah Air Buangan (liter/hari)

Desa/ Kelurahan	2023	2027	2033	2039	2045
Kotawaringin Lama	4.033.138,96	4.196.278,98	4.299.208,87	4.359.419,00	4.402.138,77
Arut Selatan	25.256.547,70	26.598.200,93	27.444.689,88	27.939.854,17	28.291.178,83
Kumai	11.090.181,47	11.560.928,56	11.857.936,91	12.031.675,65	12.154.945,25
Pangkalan Banteng	8.146.621,65	8.730.187,14	9.098.375,97	9.313.752,63	9.466.564,80
Pangkalan Lada	7.374.804,78	7.789.773,36	8.051.589,39	8.204.741,95	8.313.405,42
Arut Utara	1.892.647,59	1.835.437,66	1.752.848,82	1.673.976,21	1.598.652,62
Total (liter/hari)	57.793.942,14	60.710.806,63	62.504.649,84	63.523.419,61	64.226.885,69
Total (liter/detik)	668,91	702,67	723,43	735,22	743,37

Sumber: Dokumen Kajian Pengembangan Kawasan Kotawaringin Barat Tahun 2045

➤ Sumber Daya Air

Berdasarkan Revisi RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023, prasarana sumber daya air meliputi sistem jaringan irigasi, sistem jaringan pengendali air, dan bangunan sumber daya air. Sistem jaringan irigasi terdiri dari jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder, sebagai berikut:

1. Jaringan irigasi primer, berupa:
 - a. DI Sagu Suka Mulya (Kumai - Kondang) Induk di Kecamatan Kotawaringin Lama
 - b. DI Palih Baru Induk di Kecamatan Kotawaringin Lama
 - c. DI Berambai Makmur Induk di Kecamatan Pangkalan Banteng
 - d. DI Pangkalan Satu Bumi Harjo Induk di Kecamatan Kumai

- e. DI Pangkalan Satu Lahan II Induk di Kecamatan Kumai
2. Jaringan irigasi sekunder, berupa:
 - a. DI Sagu Suka Mulya (Kumai - Kondang) Sekunder di Kecamatan KotawaringinLama
 - b. DI Palih Baru Sekunder di Kecamatan Kotawaringin Lama
 - c. DI Berambai Makmur Sekunder di Kecamatan Pangkalan Banteng
 - d. DI Pangkalan Satu Bumi Harjo Sekunder di Kecamatan Kumai
 - e. DI Pangkalan Satu Lahan II Sekunder di Kecamatan Kumai

Rencana sistem pengendalian banjir terdiri dari rencana jaringan pengendalian banjir dan bangunan pengendalian banjir.

1. Jaringan pengendalian banjir:

Rencana pengembangan jaringan pengendalian banjir di Kabupaten KotawaringinBarat terdiri dari:

- a. Wilayah Sungai (WS) Jelai Kendawangan meliputi DAS Arut (Kabupaten Kotawaringin Barat), DAS Lamandau (Kabupaten Lamandau), DAS Kumai (Kabupaten Kotawaringin Barat), dan DAS Jelai (Kabupaten Sukamara);
 - b. Pantai di Kabupaten Kotawaringin Barat (Pantai Desa Kubu, Pantai Sei Bakau, Pantai Desa Keraya, Pantai Desa Sebuai, dan Pantai Teluk Bogam).
2. Bangunan pengendalian banjir:
 - a. Sungai Dendang Desa Marga Mulya
 - b. Sungai Buun Kec. Arut Selatan
 - c. Sungai di Desa Sungai Hijau
 - d. Sungai IPUH Desa IPUH Bangun Jaya Kec. Kotawaringin Lama
 - e. Sungai Kumai di Desa Argamulya Kec. Pangkalan Banteng
 - f. Sungai Karang Mulya Kec. Pangkalan Banteng
 - g. Sungai Sintuk Kecil Kec. Kumai
 - h. Sungai Sentosa Kec. Kumai
 - i. Sungai Badara Kumpai Batu Bawah
 - j. Sungai Melawen Desa Sungai Melawen
 - k. Sungai Desa Lada Mandala Jaya Kec. Pangkalan Lada
 - l. Sungai Dendang Desa Marga Mulya
 - m. Sungai Anak Sungai Pakit Kec. Pangkalan Banteng
 - n. Sungai Lopo Kec. Kotawaringin Lama
 - o. Sungai Sintuk Kec. Kumai
 - p. Sungai Bamban Kec. Arut Selatan

- q. Sungai Dendang Desa Simpang Berambai Kec. Pangkalan Banteng
- r. Desa Karang Sari Kec. Pangkalan Banteng
- s. Sungai Andel Perkebunan Pertanian RT 8 Kel. Candi Kec. Kumai
- t. Sungai RT.15 Sungai Melawen Kec. Pangkalan Lada
- u. Sungai Asap Kumai Hilir Kec. Kumai.

Pada kondisi eksisting bangunan sumber daya air yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat berupa bendung, embung, dan danau sebagai berikut:

1. Bendung, meliputi: Bendung Kumai Kondang di Kotawaringin Lama;
2. Embung, meliputi:
 - a. Embung Danau Asam;
 - b. Embung Sungai Kuning;
 - c. Embung Marga Mulya;
 - d. Embung Pangkalan Satu; dan
 - e. Embung Palih Baru di Kotawaringin Lama.
3. Danau, meliputi:
 - a. Danau Asem
 - b. Danau Gatel
 - c. Danau Gihitam
 - d. Danau Jalapangin; dan
 - e. Danau Kandang.

➤ **Evakuasi Bencana**

Berdasarkan Revisi RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023, evakuasi bencana Kabupaten Kotawaringin Barat meliputi jalur evakuasi dan tempat evakuasi. Berikut adalah penjelasannya.

1. Jalur Evakuasi

Jalur evakuasi adalah jalan-jalan utama, jalan kecil, dan gang-gang yang memandu masyarakat dengan cepat menuju area aman dan bangunan vertikal. Rute yang baik harus cukup lebar untuk pergerakan, dan dapat memandu langsung menjauhi lokasi bahaya. Apabila di suatu wilayah rute evakuasi tidak memadai, maka perlu pembuatan jalan tambahan untuk jalur evakuasi. Jalur evakuasi yang baik berdasarkan Buku Penyusunan Rencana Evakuasi Tahun 2020 harus memuat beberapa kriteria seperti:

- a. Titik awal adalah dari permukiman/pusat kegiatan masyarakat
- b. Lebar minimal dapat dilalui oleh 1 kendaraan roda 4, aksesibilitas baik
- c. Perkerasan jalan aspal

- d. Arah rute menjauhi atau tegak lurus dengan bibir pantai atau sungai dan menuju zona risiko rendah
- e. Penentuannya disepakati dan diketahui oleh warga masyarakat kawasan rawan bencana dilengkapi rambu penunjuk arah menuju tempat evakuasi.

Jalur evakuasi di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat memanfaatkan jaringan jalan di seluruh wilayah kabupaten.

2. Tempat Evakuasi

Tempat evakuasi yang baik berdasarkan Buku Penyusunan Rencana Evakuasi Tahun 2020 harus memuat beberapa kriteria seperti:

- a. Luas bangunan minimal 225 m² (mampu menampung seluruh warga terdampak)
- b. berada dekat dengan jalan primer (jalan kabupaten) atau jalan sekunder (jalan desa)
- c. Penentuannya disepakati dan diketahui oleh warga masyarakat kawasan rawan bencana
- d. Lokasi aman dari segala bentuk ancaman utama maupun ancaman ikutan sebagai dampak dari ancaman utama
- e. Jarak terdekat dengan tempat asal warga masyarakat terdampak
- f. Mudah dijangkau oleh bantuan kemanusiaan dari pihak luar
- g. Tersedia dan/atau dekat dengan sumberdaya untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi hunian/tempat tinggal, air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, pangan dan gizi, dan pendidikan.

Tempat evakuasi bencana dapat memanfaatkan hamparan luas, lapangan maupun bangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat yang sesuai dengan kriteria tempat evakuasi.

4.3.7 Kebutuhan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

➤ Analisis Kesesuaian Lahan

Analisa keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dan khususnya di Kecamatan Kumai dan Kecamatan Arut Selatan terhadap kesesuaian kebijakan ditinjau dari Rencana Tata Ruang Kabupaten (RTRW) Kabupaten Kotawaringin Barat, kebijakan Rencana Pembangunan RPJM/RPJP, dan rencana – rencana lainnya terkait dengan dukungan dan kesesuaian keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Sesuai dengan arahan RTRW Provinsi Kalimantan Tengah 2015-2035 (Perda Prov. Kalimantan Tengah No. 5 Tahun 2015) dan RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat (Perda Kabupaten Kotawaringin Barat No. 1 Tahun 2018), Kawasan Ekonomi Khusus sebagai Kawasan Peruntukan Industri.

Dalam rencana tata ruang tersebut, arahan rencana pola ruang direncanakan sebagai berikut:

1. Kawasan industri, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Strategis Industri tersebar sesuai dengan perencanaan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan perencanaan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (mulai dari Kawasan Industri Tanjung Kalap, Kawasan Industri Natai Peramuhan, Kawasan Industri Tempenek seluas ±146 ha dan Kawasan Ekonomi Khusus di Daerah Sebuai)
2. Kawasan terpadu industri, pelabuhan, petikemas dan pergudangan, serta simpul transportasi darat, transportasi laut dan transportasi udara berupa kawasan sentra produksi berada di Pangkalan Bun - Kumai, kawasan sentra produksi Pandu Sanjaya - Karang Mulya (Pakam), kawasan sentra produksi Pangkut, kawasan pelabuhan meliputi: pelabuhan Tanjung Kalap/CPO Bumiharjo dan pelabuhan Roro berada di Kecamatan Kumai, Bandar Udara Iskandar Pangkalan Bun dan Rencana Pembangunan Bandar Udara Baru berada di Desa Sebuai serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Desa Sebuai.

Analisa fisik dan lingkungan wilayah ini adalah untuk mengenali karakteristik sumberdaya alam tersebut, dengan menelaah kemampuan dan kesesuaian lahan, agar penggunaan lahan dalam pengembangan kawasan dapat dilakukan secara optimal dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem. Hasil studi analisis fisik dan lingkungan ini akan menjadi masukan dalam penyusunan rencana tata ruang Kawasan Ekonomi Khusus karena akan memberikan gambaran kerangka fisik pengembangan kawasan tersebut.

Sesuai dengan arahan kebijakan yang telah diuraikan diatas bahwa secara umum pembangunan ekonomi di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat diarahkan dalam sektor industri (Agro dan non agro), kehutanan dan perkebunan. Sehingga untuk mengakomodasi kepentingan tersebut maka dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dapat dibagi beberapa zona kawasan yaitu :

a. Zona Inti KEK

Merupakan zona yang di dalamnya terdapat beberapa titik kawasan industri

b. Zona Penghubung (kawasan pendukung KEK)

Merupakan kawasan penghubung antara kawasan inti KEK dengan kawasan penunjang (kawasan yang berpotensi KEK)

c. Zona Penunjang (kawasan pendukung KEK)

d. Zona Pelabuhan

Merupakan kawasan yang berfungsi sebagai distribusi ekspor/import baik bahan mentah/setengah jadi maupun bahan hasil pengolahan industri.

Pemilihan lokasi tapak perencanaan KEK yang merupakan Zona Inti, Zona Penghubung dan Zona Penunjang harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Tersedianya akses jalan yang memenuhi kelancaran arus transportasi kegiatan industri, terutama jalan untuk pengembangan kawasan industri dengan karakteristik lalu lintas truk container dan akses ke pelabuhan/bandara.
2. Jarak ke pusat kota minimal 10 km
3. Jarak terhadap permukiman minimal 2 km dari lokasi kegiatan industri.
4. Dekat dengan ketersediaan jaringan listrik, jaringan komunikasi dan air bersih
5. Dekat dengan pelabuhan
6. Topografi dengan kemiringan tanah maksimal 15%
7. Jarak terhadap sungai atau sumber air bersih maksimum 5 km
8. Ketersediaan lahan untuk kawasan industri masih luas, minimal 50 Ha
9. Harga lahan relative (bukan merupakan lahan dengan harga yang tinggi di daerah tersebut).
10. Peruntukan lahan sebagai kawasan industri (bukan peruntukan pertanian, permukiman dan konservasi) dan relative tidak subur(non irigasi teknis).
11. Orientasi Lokasi dengan aksesibilitas tinggi dan dekat dengan potensi tenaga kerja
12. Dapat memberikan pengaruh eksternal yang kuat bagi lingkungan sekitarnya (multiplier effects).

Untuk kawasan komersial yaitu perdagangan jasa, perkantoran harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Tidak terletak pada kawasan lindung dan kawasan bencana alam;
- b. Lokasinya strategis dan mudah dicapai dari seluruh penjuru kota;
- c. Dilengkapi dengan sarana antara lain tempat parkir umum, bank/ATM, pos polisi, pos pemadam kebakaran, kantor pos pembantu, tempat ibadah, dan sarana penunjang kegiatan komersial serta
- d. kegiatan pengunjug;
- e. Terdiri dari perdagangan lokal, regional, dan antar regional.

Dari kriteria-kriteria tersebut diatas maka untuk pengalokasian pemanfaatan ruang di dalam KEK perlu dilakukan analisa fisik kesesuaian lahan secara spasial. Analisa tersebut meliputi kesesuaian terhadap kondisi fisik penggunaan lahan, kemiringan lahan, sempadan sungai, dan dampak sosial terhadap permukiman penduduk.

Dalam identifikasi kesesuaian lahan untuk rencana lokasi kawasan KEK didapatkan hasil yang perlu dipertimbangkan sebagai berikut :

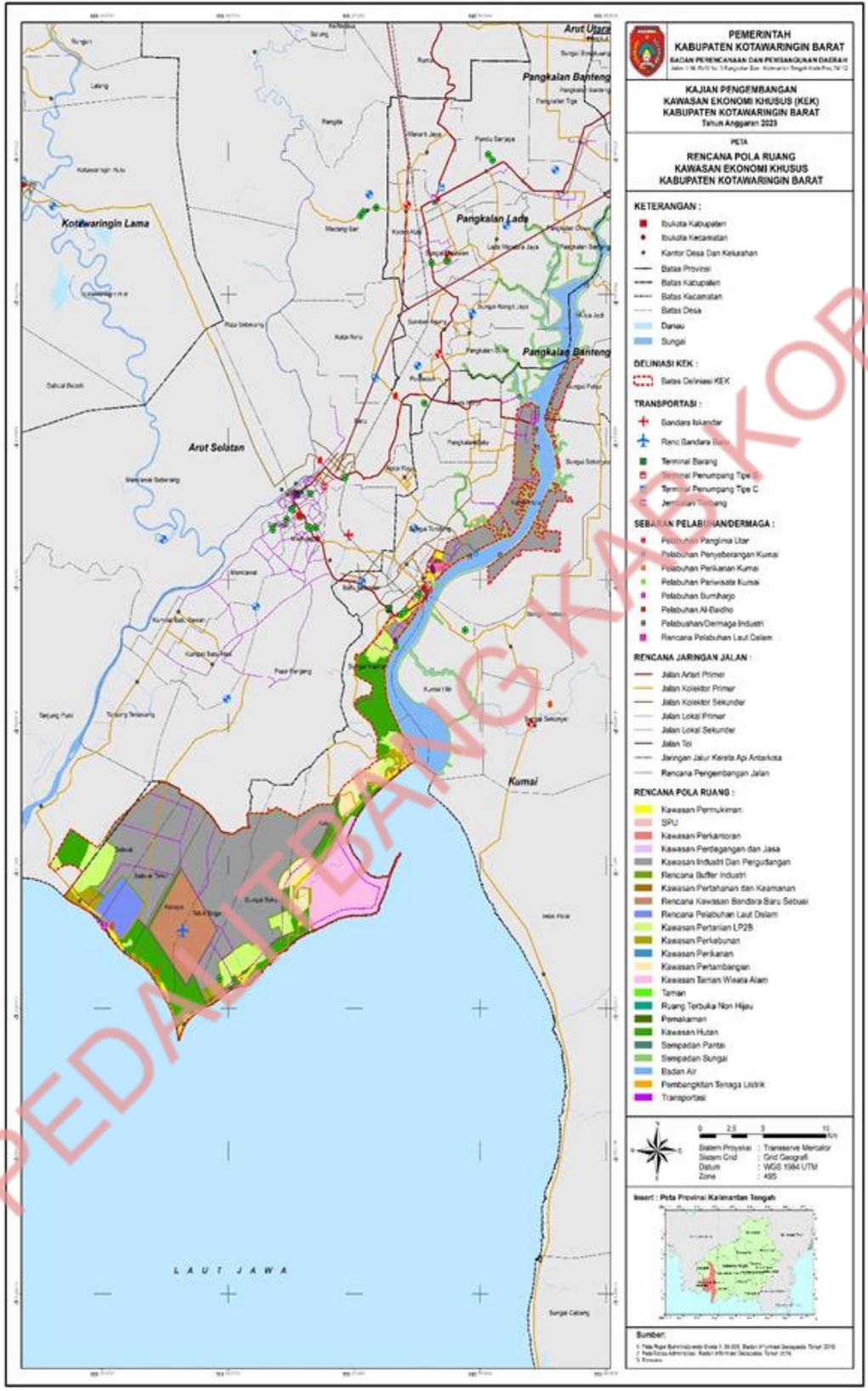
- a. Kondisi topografi lahan berupa topografi yang landai sampai kemiringan yang tajam, sehingga kawasan yang boleh terbangunan adalah daerah yang mempunyai kemiringan yang dipersyaratkan untuk bangunan.
- b. Terdapat permukiman penduduk di dalam rencana KEK, sehingga dalam penempatan peruntukan di dalam KEK perlu dipertimbangkan aspek sosial yang akan berdampak terhadap permukiman di sekitar KEK.

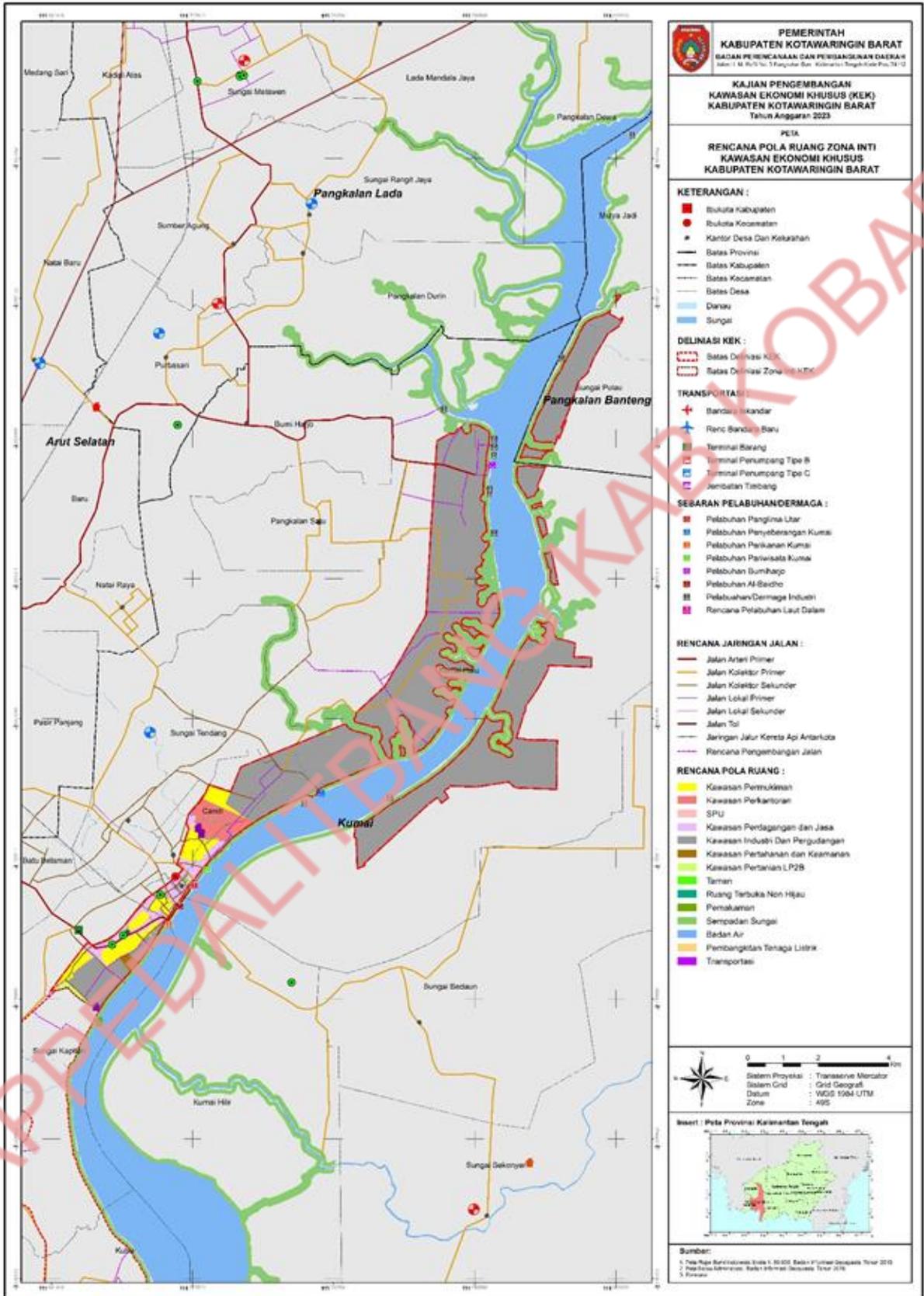
Tabel 4. 51. Rencana Pengembangan KEK Kabupaten Kotawaringin Tahun 2023

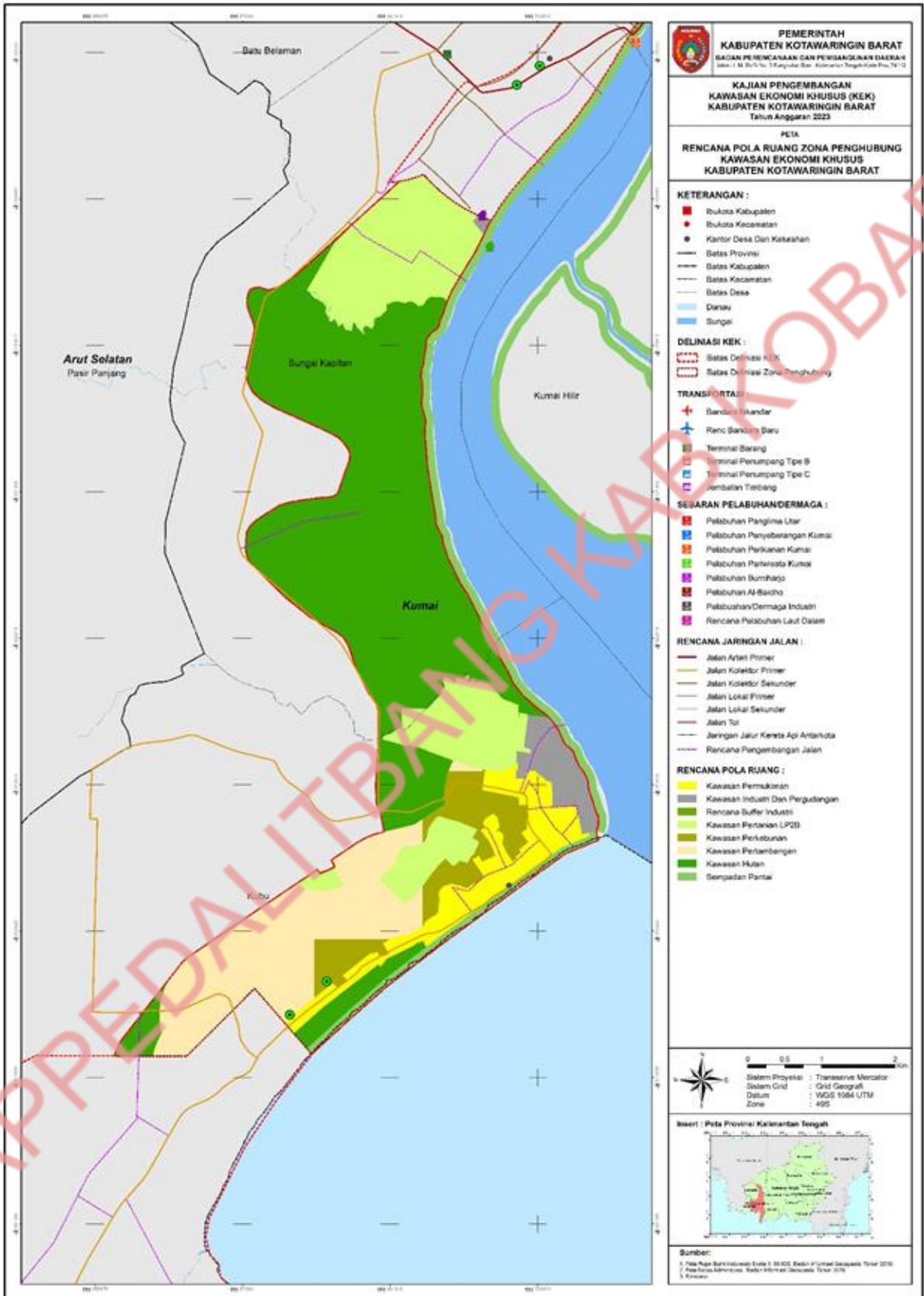
No	Rencana Pengembangan	Luas Ha
A.	Zona Inti	
1	Kawasan Permukiman	216,13
2	Kawasan Perkantoran	114,69
3	SPU	7,12
4	Kawasan Perdagangan dan Jasa	166,90
5	Kawasan Industri Dan Pergudangan	3470,33
6	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	14,49
7	Kawasan Pertanian LP2B	15,20
8	Taman	2,21
9	Ruang Terbuka Non Hijau	0,18
10	Pemukaman	1,32
11	Sempadan Sungai	9,26
12	Badan Air	3,37
13	Pembangkitan Tenaga Listrik	4,36
14	Transportasi	0,65
15	Badan Jalan	19,51
	TOTAL	4045,69
B.	Zona Penghubung	
1	Kawasan Permukiman	195,37
2	Kawasan Industri Dan Pergudangan	83,22
3	Rencana Buffer Industri	1,49
4	Kawasan Pertanian LP2B	527,63
5	Kawasan Perkebunan	158,30
6	Kawasan Pertambangan	428,50

No	Rencana Pengembangan	Luas Ha
7	Kawasan Hutan	1317,52
8	Sempadan Pantai	49,34
	TOTAL	2761,36
C.	Zona Penunjang	
1	Kawasan Permukiman	453,21
2	Kawasan Industri Dan Pergudangan	11284,99
3	Rencana Buffer Industri	770,45
4	Rencana Kawasan Bandara Baru Sebuai	2058,42
5	Rencana Pelabuhan Laut Dalam	967,59
6	Kawasan Perikanan	6,19
7	Kawasan Taman Wisata Alam	2482,86
8	Kawasan Pertanian LP2B	1533,08
9	Kawasan Perkebunan	590,88
10	Kawasan Pertambangan	695,70
11	Kawasan Hutan	3262,77
12	Sempadan Pantai	237,54
13	Badan Air	1,85
	TOTAL	24345,53
	TOTAL KEK	31152,58

Sumber: RTRW Kabupaten Kotawaringin, Analisa 2023; Dokumen Kajian Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kotawaringin Barat, 2023







➤ Analisis Daya Dukung Lahan

Analisa daya dukung lahan disini digunakan untuk mengetahui kemampuan lahan dalam menampung kegiatan didalam Kawasan Ekonomi Khusus yang terdiri dari Zona Inti, Zona Penghubung, Zona Penunjang. Dalam menentukan lahan sebagai suatu kawasan ekonomi khusus tentunya harus mempunyai potensi yang mendukung, sehingga perlu ditentukan kriteria daya dukung lahannya. Daya dukung lahan merupakan gabungan kemampuan dan kesesuaian lahan :

1. Ditaksir berdasarkan batas ketahanan suatu ekosistem dalam menghadapi dampak penggunaan yang bertujuan menumbuhkan dan meningkatkan manfaatnya yang masih dapat mendatangkan kepuasan kepada pemakainya
2. Bergantung pada keseimbangan kemampuan lahan yang dijadikan tolok ukur dengan latar belakang keperluan dan kepentingan yang dipilih. Ada daya dukung ekologi, ekonomi, fasilitas, rekreasi, estetika, psikologi, keterlanjutan fungsi, dsb.
3. Kelayakan lahan menurut pertimbangan kemampuan dan kesesuaian.

Daya dukung lahan erat kaitannya dengan jenis konstruksi pabrik, bangunan dan jenis produksi yang dihasilkan. Jenis konstruksi pabrik sangat dipengaruhi oleh daya dukung dan komposisi tanah serta kelabilan tanah, yang sangat mempengaruhi biaya dan teknologi konstruksi yang digunakan mengingat bangunan industri membutuhkan fondasi dan konstruksi yang kokoh, maka agar diperoleh efisiensi dalam pembangunannya sebaiknya nilai daya dukung tanah berkisar antara $\delta = 0.7 - 1.0 \text{ kg/cm}^2$.

Sehingga dari uraian diatas dapat ditentukan kriteria daya dukung lahan untuk Kawasan Ekonomi Khusus adalah :

1. Luas lahan yang mencukupi
2. Prosentasi luas kawasan terbangunkan dan tidak terbangun
3. Sudah memenuhi kriteria kesesuaian lahan
4. Penggunaan lahan sudah sesuai dengan arahan tata ruang
5. Ketersediaan sumberdaya air
6. Ketersediaan Aksesibilitas
7. Jaringan utilitas (jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan air bersih)

➤ Analisa Kebutuhan Ruang

A – Kebutuhan Ruang Fasilitas Industri

Analisa penetapan unit blok perencanaan didasarkan atas pembagian lahan dalam kawasan KEK menjadi blok dan jalan, dimana blok terdiri atas unit lingkungan dengan konfigurasi tertentu. Ketentuan pembagian di dalam kawasan KEK mengikuti pembagian blok untuk kawasan industri.

Sesuai dengan PP No 24 tahun 2009 tentang kawasan industri, kebutuhan lahan industri minimal dilakukan pada areal seluas 50 Ha, karena didasarkan atas perhitungan efisiensi pemanfaatan lahan atas biaya pembangunan yang dikeluarkan dan memberikan nilai tambah bagi pengembang. Selain itu tiap-tiap jenis industri membutuhkan luas lahan yang berbeda sesuai dengan skala dan proses produksinya. Sehingga alokasi ruang industri harus memperhatikan tingkat kebutuhan lahan, terutama dalam menampung pertumbuhan industri baru atau relokasi.

Ketersediaan lahan untuk kawasan industri harus memasukkan pertimbangan kebutuhan lahan diluar kegiatan sektor industri sebagai multiplier effect-nya, seperti kebutuhan lahan perumahan dan kegiatan permukiman dan perkotaan lainnya.

Ketentuan pola penggunaan lahan Kawasan Industri telah ditetapkan berdasarkan proporsi jenis penggunaan lahan sebagai kapling industri, jalan-saluran, Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan fasilitas penunjang.

Pola Penggunaan Lahan untuk pengembangan Kawasan Industri adalah sebagai berikut:

- Luas daerah kapling industri maksimum 70% dari luas total area
- Luas ruang terbuka hijau (RTH) minimum 10% dari luas total area
- Jalan dan saluran antara 8-12 % dari luas total area
- Fasilitas penunjang antara 6-12 % dari luas total area

Tabel 4. 52. Standar Pola Penggunaan Lahan Kawasan Industri

No	Jenis Penggunaan	Struktur Penggunaan	Keterangan
1	Kaveling Industri	Maksimal 70%	Setiap kaveling harus mengikuti ketentuan BCR sesuai dengan perda setempat (60-40)
2	Jalan dan Saluran	8-12%	- Untuk tercapainya aksesibilitas diman ada jalan primer dan jalan sekunder - Tekan gandar primer sebaiknya minimal 8 ton dan sekunder minimal 5 ton - Perkerasan jalan minimal 7 meter
3	RTH	Minimal 10%	Dapat berupa jalur hijau (green belt), taman dan perimeter
4	Fasilitas Penunjang	6-12%	Dapat berupa kantin, guest house, tempat ibadah, fasilitas olahraga, PMK, WWTP, GI, Rumah, Telkom dan sebagainya

Sumber : Permen Industri No.35 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri

Tabel 4. 53. Standart Alokasi Peruntukan Lahan Kawasan Industri

Luasan Lahan dapat dijual (maksimal 70%)				Jalan dan Sarana Penunjang lainnya	RTH
Luas Kawasan Industri (Ha)	Kaveling Industri (%)	Kaveling Komersial (%)	Kaveling Perumahan (%)		
10-20	65-70	Maks 10	Maks 10	Sesuai Kebutuhan	Min 10
>20-50	65-70	Maks 10	Maks 10	Sesuai Kebutuhan	Min 10
>50-100	60-70	Maks 12,5	Maks 15	Sesuai Kebutuhan	Min 10
>100-200	50-70	Maks 10	Maks 20	Sesuai Kebutuhan	Min 10
>200-500	45-70	Maks 17,5	10-30	Sesuai Kebutuhan	Min 10
>500	40-70	Maks 20	10-30	Sesuai Kebutuhan	Min 10

Sumber : Permen Industri No.35 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri

Kapling komersial adalah kapling yang disediakan oleh perusahaan kawasan industri untuk sarana penunjang seperti perkantoran, bank, pertokoan/tempat belanja, tempat tinggal sementara, kantin dan sebagainya.

Kapling perumahan adalah kapling yang disediakan oleh perusahaan kawasan industri untuk perumahan pekerja termasuk fasilitas penunjangnya, seperti tempat olah raga dan sarana ibadah.

Fasilitas yang termasuk sarana penunjang lainnya antara pusat kebugaran (fitness centre), pos pelayanan telekomunikasi, saluran pembuangan air hujan, instalasi pengolahan limbah industri, instalasi penyediaan air bersih, instalasi penyediaan tenaga listrik, instalasi telekomunikasi, unit pemadam kebakaran.

Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 10% sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Dari pedoman standar teknis diatas maka dapat diperhitungkan kebutuhan luas masing-masing peruntukan lahan sesuai dengan persentasenya, sehingga didapatkan luas total lahan kawasan industri KEK.

Tabel 4. 54. Rencana Kebutuhan Lahan Kawasan Industri KEK

No	Peruntukan Lahan		Proporsi Luas Lahan	Kebutuhan Luas Lahan	Satuan	Standart Perencanaan
1	Industri	Maksimum Lahan yang dapat dijual 70%	50%	7788,15	Ha	Luas kaveling industri 45-70%
2	Komersial		10%	1557,63	Ha	Luas kaveling komersial maks 17,5%
3	Perumahan		10%	1557,63	Ha	Luas kaveling perumahan 10-25%
4	Jalan dan Sarana Penunjang lainnya		15%	2336,44	Ha	Sesuai kebutuhan
5	RTH		15%	2336,44	Ha	Luas RTH minimal 10%

No	Peruntukan Lahan	Proporsi Luas Lahan	Kebutuhan Luas Lahan	Satuan	Standart Perencanaan
	Total	100%	15576,29		

Sumber: Dokumen Kajian Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kotawaringin Barat, 2023

Dari tabel analisa kebutuhan lahan Kawasan Industri diatas didapatkan luas masing masing peruntukan lahan untuk kapling industri, komersial, perumahan (hunian), jalan dan prasarana lainnya dan Ruang Terbuka Hijau (RTH), sehingga total kebutuhan lahan untuk kawasan industri adalah 15576,29 Ha (sesuai dengan lahan yang tersedia direncana KEK Kotawaringin Barat).

B - Kebutuhan Ruang Perumahan

Untuk kapling permukiman, kebutuhan akan perumahan adalah 88.266 hunian. Sesuai dengan standar dan kriteria pembangunan perumahan (SKB Mendagri; Menteri PU; Meteri Negara Perumahan Rakyat no. 648-389 Th1992; 739/KPTS/1992; 09/KPTS/1992), yaitu “Pembangunan perumahan dan permukiman diarahkan untuk mewujudkan kawasan dan lingkungan perumahan dan permukiman dengan lingkungan hunian yang berimbang meliputi rumah sederhana, rumah menengah dan rumah mewah dengan perbandingan dan kriteria tertentu sehingga dapat menampung secara serasi antara kelompok masyarakat dari berbagai profesi, tingkat ekonomi dan status sosial.”, maka Perbandingan tertentu sebagaimana dimaksud adalah perbandingan jumlah rumah sederhana, berbanding rumah menengah, berbanding rumah mewah, sebesar 6 (enam) atau lebih, berbanding 3 (tiga) atau lebih, berbanding 1 (satu).

Untuk menghitung kebutuhan luas hunian dipakai pendekatan berdasarkan jumlah penduduk. Sedangkan standar luasan masing- masing tipe rumah dengan dimodifikasi luasannya per kapling adalah sebagai berikut:

1. Type rumah sederhana : luas 54-200 m²
2. Type rumah menengah : luas 200-600 m²
3. Type rumah Mewah : luas 600-2000 m²

Tabel 4. 55. Kebutuhan Rumah Tinggal pada Kawasan Permukiman

No	Tipe Rumah	Luas tiap tipe	Ukuran (meter)	Luas Lahan (HA)	Jumlah Rumah (unit)
1	Rumah sederhana	150	10x15	934,58	62305
2	Rumah Menengah	200	10x20	467,29	23364
3	Rumah Mewah	600	20x30	155,76	2596
	Total			1557,63	88.266

Sumber: Dokumen Kajian Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kotawaringin Barat, 2023

Dengan perbandingan dan standar luas tiap tipe rumah maka untuk memenuhi kebutuhan 9000 unit hunian didapatkan komposisi jumlah rumah sebagai berikut :

1. Rumah Sederhana (Luas Tanah 150 m²) : 62.305 unit
2. Rumah Menengah (Luas Tanah 200 m²) : 23.364 unit
3. Rumah Mewah (Luas Tanah 600 m²) : 2.596 unit

Dari perhitungan tabel diatas, maka kebutuhan luas lahan untuk perumahan adalah 1557,63 Ha, jika tambahan kebutuhan lahan untuk berbagai fasilitas umum dan sosial adalah 25% sehingga menjadi 3894,07 Ha.

Dari perhitungan tersebut, dari lahan yang tersedia di dalam kawasan KEK (Zona Inti) untuk pemenuhan perumahan maka alternatif untuk menyelesaikan masalah kebutuhan permukiman dapat dilakukan dengan cara mengakomodasi kebutuhan lahan permukiman sesuai dengan lahan yang tersedia di kawasan industry dan di dalam KEK.

Tipe perumahan yang dapat dikembangkan antara lain :

1. Rumah renggang : peruntukan lahan rumah renggang ditujukan untuk pemanfaatan ruang unit-unit perumahan tunggal dengan mengakomodasi berbagai ukuran perpepetakan serta mengupayakan peningkatan kualitas lingkungan hunian.
2. Rumah deret : peruntukan lahan rumah deret bertujuan menyediakan pembangunan perumahan unit deret dalam perpepetakan sedang dan kecil dengan jalan lingkungan

C - Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Dalam pengembangan kawasan industri diwajibkan mengalokasikan lahan untuk Ruang Terbuka Hijau minimum adalah sebesar 10% dari total luas lahan Kawasan Industri. Alokasi Ruang Terbuka Hijau direncanakan Kawasan Industri adalah sebesar 15% atau seluas 2336,44 Ha. Secara ekologi Ruang Terbuka Hijau untuk kawasan industri berfungsi menurunkan kadar polusi (CO₂), memproduksi O₂, meredam kebisingan, penyegaran udara, menunjang tata guna, tata air, pelestarian tanah dan pelestarian plasma nutfah. Secara arsitektur Ruang Terbuka Hijau berfungsi sebagai penegasan ruang, pemberi suasana dan karakter bangunan-tapak-lingkungan, peralihan skala, pengendali view, dan pengontrol silau. Fungsi sosial Ruang terbuka Hijau adalah sebagai tempat interaksi antar sesama warga, memberikan sarana rekreasi, menyediakan cadangan kota untuk keperluan darurat, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Ruang Terbuka Hijau dapat berupa RTH Publik dan RTH privat. Ruang Terbuka Hijau publik dapat berupa :

1. Hutan Kota
2. Taman

3. Pedestrian
4. Jalur Hijau Jalan/Jalur Tegangan Tinggi
5. Bantaran Sungai (sempadan Sungai), Waduk/Bozem
6. Lapangan Olah raga
7. Makam

Ruang Terbuka Hijau Privat dapat berupa :

1. Area RTH pada lingkungan Rumah (Halaman, Taman)
2. Area RTH pada lingkungan Pabrik, Perkantoran (Taman, Halaman, parkir)

Ruang Terbuka Hijau yang dimaksud dapat berupa taman buatan seperti lapangan olah raga dan taman. Taman atau ruang terbuka hijau disarankan dapat ditanami oleh tanaman yang memiliki kesesuaian secara ekologis dengan kondisi setempat, mampu menyerap zat pencemar, ketahanan hidup yang lama dan memiliki daya serap air yang tinggi.

➤ **Analisa Kebutuhan Fasilitas Utama**

A - Analisis Kebutuhan Fasilitas Perumahan

Kapling Permukiman merupakan salah satu kawasan pendukung sebagai hunian yang menampung para pekerja di kawasan industri KEK tersebut. Kawasan permukiman yang ada dan terdekat dengan kawasan industri saat ini adalah di desa Lontar, desa Gosong Panjang dan Desa Tepian Balai, desa Kampung Baru dan desa Tata Mekar. Beberapa kawasan permukiman tersebut merupakan kawasan permukiman yang dahulunya adalah permukiman asli, pendatang transmigran dan perumahan karyawan/pekerja perusahaan. Pola permukiman di wilayah ini adalah mengumpul dalam satu kawasan dan juga ada yang menyebar. Untuk mengakomodasi kebutuhan akan perumahan akibat dari adanya pembangunan Kawasan KEK, maka perencanaan kawasan permukiman perlu dilakukan dengan pertimbangan jumlah pekerja yang akan tinggal kawasan tersebut. Perencanaan permukiman dapat berupa permukiman di kawasan KEK maupun perumahan di luar di sekitar kawasan KEK.

Kawasan permukiman tersebut dapat berupa rumah tinggal tunggal, rumah mess/barak pekerja dilengkapi dengan fasilitas penunjang yaitu RTH, Pos Keamanan, TPS, Sekolah, pasar, toko dan sebagainya yang diakomodir dalam satu kawasan perumahan. Kebutuhan kawasan permukiman dihitung berdasarkan pada jumlah pekerja atau pelaku didalam kawasan industri. Sesuai dengan standar pada kawasan industri dibutuhkan tenaga kerja sebanyak 90-110 Tenaga Kerja/Hektar. Hunian dapat berupa Rumah Hunian, Mess/Domitori karyawan. Sehingga kebutuhan Hunian untuk menampung karyawan adalah sebagai berikut :

Luas Kawasan Industri yang direncanakan	:	15576,29 ha	Luas peruntukan lahan industri di dalam kawasan industri KEK sebesar 7788,15 Ha
Kebutuhan Tenaga Kerja	:	90-110 orang/Ha	- diasumsikan tenaga Kerja yang membutuhkan Hunian adalah 100 orang/Ha : 7788,15 Ha x 100 orang/ha = 778.815 orang - diasumsikan 10% (77.881 orang) adalah pekerja lokal yang tinggal di luar perumahan di kawasan industri, maka 90% dari 778.815 orang adalah 700.933 orang pekerja pendatang.
Kebutuhan Hunian	:	88.266 Hunian	- Diasumsikan untuk Hunian di Kawasan Industri KEK dibutuhkan 88.266 Unit hunian - Diasumsikan bila 1 KK atau hunian terdiri 4 orang maka jumlah penduduk untuk perumahan adalah 4 x 88.266 = 353.063 jiwa.
Lahan yang tersedia untuk kapling permukiman	:	1557,63 Ha	Diasumsikan kaveling perumahan adalah 10% dari luas kawasan industri.

Kebutuhan 88.266 hunian tersebut diakomodir dalam suatu kawasan permukiman dengan standar fasilitas perumahan. Sesuai dengan ketentuan teknis kawasan industri bahwa apabila luas kawasan industri 200-500 Ha, maka prosentase luas kapling perumahan maksimum 10-25 %. Maka untuk luas kawasan industri 7788,15 Ha, maka luas kapling perumahan adalah kurang lebih 1557,63 Ha (asumsi 10%) termasuk fasilitas umum-fasilitas sosial. Dari luas yang tersedia, setidaknya harus dapat memadai kebutuhan 88.266 unit hunian, baik hunian rumah tinggal horisontal maupun hunian vertikal.

Untuk pengembangan perumahan baru, ada beberapa kriteria dan batasan teknis sebagai berikut :

1. Penggunaan lahan untuk pengembangan perumahan baru 40-60% dari luas yang ada, dan untuk kawasan-kawasan tertentu disesuaikan dengan karakteristik serta daya dukung lingkungan
2. Kepadatan bangunan dalam satu pengembangan kawasan baru perumahan tidak bersusun maksimum 50 bangunan rumah/ha dan dilengkapi dengan utilitas umum yang memadai
3. Memanfaatkan ruang yang sesuai untuk tempat bermukim di kawasan peruntukan permukiman di pedesaan dengan menyediakan lingkungan yang sehat dan aman dari bencana alam serta dapat memberikan lingkungan hidup yang sesuai bagi pengembangan masyarakat, dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup
4. Kawasan perumahan harus dilengkapi dengan :
 - a. Sistem pembuangan air limbah yang memenuhi SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Lingkungan Perumahan di Perkotaan
 - b. Sistem pembuangan air hujan yang mempunyai kapasitas tampung yang cukup

sehingga lingkungan perumahan bebas dari genangan. Saluran pembuangan air hujan harus direncanakan berdasarkan frekuensi intensitas curah air hujan 5 tahunan dan daya resap tanah. Saluran ini dapat berupa saluran terbuka maupun tertutup. Dilengkapi juga dengan sumur resapan air hujan mengikuti SNI 03-2453-2002 tentang Tata Cara Perencanaan Sumur Resapan Air Hujan untuk lahan pekarangan dan dilengkapi dengan penanaman pohon.

- c. Prasarana air bersih yang memenuhi syarat, baik kuantitas maupun kualitasnya. Kapasitas minimum sambungan rumah tangga 60 liter/orang/hari dan sambungan kran umum 30 liter/orang/hari.
 - d. Sistem pembuangan sampah mengikuti ketentuan SNI 03+3242-1994 tentang Tata Cara Pengelolaan Sampah di Permukiman
5. Penyediaan kebutuhan sarana pendidikan di kawasan peruntukan permukiman yang berkaitan dengan jenis sarana yang disediakan, jumlah penduduk pendukung, luas lantai dan luas lahan minimal, radius pencapaian serta lokasi
 6. Penyediaan sarana kesehatan di kawasan peruntukan permukiman yang berkaitan dengan jenis sarana yang disediakan, jumlah penduduk pendukung, luas lantai dan luas lahan minimal, radius pencapaian, serta lokasi.
 7. Penyediaan kebutuhan sarana ruang terbuka, taman, dan lapangan olah raga di kawasan peruntukan permukiman berkaitan dengan jenis sarana yang disediakan, jumlah penduduk pendukung, luas lahan minimal, radius pencapaian dan kriteria lokasi.
 8. Pemanfaatan kawasan perumahan merujuk SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan kepada Pemerintah Daerah.

B - Analisis Kebutuhan Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan dibutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan akan pendidikan masyarakat. Fasilitas pendidikan disediakan di dalam kawasan permukiman di area kawasan KEK dan juga di luar kawasan KEK sesuai dengan kebutuhan.

Kebutuhan sarana pendidikan di kawasan peruntukan permukiman yang berkaitan dengan jenis sarana yang disediakan, jumlah penduduk pendukung, luas lantai dan luas lahan minimal, radius pencapaian serta lokasi

Kebutuhan Fasilitas Pendidikan dihitung berdasarkan tabel standar kebutuhan fasilitas pendidikan pada peruntukan kawasan permukiman.

Tabel 4. 56. Standar Kebutuhan Sarana Pendidikan pada Kawasan Peruntukan Permukiman

No	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Pendukung (Jiwa)	Kebutuhan per Satuan Sarana		Standar (M ² / Jiwa)	Kriteria	
			Luas Lantai Min (M ²)	Luas lahan Min (M ²)		Radius Pencapaian (M)	Lokasi dan Penyelesaian
1	TK	1.250	216	500	0,28	500	Ditengah kelompok keluarga. Tidak menyeberang jalanraya. Bergabung dengan taman sehingga terjadi pengelompokan kegiatan
2	SD	1.600	633	2.000	1,25	1000	
3	SLTP	4.800	2.282	9.000	1,88	1000	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum. Disatukan dengan lapangan olahraga. Tidak selalu harus di pusat lingkungan
4	SLTA	4.800	3.835	12.500	2,6	3000	
5	Taman Bacaan	2.500	72	150	0,09	1000	Ditengah kelompok warga. Tidak menyeberang jalan lingkungan

Sumber : Permen PU No.41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya

Tabel 4. 57. Kebutuhan Sarana Pendidikan pada Kawasan Permukiman

No	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Pendukung (Jiwa)	Kebutuhan Satuan Sarana		Standar (M ² /Jiwa)	Kriteria	
			Luas Lantai min (m ²)	Luas Lahan min (m ²)		Jumlah (unit)	Lokasi dan Penyelesaian
1	TK	353.063	61009	141225	0,28	282	Ditengah kelompok keluarga . Tidak menyeberang jalan raya. Bergabung dengan taman sehingg terjadi pengelompokan kegiatan
2	SD	353.063	139680	441328	1,25	221	
3	SLTP	353.063	167852	661992	1,88	74	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum. Disatukan dengan lapangan olahraga. Tidak selalu harus di pusat lingkungan
4	SLTA	353.063	282082	919434	2,6	74	
5	Taman Bacaan	353.063	10168	21184	0,09	141	Ditengah kelompok warga. Tidak menyeberang jalan lingkungan

Sumber: Dokumen Kajian Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kotawaringin Barat, 2023

Dari perhitungan fasilitas pendidikan di kawasan permukiman maka didapatkan hasil sebagai berikut :

- TK : 282 unit dengan kebutuhan luas lahan 141.225 m²
- SD : 221 unit dengan kebutuhan luas lahan 441.328 m²
- SLTP : 74 unit dengan kebutuhan luas lahan 661.992 m²
- SLTA : 74 unit dengan kebutuhan luas lahan 919.434 m²
- Taman Bacaan : 141 unit dengan kebutuhan luas lahan 21.184 m²

C - Analisis Kebutuhan Fasilitas Kesehatan

Penyediaan sarana kesehatan di kawasan peruntukan permukiman yang berkaitan dengan jenis sarana yang disediakan, jumlah penduduk pendukung, luas lantai dan luas lahan minimal, radius pencapaian, serta lokasi.

Tabel 4. 58. Standar Kebutuhan Sarana Kesehatan pada Kawasan Peruntukan Permukiman

No	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Pendukung (Jiwa)	Kebutuhan per Satuan Sarana		Standar (M ² / Jiwa)	Kriteria	
			Luas Lantai Min (M ²)	Luas lahan Min (M ²)		Radius Pencapaian (M)	Lokasi dan Penyelesaian
1	Posyandu	1.250	36	60	0,048	500	Ditengah kelompok tetangga Tidak menyeberang jalan raya
2	Balai Pengobatan Warga	2.500	150	300	0,12	1.000	Di tenga kelompok tetangga Tidak menyeberang jalan raya
3	BKIA/Klinik Bersalin	30.000	1500	3.000	0,1	4.000	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum
4	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	30.000	150	300	0,006	1.500	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum
5	Puskesmas dan balai pengobatan	120.000	420	1.000	0,008	3.000	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum
6	Tempat Prakter Dokter	5.000	18	-	-	1.500	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum
7	Posyandu skala lingkungan	30.000	120	250	0,025	1.500	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum

Sumber : Permen PU No.41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya

Kebutuhan Fasilitas Sarana Kesehatan dihitung berdasarkan tabel standar kebutuhan Sarana Kesehatan pada Peruntukan Kawasan Permukiman.

Tabel 4. 59. Kebutuhan Sarana Kesehatan pada Kawasan Permukiman

No	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Pendukung (Jiwa)	Kebutuhan per Satuan Sarana		Standar (M2/ Jiwa)	Kriteria	
			Luas Lantai Min (M2)	Luas lahan Min (M2)		Jumlah (Unit)	Lokasi dan Penyelesaian
1	Posyandu	353.063	10168	16947	0,048	282	Ditengah kelompok tetangga Tidak menyeberang jalan raya
2	Balai Pengobatan Warga	353.063	21184	42368	0,12	141	Di tenga kelompok tetangga Tidak menyeberang jalan raya
3	BKIA/Klinik Bersalin	353.063	17653	35306	0,1	12	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum
4	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	353.063	1765	3531	0,006	12	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum
5	Puskesmas dan balai pengobatan	353.063	0	2942	0,008	3	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum
6	Tempat Prakter Dokter	353.063	1271	-	-	71	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum
7	Posyandu skala lingkungan	353.063	120	2942	0,025	12	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum

Sumber: Dokumen Kajian Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kotawaringin Barat, 2023

Dari perhitungan fasilitas sarana kesehatan di kawasan permukiman maka didapatkan hasil sebagai berikut :

- Posyandu : 282 unit dengan kebutuhan luas lahan 13243 m²
- Balai Pengobatan Warga : 141 unit dengan kebutuhan luas lahan 9600 m²
- BKIA/Klinik Bersalin : 12 unit dengan kebutuhan luas lahan 6000 m²
- Pustu/Balai Pengobatan : 12 unit dengan kebutuhan luas lahan 600 m²
- Posyandu skala lingkungan : 12 unit dengan kebutuhan luas lahan 500 m²

D - Analisis Kebutuhan Fasilitas Perdagangan Dan Jasa

Penyediaan kebutuhan sarana perdagangan dan niaga di kawasan peruntukan komersial yang berkaitan dengan jenis sarana yang disediakan, jumlah penduduk pendukung, luas lantai dan luas lahan minimal, radius pencapaian, serta lokasi.

Tabel 4. 60. Standar Kebutuhan Sarana Perdagangan Dan Niaga Pada Kawasan Peruntukan Permukiman

No	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Pendukung (Jiwa)	Kebutuhan per Satuan Sarana		Standar (M ² / Jiwa)	Kriteria	
			Luas Lantai Min (M ²)	Luas lahan Min (M ²)		Radius Pencapaian (M)	Lokasi dan Penyelesaian
1	Toko/ Warung	250	50 (termasuk Gudang)	100 (bila berdiri sendiri)	0,4	300	Ditengah kelompok tetangga Dapat Merupakan bagian dari sarana lainnya
2	Pertokoan	6.000	1.200	3.000	0,5	2.000	Di pusat kegiatan sub lingkungan KDB 40% Dapat berbentuk P & D
3	Pusat Pertokoan+Pasar Lingkungan	30.000	13.500	10.000	0,33		- Dapat dijangkau dengan kendaraan umum
4	Pusat Perbelanjaan dan Niaga (toko+pasar+bank+kantor)	120.000	36.000	36.000	0,3		- Terletak dijalan utama Termasuk sarana parkir sesuai dengan ketentuan berlaku

Sumber : Permen PU No.41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya

Kebutuhan Perdagangan dan Niaga dihitung berdasarkan tabel standar kebutuhan Perdagangan dan Niaga pada Peruntukan Kawasan Permukiman.

Tabel 4. 61. Kebutuhan Sarana Perdagangan dan Niaga pada Kawasan Permukiman

No	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Pendukung (Jiwa)	Kebutuhan per Satuan Sarana		Standar (M ² / Jiwa)	Kriteria	
			Luas Lantai Min (M ²)	Luas lahan Min (M ²)		Jumlah (Unit)	Lokasi dan Penyelesaian
1	Toko/ Warung	353.063	70613	141225	0,4	1412	Ditengah kelompok tetangga Dapat Merupakan bagian dari sarana lainnya
2	Pertokoan	353.063	70613	176532	0,5	59	Di pusat kegiatan sub lingkungan KDB 40% Dapat berbentuk P & D

No	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Pendukung (Jiwa)	Kebutuhan per Satuan Sarana		Standar (M ² / Jiwa)	Kriteria	
			Luas Lantai Min (M ²)	Luas lahan Min (M ²)		Jumlah (Unit)	Lokasi dan Penyelesaian
3	Pusat Pertokoan+Pasar Lingkungan	353.063	158878	117688	0,33	12	- Dapat dijangkau dengan kendaraan umum
4	Pusat Perbelanjaan dan Niaga (toko+pasar +bank+kantor)	353.063	0	0	0,3	3	Terletak di jalan utama Termasuk sarana parkir sesuai dengan ketentuan berlaku

Sumber: Dokumen Kajian Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kotawaringin Barat, 2023

Dari perhitungan fasilitas Perdagangan dan Niaga di kawasan permukiman maka didapatkan hasil sebagai berikut :

- Toko/Warung : 1412 unit dengan kebutuhan luas lahan 141.225 m²
- Pertokoan : 59 unit dengan kebutuhan luas lahan 176.532 m²
- Pusat Grosir+pasar lingkungan : 12 unit dengan kebutuhan luas lahan 91.967 m²

E - Analisis Kebutuhan Fasilitas RTH

Penyediaan kebutuhan sarana ruang terbuka, taman, dan lapangan olah raga di kawasan peruntukan permukiman berkaitan dengan jenis sarana yang disediakan, jumlah penduduk pendukung, luas lahan minimal, radius pencapaian dan kriteria lokasi.

Tabel 4. 62. Standar Kebutuhan Sarana Ruang Terbuka, Taman dan Lapangan Olah Raga pada Kawasan Peruntukan Permukiman

No	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Pendukung (Jiwa)	Kebutuhan Luas Lahan Min (M ²)	Standar (M ² / Jiwa)	Kriteria	
					Radius Pencapaian (M)	Lokasi dan Penyelesaian
1	Taman/Tempat Main	250	250	1	100	- Ditempang kelompok tetangga
2	Taman/Tempat Main	2.500	1.250	0,5	1.000	- Di pusat kegiatan lingkungan
3	Taman dan lapangan Olah Raga	30.000	9.000	0,3	-	- Sedapat mungkin berkelompok dengan sarana pendidikan
4	Taman dan Lapangan Olah Raga	120.000	24.000	0,2	-	Terletak di jalan utama Sedapat mungkin berkelompok dengan sarana pendidikan

No	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Pendukung (Jiwa)	Kebutuhan Luas Lahan Min (M2)	Standar (M2/ Jiwa)	Kriteria	
					Radius Pencapaian (M)	Lokasi dan Penyelesaian
5	Jalur Hijau	-	-	15	-	- Terletak menyebar
6	Kuburan/Pe makaman Umum	120.000	2000	-	-	- Mempertimbangkan radius pencapaian dan area yang dilayani

Sumber : Permen PU No.41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya

Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau, Taman dan Lapangan Olah Raga dihitung berdasarkan tabel standar kebutuhan Ruang Terbuka Hijau, Taman dan Lapangan Olah Raga pada Peruntukan Kawasan Permukiman.

Tabel 4. 63. Kebutuhan Sarana Ruang Terbuka, Taman dan Lapangan Olah Raga pada Kawasan Permukiman

No	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Pendukung (Jiwa)	Kebutuhan Luas Lahan Min (M2)	Standar (M2/ Jiwa)	Kriteria	
					Radius Pencapaian (M)	Lokasi dan Penyelesaian
1	Taman/Tempat Main	353.063	353063	1	1412	- Ditemgah kelompok tetangga
2	Taman/Tempat Main	353.063	176532	0,5	141	- Di pusat kegiatan lingkungan
3	Taman dan lapangan Olah Raga	353.063	105919	0,3	12	- Sedapat mungkin berkelompok dengan sarana pendidikan
4	Taman dan Lapangan Olah Raga	353.063	70613	0,2	3	Terletak dijalan utama Sedapat mungkin berkelompok dengan sarana pendidikan
5	Jalur Hijau	353.063	5295945	15	0	- Terletak menyebar
6	Kuburan/ Pemakaman Umum	353.063	0	-	3	- Mempertimbangkan radius pencapaian dan area yang dilayani

Sumber: Dokumen Kajian Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kotawaringin Barat, 2023

Dari perhitungan fasilitas Ruang Terbuka Hijau, Taman dan Lapangan Olah Raga di kawasan permukiman maka didapatkan hasil sebagai berikut :

- Taman/tempat bermain skala kecil : 353.063 m2
- Taman/tempat bermain skala sedang : 176.532 m2
- Taman dan lapangan olah raga skala kecil : 105.919 m2
- Taman dan lapangan olah raga skala besar : 70613 m2

- Kuburan /pemakaman umum : 1331 m²

➤ **Analisa Infrastruktur Dan Energi**

A - Analisis Kebutuhan Energi Kelistrikan

Kebutuhan energi listrik dalam kawasan ekonomi khusus merupakan kebutuhan yang mutlak harus tersedia. Sumber energi listrik dapat bersumber dari PLN maupun yang diusahakan swasta. Sehingga untuk mendukung kawasan ekonomi khusus ini perlu diusahakan fasilitas penghasil energi listrik yaitu power plant yang mampu melayani kebutuhan energi listrik yang cukup besar.

Kebutuhan listrik untuk kawasan ekonomi khusus diasumsikan 0.2 MVA/Ha berdasarkan pedoman kawasan industri, apabila lahan yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan listrik 15.576,29 Ha, maka kebutuhan listrik adalah sebesar 3115,3 MVA.

B - Analisis Kebutuhan Air Bersih

Kondisi eksisting di wilayah perencanaan, air bersih saat ini berasal dari sumur gali dan sumur bor yang di pompa ke permukaan. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Kawasan Ekonomi Khusus perlu upaya lain selain mengambil air dalam tanah, hal ini dikawatirkan apabila pengambilan air bawah tanah secara besar-besaran akan merusak lingkungan. Untuk memanfaatkan sungai sebagai bahan baku air bersih tidak memungkinkan, melihat kondisi sungainya yang mempunyai debit sangat kecil, dan dialiri air apabila musim hujan. Usaha pengolahan air bersih mungkin diperlukan dengan memanfaatkan embung atau pengolahan air laut untuk menjadi air bersih.

Diasumsikan standar kebutuhan air bersih untuk kawasan industri adalah 0.75 l/dt/ha, maka kebutuhan air bersih untuk kawasan industri KEK seluas 15.576,29 Ha (terbangun) adalah 11.682 l/dt/ha.

C - Analisis Kebutuhan Telekomunikasi

Untuk kebutuhan telekomunikasi, disekitar kawasan perencanaan KEK sudah terlayani jaringan telepon seluler dan telepon kabel dari Telkom. Kebutuhan fasilitas telekomunikasi diantaranya digunakan untuk :

- a. Sambungan telepon
- b. Faksimili/telex
- c. Jaringan internet
- d. Telepon umum

Standar maksimal kebutuhan telekomunikasi untuk kawasan industri adalah 40 SST/Ha, sehingga, total kebutuhan sambungan telepon untuk Kawasan Industri KEK di lahan seluas 15576,29 ha adalah 623.052 SST/Ha.

4.3.8 Kebutuhan Capaian Standar Pelayanan Minimal

4.3.8.1 Capaian SPM Bidang urusan Pendidikan

Berikut hasil capaian SPM tahun 2022 :

Tabel 4. 64. Hasil Capaian SPM Bidang Urusan Pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian Tahun 2022
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7- 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	96,14%
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7– 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	99,09%
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	95,25%

Sumber : Laporan Kajian Pencapaian Standar Pelayanan Minimum Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023

4.3.8.2 Capaian SPM Bidang urusan Kesehatan

Hasil capaian adalah target yang dapat dicapai oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Berikut adalah capaian SPM tahun 2022.

Tabel 4. 65. Realisasi SPM Bidang Kesehatan Tahun 2022

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL	RUMUS		CAPAIAN TAHUN 2022		
			PEMBILANG	PENYEBUT	PEMBILANG	PENYEBUT	%
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta	Jumlah semua ibu hamil di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	4750	4750	100%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan	Jumlah semua ibu bersalin yang ada di wilayah Kabupaten/ Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun	4534	4376	96,52%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	Jumlah semua bayi baru lahir wilayah Kabupaten/ Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun	4318	4318	100%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah balita usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah balita usia 0-59 bulan yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama	18.939	17.487	92.33 %
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 s.d kelas 9 yang mendapatkan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar	Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 s.d kelas 9 yang ada di wilayah Kabupaten/ Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran	46.948	46.948	100%
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah warga warga negara usia 15-59 tahun yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama	180.358	173.344	96.11 %
7	Pelayanan Kesehatan	Persentase warga	Jumlah pengunjung	Jumlah semua penduduk	18.468	18.468	100%

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL	RUMUS		CAPAIAN TAHUN 2022		
			PEMBILANG	PENYEBUT	PEMBILANG	PENYEBUT	%
	pada Usia Lanjut	negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	usia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun	berusia 60 tahun keatas yang ada di wilayah Kabupaten/ Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun perhitungan			
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang datang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Estimasi jumlah penderita hipertensi yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama	53.566	39.104	73.00 %
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita Diabetes Melitus mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita Diabetes Melitus yang datang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Estimasi jumlah penderita Diabetes Melitus yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama	5.591	5.591	100%
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerja kab/kota yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah ODGJ berat (psikotik) yang ada di wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	409	393	96.09 %
11	Pelayanan Kesehatan orang Terduga TB	Persentase orang Terduga TB mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah orang Terduga TB yang datang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Estimasi jumlah orang Terduga TB yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama	5.470	4.917	89,89%
12	Pelayanan Kesehatan orang beresiko terinfeksi HIV	Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV yang datang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah beresiko HIV	6.255	6.255	100%

Sumber : Laporan Kajian Pencapaian Standar Pelayanan Minimum Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023

4.3.8.3 Kondisi Capaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Berikut hasil capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum :

Tabel 4. 66. Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian Tahun 2022
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	94,08 %
2	Penyediaan Pelayanan	Jumlah Warga Negara yang	87,88 %

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian Tahun 2022
	Pengolahan air limbah Domestik	memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	

Sumber : Laporan Kajian Pencapaian Standar Pelayanan Minimum Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023

4.3.8.4 Kondisi Capaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Dan Permukiman

Berikut hasil capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat :

Tabel 4. 67. Realisasi SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian Tahun 2022
1	Penyediaan & rehaibitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kabupaten	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	N/A Tidak ada Rumah yang Rusak Akibat Bencana
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	N/A Tidak ada relokasi akibat terkena program pemerintah.

Sumber : Laporan Kajian Pencapaian Standar Pelayanan Minimum Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023

4.3.8.5 Kondisi Capaian Spm Bidang Urusan Trantibumlinmas

Berikut hasil capaian SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat :

Tabel 4. 68. Capaian SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian (%)
1.	Pelayanan Ketentraman Ketertiban Umum serta Peerlindungan Masyarakat	Jumlah warga Negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	100 %
		Jumlah warga Negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	100 %
		Jumlah Dokumen Standar operasional prosedur Satpol PP	100 %
		Jumlah sarana prasarana Satpol PP sesuai standar	100 %
		Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan Masyarakat	100 %
		Dokumen Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum pelanggaran Perda dan Perkada akibat penegakan hukum terhadap	100 %
2.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/ laporan sampai tiba di lokasi	100 %
		Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	100 %
		Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	100 %
		Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/ Sumber Daya Manusia	100 %

Sumber : Laporan Kajian Pencapaian Standar Pelayanan Minimum Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023

4.3.8.6 Kondisi Capaian SPM Bidang Urusan Sosial

Berikut hasil capaian SPM Bidang Sosial :

Tabel 4. 69. Hasil Capaian Bidang Sosial Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian Tahun 2022
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%

Sumber : Laporan Kajian Pencapaian Standar Pelayanan Minimum Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023

4.3.8.7 Kebutuhan Pencapaian SPM

Berdasarkan hasil identifikasi capaian SPM dan permasalahan di masing-masing bidang urusan di atas, maka dapat dirumuskan arahan/rekomendasi untuk pencapaian SPM yang disesuaikan dengan kebijakan di Kabupaten Kotawaringin Barat, antara lain sebagai berikut :

- Sosialisasi secara menyeluruh terkait dengan SPM, baik dari pendataan, pengisian form hingga penerapan
- Peninjauan SPM pada variabel-variabel yang belum memiliki data yang akurat
- Pelatihan terkait pengisian form, pemilahan data dan pelatihan terkait SPM secara menyeluruh
- SPM menjadi salah satu indikator kinerja sehingga dapat menjadi prioritas
- SPM diharapkan menjadi prioritas dalam penganggaran
- Penyediaan anggaran untuk pendataan
- Diperlukan peran aktif Tim SPM dalam mengkoordinasi pelaksanaan SPM dan monev
- Sosialisasi di level pimpinan sehingga SPM menjadi prioritas di masing-masing dinas pengampu
- Mengidentifikasi peluang-peluang kerjasama dengan pihak lain/swasta terkait penganggaran dan penanganan program SPM

4.4 ANALISIS EKSTERNALITAS

4.4.1 Megatren Dunia 2045

Megatren adalah perubahan besar yang bersifat jangka panjang dan berdampak luas, memengaruhi cara manusia hidup, bekerja, dan berinteraksi. Menghadapi tahun 2045, dunia berada di tengah percepatan perubahan yang dipicu oleh teknologi, perubahan iklim, dinamika demografi, dan perubahan geopolitik. Megatren ini tidak hanya bersifat regional, tetapi juga global, membentuk masa depan ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. Terdapat 10 megatren dunia 2045 yang diperkirakan akan memiliki dampak signifikan bagi Indonesia.



Gambar 4. 17. Megatren Dunia 2045

Sumber : Bappenas, 2019

Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) sebagai bagian dari Indonesia yang terus berkembang, perlu merespons megatren ini secara strategis untuk menciptakan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan kompetitif. Berikut adalah adaptasi megatren dunia 2045 yang relevan bagi pembangunan Kobar:

1. Urbanisasi dan Pertumbuhan Kota

Prediksi Global: Pada tahun 2050, urbanisasi global diproyeksikan mencapai puncaknya dengan dua pertiga populasi dunia tinggal di wilayah perkotaan. Fenomena ini akan menciptakan lebih banyak megacity dan menggeser peran kota-kota menengah menjadi pusat penting dalam ekonomi global.

Adaptasi untuk Kobar: Kabupaten Kotawaringin Barat harus menyiapkan infrastruktur perkotaan yang modern untuk mendukung urbanisasi lokal. Kota Pangkalan Bun dan Kumai dapat dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, yang dilengkapi dengan konektivitas wilayah yang strategis. Ini termasuk pembangunan kawasan industri yang mendukung sektor unggulan seperti agribisnis dan transportasi berbasis logistik. Selain itu, perlu dilakukan perencanaan tata kota yang berkelanjutan untuk mendukung urbanisasi yang terorganisir dan ramah lingkungan.

2. Teknologi dan Revolusi Industri 4.0

Prediksi Global: Revolusi Industri 4.0 akan mendisrupsi berbagai sektor dengan automasi dan kecerdasan buatan (AI), menghilangkan pekerjaan konvensional tetapi membuka peluang baru di bidang teknologi dan inovasi.

Adaptasi untuk Kobar: Kobar dapat mengadopsi teknologi digital dan automasi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas di sektor unggulan, seperti perkebunan kelapa sawit dan agribisnis. Pemanfaatan AI dalam pengelolaan lahan, prediksi cuaca, dan optimalisasi hasil panen dapat menjadi solusi strategis. Selain itu, Kobar dapat menciptakan ekosistem inovasi dengan mendirikan pusat inkubator bisnis untuk mendukung industri kecil dan menengah berbasis teknologi.

3. Bonus Demografi Indonesia

Prediksi Global: Pada 2045, Indonesia diprediksi akan memiliki bonus demografi, di mana mayoritas penduduk berada dalam usia produktif, menciptakan peluang besar untuk pertumbuhan ekonomi.

Adaptasi untuk Kobar: Kabupaten Kotawaringin Barat perlu berinvestasi dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan formal dan pelatihan keterampilan, khususnya yang berbasis teknologi digital. Program pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan transformasi ekonomi, seperti pelatihan coding, desain, dan kewirausahaan, dapat mempersiapkan generasi muda untuk bersaing di pasar kerja modern.

4. Ketahanan Pangan dan Sumber Daya Alam

Prediksi Global: Permintaan pangan global akan meningkat hingga 60% pada tahun 2050, sementara perubahan iklim mengancam ketahanan hasil panen.

Adaptasi untuk Kobar: Memperkuat sektor agribisnis menjadi prioritas utama di Kobar. Teknologi pertanian presisi, seperti penggunaan drone untuk pemantauan lahan dan sistem irigasi pintar, dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi. Hilirisasi produk pertanian juga harus didorong untuk menciptakan nilai tambah, seperti pengolahan kelapa sawit menjadi produk turunan atau komoditas lain berbasis ekspor.

5. Energi Terbarukan

Prediksi Global: Energi terbarukan, seperti tenaga surya dan angin, akan mendominasi transisi energi global di masa depan.

Adaptasi untuk Kobar: Kobar memiliki potensi besar untuk mengembangkan energi terbarukan, terutama tenaga surya dan biomassa yang sesuai dengan kekayaan sumber daya alam daerah ini. Daerah pedesaan dapat memanfaatkan panel surya untuk elektrifikasi, sementara limbah dari sektor perkebunan, seperti kelapa sawit, dapat diolah menjadi biomassa untuk kebutuhan energi. Kebijakan insentif dan kemitraan dengan pihak swasta dapat mempercepat adopsi energi terbarukan di wilayah ini.

6. Pariwisata Berkelanjutan

Prediksi Global: Pola perjalanan wisata akan semakin bergeser ke arah pariwisata berbasis alam, budaya, dan keberlanjutan.

Adaptasi untuk Kobar: Kobar memiliki potensi besar dalam mengembangkan ekowisata, terutama dengan keberadaan Taman Nasional Tanjung Puting yang sudah mendunia. Pengelolaan pariwisata yang berbasis komunitas, edukasi lingkungan, dan pelestarian habitat orangutan dapat menjadi daya tarik utama. Pembangunan infrastruktur pariwisata berkelanjutan, seperti penginapan ramah lingkungan, dan pelibatan masyarakat lokal dalam sektor ini akan memperkuat posisi Kobar sebagai destinasi ekowisata unggulan.

7. Ketahanan Iklim dan Lingkungan

Prediksi Global: Perubahan iklim akan memengaruhi berbagai sektor, termasuk ketahanan pangan, migrasi, dan pembangunan infrastruktur.

Adaptasi untuk Kobar: Ketahanan iklim harus menjadi agenda utama dalam perencanaan wilayah Kobar. Langkah ini melibatkan perlindungan kawasan lindung, rehabilitasi hutan, dan pengelolaan ekosistem pesisir yang berkelanjutan. Selain itu, pengintegrasian teknologi ramah lingkungan dalam pembangunan infrastruktur dapat mengurangi dampak perubahan iklim. Edukasi kepada masyarakat mengenai adaptasi terhadap perubahan iklim juga penting untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan komunitas lokal.

Melalui adaptasi nilai-nilai megatren dunia 2045 ini, Kabupaten Kotawaringin Barat dapat menjadikan dirinya sebagai wilayah yang tangguh dan inovatif dalam menghadapi tantangan global. Fokus pada urbanisasi yang berkelanjutan, pemanfaatan teknologi, dan pengelolaan bonus demografi dapat membuka jalan menuju masa depan yang lebih cerah dan berdaya saing. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta diperlukan untuk mewujudkan visi ini, menjadikan Kobar sebagai model pembangunan daerah yang unggul di tengah perubahan global.

4.4.2 Pembangunan SDG's

Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) merupakan wilayah dengan potensi alam, sosial, dan ekonomi yang strategis, namun juga menghadapi tantangan pembangunan yang signifikan. Dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, adaptasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG's) menjadi pendekatan yang relevan untuk mengatasi tantangan sekaligus mengoptimalkan potensi daerah.

Di sisi lain, tantangan seperti kemiskinan, keterbatasan akses terhadap infrastruktur dasar, serta risiko terhadap perubahan iklim menjadi aspek penting yang memerlukan perhatian dalam kerangka pembangunan ini. Upaya mengatasi tantangan tersebut dapat dilakukan melalui program yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, peningkatan akses layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, serta penguatan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan.

Sebagai daerah dengan fokus pada sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata, Kabupaten Kobar berpeluang besar untuk mengintegrasikan nilai-nilai SDG's dalam strategi pembangunannya. Pendekatan ini tidak hanya memberikan solusi terhadap permasalahan lokal, tetapi juga berkontribusi pada upaya global untuk menciptakan dunia yang lebih adil, makmur, dan berkelanjutan.

Implementasi SDG's di Kobar mencakup berbagai aspek penting, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan ketahanan pangan, penguatan pendidikan, hingga konservasi lingkungan. Program-program seperti pengembangan lumbung pangan lokal, rehabilitasi hutan, pendidikan vokasi berbasis lokal, dan energi terbarukan mencerminkan komitmen daerah ini terhadap keberlanjutan.

TPB/SDGs adalah serangkaian tujuan yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan bagi semua orang di planet ini.

Ada 17 tujuan SDGs yang saling terkait dan saling mendukung untuk mengatasi berbagai tantangan global yang kita hadapi.



Gambar 4. 18. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)

Sumber : <https://sdgs.bappenas.go.id/>

Dalam rangka mendukung visi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif, pendekatan SDG's dapat diintegrasikan dengan program-program strategis daerah. Berikut adalah deskripsi detail dan relevansi program adaptasi nilai-nilai SDG's berdasarkan kondisi eksisting Kobar:

1. Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan (SDG 1 & 8)

Kabupaten Kobar memiliki tingkat kemiskinan sebesar 4,18% pada tahun 2023, yang menjadi tantangan utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, pemberdayaan masyarakat desa menjadi prioritas melalui:

- **Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa:** Meningkatkan kapasitas ekonomi melalui pelatihan, akses modal, dan pendampingan untuk memaksimalkan potensi lokal seperti pertanian, perikanan, dan kerajinan tangan.
- **Pusat Inovasi dan UMKM Kotawaringin Barat:** Pusat ini menjadi penggerak pengembangan usaha kecil dan menengah melalui pelatihan kewirausahaan, pemasaran digital, dan akses ke pasar nasional dan internasional.

2. Ketahanan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan (SDG 2)

Kobar memiliki potensi lahan pertanian yang luas, namun perlu dioptimalkan untuk mendukung ketahanan pangan lokal dan regional:

- **Program Pertanian Terpadu dan Organik:** Mendorong praktik pertanian ramah lingkungan dengan integrasi teknologi modern untuk meningkatkan hasil panen dan menjaga kelestarian tanah.
- **Pengembangan Lumbung Pangan Lokal:** Mengoptimalkan peran lumbung pangan sebagai cadangan strategis dan mendukung pengelolaan pangan berbasis masyarakat.

3. Akses Kesehatan yang Berkualitas (SDG 3)

Meskipun tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) cukup baik, akses kesehatan terutama di daerah terpencil perlu ditingkatkan:

- **Program Klinik Bergerak dan Layanan Kesehatan Digital:** Menghadirkan layanan kesehatan langsung ke masyarakat terpencil melalui kendaraan medis dan platform telemedik.
- **Pusat Kesehatan Ibu dan Anak Terpadu:** Fokus pada penurunan angka kematian ibu dan bayi dengan fasilitas kesehatan yang terintegrasi.

4. Pendidikan Berkualitas dan Berkelanjutan (SDG 4)

Pendidikan di Kobar terus berkembang, namun pemerataan kualitas pendidikan menjadi perhatian penting:

- **Program Pendidikan Vokasi Berbasis Lokal:** Menyediakan pelatihan keterampilan praktis berbasis kebutuhan lokal seperti agribisnis, perikanan, dan pariwisata.
- **Digitalisasi Pendidikan:** Mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, terutama di daerah terpencil.

5. Kesetaraan Gender dan Keterlibatan Perempuan (SDG 5)

Kobar berkomitmen untuk memperkuat peran perempuan dalam pembangunan:

- **Program Wirausaha Perempuan dan Pengembangan Kepemimpinan:** Memberikan pelatihan dan akses modal kepada perempuan untuk menciptakan peluang usaha baru.

- **Inisiatif Keamanan dan Kesejahteraan Perempuan dan Anak:** Menyediakan layanan advokasi dan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan domestik.

6. **Infrastruktur, Energi, dan Pemanfaatan Sumber Daya Berkelanjutan (SDG 7, 9, 11, 12)**

Kobar memiliki infrastruktur dasar yang terus berkembang, namun masih diperlukan upaya untuk menjangkau daerah terpencil:

- **Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan:** Memperluas jaringan jalan, listrik, dan air bersih dengan pendekatan yang memperhatikan daya dukung lingkungan.
- **Program Energi Terbarukan di Daerah Tertinggal/Terpencil:** Menggunakan energi surya, biomassa, dan mikrohidro untuk memenuhi kebutuhan listrik di daerah yang sulit dijangkau jaringan listrik konvensional.
- **Pengelolaan Sampah dan Limbah Berbasis Komunitas:** Mengurangi dampak lingkungan melalui program daur ulang dan bank sampah di tingkat desa.

7. **Konservasi Lingkungan dan Pengendalian Iklim (SDG 13, 14, 15)**

Sebagai wilayah yang memiliki Taman Nasional Tanjung Puting, Kobar memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga ekosistem alamnya:

- **Program Rehabilitasi dan Konservasi Hutan dan Lahan Basah:** Menanam kembali kawasan hutan yang rusak dan melindungi lahan basah dari konversi lahan yang merusak lingkungan.
- **Edukasi dan Pelatihan Penanganan Bencana:** Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko banjir, kebakaran hutan, dan bencana lainnya.
- **Wisata Alam Berkelanjutan:** Mengembangkan ekowisata sebagai upaya konservasi sekaligus sumber ekonomi baru.

8. **Kemitraan dan Kolaborasi (SDG 17)**

Kemitraan yang efektif menjadi kunci keberhasilan pembangunan berkelanjutan di Kobar:

- **Forum Kemitraan Daerah untuk Pembangunan Berkelanjutan:** Membentuk wadah diskusi antara pemerintah, masyarakat, swasta, dan akademisi untuk merancang strategi pembangunan yang inklusif.
- **Kolaborasi dengan Sektor Akademik dan Penelitian:** Mengintegrasikan hasil riset dalam kebijakan lokal untuk mendukung inovasi dan solusi pembangunan.

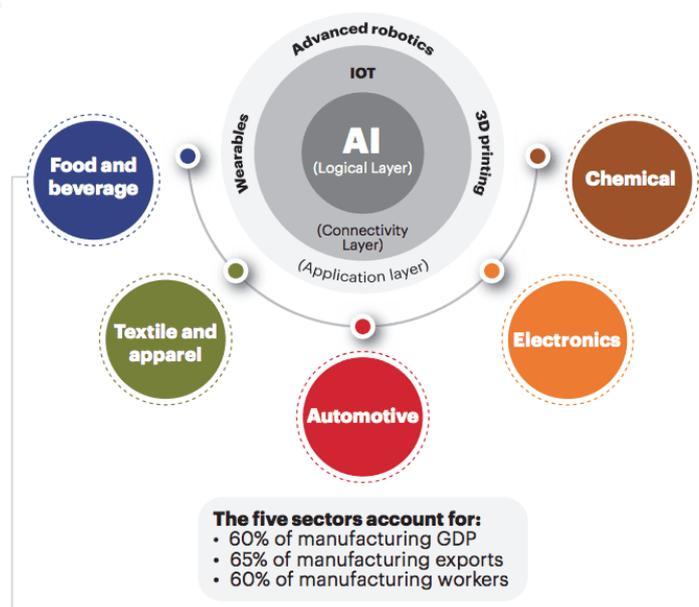
Dengan pendekatan yang berbasis pada nilai-nilai SDG's, Kabupaten Kotawaringin Barat tidak hanya dapat mempercepat pencapaian visi pembangunan lokal tetapi juga menjadi model daerah berkelanjutan yang relevan dalam konteks pembangunan nasional dan global.

4.4.3 Industrialisasi 4.0

Revolusi Industri 4.0 merupakan salah satu perubahan besar dalam dunia industri yang menggabungkan teknologi digital, konektivitas, dan otomatisasi. Transformasi ini tidak hanya memengaruhi efisiensi dan produktivitas sektor manufaktur tetapi juga membawa tantangan, terutama dalam hal dampak sosial-ekonomi. Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) memiliki potensi besar untuk memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh Industri 4.0. Namun, keberhasilan ini memerlukan strategi yang matang, khususnya dalam menciptakan keseimbangan antara modernisasi teknologi dan kebutuhan lapangan kerja.

Revolusi Industri 4.0, yang mencakup adopsi teknologi seperti robot, kecerdasan buatan (AI), Internet of Things (IoT), dan manufaktur berbasis digital, telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai sektor industri secara global.

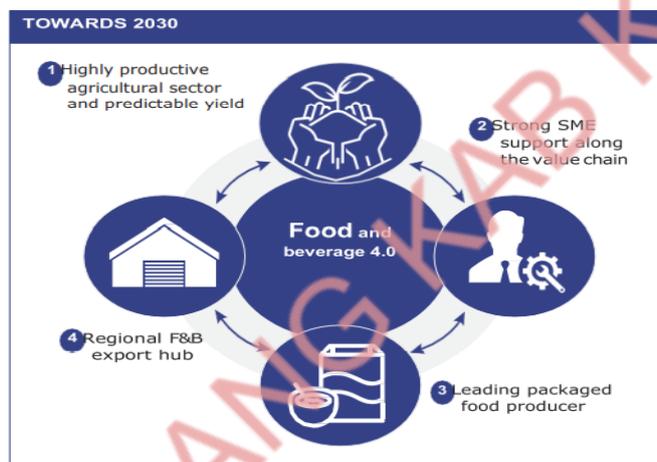
1. **Dampak pada Lapangan Kerja:** Dalam penerapannya, teknologi Industri 4.0 menggantikan banyak pekerjaan manual dengan otomatisasi. Analisis dari McKinsey Global Institute memprediksi bahwa hingga 800 juta lapangan kerja di seluruh dunia dapat tergantikan oleh mesin pada tahun 2030. Meski demikian, adopsi teknologi ini juga meningkatkan efisiensi dan kualitas produk, sehingga menciptakan peluang baru bagi sektor industri.
2. **Transformasi Ekonomi di Sektor Strategis:** Lima sektor utama, yaitu agribisnis dan pangan, tekstil, otomotif, elektronik, serta kimia, menjadi tulang punggung penerapan Industri 4.0. Kelima sektor ini memiliki kontribusi strategis terhadap perekonomian, ekspor, dan ketenagakerjaan di Indonesia dimana sektor-sektor ini menyumbang 60% terhadap PDB manufaktur nasional, 65% terhadap ekspor manufaktur, dan mempekerjakan 60% tenaga kerja industri.. Setiap sektor memiliki karakteristik khusus dan target pengembangan yang mendukung daya saing global.



Gambar 4. 19. Sektor Utama dalam Mendukung Industri 4.0

a) *Food and Beverage (Makanan dan Minuman)*

Sektor makanan dan minuman merupakan pilar penting dalam perekonomian Indonesia, terutama karena potensi agribisnis dan keanekaragaman sumber daya alam yang melimpah. Penerapan teknologi Industri 4.0 di sektor ini dapat mendukung inovasi dalam pengolahan bahan pangan, meningkatkan efisiensi rantai pasok, serta memperluas akses produk lokal ke pasar internasional. Digitalisasi dan otomatisasi memungkinkan terciptanya ekosistem agribisnis yang lebih produktif, berkelanjutan, dan kompetitif secara global.



Gambar 4. 20. Sektor *Food and Beverage* dalam Mendukung Industri 4.0

• **Target:**

- Meningkatkan produktivitas di sektor pertanian dan agribisnis melalui teknologi modern.
- Mengembangkan produk olahan makanan yang dapat bersaing di pasar global.
- Membangun pusat penelitian dan pengembangan (R&D) ekspor regional untuk produk makanan.

• **Manfaat:**

- Meningkatkan efisiensi rantai pasok.
- Mendukung keberlanjutan industri makanan melalui inovasi teknologi berbasis digital seperti IoT untuk pengelolaan sumber daya.

b) *Textile and Apparel (Tekstil dan Pakaian Jadi)*

Industri tekstil dan pakaian jadi merupakan salah satu sektor tradisional yang telah lama menjadi kontributor besar ekspor Indonesia. Dengan Industri 4.0, sektor ini dapat bertransformasi menjadi lebih inovatif melalui otomatisasi produksi, penggunaan

teknologi ramah lingkungan, dan optimalisasi rantai pasok. Hal ini tidak hanya membantu memenuhi permintaan pasar domestik dan internasional, tetapi juga memungkinkan pengembangan produk tekstil fungsional dengan nilai tambah yang lebih tinggi.



Gambar 4. 21. Sektor *Textile and Apparel* dalam Mendukung Industri 4.0

- **Target:**

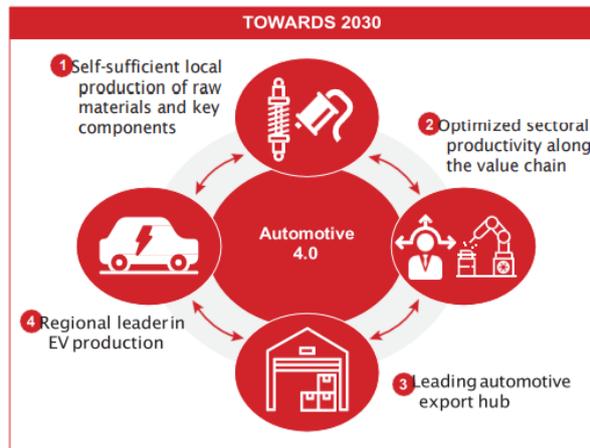
- Meningkatkan kemampuan produksi hulu dengan memanfaatkan bahan baku berkualitas tinggi.
- Menciptakan produk tekstil yang fungsional dan inovatif untuk memenuhi kebutuhan domestik dan ekspor.
- Mengembangkan teknologi manufaktur yang lebih hemat biaya dan efisien.

- **Manfaat:**

- Memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen tekstil global.
- Meningkatkan daya saing melalui teknologi otomatisasi di lini produksi.

c) **Automotive (Otomotif)**

Sektor otomotif memainkan peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama melalui investasi dan penyerapan tenaga kerja. Di era Industri 4.0, transformasi di sektor ini difokuskan pada digitalisasi proses manufaktur, inovasi produk, serta transisi menuju kendaraan ramah lingkungan seperti kendaraan listrik (EV). Dengan memanfaatkan teknologi modern, Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai pusat produksi otomotif regional yang kompetitif di pasar global.



Gambar 4. 22. Sektor *Automotive* dalam Mendukung Industri 4.0

- **Target:**

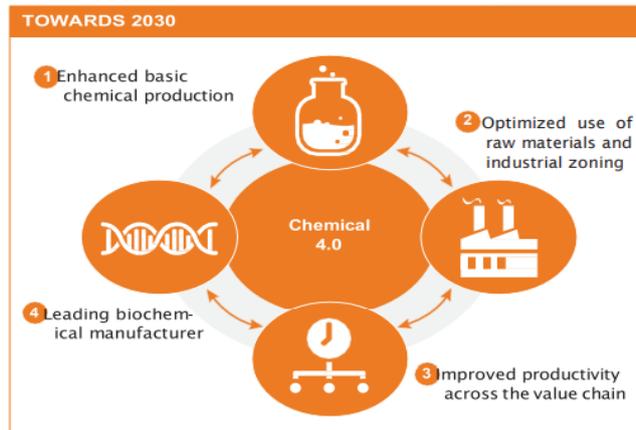
- Menjadi pusat produksi kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV) di tingkat regional.
- Mengoptimalkan produktivitas sektor otomotif melalui digitalisasi rantai nilai.
- Mengembangkan sektor industri berbasis energi bersih untuk masa depan.

- **Manfaat:**

- Mendukung transisi menuju transportasi ramah lingkungan.
- Meningkatkan kontribusi industri otomotif terhadap ekspor dan pertumbuhan ekonomi lokal.

d) *Electronics* (Elektronika)

Sektor elektronik memiliki potensi besar untuk tumbuh pesat dengan dukungan Industri 4.0. Transformasi di sektor ini berfokus pada pengembangan manufaktur bernilai tambah tinggi yang melampaui sekadar perakitan produk. Dengan memanfaatkan kecerdasan buatan, IoT, dan big data, Indonesia dapat menciptakan tenaga kerja yang terampil, inovatif, dan menarik investasi dari produsen elektronik global. Sektor ini diharapkan menjadi salah satu pilar utama dalam digitalisasi ekonomi nasional.

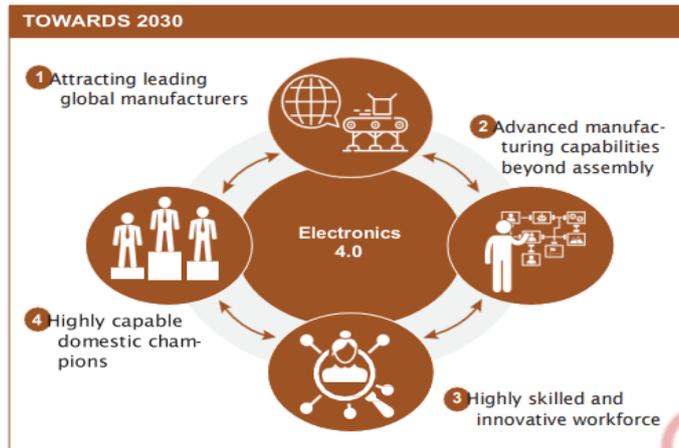


Gambar 4. 23. Sektor *Electronics* dalam Mendukung Industri 4.0

- **Target:**
 - Mengembangkan kemampuan manufaktur di luar sekadar proses perakitan (beyond assembly).
 - Menguatkan tenaga kerja yang inovatif dan terampil dalam teknologi elektronik.
 - Menarik produsen elektronik global untuk berinvestasi di Indonesia.
- **Manfaat:**
 - Meningkatkan nilai tambah produk elektronik buatan lokal.
 - Memajukan teknologi berbasis IoT, big data, dan kecerdasan buatan di sektor elektronik.

e) *Chemical* (Kimia)

Industri kimia merupakan fondasi bagi berbagai sektor lain, seperti pertanian, farmasi, dan manufaktur. Di era Industri 4.0, pengembangan sektor ini diarahkan pada optimalisasi proses produksi, efisiensi penggunaan bahan mentah, dan inovasi bahan kimia baru. Dengan penerapan teknologi otomatisasi dan digitalisasi, industri kimia dapat meningkatkan daya saing, mengurangi ketergantungan impor, serta memenuhi kebutuhan pasar domestik dan internasional secara lebih efisien.



Gambar 4. 24. Sektor *Chemical* dalam Mendukung Industri 4.0

- **Target:**
 - Mengoptimalkan penggunaan bahan mentah baru dan meningkatkan zonasi industri yang efisien.
 - Meningkatkan kemampuan produksi bahan kimia dasar serta biokimia.
 - Memperbaiki produktivitas rantai nilai industri kimia.
 - **Manfaat:**
 - Mendukung sektor industri lain yang membutuhkan bahan kimia sebagai input utama.
 - Menurunkan ketegantungan impor bahan kimia dan meningkatkan efisiensi biaya produksi.
3. **Tantangan Sosial dan Strategi Pemerintah:** Pengurangan lapangan kerja akibat otomatisasi menjadi tantangan serius bagi negara-negara seperti Indonesia, yang memiliki angka pengangguran cukup tinggi. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah perlu menyusun strategi yang tidak hanya fokus pada teknologi, tetapi juga pada pengembangan tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan berbasis digital.

Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki peluang besar untuk memanfaatkan Revolusi Industri 4.0 guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Namun, pemanfaatan ini harus diiringi dengan strategi yang tepat agar tantangan yang muncul dapat diatasi secara efektif.

1. **Hilirisasi dan Teknologi dalam Agribisnis:** Sektor agribisnis dan agroindustri di Kobar memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui teknologi 4.0. Hilirisasi produk, seperti hasil pertanian dan perkebunan, dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi lokal. Pemanfaatan teknologi seperti IoT untuk pemantauan, otomatisasi proses, dan efisiensi manufaktur sangat penting untuk menunjang daya saing lokal.

2. **Peningkatan Efisiensi di Sektor Manufaktur:** Sektor manufaktur, yang menyumbang 27% terhadap ekonomi lokal Kobar, dapat lebih produktif dengan adopsi teknologi seperti robotika dan otomatisasi. Efisiensi biaya dan peningkatan kualitas produk menjadi kunci untuk bersaing di pasar global.
3. **Pengembangan SDM Berbasis Teknologi:** Salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan keterampilan tenaga kerja. Untuk mengatasinya, perlu dilakukan peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan berbasis teknologi, pelatihan digital, dan penguasaan keahlian relevan. Hal ini juga penting untuk mempersiapkan generasi muda agar siap memasuki pasar kerja berbasis digital.
4. **Pembangunan Infrastruktur Digital dan Telekomunikasi:** Infrastruktur digital yang memadai, termasuk data real-time, cloud computing, dan big data, harus dibangun untuk mendukung pengembangan teknologi 4.0. Jaringan telekomunikasi yang andal sangat penting untuk menghubungkan daerah terpencil di Kobar dengan pusat pertumbuhan ekonomi.
5. **Diversifikasi Ekonomi melalui Ekowisata dan Energi Terbarukan:** Selain sektor industri, Kobar memiliki potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan seperti PLTS dan biomassa, serta sektor ekowisata. Taman Nasional Tanjung Puting, sebagai salah satu destinasi utama, dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mendukung ekonomi berkelanjutan.

4.5 ASPIRASI STAKEHOLDER

Dalam rangka pengembangan Kotawaringin Barat menuju usia satu abad, para pemangku kepentingan menekankan pentingnya perencanaan yang holistik dan berkelanjutan. Salah satu usulan utama adalah penerapan konsep pembangunan berbasis sungai atau Daerah Aliran Sungai (DAS), yang membagi kawasan hulu untuk fungsi lindung, kawasan tengah untuk permukiman dan industri, serta kawasan hilir untuk pertanian. Pendekatan ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan ekosistem sambil mendukung pertumbuhan ekonomi.

Perencanaan ini perlu dirancang untuk jangka panjang, hingga tahun 2045 atau 2059, dengan mempertimbangkan skenario pertumbuhan yang komprehensif. Kota Palangkaraya diajukan sebagai acuan, mengingat keberhasilannya dalam perencanaan tata kota sejak dini. Model ini relevan bagi Kotawaringin Barat yang menghadapi tantangan berupa keberadaan kawasan hutan. Penataan akses wilayah juga menjadi prioritas, khususnya untuk mencegah pertumbuhan permukiman kumuh serta memperkuat konektivitas dengan wilayah Sumatra dan barat lainnya. Sebagai contoh, potensi wisata

geopark Bangka Belitung dapat dikembangkan melalui integrasi dengan aksesibilitas di Kotawaringin Barat.

Di sektor pariwisata, program penggalian potensi wisata memerlukan dukungan teknologi informasi untuk memperluas jangkauan promosi dan meningkatkan daya saing. Sebagai contoh, Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) yang telah menarik 40.000 wisatawan perlu dioptimalkan lebih lanjut. Pendapatan dari sektor ini dapat ditingkatkan dengan merevisi regulasi pajak atau retribusi penginapan yang selama ini belum dapat dimanfaatkan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, pariwisata harus diintegrasikan dengan sarana-prasarana, seperti jalan desa, serta sektor UMKM, perhotelan, dan jasa lainnya.

Di sektor permukiman, kebutuhan perumahan yang terus meningkat menjadi perhatian utama. Tingginya minat investasi perumahan, termasuk dari luar daerah, menjadi peluang yang harus dikelola dengan baik. Selain itu, perlu ada regulasi untuk melindungi kawasan tradisional dan rumah adat sebagai bagian dari daya tarik wisata. Penataan ini penting untuk menjaga karakter budaya lokal sambil meningkatkan rasio penguasaan tanah yang berkeadilan.

Dalam sektor perikanan, pengelolaan kawasan budidaya dan perikanan perlu diperkuat dengan target produksi sebesar 20.000 ton untuk perikanan tangkap dan 10.000 ton untuk budidaya. Namun, ketergantungan pada bibit dari luar daerah, yang mencapai 97%, menjadi tantangan besar yang memerlukan perhatian khusus. Pengembangan sektor ini juga harus didukung dengan perencanaan ekonomi dan pembiayaan yang berkelanjutan.

Aspek pendidikan dan kesehatan juga menjadi fokus utama. Pengembangan pendidikan di Kotawaringin Barat perlu diarahkan pada bidang-bidang potensial, termasuk jasa pengolahan. Di sisi lain, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, baik secara fisik maupun digital seperti telemedicine, diharapkan dapat mengurangi disparitas layanan di wilayah terpencil. Indikator kesehatan yang membaik akan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah.

Keseluruhan aspirasi ini menegaskan perlunya integrasi antara pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berorientasi jangka panjang, Kotawaringin Barat diharapkan mampu berkembang menjadi wilayah yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan menuju satu abad yang gemilang.

BAB 05

Konsep Pengembangan, Visi Misi, Strategi, dan Rencana Aksi 100 Tahun Abad

Bab ini bertujuan untuk memberikan landasan yang jelas dalam merumuskan arah pengembangan program menyongsong satu abad Kabupaten Kotawaringin Barat. Dalam proses perencanaan, pendekatan yang terstruktur diperlukan agar semua langkah yang diambil selaras dengan tujuan jangka panjang.

5.1 ISU

Pokok permasalahan pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan kondisi eksisting, tinjauan kebijakan dan kajian, serta analisis kajian dapat dijabarkan sebagai berikut.

a. Perlunya pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam dengan prinsip keberlanjutan dan keseimbangan lingkungan

Sumber daya alam Kotawaringin Barat yang beragam ke depannya perlu dikelola dengan baik. Seiring dengan berkembangnya pusat-pusat perkotaan, maka diperlukan pengembangan kota yang berprinsip pada keberlanjutan dan keefisiensi. Selain itu, perlunya mempertimbangkan daya dukung dan keseimbangan lingkungan dalam pengembangan kota dan pemanfaatan sumber daya alam daerah agar ke depannya sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan namun tetap terjaga kelestariannya. Potensi sumber daya alam Kotawaringin Barat yang beragam dan melimpah dapat menjadi peluang untuk ketahanan pangan daerah, mengingat isu utama global terkini adalah ancaman ketahanan pangan. Potensi rawan bencana daerah juga perlu menjadi pertimbangan dalam pemanfaatan sumber daya alam dan pembangunan kota agar Kotawaringin Barat ke depannya berkembang sebagai Resilient City atau Kota Tangguh. Oleh karena itu, penting untuk mengoptimalkan tata ruang berkelanjutan dan eko-efisiensi.

b. Tidak meratanya sebaran penduduk serta perlunya peningkatan kualitas penduduk

Tidak meratanya sebaran penduduk di kecamatan-kecamatan Kotawaringin Barat dapat berdampak pada kesenjangan sosial, ekonomi, dan budaya, serta pembangunan yang tidak dapat dirasakan masyarakat secara merata. Kepadatan yang hanya berpusat pada beberapa wilayah saja berpengaruh pada ketidakmerataan pelayanan infrastruktur dan fasilitas sosial. Potensi munculnya masalah-masalah sosial seperti kemiskinan ekstrem, stunting, kriminalitas, masalah perceraian, perkawinan usia anak, kekerasan dalam rumah tangga, kasus hukum pada anak, penyalahgunaan narkoba, dan konflik sosial juga semakin tinggi. Selain itu, peningkatan kualitas penduduk juga kurang maksimal bagi wilayah yang tertinggal. Masalah lain yang akan timbul adalah menurunnya kualitas lingkungan dan persebaran penyakit pada wilayah padat penduduk. Namun, Pemerintah Daerah memiliki peluang pembentukan pusat-pusat kegiatan di beberapa lokasi baik pengembangan baru maupun yang telah ada. Pertumbuhan penduduk yang positif ini menjadi peluang dan kekuatan bagi daerah untuk dapat mengelola SDM.

c. Pentingnya penguatan sosial budaya lokal

Potensi sosial budaya masyarakat Kotawaringin Barat dengan sejarah dan keberagaman yang unik dapat menjadi nilai tambah bagi daerah untuk dikembangkan. Pelestarian dan pengembangan dapat melalui pariwisata berbasis edukasi, sejarah, agama, maupun hiburan. Selain itu, dengan adanya kegiatankegiatan sosial budaya akan mempererat kebersamaan dan nilai sosial budaya itu sendiri. Hal-hal yang dapat memicu konflik sosial perlu dipetakan dan diantisipasi agar tidak terjadi perpecahan. Mengingat penduduk yang tinggal di Kabupaten Kotawaringin Barat sangat heterogen sehingga perlunya untuk menguatkan ideologi bangsa dan penguatan nilai-nilai toleransi antar umat beragama oleh pemerintah daerah.

d. Masih banyaknya potensi ekonomi yang belum dimanfaatkan dengan baik, efisien, dan berkelanjutan; pentingnya reformasi tata kelola pemerintahan

Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya daerah untuk perekonomian menjadi salah satu masalah daerah yang perlu diselesaikan. Kotawaringin Barat merupakan wilayah yang kaya dengan berbagai sumber daya. Sumber daya alam yang melimpah perlu dikelola dengan baik untuk kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan. Selain itu, potensi-potensi ekonomi lainnya seperti IKM, UMKM, Ekonomi Kreatif, Industri Pengolahan, dan lainnya masih perlu perhatian dan pengembangan secara optimal. Namun, tidak kalah pentingnya juga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan agar tercipta generasi berkualitas yang mampu mengelola perekonomian daerah secara berkelanjutan. Potensi-potensi daerah yang dimanfaatkan dan dikelola dengan baik harapannya mampu menambah PAD Kotawaringin Barat. Ketergantungan Pemerintah Kotawaringin Barat kepada Pemerintah Pusat masih sangat tinggi,

dan masih didapati SiLPA yang menandakan ketidakefektifan penggunaan anggaran. Nilai tambah lain yang diharapkan adalah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kotawaringin Barat. Masalah lainnya yang dapat menghambat perekonomian daerah adalah tata kelola pemerintahan. Nilai akuntabilitas survei kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah masih di bawah target, dan nilai reformasi birokrasi masih rendah. Untuk itu, daerah juga perlu untuk mereformasi tata kelola pemerintahan yang menjunjung nilai keadilan, keterbukaan, efisien, efektif, dan bermutu.

e. Ketidakmerataan infrastruktur memperlambat kemajuan daerah

Kawasan permukiman masih tergolong sedikit dan polanya menyebar tidak merata. Pola permukiman seperti ini dapat menimbulkan ancaman yaitu lambatnya pemerataan pembangunan karena membutuhkan biaya infrastruktur yang tinggi. Jarak antar kecamatan dan permukiman yang jauh berdampak sulitnya akses terhadap pelayanan publik. Selain itu, masyarakat membutuhkan jarak yang jauh dan waktu tempuh yang lama untuk menyelesaikan urusan di pusat Kabupaten. Persebaran layanan fasilitas seperti pendidikan, kesehatan, sosial, dan lainnya sulit diakses secara merata oleh masyarakat. Ketersediaan fasilitas-fasilitas yang terbatas juga menjadi kelemahan dan ancaman bagi pembangunan. Beberapa wilayah yang belum terpenuhi oleh jaringan-jaringan lainnya seperti telekomunikasi, drainase, persampahan, limbah, dan lainnya. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat menjadi peluang bagi Pemerintah Daerah untuk dapat meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi tinggi seperti penggunaan internet dan lainnya yang dapat dilakukan dimanapun. Selain itu, pembangunan di lokasi-lokasi sulit terjangkau memicu tumbuhnya perkotaan-perkotaan baru di beberapa wilayah. Dengan begitu, pemenuhan infrastruktur yang tersebar secara merata ke wilayah yang jaraknya jauh sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses fasilitas-fasilitas yang ada. Dampak yang lebih luas adalah kesejahteraan dan perekonomian masyarakat akan meningkat; memberi nilai tambah untuk daerah.



Gambar 5. 1. Penarikan Pokok Permasalahan dan Isu Utama Pembangunan Daerah
Sumber: Dokumen Kajian Pengembangan Kawasan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2045

Berdasarkan penjabaran pada bab-bab dan subbab-subbab sebelumnya, maka isu utama pembangunan daerah dalam rangka menuju Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2045 adalah sebagai berikut.



Gambar 5. 2. Isu Utama Pembangunan Kotawaringin Barat

Sumber: Dokumen Kajian Pengembangan Kawasan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2045

Kabupaten Kotawaringin Barat, sebagai salah satu daerah strategis di Kalimantan Tengah, akan memasuki usia satu abad, sebuah momentum penting untuk mengevaluasi dan merencanakan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam menghadapi tantangan dan peluang yang semakin kompleks, diperlukan perumusan isu-isu strategis sebagai langkah awal dalam menyusun arah pembangunan jangka panjang. Isu strategis ini ditinjau dari berbagai aspek yang saling berkaitan, dengan tujuan menciptakan daerah yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing tinggi. Isu pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat setiap aspeknya adalah sebagai berikut.

1. Aspek Guna Lahan

Pengelolaan tata guna lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat menghadapi berbagai tantangan yang menghambat pengoptimalan sumber daya alam dan pengembangan wilayah secara berkelanjutan.

Dominasi lahan berupa perkebunan, semak belukar, dan lahan gambut perlu diatur dengan bijaksana untuk mendukung keberlanjutan ekonomi dan lingkungan. Di sisi lain, aksesibilitas dan infrastruktur yang terbatas di daerah pedesaan serta ketimpangan pembangunan antara kawasan perkotaan dan pedesaan menjadi isu yang harus ditangani dengan percepatan pembangunan infrastruktur yang merata. Selain itu, sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), daerah ini memiliki potensi pelayanan regional yang perlu dioptimalkan untuk mendukung fungsi strategisnya. Isu-isu strategis terkait guna lahan meliputi:

- Dominasi lahan berupa perkebunan, semak belukar, dan lahan gambut mencerminkan perlunya optimalisasi tata guna lahan untuk mendukung keberlanjutan ekonomi dan lingkungan.
- Potensi perkembangan wilayah terhambat aksesibilitas, dukungan infrastruktur, dan kondisi fisik dasar yang belum memadai, sehingga memerlukan percepatan pembangunan konektivitas dan infrastruktur dasar.
- Perkembangan lahan yang cenderung stagnan dan terpusat di kawasan perkotaan membutuhkan strategi pengembangan wilayah yang lebih merata ke daerah pedesaan dan hinterland.
- Sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Kabupaten ini memiliki banyak potensi pelayanan skala kabupaten dan regional yang perlu dioptimalkan untuk mendukung fungsi strategisnya.

2. Aspek Sosial Demografi

Tantangan dalam aspek sosial demografi Kabupaten Kotawaringin Barat berkaitan dengan upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pengurangan angka kemiskinan yang masih terbilang tinggi. Upaya strategis diperlukan untuk mengatasi ketimpangan sosial dengan intervensi kebijakan yang efektif, serta untuk memanfaatkan bonus demografi melalui pengembangan sumber daya manusia yang lebih produktif. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat menjadi prioritas untuk memperkuat daya saing daerah, sedangkan pengelolaan ketimpangan sosial memerlukan kebijakan yang lebih inklusif. Isu-isu strategis sosial demografi meliputi:

- Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM): Meski berada di urutan ke-3 di Provinsi Kalimantan Tengah, diperlukan upaya strategis untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat guna memperkuat daya saing daerah.
- Pengurangan Kemiskinan: Dengan garis kemiskinan berada pada 4,18%, dibutuhkan intervensi kebijakan yang terarah untuk mengurangi ketimpangan sosial dan memastikan inklusivitas pembangunan.
- Optimalisasi Bonus Demografi: Tantangan utama adalah memanfaatkan momentum bonus demografi melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang produktif dan pengembangan lapangan kerja berbasis inovasi.

3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik di Kabupaten Kotawaringin Barat menghadapi masalah ketidakmerataan akses dan kualitas layanan, terutama di daerah terpencil. Pendataan yang lebih akurat dan sistematis sangat dibutuhkan untuk mendukung perencanaan dan analisis pembangunan yang lebih baik. Selain itu, kapasitas sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan publik yang sesuai dengan standar nasional perlu ditingkatkan. Adanya tumpang tindih data serta ketidakcocokan nomenklatur dalam perencanaan dan penganggaran SPM menjadi kendala yang mempengaruhi efektivitas pelayanan. Dengan peningkatan infrastruktur dan SDM, pelayanan publik diharapkan dapat lebih merata dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Isu-isu strategis aspek pelayanan umum meliputi:

- Pendataan yang lebih detail diperlukan karena data pendukung yang tersedia masih bersifat global dan kurang spesifik untuk kebutuhan analisis dan perencanaan pembangunan.
- Terdapat potensi overlapping data akibat keberadaan penduduk yang berpindah lintas daerah, yang dapat mengganggu akurasi statistik dan alokasi sumber daya.
- Masih banyak masyarakat yang belum terlayani dengan optimal, mengingat ketimpangan akses terhadap pelayanan dasar di berbagai wilayah, terutama daerah terpencil.
- Kapasitas SDM dalam melaksanakan standar pelayanan perlu ditingkatkan agar pelayanan publik dapat memenuhi kualitas dan kuantitas yang ditetapkan oleh kebijakan nasional.
- Nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan dalam perencanaan dan penganggaran untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) masih belum sepenuhnya sesuai dengan standar yang tercantum dalam Aplikasi Laporan SPM Bangda.
- Pendataan sesuai dengan form tahapan penerapan SPM dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 belum dapat menghasilkan data yang lengkap, sehingga menghambat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPM secara efektif.

4. Aspek Pariwisata

Potensi sektor pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat sangat besar dengan adanya berbagai destinasi wisata, baik alam, sejarah, maupun buatan. Namun, pengembangan sektor ini menghadapi tantangan berupa keterbatasan infrastruktur, aksesibilitas yang terbatas, serta ancaman bencana alam yang mengganggu kelancaran perjalanan wisatawan. Perlu adanya perencanaan yang matang terkait peningkatan sarana transportasi, fasilitas penginapan, dan fasilitas lainnya guna mendukung kenyamanan wisatawan. Sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga sangat penting dalam menciptakan kolaborasi yang efektif untuk memajukan sektor pariwisata. Isu-isu pembangunan strategis sektor pariwisata meliputi:

- Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki berbagai potensi wisata, termasuk wisata sejarah, alam, dan buatan, yang dapat dikembangkan untuk menarik kunjungan wisatawan.

- Terdapat kawasan wisata skala nasional yang memerlukan dukungan peningkatan infrastruktur dan pemasaran yang lebih efektif untuk menarik wisatawan domestik dan mancanegara.
- Isu kebencanaan, seperti banjir dan kebakaran hutan, memengaruhi aksesibilitas jalur wisata, sehingga perlu adanya langkah mitigasi yang lebih baik untuk menjaga keberlanjutan sektor pariwisata.
- Aksesibilitas menuju objek wisata masih terbatas, baik dari segi kondisi jalan yang belum diperkeras maupun jalan yang belum terhubung langsung ke destinasi wisata.
- Kondisi destinasi wisata memerlukan penguatan sarana pendukung, seperti fasilitas transportasi, penginapan, dan tempat makan, untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan.
- Sinkronisasi program antar OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sangat penting dalam mendukung pengembangan pariwisata di Kotawaringin Barat agar tercipta kolaborasi yang efektif dalam perencanaan dan pelaksanaan program.

5. Aspek Energi

Masalah utama dalam aspek energi di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah belum meratanya jaringan kelistrikan yang memadai ke seluruh wilayah, terutama di daerah terpencil. Potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan seperti energi angin, air, matahari, dan biomassa dari perkebunan perlu dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan yang ramah lingkungan. Namun, masalah aksesibilitas dan infrastruktur yang terbatas menjadi kendala utama dalam pengembangan jaringan energi di wilayah ini. Oleh karena itu, penting untuk melakukan upaya pengembangan energi terbarukan yang efisien dan distribusi yang merata. Isu-isu strategis aspek energi meliputi:

- Belum seluruh wilayah di Kabupaten Kotawaringin Barat terlayani oleh jaringan energi kelistrikan yang memadai.
- Terdapat potensi besar dalam sektor energi, seperti energi angin, air, matahari, sampah, dan biomassa dari perkebunan, namun potensi tersebut belum dikembangkan secara optimal.
- Pengembangan jaringan energi terkendala oleh masalah aksesibilitas, baik dari segi infrastruktur maupun distribusi ke wilayah-wilayah terpencil.

6. Aspek Ekonomi dan Pembiayaan

Aspek ekonomi dan pembiayaan Kabupaten Kotawaringin Barat menghadapi tantangan ketergantungan masyarakat terhadap sektor formal yang terbatas dan rendahnya kualitas sumber daya manusia, baik teknis maupun akademis, yang menghambat penciptaan lapangan kerja yang inklusif. Selain itu, masih tingginya angka penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) memerlukan kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Kurangnya keunggulan komparatif produk Industri Kecil dan Menengah (IKM) di pasar nasional juga menjadi tantangan dalam memperkuat

daya saing daerah. Pengembangan sektor IKM yang lebih kompetitif dan kebijakan pembiayaan yang lebih inklusif sangat dibutuhkan untuk menciptakan ekonomi yang berkelanjutan. Isu-isu strategis aspek ekonomi dan pembiayaan meliputi:

- Ketergantungan Masyarakat terhadap Lapangan Kerja Sektor Formal: Ketergantungan masyarakat terhadap lapangan kerja sektor formal yang terbatas menjadi tantangan dalam menciptakan lapangan kerja yang inklusif dan berkelanjutan.
- Kurangnya Potensi Teknis dan Akademis dalam Memenuhi Lowongan Pekerjaan: Rendahnya kualitas sumber daya manusia di bidang teknis maupun akademis menghambat kemampuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil, yang berdampak pada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).
- Tingginya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS): Masih tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih efektif dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial.
- Belum Ada Keunggulan Komparatif Produk IKM di Pasar Nasional: Kurangnya keunggulan komparatif pada produk IKM di Kabupaten Kotawaringin Barat membatasi daya saing mereka di pasar nasional, sehingga diperlukan pengembangan sektor ini agar lebih kompetitif.

7. Aspek Sumber Daya Alam

Aspek sumber daya alam di Kabupaten Kotawaringin Barat, baik dalam hal pertanian, perikanan, maupun petanian, menghadapi berbagai masalah yang perlu diatasi. Ketergantungan pada pasokan luar daerah untuk pangan, serta terbatasnya lahan untuk pertanian produktif, menjadi masalah utama dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Di sisi lain, sektor perikanan dan petanian juga menghadapi kendala terkait dengan infrastruktur, kapasitas sumber daya manusia, dan pengelolaan yang tidak efisien. Pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produktivitas serta daya saing produk lokal sangat dibutuhkan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat. Isu strategis aspek sumber daya alam meliputi:

a) Tanaman Pangan

- Luasnya lahan tidur/terlantar dan tingginya alih fungsi lahan pertanian menyebabkan berkurangnya luas lahan yang tersedia untuk produksi pertanian, mengancam ketahanan pangan daerah.
- Produksi pertanian yang belum mampu memenuhi kebutuhan pangan daerah mengindikasikan adanya ketergantungan pada pasokan luar daerah yang berisiko terhadap kemandirian pangan.
- Ketersediaan sarana dan prasarana produksi pertanian yang kurang memadai membatasi efisiensi dan produktivitas sektor pertanian, menghambat kemajuan sektor ini.

- Ancaman Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), penyakit ternak, dan dampak perubahan iklim (DPI) dapat mengurangi hasil pertanian dan menyebabkan kerugian ekonomi bagi petani dan peternak.
- Lemahnya kapasitas SDM dan kelembagaan petani berdampak pada keterbatasan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki petani, sehingga mempengaruhi pengelolaan usaha pertanian secara efektif.
- Akses terhadap pembiayaan dan permodalan yang masih terbatas menghambat petani dalam mengembangkan usaha mereka, serta meningkatkan ketergantungan pada pendanaan yang tidak berkelanjutan.
- Mutu produk yang dihasilkan belum mampu bersaing dengan produk luar daerah menunjukkan perlunya peningkatan kualitas dan daya saing produk lokal untuk membuka pasar yang lebih luas.
- Skala usaha yang terbatas dengan nilai jual produk yang masih rendah menjadi tantangan utama dalam menciptakan usaha pertanian yang menguntungkan dan berkelanjutan.
- Kawasan rawan pangan mengancam ketahanan pangan daerah, membutuhkan perhatian serius dalam pengelolaan sumber daya alam dan sistem distribusi pangan yang lebih efisien.

b) Perikanan

- Jumlah tempat penampungan ikan yang terbatas tidak mampu mengakomodasi volume produksi perikanan tangkap secara maksimal.
- Kurangnya pengetahuan di kalangan pelaku usaha perikanan budidaya mengenai teknik dan manajemen yang efisien.
- Produktivitas perikanan budidaya dan produksi perikanan tangkap yang belum optimal, sehingga menghambat potensi produksi yang maksimal.
- Pemanfaatan sumber daya perangkat daerah dalam pengoptimalan sumber daya perikanan yang tersedia masih belum mencapai efisiensi dan efektivitas yang diharapkan.
- Pengawasan terhadap Sumber Daya Perikanan (SDI) yang belum optimal menghambat upaya pelestarian dan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.
- Penerapan sistem rantai dingin dalam penanganan hasil produksi perikanan yang belum optimal menyebabkan rendahnya mutu kualitas bahan baku olahan.

c) Petanian

- Kurangnya kualitas dan kuantitas infrastruktur serta sumber daya penunjang yang memadai untuk pengembangan pertanian dalam arti luas menghambat peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani.

8. Aspek Lingkungan

Masalah lingkungan di Kabupaten Kotawaringin Barat mencakup pengelolaan sampah, kualitas air, serta kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat yang masih kurang sadar akan pentingnya prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dalam pengelolaan sampah memerlukan pendidikan dan pelatihan lebih lanjut. Selain itu, kualitas air yang rendah dan penurunan kualitas udara yang disebabkan oleh kebakaran hutan membutuhkan perhatian lebih dalam pengelolaan sumber daya alam dan pencegahan kebakaran. Pengelolaan ruang terbuka hijau juga perlu diperkuat agar dapat berfungsi dengan baik sebagai penyangga ekosistem yang berkelanjutan. Isu strategis aspek lingkungan meliputi:

- Penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) pada pengelolaan sampah tingkat rumah tangga masih belum efektif dan memerlukan peningkatan partisipasi masyarakat.
- Kader lingkungan hidup yang terbatas menjadi kendala dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan.
- Kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah masih rendah, sehingga diperlukan upaya lebih untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian terhadap isu sampah.
- Layanan persampahan belum mencakup seluruh kecamatan, sehingga perlu diperluas untuk memastikan setiap wilayah mendapatkan akses yang memadai.
- Permasalahan utama terkait kebutuhan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) terhambat oleh keterbatasan lokasi yang memenuhi syarat, seperti lahan minimal 2 hektar yang sulit ditemukan.
- Kualitas air di beberapa daerah masih rendah, memerlukan upaya lebih untuk peningkatan kualitas air bersih dan pengelolaannya secara berkelanjutan.
- Indeks kualitas udara menurun, terutama disebabkan oleh kebakaran lahan dan hutan, yang menuntut penanganan yang lebih efektif dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran.
- Pemeliharaan ruang terbuka hijau masih belum optimal, sehingga perlu ada penguatan pengelolaan dan pemeliharaan untuk menjaga keberlanjutan ruang hijau di daerah.

9. Aspek Kebencanaan

Ketahanan terhadap bencana alam di Kabupaten Kotawaringin Barat memerlukan perhatian khusus, terutama dalam hal mitigasi kebakaran hutan, banjir, dan gelombang pasang. Meskipun sudah ada upaya mitigasi, tingginya angka kebakaran hutan dan lahan serta dampak bencana alam lainnya menunjukkan perlunya penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat. Selain itu, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana menjadi kunci untuk mengurangi dampak negatif bencana terhadap kehidupan sosial dan ekonomi daerah. Isu strategis aspek kebencanaan meliputi:

- Mitigasi bencana, termasuk kebakaran hutan dan lahan, banjir, serta gelombang pasang, menjadi isu utama untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan ketangguhan daerah terhadap bencana alam.

- Tingginya angka kebakaran hutan dan lahan dibandingkan dengan luas daerah rawan kebakaran menunjukkan perlunya penguatan pengawasan dan penegakan hukum dalam pengendalian kebakaran.

5.2 PELUANG PENGEMBANGAN

Pada usia yang memasuki satu abad, Kabupaten Kotawaringin Barat menghadapi tantangan sekaligus peluang besar untuk memajukan berbagai sektor pembangunan. Peluang ini perlu dikelola dengan bijak melalui pendekatan yang holistik dan terintegrasi, mempertimbangkan berbagai aspek yang berperan dalam perkembangan daerah. Peluang pengembangan Kabupaten Kotawaringin Barat setiap aspeknya adalah sebagai berikut.

1. Aspek Guna Lahan

Pulau Kalimantan, termasuk Kalimantan Tengah, memiliki potensi strategis sebagai Superhub Ekonomi Nusantara, sebagaimana dirancang dalam RPJMN. Dengan rencana tata ruang yang berfokus pada pertanian berorientasi agribisnis dan agroindustri, kawasan ini diproyeksikan menjadi lumbung energi dan pangan. Pengelolaan lahan diarahkan untuk menjaga keseimbangan daya dukung lingkungan, pengembangan kawasan strategis, dan penciptaan daya tarik wilayah melalui infrastruktur modern seperti Water Front City. Peluang pengembangan aspek guna lahan meliputi:

- Pulau Kalimantan dirancang sebagai Superhub Ekonomi Nusantara sesuai dengan tema yang diusung dalam RPJMN.
- Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Tengah bertujuan untuk menciptakan tatanan ruang berbasis pertanian yang berorientasi agribisnis dan agroindustri, menjadi lumbung energi dan pangan, dengan tetap menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- Kawasan industri Surya Borneo Industri (SBI) di Kecamatan Kumai termasuk dalam Kawasan Strategis Nasional.
- RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat bertujuan mengembangkan sektor pertanian, perikanan, kehutanan, agroindustri, dan pariwisata secara berkelanjutan.
- Kawasan strategis Provinsi Kalimantan Tengah meliputi ekosistem mangrove, Daerah Aliran Sungai (DAS), serta kawasan strategis sosial budaya.
- Kawasan strategis ekonomi meliputi perkebunan, kawasan terpadu industri, kawasan agropolitan, kawasan strategis minapolitan, serta kota terpadu mandiri.
- Pembangunan Water Front City menjadi salah satu peluang strategis untuk meningkatkan daya tarik kawasan.

2. Aspek Sosial Demografi

Pertumbuhan penduduk yang signifikan hingga tahun 2048 menjadi tantangan bagi Kalimantan Tengah untuk merancang perencanaan demografi yang matang. Fokus utama diarahkan pada pengurangan angka kemiskinan melalui penguatan infrastruktur pendukung, guna menciptakan kesejahteraan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Peluang pengembangan aspek sosial demografi meliputi:

- Pada tahun 2048, diperkirakan akan terjadi pertumbuhan penduduk yang signifikan, yang memerlukan perencanaan demografi yang matang.
- Pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan melalui penguatan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

3. Aspek Pelayanan Umum

Peningkatan standar pelayanan minimal (SPM) menjadi indikator utama keberhasilan pembangunan di Kalimantan Tengah, dengan target mencapai 100% pada tahun 2024. Capaian di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, keamanan, serta kesejahteraan sosial menjadi prioritas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Peluang pengembangan aspek pelayanan umum meliputi:

- Pada tahun 2023, capaian Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) di berbagai bidang adalah sebagai berikut: pendidikan 80,56%, kesehatan 85,08%, pekerjaan umum 83,52%, perumahan rakyat 81,43%, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas) 85,78%, serta bidang sosial 83,38%, dengan capaian rata-rata penerapan SPM Nasional sebesar 83,23%.
- Pada tahun 2024, target capaian kinerja penerapan SPM secara nasional ditetapkan sebesar 100%.

4. Aspek Pariwisata

Pariwisata di Kalimantan Tengah memiliki peluang besar untuk dikembangkan melalui kawasan strategis nasional seperti Tanjung Putih Beliung dan pelestarian warisan budaya berupa bangunan kerajaan atau kesultanan. Upaya ini mendukung penguatan identitas sosial budaya serta mendorong pertumbuhan sektor pariwisata berkelanjutan. Peluang pengembangan aspek pariwisata meliputi:

- Tanjung Putih Beliung telah ditetapkan sebagai bagian dari rencana kawasan strategis nasional, yang menunjukkan pentingnya kawasan ini dalam pembangunan nasional.
- Bangunan kerajaan atau kesultanan termasuk dalam kawasan strategis provinsi dengan nilai sosial budaya yang tinggi, mencerminkan warisan sejarah dan budaya yang harus dilestarikan.

5. Aspek Energi

Kalimantan Tengah memiliki peluang besar untuk mengembangkan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan seperti energi dari air, matahari, dan angin. Dengan Grand Strategi Energi Nasional 2020-2040, wilayah ini diharapkan mampu memanfaatkan teknologi terkini guna mencapai target bauran energi bersih hingga 54% pada tahun 2050, sekaligus mendukung transisi menuju energi berkelanjutan.

Peluang pengembangan aspek energi meliputi:

- Sektor perkebunan memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai sumber pembangkit listrik berbasis energi terbarukan.
- Energi dari air, matahari, dan angin menawarkan potensi signifikan untuk dikembangkan sebagai pembangkit listrik ramah lingkungan.
- Pemerintah telah menyusun Grand Strategi Energi Nasional 2020-2040 untuk mempercepat transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan.
- Target bauran energi baru dan terbarukan (EBT) dinaikkan menjadi 38%-41% pada tahun 2040, dengan asumsi teknologi CCS/CCUS digunakan secara luas di pembangkit listrik dan industri.
- Pada tahun 2050, bauran energi baru dan terbarukan ditargetkan mencapai 52%-54%, seiring dengan pengembangan teknologi pendukung yang lebih masif.

6. Aspek Ekonomi dan Pembiayaan

Kalimantan Tengah menghadapi peluang besar dalam memperkuat posisi ekonominya melalui pengembangan perdagangan, investasi, dan kawasan industri. Dengan fokus pada peningkatan daya saing ekspor, pembukaan lapangan kerja, serta kehadiran BUMD responsif, wilayah ini diproyeksikan menjadi mitra strategis dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan pusat ekonomi baru di Asia. Peluang pengembangan aspek ekonomi dan pembiayaan meliputi:

- Pada tahun 2045, perdagangan global diperkirakan tumbuh sebesar 3,4% per tahun, dengan negara berkembang menjadi poros utama perdagangan dan investasi dunia yang mencatat pertumbuhan hingga 6% per tahun.
- Perdagangan intra-Asia akan terus meningkat, disertai dengan arus investasi asing langsung yang berkelanjutan antara negara-negara berkembang.
- Dengan meningkatkan daya saing ekspor melalui inovasi dan teknologi, Indonesia diproyeksikan menjadi negara pengekspor terbesar ke-10 dunia pada tahun 2045, dengan pangsa 2,0% dari total ekspor barang dan jasa dunia.
- Pengembangan Kawasan Industri di Kabupaten Kotawaringin Barat dirancang untuk mendukung efisiensi ekonomi wilayah secara berkelanjutan.
- Terdapat potensi besar dalam penciptaan lapangan kerja di sektor perdagangan, jasa, dan perkebunan di wilayah tersebut.

- Kehadiran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru diharapkan mampu menghadirkan unit bisnis yang responsif terhadap permintaan pasar (demand).
- Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki potensi untuk menjadi mitra strategis bagi pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN).
- Ibukota kecamatan ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan publik di wilayahnya.
- Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi di Kecamatan Kumai meliputi Pelabuhan Kumai sebagai gerbang utama keluar-masuk barang dan penumpang, sedangkan di Kecamatan Arut Selatan meliputi Pelabuhan Pangkalan Bun dan Bandara Iskandar sebagai simpul transportasi utama.
- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) berada di Pangkalan Bun, sedangkan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) berada di Kumai.
- Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) mencakup wilayah IKK Kotawaringin Lama, IKK Pangkalan Banteng, IKK Pangkalan Lada, IKK Arut Utara, serta sejumlah desa seperti Runtu (Arut Selatan), Teluk Bogam (Kumai), Kubu (Kumai), Sidomulyo (Pangkalan Banteng), dan Riam Durian (Kotawaringin Lama).
- Pusat Pelayanan Lokal (PPL) tersebar di seluruh desa di Kabupaten Kotawaringin Barat, sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi di wilayah ini mencakup kawasan perkebunan, kawasan industri terpadu, simpul transportasi, kawasan agropolitan, kawasan minapolitan, dan kota terpadu mandiri.

7. Aspek Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Pemanfaatan sumber daya alam di Kalimantan Tengah diarahkan untuk menciptakan nilai tambah melalui hilirisasi sektor pertanian dan kehutanan. Kawasan strategis seperti Taman Nasional Tanjung Puting menjadi fokus konservasi lingkungan, sementara pengelolaan sampah berbasis 3R di tingkat rumah tangga menjadi prioritas untuk mendukung keberlanjutan ekosistem. Komoditas seperti CPO, kayu gelondongan, dan bijih logam menjadi andalan ekonomi regional. Peluang pengembangan aspek SDA meliputi:

- Kawasan Strategis Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi diarahkan untuk mengoptimalkan hasil pengelolaan sumber daya di Kalimantan Tengah sesuai RTRW Provinsi.
- Kawasan Strategis Daya Dukung Lingkungan Hidup meliputi kawasan lindung di Taman Nasional Tanjung Puting serta kawasan rawan gelombang pasang di Kabupaten Kotawaringin Barat, sebagaimana tercantum dalam RTRW Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kotawaringin Barat.

- Hilirisasi potensi sumber daya alam di Kalimantan Tengah didorong untuk mempercepat penciptaan nilai tambah pada sektor pengelolaan sumber daya.
- Kalimantan Tengah dikembangkan sebagai Kawasan Sentra Pangan Pertanian (Food Estate) guna memperkuat ketahanan pangan nasional.
- Komoditas kayu gelondongan menjadi salah satu andalan perdagangan antarwilayah di Kalimantan Tengah selain batu bara, minyak kelapa sawit mentah (CPO), serta bijih logam dan konsentrat.
- Dominasi pengelolaan sumber daya alam oleh pihak swasta menciptakan tantangan bagi pembentukan badan usaha milik daerah (BUMD) baru di Kalimantan Tengah.
- Permintaan pasar ekspor terhadap minyak kelapa sawit mentah (CPO) terus meningkat seiring kebutuhan global.
- Kebutuhan industri dalam negeri terhadap minyak kelapa sawit mentah (CPO) dan produk turunannya mengalami peningkatan signifikan.
- Diversifikasi produk kelapa sawit berpotensi menyerap banyak tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
- Peningkatan upaya reduksi sampah melalui pendekatan 3R (reduce, reuse, recycle) serta penggunaan bahan yang mudah terurai menjadi prioritas pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga.

5.3 TANTANGAN PENGEMBANGAN

Menyongsong satu abad Kabupaten Kotawaringin Barat, tantangan pengembangan yang dihadapi cukup kompleks dan multidimensional. Kabupaten ini harus mengelola pertumbuhan penduduk yang cepat, memperkuat infrastruktur dasar, dan menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, keberagaman potensi sumber daya alam, seperti perkebunan kelapa sawit, kehutanan, serta sektor perikanan dan pariwisata, perlu dioptimalkan melalui hilirisasi industri dan pengelolaan yang ramah lingkungan. Transformasi ekonomi menuju kawasan industri yang efisien dan pembangunan kawasan agropolitan serta minapolitan menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam mentah. Selain itu, pemerataan pembangunan di seluruh wilayah, penguatan kapasitas sumber daya manusia, dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan menjadi tantangan utama agar Kotawaringin Barat dapat bersaing secara regional maupun global dalam satu abad ke depan. Tantangan pengembangan Kabupaten Kotawaringin Barat setiap aspeknya adalah sebagai berikut.

1. Aspek Guna Lahan

Pengelolaan guna lahan menjadi tantangan penting bagi Kabupaten Kotawaringin Barat dalam mendukung keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Alih fungsi lahan, keterbatasan lahan untuk

pengembangan industri, dan konflik administratif terkait kepemilikan lahan menciptakan berbagai kendala yang memengaruhi produktivitas sektor agraris, kelestarian ekosistem, dan pembangunan infrastruktur. Pendekatan yang berimbang dan berbasis keberlanjutan diperlukan untuk mengatasi tantangan ini. Berikut ini menunjukkan tantangan dari aspek guna lahan dalam pengembangan Kotawaringin Barat.

- Alih fungsi lahan perkebunan dan pertanian menjadi tantangan dalam menjaga keberlanjutan sektor agraris yang penting bagi perekonomian lokal dan ketahanan pangan.
- Keterbatasan lahan yang sesuai untuk pengembangan kawasan industri menghambat proses ekspansi dan investasi dalam sektor industri.
- Tumpang tindih status kepemilikan lahan gambut serta izin penggunaannya akibat ketidaksesuaian administrasi dan informasi menjadi kendala utama dalam pengelolaan lahan secara efektif.
- Keterbatasan pengembangan lahan gambut disebabkan oleh karakteristik ekologisnya yang rentan dan memerlukan pendekatan yang hati-hati untuk menjaga keseimbangan lingkungan.
- Kurangnya aksesibilitas ke wilayah-wilayah potensial menghambat pertumbuhan ekonomi serta keterhubungan antara pusat-pusat kegiatan.

2. Aspek Ekonomi dan Pembiayaan

Pertumbuhan ekonomi dan pengelolaan keuangan daerah menjadi elemen kunci dalam menciptakan pembangunan berkelanjutan di Kotawaringin Barat. Berbagai tantangan, seperti perlambatan ekspor-impor, keterbatasan BUMD, serta tingginya tingkat inflasi, memengaruhi stabilitas ekonomi lokal. Selain itu, peningkatan investasi, pengurangan kemiskinan, dan penguatan keterkaitan antarwilayah strategis, termasuk sinergi dengan Ibu Kota Nusantara (IKN), menjadi prioritas untuk meningkatkan daya saing dan pemerataan pembangunan. Berikut ini menunjukkan tantangan dari aspek ekonomi dan pembiayaan dalam pengembangan Kotawaringin Barat.

- Mendesaknya akselerasi pertumbuhan dan pemulihan ekonomi daerah menjadi prioritas utama untuk mengembalikan stabilitas dan daya saing regional.
- Relaksasi sementara pada aktivitas ekspor-impor mengakibatkan perlambatan di sektor perdagangan dan industri, sehingga menekan performa ekonomi lokal.
- Adanya potensi permintaan tinggi yang belum dapat dipenuhi oleh BUMD, sekaligus ketidakmampuan BUMD untuk memenuhi kebutuhan lokal secara optimal, menciptakan kesenjangan antara penawaran dan permintaan.
- BUMD baru menghadapi kendala dalam menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, sehingga kontribusi terhadap pengurangan pengangguran masih terbatas.

- Inflasi yang tinggi menekan daya beli masyarakat dan memperburuk ketimpangan ekonomi di berbagai sektor.
- Upaya penurunan tingkat kemiskinan daerah masih menghadapi tantangan, meskipun tingkat kemiskinan relatif rendah, akibat akses terbatas ke layanan umum di wilayah terpencil.
- Pemerintah Daerah menghadapi tantangan dalam berinvestasi pada pengembangan SDM, infrastruktur, reformasi struktural, dan perbaikan iklim usaha, yang diperlukan untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan.
- Tantangan pengembangan keterkaitan antar pusat pertumbuhan dan kawasan strategis, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN), menjadi fokus penting untuk mendorong pemerataan pembangunan.
- Isu lingkungan hidup, pembangunan rendah karbon, efisiensi ekosistem, ketahanan energi, dan ketahanan air menjadi tantangan utama dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di tengah perubahan iklim global.

3. Aspek Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Pemanfaatan sumber daya alam di Kotawaringin Barat, khususnya kelapa sawit, menghadapi tantangan besar terkait keberlanjutan lingkungan, legalitas lahan, dan efisiensi rantai pasok. Kebijakan pemerintah, seperti larangan ekspor CPO, serta tantangan ekologis, seperti pengelolaan limbah dan pendangkalan alur sungai, memerlukan inovasi dalam pengelolaan sumber daya dan infrastruktur. Penyeimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan menjadi fokus utama dalam mengatasi tantangan ini. Berikut ini menunjukkan tantangan dari aspek sumber daya alam dan lingkungan dalam pengembangan Kotawaringin Barat.

- Kebijakan Larangan Ekspor CPO: Kebijakan pemerintah yang melarang ekspor produk Crude Palm Oil (CPO) menjadi tantangan utama dalam menjaga stabilitas pasar dan daya saing industri kelapa sawit di tingkat internasional.
- Konflik antara Perkebunan, Industri, dan Kawasan Hutan: Keberadaan perkebunan dan industri kelapa sawit yang berbatasan dengan kawasan hutan sering kali menghadapi kendala legalitas lahan serta kesulitan dalam memenuhi persyaratan sertifikasi produk secara internasional.
- Gangguan Distribusi akibat Pendangkalan Alur Sungai: Pendangkalan alur sungai yang menghambat distribusi komoditas kelapa sawit menyebabkan peningkatan biaya dan penurunan efisiensi dalam rantai pasok industri.
- Tingginya Biaya Produksi karena Transportasi dan Logistik: Infrastruktur yang kurang memadai di wilayah penghasil kelapa sawit mengakibatkan tingginya biaya transportasi dan logistik, yang secara signifikan meningkatkan biaya produksi.

- Pengelolaan Limbah Industri: Pengelolaan limbah padat dan cair dari industri pengolahan kelapa sawit menjadi tantangan lingkungan yang memerlukan teknologi dan sistem manajemen yang lebih baik.
- Ketimpangan Pembangunan: Hasil pembangunan yang belum merata menghambat pemerataan manfaat ekonomi dan sosial, terutama di wilayah yang bergantung pada sektor kelapa sawit.
- Kesenjangan Antarwilayah: Kesenjangan antar wilayah di Kabupaten Kotawaringin Barat menciptakan perbedaan akses terhadap infrastruktur, peluang ekonomi, dan layanan dasar yang mendukung pengembangan sektor kelapa sawit.
- Permasalahan Kawasan Kumuh: Munculnya kawasan kumuh di sekitar sentra industri dan permukiman pekerja menunjukkan perlunya perhatian lebih pada tata ruang dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut.

4. Aspek Kebencanaan

Kerentanan terhadap bencana, seperti banjir akibat karakteristik sungai, menjadi tantangan signifikan bagi Kotawaringin Barat. Perubahan iklim dan pemanasan global memperburuk dampak bencana, menuntut langkah-langkah mitigasi dan adaptasi yang inovatif. Selain itu, penerapan konsep Resilient City atau Kota Tangguh menjadi penting untuk meningkatkan ketahanan wilayah terhadap ancaman bencana, perubahan sosial, dan tekanan lingkungan, demi memastikan keberlanjutan pembangunan. Berikut ini menunjukkan tantangan dari aspek kebencanaan dalam pengembangan Kotawaringin Barat.

- Banjir yang dipengaruhi oleh karakteristik sungai menjadi salah satu tantangan utama dalam pengelolaan sumber daya air dan mitigasi bencana di wilayah ini.
- Perubahan iklim dan pemanasan global menghadirkan tantangan besar yang memerlukan upaya adaptasi dan mitigasi untuk menjaga keberlanjutan lingkungan.
- Tantangan dalam mewujudkan konsep Resilient City atau Kota Tangguh menjadi fokus penting guna meningkatkan ketahanan terhadap bencana, perubahan sosial, dan tekanan lingkungan.

5.4 KEBUTUHAN PENGEMBANGAN

Menjelang satu abad berdirinya, Kabupaten Kotawaringin Barat menghadapi kebutuhan pengembangan yang mendesak untuk memastikan keberlanjutan, kesejahteraan, dan daya saing wilayah di tengah dinamika global dan nasional. Transformasi holistik diperlukan untuk mengoptimalkan potensi daerah dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan dan sosial. Kebutuhan pengembangan Kabupaten Kotawaringin Barat setiap aspeknya adalah sebagai berikut.

1. Aspek Ekonomi dan Pembiayaan

Pengembangan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat memerlukan strategi terintegrasi yang mampu memanfaatkan potensi sumber daya daerah untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Fokus utama diarahkan pada optimalisasi sektor unggulan seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata, serta penguatan industri pengolahan. Dalam mewujudkan pembangunan yang kokoh, dukungan pembiayaan yang efektif melalui sinergi investasi dan optimalisasi APBD menjadi kunci keberhasilan. Kebutuhan pengembangan Kotawaringin Barat dari aspek ekonomi dan pembiayaan meliputi:

- Pengembangan pusat-pusat kawasan strategis perlu diarahkan pada keterkaitan aliran komoditas dan produksi dari hulu ke hilir untuk menciptakan sinergi ekonomi yang berkelanjutan.
- Pembangunan harus difokuskan pada sektor utama, seperti pertanian, perkebunan (kelapa sawit dan karet), perikanan, serta pariwisata, yang memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan daerah.
- Pengembangan industri pengolahan, khususnya di sektor perkebunan dan pertanian, perlu diperluas guna meningkatkan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat dan daerah.
- Diperlukan mekanisme pembiayaan yang kuat melalui optimalisasi APBD serta peningkatan investasi di sektor infrastruktur, energi, dan industri untuk mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

2. Aspek Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Kelestarian sumber daya alam menjadi fondasi utama dalam pembangunan Kotawaringin Barat. Tantangan pemenuhan kebutuhan pangan, pengelolaan sampah, serta pelestarian kawasan konservasi strategis memerlukan pendekatan berbasis keberlanjutan. Perencanaan pembangunan harus dilakukan dengan menyeimbangkan eksploitasi sumber daya dengan pelestarian lingkungan untuk mendukung kehidupan masyarakat dan keanekaragaman hayati. Kebutuhan pengembangan Kotawaringin Barat dari aspek Sumber Daya Alam dan lingkungan meliputi:

- Kabupaten Kotawaringin Barat menghadapi tantangan untuk memenuhi kebutuhan pangan sebesar 41.726 ton per tahun, yang memerlukan pengamanan lahan produktif seluas 5.871,32 hektar guna mendukung keberlanjutan sektor pertanian.
- Upaya pengelolaan sampah memerlukan pengadaan fasilitas Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang memadai untuk mengatasi permasalahan timbulan sampah yang terus meningkat.
- Pembangunan wilayah harus dilakukan dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan melalui penurunan tingkat deforestasi dan perlindungan kawasan konservasi strategis seperti Taman Nasional Tanjung Puting.

3. Aspek Kebencanaan

Kabupaten Kotawaringin Barat menghadapi risiko bencana alam seperti kebakaran hutan, banjir, dan abrasi. Oleh karena itu, peningkatan infrastruktur mitigasi dan adaptasi bencana menjadi prioritas untuk meningkatkan ketahanan daerah. Strategi yang terintegrasi dengan pengelolaan dampak perubahan iklim diperlukan untuk melindungi wilayah pesisir serta menciptakan sistem peringatan dini yang efektif guna mengurangi risiko bencana. Kebutuhan pengembangan Kotawaringin Barat dari aspek kebencanaan meliputi:

- Pemenuhan sarana dan prasarana untuk mitigasi dan adaptasi terhadap bencana seperti kebakaran hutan, banjir, dan gelombang abrasi, termasuk pembangunan infrastruktur pengendali banjir, tempat evakuasi, serta pengembangan sistem peringatan dini, menjadi prioritas utama untuk meningkatkan ketahanan daerah.
- Strategi mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim harus diintegrasikan ke dalam setiap sektor pembangunan, khususnya di wilayah pesisir yang rentan terhadap abrasi dan kenaikan permukaan laut, guna melindungi lingkungan serta keberlanjutan kehidupan masyarakat.

4. Aspek Guna Lahan

Perencanaan tata ruang yang berkelanjutan merupakan elemen penting untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial di Kabupaten Kotawaringin Barat. Pengembangan lahan untuk sektor perkebunan, pariwisata, dan industri harus disinergikan dengan keberlanjutan lingkungan dan optimalisasi potensi lokal. Infrastruktur pendukung yang memadai juga diperlukan untuk memperkuat konektivitas dan efisiensi pemanfaatan lahan. Kebutuhan pengembangan Kotawaringin Barat dari aspek guna lahan meliputi:

- Pengembangan lahan ke arah sektor perkebunan dan pariwisata memerlukan perencanaan yang berkelanjutan serta sinergi dengan potensi lokal dan keberlanjutan lingkungan.
- Pengembangan lahan untuk sektor industri membutuhkan optimalisasi tata ruang yang mendukung investasi, tenaga kerja, dan keberlanjutan ekonomi daerah.
- Pengembangan lahan harus disertai dengan peningkatan infrastruktur yang memadai untuk mendukung konektivitas, aksesibilitas, dan efisiensi pembangunan.

5. Aspek Sosial Demografi

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat merupakan tantangan utama dalam pembangunan Kotawaringin Barat. Upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi langkah strategis yang harus dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan di berbagai sektor, khususnya perkebunan, pariwisata, dan industri. Kebutuhan pengembangan Kotawaringin Barat dari aspek sosial demografi meliputi:

- Kabupaten Kotawaringin Barat menghadapi tantangan dalam mengatasi kemiskinan, yang memerlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di berbagai sektor.
- Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sangat diperlukan guna mendukung pengembangan sektor perkebunan, pariwisata, dan industri secara optimal.

6. Aspek Pelayanan Umum

Peningkatan kualitas pelayanan publik di Kotawaringin Barat membutuhkan data yang akurat dan SDM yang kompeten. Proses pendataan, monitoring, dan evaluasi harus dilakukan secara sistematis untuk memastikan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dengan dukungan pelatihan berkelanjutan dan peningkatan kapasitas petugas, kualitas layanan publik diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal. Kebutuhan pengembangan Kotawaringin Barat dari aspek pelayanan umum meliputi:

- Kebutuhan pendataan yang akurat dan komprehensif perlu dipenuhi untuk menunjang pelaporan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- Sosialisasi dan pelatihan terkait kegiatan pendataan harus dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan petugas.
- Penambahan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten menjadi prioritas dalam mendukung proses penghitungan capaian layanan SPM secara optimal.
- Monitoring dan evaluasi kegiatan perlu dilakukan secara terstruktur untuk memastikan tercapainya target layanan sesuai dengan SPM.

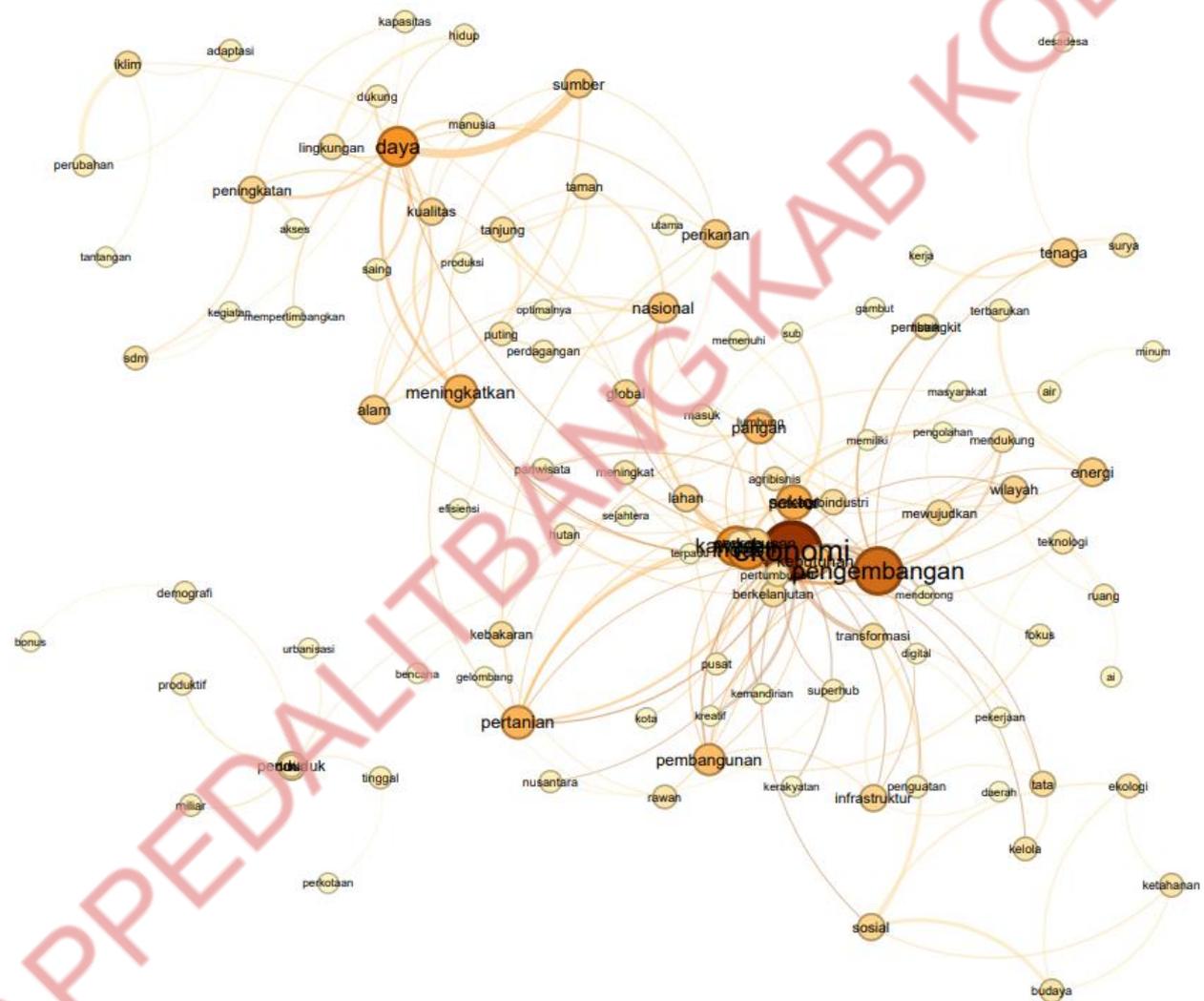
7. Aspek Pariwisata

Sebagai salah satu daya tarik utama, sektor pariwisata Kotawaringin Barat, khususnya Tanjung Puting, membutuhkan pengembangan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas, kenyamanan, dan daya tarik wisata. Peningkatan fasilitas umum dan sarana pendukung lainnya menjadi langkah strategis untuk memperkuat posisi Kabupaten sebagai destinasi wisata unggulan nasional. Kebutuhan pengembangan Kotawaringin Barat dari aspek pariwisata yaitu:

- Kebutuhan pengembangan infrastruktur pendukung kawasan pariwisata strategis nasional, seperti Tanjung Puting, mencakup peningkatan aksesibilitas, fasilitas umum, dan sarana pendukung lainnya untuk mendukung daya tarik wisata dan kenyamanan pengunjung.

5.5 KONSEP PENGEMBANGAN

Perumusan konsep dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang berbasis pada analisis mendalam terhadap berbagai kajian kebijakan, hasil analisis situasi, serta identifikasi isu-isu, peluang, tantangan, dan kebutuhan pembangunan di wilayah ini. Untuk mendukung keakuratan dan ketajaman analisis, digunakan perangkat *text mining* seperti Wordij dan Gephi. Tools ini membantu dalam menstrukturkan dan memvisualisasikan hubungan antar kata kunci dari dokumen kebijakan dan laporan terkait. Berdasarkan hasil analisis visualisasi data berbasis *network analysis* didapatkan keterkaitan kata-kata kunci yang relevan dalam mendukung pengambilan keputusan strategis dan pengembangan kawasan.



Gambar 5. 3. Visualisasi Konsep Pengembangan Berdasarkan Hasil *Text Mining Network Analysis*

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Setiap lingkaran (*node*) dalam diagram merepresentasikan kata kunci penting yang muncul dari hasil analisis. Ukuran node menunjukkan tingkat kepentingan atau frekuensi kemunculan kata tersebut dalam dokumen yang dianalisis. Kata seperti *daya*, *pengembangan*, *ekonomi*, dan *meningkatkan* tampak lebih besar, menandakan bahwa konsep-konsep ini menjadi pusat perhatian dalam kajian. Garis penghubung antar node menunjukkan hubungan atau asosiasi antara kata kunci. Ketebalan garis

menggambarkan seberapa kuat hubungan tersebut. Dalam hal ini, *ekonomi* memiliki keterkaitan yang kuat dengan *pertanian*, *pariwisata*, dan *pembangunan*. Diagram ini juga menunjukkan klustering atau kelompok-kelompok kata kunci yang saling berhubungan. Beberapa klaster utama adalah:

- **Ekonomi dan Pengembangan:** Berfokus pada strategi peningkatan ekonomi berbasis inklusivitas, kreatifitas, dan keberlanjutan.
- **Pariwisata dan Energi Terbarukan:** Menyoroti kebutuhan pembangunan infrastruktur pendukung sektor wisata serta pemanfaatan energi terbarukan.
- **Pertanian dan Teknologi:** Mengedepankan pentingnya pengembangan kawasan pertanian terpadu berbasis teknologi untuk mendukung keberlanjutan produksi pangan dan kehutanan.
- **SDM dan SDA Berkelanjutan:** Menggarisbawahi pengelolaan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) untuk keberlanjutan lingkungan hidup dan daya saing kawasan.

Dari diagram tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat empat prioritas utama sebagai konsep pengembangan Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu:

1. **Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Global yang Inklusif:** Mengutamakan transformasi infrastruktur sosial dan pengelolaan ekonomi berbasis pertanian yang inovatif.
2. **Pembangunan Infrastruktur Pendukung Pariwisata:** Fokus pada sektor pariwisata yang berkelanjutan dengan pemanfaatan energi baru dan terbarukan.
3. **Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu:** Pengolahan hasil pertanian dengan penerapan teknologi mutakhir untuk mendukung kawasan rawan di sekitar kota (*hinterland*).
4. **Peningkatan Kualitas SDM dan SDA Berbasis Perikanan Berkelanjutan:** Menciptakan lingkungan hidup yang lestari sekaligus memperkuat daya saing global.

Lebih lanjut, diagram ini merupakan visualisasi lanjutan dari diagram sebelumnya, yang memberikan penekanan lebih jelas pada *konsep pengembangan pertama*: peningkatan pertumbuhan ekonomi global secara inklusif. Dalam visualisasi ini, hubungan antar kata kunci yang relevan dengan konsep tersebut ditampilkan lebih terperinci, menggambarkan dimensi utama yang menjadi fokus kajian.

Node dengan ukuran lebih besar, seperti *sektor, ekonomi, pertumbuhan, pengembangan, dan berkelanjutan*, menunjukkan bahwa kata-kata ini sering muncul dan memiliki peran signifikan dalam dokumen kajian. Kata kunci seperti *pertanian, sosial, kreatif, dan kerakyatan* juga tampak relevan, mencerminkan dimensi yang menjadi fokus dalam konsep pengembangan daerah. Garis penghubung antar node menunjukkan adanya hubungan logis atau keterkaitan antara dua kata kunci. Ketebalan garis menunjukkan kekuatan hubungan tersebut. Misalnya, *ekonomi* sangat erat hubungannya dengan *pengembangan, transformasi, dan berkelanjutan*. Koneksi antar node menggambarkan integrasi konsep, seperti bagaimana *kemandirian ekonomi* mendukung *transformasi sosial* dan *pertumbuhan global*.

Terdapat beberapa kelompok utama yang dapat diidentifikasi:

- Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Global: Terkait dengan transformasi infrastruktur, tata kelola, dan pengelolaan ekonomi yang inklusif.
- Pengembangan Sektor Pertanian dan Perkebunan: Berbasis keberlanjutan dan pengelolaan sumber daya lokal untuk mendukung pertumbuhan wilayah.
- Transformasi Sosial dan Kreatif: Berfokus pada peningkatan kualitas masyarakat dan tata kelola berbasis kerakyatan.
- Kemandirian dan Inovasi: Pengelolaan yang inovatif dalam konteks sumber daya lokal dan global.

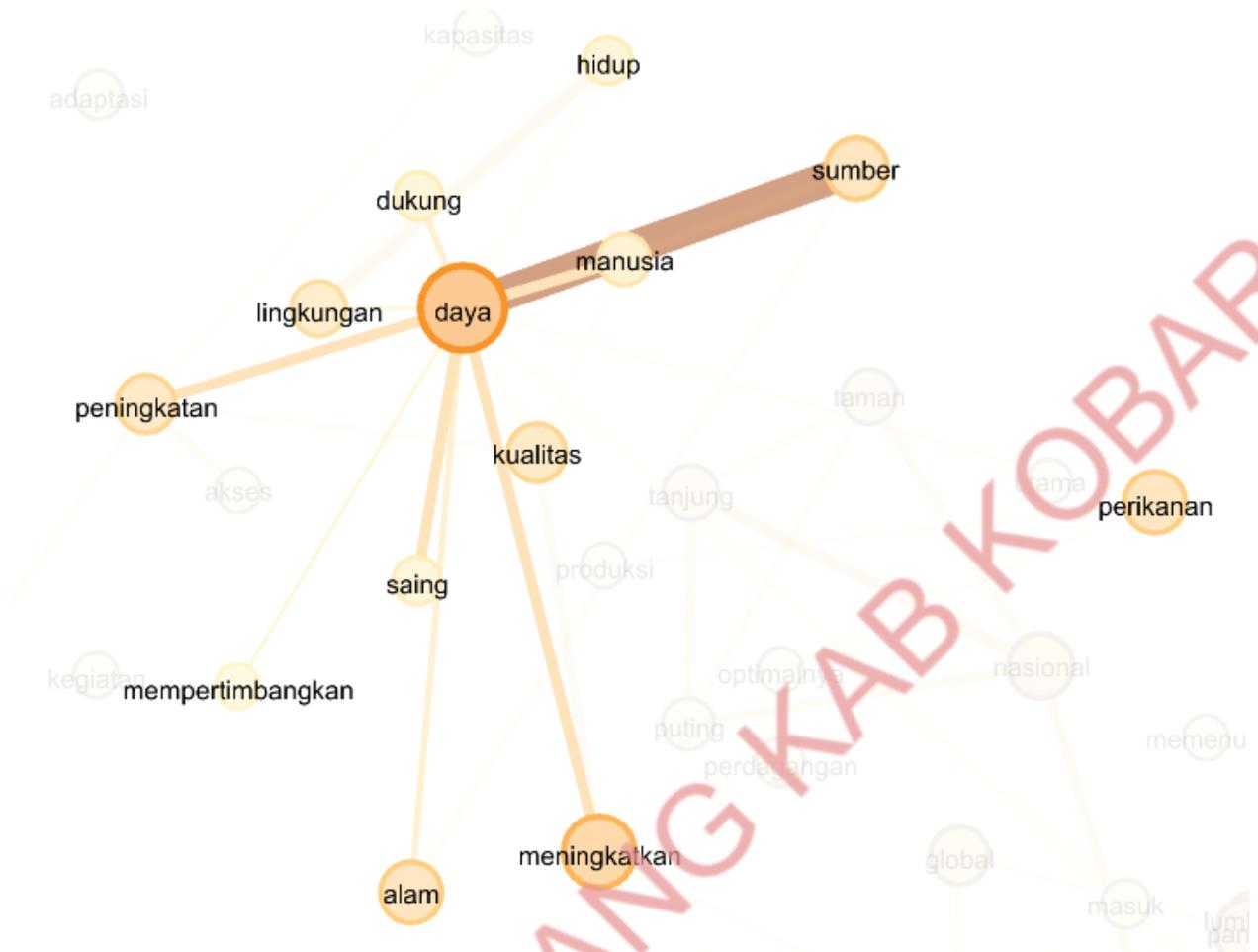
Dari beberapa kelompok utama kata-kata kunci tersebut, dapat dirumuskan konsep pengembangan yang menekankan pada: ***Peningkatan pertumbuhan ekonomi global secara inklusif dengan transformasi infrastruktur sosial, pengelolaan ekonomi kreatif, dan kemandirian ekonomi berbasis pertanian berkelanjutan.***

Selanjutnya, diagram ini menunjukkan penekanan lebih mendalam pada *konsep pengembangan kedua*: pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata dan energi terbarukan melalui pemanfaatan lahan berkelanjutan yang secara khusus mengurai elemen-elemen yang menjadi dasar pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata dan energi terbarukan.

Dari diagram tersebut dapat terlihat kata-kata seperti *pengembangan*, *pembangunan*, *peningkatan*, dan *ekonomi* menjadi fokus utama sebagai inti dari tujuan pengembangan. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan kawasan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi dan berkelanjutan. Kata-kunci tambahan seperti *pertanian terpadu*, *hutan*, *pengolahan*, *pangan*, *teknologi*, dan *wilayah* mendukung konsep utama dengan pendekatan tematik, yakni integrasi sumber daya lokal dalam sistem yang terpadu. Nodes dan garis dalam diagram menggambarkan hubungan logis antara berbagai elemen, seperti: *Pertanian terpadu* terkait erat dengan *pengolahan* dan *teknologi*, menunjukkan pentingnya pemanfaatan teknologi modern dalam memaksimalkan hasil pertanian; Elemen *wilayah* dan *rawan* mengarah pada perhatian khusus terhadap pengembangan kawasan pinggiran (*hinterland*), yang memiliki potensi tetapi rentan terhadap tantangan lingkungan dan sosial.

Sesuai dengan kondisi eksisting Kabupaten Kotawaringin Barat, yang memiliki potensi besar di sektor agribisnis, kehutanan, dan pangan. Pengolahan berbasis teknologi diarahkan untuk memperkuat daya dukung kawasan pinggiran dan mendukung pembangunan perkotaan. Keseluruhan konsep dalam diagram ini menekankan pada integrasi antara kebutuhan ekonomi, ekologi, dan teknologi dalam upaya pengembangan kawasan yang berkelanjutan dan mendukung stabilitas wilayah sekitar. Dengan demikian, konsep pengembangan yang dapat disimpulkan adalah: ***Pengembangan kawasan pertanian terpadu berbasis teknologi melalui pengolahan hasil pertanian pangan/kehutanan dalam menyangga kawasan rawan di sekitar kota (hinterland).***

Selanjutnya adalah diagram yang menggambarkan konsep pengembangan keempat: *Peningkatan Kualitas SDM dan SDA Berbasis Perikanan Berkelanjutan*. Diagram ini menunjukkan hubungan antara berbagai konsep kunci terkait "Daya" yang menjadi inti dari tema pengembangan sumber daya, khususnya sumber daya manusia, daya lingkungan, dan daya saing.



Gambar 5. 7. Visualisasi Konsep Pengembangan Pertanian Terpadu

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Dari diagram tersebut, koneksi yang kuat antara "daya" dengan "sumber" dan "manusia" menunjukkan bahwa pengembangan sumber daya manusia menjadi fokus utama. Hal ini berkaitan dengan peningkatan kualitas manusia untuk mendukung keberlanjutan sumber daya alam. Hubungan dengan "lingkungan" menegaskan bahwa pengembangan daya juga melibatkan pelestarian lingkungan, di mana keseimbangan antara eksploitasi dan pelestarian menjadi perhatian. Fokus pada peningkatan "kualitas" dan "saing" menunjukkan upaya untuk meningkatkan daya saing baik secara lokal, nasional, maupun global melalui optimalisasi potensi manusia dan lingkungan. Kata "meningkatkan" menunjukkan tindakan yang diupayakan, yakni peningkatan daya dalam berbagai aspek untuk mencapai tujuan pembangunan. Adapun konsep "alam" mengaitkan daya dengan keberlanjutan sumber daya alam, yang menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya berbasis kearifan lokal dan ekologis. Terdapat juga koneksi ke sektor perikanan, yang mengindikasikan salah satu fokus utama pengembangan daya adalah optimalisasi potensi perikanan, baik dari sisi pengelolaan sumber daya laut maupun darat.

Secara holistik, diagram ini memperlihatkan hubungan yang luas antara daya manusia, sumber daya alam, dan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan daya memerlukan pendekatan

terpadu yang memperhitungkan aspek keberlanjutan, peningkatan kualitas hidup, dan daya saing global. Dengan demikian, fokus utama konsep pengembangan yang dapat dirumuskan adalah: **Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan daya saing melalui pengelolaan lingkungan yang bijaksana**, termasuk sektor penting seperti perikanan, yang relevan dalam konteks pembangunan daerah berbasis sumber daya alam.

5.6 VISI DAN MISI

Berdasarkan kajian berbagai kebijakan pembangunan:

- RPJMN yang menyebutkan tema pembangunan Pulau Kalimantan sebagai “Superhub Ekonomi Nusantara”: Pusat aglomerasi dan pengembangan ekonomi baru berbasis klaster ekonomi masa depan untuk mendorong terciptanya pemerataan ekonomi di kawasan timur nusantara, dengan fokus pembangunan kalimantan tengah sebagai lumbung pangan nasional dan pusat konservasi internasional;
- RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat dengan visi pembangunan tahun 2025 – 2045: “Kotawaringin Barat maju, sejahtera, dan berkelanjutan”;
- RTRW Provinsi Kalimantan Tengah dengan tujuan penataan ruang wilayah provinsi: “Mewujudkan tatanan ruang wilayah Kalimantan Tengah berbasis pertanian yang berorientasi **AGRIBISNIS** dan **AGROINDUSTRI**, serta sebagai **LUMBUNG ENERGI** dan **LUMBUNG PANGAN** dengan tetap mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup”;
- RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat dengan tujuan penataan ruang: “Kabupaten yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dengan berbasis sumber daya **PERTANIAN, PERIKANAN, KEHUTANAN, AGROINDUSTRI**, dan **PARIWISATA**”;

serta berdasarkan konsep pengembangan yang telah dirumuskan dari hasil *text mining* berbasis *network analysis* yang meliputi:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi global secara inklusif dengan transformasi infrastruktur sosial, pengelolaan ekonomi kreatif, dan kemandirian ekonomi berbasis pertanian berkelanjutan;
2. Pembangunan infrastruktur strategis yang tidak hanya mendukung pariwisata, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan melalui pengelolaan lahan dan pemanfaatan energi terbarukan;
3. Pengembangan kawasan pertanian terpadu berbasis teknologi melalui pengolahan hasil pertanian pangan/kehutanan dalam menyangga kawasan rawan di sekitar kota (hinterland);
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan daya saing melalui pengelolaan lingkungan yang bijaksana;

dapat diperoleh berbagai *key point* dengan sejumlah fokus pembangunan, yang diarahkan untuk memperkuat sektor perkotaan, industri, pertanian, pariwisata, pelayanan publik, serta konektivitas wilayah.

1. Sektor Perkotaan: Permukiman

Pembangunan sektor permukiman di perkotaan menjadi prioritas untuk mendukung pengelolaan tata ruang yang berkelanjutan. Fokusnya adalah penyediaan perumahan yang layak huni, pengendalian kawasan permukiman kumuh, serta pengintegrasian ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memperhatikan daya dukung lingkungan serta kebutuhan urbanisasi.

2. Pelabuhan Kumai – *Waterfront City*

Pelabuhan Kumai memiliki peran strategis sebagai penghubung utama antar wilayah di Kalimantan Tengah sekaligus pintu gerbang maritim. Konsep *waterfront city* diarahkan untuk mengembangkan kawasan pesisir menjadi destinasi ekonomi baru dengan integrasi sektor pariwisata, transportasi, dan perdagangan. Transformasi pelabuhan menjadi kawasan modern yang ramah lingkungan diharapkan mampu meningkatkan daya tarik investasi dan pengembangan ekonomi lokal.

3. Industri Berbasis Pertanian dan Perkebunan

Pengembangan sektor industri diarahkan pada hilirisasi produk pertanian dan perkebunan untuk menciptakan nilai tambah. Fokus pada pengolahan komoditas unggulan seperti kelapa sawit, karet, dan rotan bertujuan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar nasional dan internasional. Pembangunan kawasan industri yang berkelanjutan juga diharapkan menciptakan lapangan kerja baru dan mendukung pemerataan ekonomi di daerah.

4. Lumbung Pangan: Pertanian dan Perkebunan

Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki potensi besar sebagai lumbung pangan Kalimantan Tengah. Program intensifikasi dan diversifikasi pertanian diarahkan pada peningkatan produksi padi, hortikultura, dan komoditas perkebunan. Dengan memanfaatkan teknologi modern serta pengelolaan berbasis ekologi, sektor ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan lokal sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

5. KSPN: Wisata Tanjung Puting

Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Tanjung Puting merupakan aset wisata unggulan berbasis konservasi alam. Fokus pengembangan diarahkan pada pelestarian habitat orangutan, pengelolaan ekowisata berbasis komunitas, dan peningkatan infrastruktur pendukung pariwisata. Dengan pengelolaan yang terintegrasi, kawasan ini diharapkan dapat menjadi ikon internasional yang mendukung perekonomian berbasis lingkungan.

6. Kesejarahan: Dukungan untuk Wisata dan Aksesibilitas sebagai Gerbang Masuk Kalteng

Sebagai pintu gerbang utama Kalimantan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki potensi besar dalam mengembangkan wisata sejarah dan budaya. Penguatan aksesibilitas melalui pembangunan infrastruktur jalan, pelabuhan, dan bandara menjadi prioritas untuk meningkatkan konektivitas. Dengan pendekatan ini, wisata sejarah seperti Istana Kuning dan budaya lokal diharapkan dapat mendukung posisi strategis kabupaten sebagai tujuan utama wisatawan domestik maupun mancanegara.

7. Pelayanan Umum: Kesehatan, Pendidikan, dan Pelayanan Gratis

Peningkatan pelayanan umum menjadi fondasi penting dalam pembangunan inklusif. Pemerintah daerah memprioritaskan layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Program layanan gratis seperti subsidi kesehatan, pendidikan dasar, dan pelatihan kerja diimplementasikan untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM). Hal ini juga mencakup pengembangan infrastruktur kesehatan dan pendidikan, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia lokal.

Berdasarkan *key points* tersebut, dalam menyongsong 100 tahun Kabupaten Kotawaringin Barat, visi besar dirumuskan untuk menghadirkan arah pembangunan yang terarah dan berkelanjutan:

"MEWUJUDKAN KOTAWARINGIN BARAT SEBAGAI PUSAT PERTANIAN, WISATA, INDUSTRI YANG SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN"

Visi ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menitikberatkan pada kesejahteraan masyarakat, kelestarian lingkungan, serta pemanfaatan potensi unggulan daerah secara optimal. Sebagai daerah dengan sumber daya alam yang melimpah, Kotawaringin Barat diarahkan menjadi pusat agrikultur modern berbasis teknologi dan kearifan lokal. Di sektor wisata, kekayaan alam dan budaya lokal akan dikembangkan menjadi daya tarik internasional dengan konsep keberlanjutan yang menjunjung tinggi pelestarian lingkungan. Sementara itu, pengembangan sektor industri akan difokuskan pada hilirisasi berbasis hasil pertanian dan perkebunan untuk mendorong nilai tambah produk lokal.

Fokus pembangunan ini didukung dengan penguatan aksesibilitas, pelayanan publik, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan sosial yang inklusif. Pendekatan integratif yang menghubungkan sektor pertanian, wisata, dan industri diharapkan dapat menciptakan ekosistem pembangunan yang kokoh, mendorong kesejahteraan masyarakat, serta menjamin keberlanjutan lingkungan.

Untuk mencapai visi besar ini, sektor utama dan sektor pendukung dirumuskan secara sinergis dengan pendekatan holistik yang menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

- a. Sektor utama: pertanian, wisata, dan industri
- b. Sektor pendukung: permukiman, pelayanan umum, sarana dan prasarana

Selanjutnya, dalam mewujudkan visi pembangunan dengan penekanan pada sektor utama dan sektor pendukungnya, maka ditetapkan misi pembangunan sebagai berikut.

- Misi 1: Mengembangkan transformasi ekonomi berbasis kerakyatan untuk mendorong pertumbuhan inklusif dan berdaya saing.
- Misi 2: Mewujudkan kemandirian ekonomi yang sejahtera melalui penguatan sektor pertanian, pariwisata, dan industri.
- Misi 3: Mendorong pembangunan wilayah yang merata dan berkeadilan untuk mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi.
- Misi 4: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter sebagai fondasi pembangunan.
- Misi 5: Menyediakan infrastruktur berkualitas dengan memperhatikan keberlanjutan dan ramah lingkungan.
- Misi 6: Mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan kesinambungan kesejahteraan.

5.7 STRATEGI

Pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan memerlukan pendekatan strategis yang terarah sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Setiap misi pembangunan dirancang untuk menjawab tantangan utama, memaksimalkan potensi daerah, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara holistik. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, disusun strategi pembangunan setiap misinya sebagai berikut.

Strategi pembangunan Misi 1 “Mengembangkan transformasi ekonomi berbasis kerakyatan untuk mendorong pertumbuhan inklusif dan berdaya saing”:

- Mengembangkan potensi lokal dan UMKM melalui akses pendanaan, pelatihan, dan pendampingan.
- Mendorong hilirisasi industri berbasis kerakyatan untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal.
- Memperluas diversifikasi pertanian guna meningkatkan ketahanan dan inovasi sektor agribisnis.
- Mengembangkan produk wisata berbasis pertanian untuk mendukung ekonomi kreatif dan pariwisata lokal.

Strategi pembangunan Misi 2 “Mewujudkan kemandirian ekonomi yang sejahtera melalui penguatan sektor pertanian, pariwisata, dan industri”:

- Mengembangkan program Food Estate untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pangan.
- Membangun dan memperluas kawasan industri strategis yang berdaya saing tinggi.
- Mewujudkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.
- Mendiversifikasi ekonomi dengan pengembangan sektor-sektor baru yang inovatif dan berkelanjutan.

- Meningkatkan produksi pangan sekaligus mengatasi kerawanan pangan di masyarakat.
- Mengembangkan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) melalui dukungan atraksi wisata, produk lokal, tempat ikonik, dan pelestarian budaya.
- Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar untuk pariwisata berkelanjutan

Strategi pembangunan Misi 3 “Mendorong pembangunan wilayah yang merata dan berkeadilan untuk mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi”:

- Mengintegrasikan sinergi antar sektor untuk menciptakan pembangunan yang terkoordinasi.
- Menggalang kolaborasi antara pemerintah, swasta, masyarakat, dan pihak terkait dalam pelaksanaan pembangunan.
- Memastikan pemerataan pembangunan hingga ke wilayah terpencil dan minim aksesibilitas.

Strategi pembangunan Misi 4 “Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter sebagai fondasi pembangunan”:

- Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, dengan penekanan pada pendidikan karakter dan pengembangan keterampilan.
- Mengembangkan program pelatihan dan edukasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan sektor prioritas.
- Mengentaskan kemiskinan melalui program pengembangan kapasitas masyarakat berbasis inklusi sosial.
- Memperluas dan meningkatkan akses layanan kesehatan guna menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta meningkatkan harapan hidup masyarakat.
- Menyediakan fasilitas pendidikan umum dan khusus yang mendukung pengembangan sektor pertanian, pariwisata, dan industri.
- Mendorong digitalisasi dan pemanfaatan teknologi modern di sektor pertanian untuk meningkatkan produktivitas.

Strategi pembangunan Misi 5 “Menyediakan infrastruktur berkualitas dengan memperhatikan keberlanjutan dan ramah lingkungan”:

- Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar melalui program perbaikan dan pengembangan yang terencana.
- Menambah aksesibilitas dan jaringan prasarana pendukung di sektor pertanian, pariwisata, dan industri untuk memperkuat konektivitas.
- Mengembangkan infrastruktur strategis seperti bandara, pelabuhan, dan terminal barang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

- Menyediakan fasilitas umum, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik yang merata di seluruh wilayah.
- Memperluas akses internet dan teknologi informasi, khususnya di daerah terpencil, untuk mendukung transformasi digital.
- Memperluas aksesibilitas transportasi dan infrastruktur jalan di daerah terpencil untuk meningkatkan koneksi antarwilayah.
- Mengembangkan energi terbarukan untuk mendukung kemandirian energi dan keberlanjutan lingkungan.
- Menyediakan teknologi modern untuk pertanian dan perkebunan.

Strategi pembangunan Misi 6 “Mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan kesinambungan kesejahteraan”:

- Mengembangkan sistem pemantauan berbasis data untuk mengevaluasi dampak pembangunan terhadap ekonomi lokal dan lingkungan secara berkala.
- Mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas program pembangunan.
- Menyesuaikan dan memperbaiki strategi pembangunan berdasarkan hasil evaluasi untuk memastikan relevansi dan keberlanjutan program.
- Menyediakan teknologi pompa air tenaga surya untuk pengairan lahan pertanian di sekitar DAS

5.8 RENCANA AKSI

Rencana aksi menyajikan langkah-langkah strategis yang dirancang untuk mewujudkan konsep pengembangan, visi, misi, dan strategi yang telah ditetapkan sebelumnya. Tabel berikut menunjukkan rencana aksi dalam pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat 35 tahun mendatang.

Tabel 5. 1. Rencana Aksi Pembangunan Kotawaringin Barat

Konsep Pengembangan	Visi	Misi	Strategi	Rencana Aksi	Tahap Pelaksanaan (Tahun Ke-)						Sumber Pembiayaan	Dinas	
					1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30			31-35
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Global yang Inklusif	MEWUJUDKAN KOTAWARINGIN BARAT SEBAGAI PUSAT PERTANIAN, WISATA, INDUSTRI YANG SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN	Misi 1: Mengembangkan transformasi ekonomi berbasis kerakyatan untuk mendorong pertumbuhan inklusif dan berdaya saing	Mengembangkan potensi lokal dan UMKM melalui akses pendanaan, pelatihan, dan pendampingan.	Mengembangkan sentra pengolahan dan distribusi hasil pertanian berbasis koperasi di hinterland dengan fasilitas modern untuk meningkatkan efisiensi produksi dan nilai tambah produk.								APBD, APBN, Investasi Swasta	Dinas Pertanian, Dinas Koperasi
				Menyediakan pelatihan vokasi berfokus pada praktik perikanan berkelanjutan untuk masyarakat pesisir guna meningkatkan keterampilan dan pendapatan.							APBD, Hibah LSM	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Mengembangkan produk wisata berbasis pertanian untuk mendukung ekonomi kreatif dan pariwisata lokal.							APBN, PPP	Dinas Pertanian		
			Mendorong hilirisasi industri berbasis kerakyatan untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal							Dana CSR, APBD	Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian		
			Memasang instalasi energi terbarukan seperti solar panel, solar dryer, dan pompa surya untuk mendukung operasional							APBD, Dana Hibah LSM	Dinas ESDM, Dinas Koperasi		

Konsep Pengembangan	Visi	Misi	Strategi	Rencana Aksi	Tahap Pelaksanaan (Tahun Ke)							Sumber Pembiayaan	Dinas	
					1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35			
				UMKM dan nelayan kecil di daerah pesisir.										
				Mengembangkan hilirisasi industri berbasis kerakyatan melalui penerapan teknologi modern dan pembentukan pusat inovasi digital untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal.								APBN, Swasta	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			Mengurangi ketergantungan sektor perikanan pada bibit luar daerah	Mendirikan pusat produksi bibit ikan lokal berbasis teknologi untuk mendukung kemandirian sektor perikanan dan efisiensi tata niaga dari hulu ke hilir.								APBN, Dana LSM	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Hilirisasi agribisnis berbasis teknologi untuk meningkatkan daya saing	Mengimplementasikan teknologi IoT untuk pemantauan lahan dan pengelolaan hasil pertanian serta perkebunan secara real-time guna meningkatkan produktivitas.								APBD, APBN, Investasi Swasta	Dinas Pertanian	
			Mengembangkan potensi lokal dan UMKM melalui akses pendanaan, pelatihan, dan pendampingan.	Memberikan akses pendanaan, pelatihan berbasis gender, dan pendampingan teknologi kepada UMKM di sektor agribisnis, perikanan, dan pariwisata untuk pengembangan potensi lokal.								APBN, Hibah LSM	Dinas Koperasi, Dinas Sosial	
		Misi 2: Mewujudkan kemandirian ekonomi yang sejahtera melalui penguatan sektor pertanian, pariwisata, dan industri	Mengembangkan program Food Estate untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pangan	Membangun pusat logistik berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok agribisnis dari hinterland ke pasar utama.								APBN, Investasi Swasta	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
				Membangun sistem irigasi modern untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian dan memastikan ketersediaan air sepanjang musim.								APBN, PPP	Dinas Pertanian, Dinas PU	
			Mengembangkan potensi produk lokal untuk penetrasi pasar global	Mengadakan promosi produk pertanian lokal melalui partisipasi di pameran								APBD, APBN, Sponsor	Dinas Pertanian,	

Konsep Pengembangan	Visi	Misi	Strategi	Rencana Aksi	Tahap Pelaksanaan (Tahun Ke)						Sumber Pembiayaan	Dinas
					1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30		
				internasional guna meningkatkan akses pasar global.								Dinas Perdagangan
		Misi 4 “Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter sebagai fondasi pembangunan”	Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, dengan penekanan pada pendidikan karakter dan pengembangan keterampilan	Membangun sekolah berbasis teknologi dengan fokus pada sektor prioritas seperti agribisnis, energi terbarukan, dan digitalisasi.							APBN, Dana Hibah	Dinas Pendidikan, Dinas ESDM
			Menyediakan fasilitas pendidikan umum dan khusus yang mendukung pengembangan sektor pertanian, pariwisata, dan industri.	Mendirikan Center of Excellence berbasis sektor ekonomi utama untuk mendukung riset dan pengembangan teknologi lokal. Menyediakan program beasiswa pendidikan kejuruan untuk mendukung pengembangan tenaga kerja terampil sesuai kebutuhan industri lokal.							APBN, Investasi Swasta	Dinas Pendidikan, Dinas Perindustrian
											APBN, Dana CSR	Dinas Pendidikan
		Misi 5 “Menyediakan infrastruktur berkualitas dengan memperhatikan keberlanjutan dan ramah lingkungan”	Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar melalui program perbaikan dan pengembangan yang terencana.	Meningkatkan jalur distribusi hasil pertanian di hinterland untuk mengurangi biaya transportasi dan mempercepat akses ke pasar.							APBD, APBN	Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian
				Melakukan modernisasi Bandara Iskandar menjadi bandara internasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pariwisata.							APBN, PPP	Dinas Perhubungan
			Mengembangkan energi terbarukan untuk mendukung kemandirian energi dan keberlanjutan lingkungan	Mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya dan biomassa di kawasan terpencil untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat.							APBN, Hibah LSM	Dinas ESDM

Konsep Pengembangan	Visi	Misi	Strategi	Rencana Aksi	Tahap Pelaksanaan (Tahun Ke)							Sumber Pembiayaan	Dinas
					1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35		
		Misi 6 "Mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan kesinambungan kesejahteraan"	Mengembangkan sistem pemantauan berbasis data untuk mengevaluasi dampak pembangunan terhadap ekonomi lokal dan lingkungan secara berkala.	Mengembangkan platform digital berbasis GIS untuk memantau dampak pembangunan secara real-time dan transparan.								APBN, Investasi Swasta	Dinas Kominfo, Bappeda
				Menyelenggarakan pelatihan teknis untuk instalasi, pengoperasian, dan pemeliharaan teknologi berbasis energi terbarukan seperti pompa surya.							APBD, Hibah LSM	Dinas ESDM	
				Mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas program pembangunan								APBD, Dana Hibah	Bappeda, Dinas Kominfo
Pembangunan Infrastruktur Pendukung Pariwisata		Misi 2: Mewujudkan kemandirian ekonomi yang sejahtera melalui penguatan sektor pertanian, pariwisata, dan industri	Mengembangkan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)	Memperbaiki akses jalan menuju destinasi wisata utama, termasuk Taman Nasional Tanjung Puting, untuk meningkatkan kunjungan wisatawan.								APBN, PPP	Dinas Pariwisata, Dinas PU
				Membangun sarana dan prasarana pariwisata ramah lingkungan dengan bahan lokal dan teknologi hijau.							APBN, Dana Hibah	Dinas Pariwisata	
				Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar untuk pariwisata berkelanjutan								APBD, Dana Desa	Dinas Pariwisata, Dinas Desa
				Melakukan rehabilitasi lahan kritis menjadi destinasi agrowisata terpadu untuk meningkatkan daya tarik wisata dan konservasi lingkungan.								APBN, Hibah LSM	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian

Konsep Pengembangan	Visi	Misi	Strategi	Rencana Aksi	Tahap Pelaksanaan (Tahun Ke)							Sumber Pembiayaan	Dinas
					1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35		
			Mewujudkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru	Menyusun rencana infrastruktur dasar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk mendukung aktivitas investasi dan industri.								APBN, Investasi Swasta	Dinas PU, Dinas Perindustrian
				Meningkatkan promosi KEK melalui forum internasional untuk menarik investasi global.								APBN, Swasta	Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata
				Menyediakan pendidikan vokasi di KEK untuk mendukung kebutuhan tenaga kerja industri lokal.								APBN, Dana CSR	Dinas Pendidikan
			Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar untuk pariwisata berkelanjutan.	Melaksanakan program edukasi konservasi bagi masyarakat lokal dan wisatawan untuk menjaga kelestarian alam.								APBD, Dana Hibah	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata
				Mengadopsi skema PPP (Public-Private Partnership) untuk pembangunan dermaga di kawasan terpencil guna mendukung aktivitas ekonomi.								PPP, APBN	Dinas Perhubungan, Bappeda
		Misi 4 "Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter sebagai fondasi pembangunan":	Menyediakan fasilitas pendidikan umum dan khusus yang mendukung pengembangan sektor pertanian, pariwisata, dan industri	Modernisasi fasilitas pendidikan di sektor pariwisata untuk menghasilkan tenaga kerja berkualitas dan berwawasan lingkungan.								APBN, Dana CSR	Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata
		Misi 5 "Menyediakan infrastruktur berkualitas dengan memperhatikan keberlanjutan dan ramah lingkungan"	Digitalisasi promosi dan manajemen destinasi wisata	Membangun aplikasi berbasis AI untuk mengelola wisatawan dan mempromosikan destinasi lokal secara otomatis.								APBN, Investasi Swasta	Dinas Kominfo, Dinas Pariwisata
			Menambah aksesibilitas dan jaringan prasarana pendukung di sektor pertanian, pariwisata, dan industri untuk memperkuat konektivitas	Menyediakan akses transportasi air untuk kawasan pariwisata terpencil guna meningkatkan keterjangkauan.								APBD, APBN	Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata
		Misi 6 "Mengintegrasikan prinsip pembangunan	Mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi untuk	Membentuk forum diskusi masyarakat untuk mengevaluasi dampak								APBD, Dana Hibah	Bappeda

Konsep Pengembangan	Visi	Misi	Strategi	Rencana Aksi	Tahap Pelaksanaan (Tahun Ke)							Sumber Pembiayaan	Dinas		
					1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35				
Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu		berkelanjutan untuk mewujudkan kesinambungan kesejahteraan”	meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas program pembangunan.	pembangunan secara partisipatif.											
				Mengintegrasikan survei berbasis aplikasi teknologi untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan.								APBD, APBN	Dinas Kominfo, Bappeda		
		Misi 5: Menyediakan infrastruktur berkualitas dengan memperhatikan keberlanjutan dan ramah lingkungan	Memperluas aksesibilitas transportasi untuk distribusi hasil pertanian	Membuka akses transportasi khusus untuk distribusi hasil pangan dari hinterland ke kota.								APBN, PPP	Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian		
				Mengembangkan kawasan buffer berbasis agroindustri di sekitar kota untuk mendukung rantai pasok.								APBN, Investasi Swasta	Dinas Pertanian		
			Menyediakan teknologi modern untuk pertanian dan perkebunan	Menyediakan pusat pelatihan berbasis riset dan laboratorium teknologi pertanian terapan untuk petani di hinterland.								APBD, CSR	Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan, Bappedalitbang		
				Membangun unit pengolahan hasil pertanian berteknologi tinggi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas pangan dan perkebunan.								APBN, PPP	Dinas Pertanian		
			Diversifikasi energi terbarukan untuk mendukung kawasan agroindustri	Mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya dan biomassa di kawasan hinterland untuk mendukung kebutuhan energi lokal.								APBN, APBD, PPP	Dinas ESDM, Dinas LH, Dinas Perindustrian, Dinas PU		
			Mengembangkan infrastruktur strategis seperti bandara, pelabuhan, dan terminal barang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.	Melakukan pengembangan Pelabuhan Kumai untuk mendukung ekspor komoditas lokal.								APBN, Investasi Swasta	Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan		
Memperluas akses internet dan teknologi informasi, khususnya di daerah terpencil, untuk	Memperluas akses internet dan layanan digital di daerah terpencil untuk mendukung								APBN, Hibah LSM	Dinas Kominfo					

Konsep Pengembangan	Visi	Misi	Strategi	Rencana Aksi	Tahap Pelaksanaan (Tahun Ke)							Sumber Pembiayaan	Dinas	
					1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35			
			mendukung transformasi digital.	pendidikan, kesehatan, dan transformasi digital desa.										
			Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar untuk pariwisata berkelanjutan.	Melaksanakan revitalisasi kawasan wisata dengan pendekatan ramah lingkungan guna menarik wisatawan.								APBN, Dana Hibah	Dinas Pariwisata, Dinas LH	
				Meningkatkan ruang hijau publik di sekitar destinasi wisata utama untuk menciptakan lingkungan nyaman dan sejuk.								APBD, APBN	Dinas Pariwisata, Dinas LH	
			Menyediakan teknologi modern untuk pertanian.	Membuat irigasi pintar berbasis energi surya untuk lahan pertanian terpencil guna mengoptimalkan pengelolaan air.								APBN, Dana Hibah	Dinas Pertanian, Dinas ESDM	
		Misi 1 "Mengembangkan transformasi ekonomi berbasis kerakyatan untuk mendorong pertumbuhan inklusif dan berdaya saing"	Memperluas diversifikasi pertanian guna meningkatkan ketahanan dan inovasi sektor agribisnis	Mengembangkan varietas unggul lokal melalui riset dan pembibitan untuk meningkatkan produktivitas dan daya tahan tanaman.								APBN, Hibah LSM	Dinas Pertanian	
				Membangun pusat riset agribisnis berbasis kerakyatan untuk mendukung inovasi teknologi lokal.								APBN, Investasi Swasta	Dinas Pertanian, Dinas Riset	
		Misi 2: Mewujudkan kemandirian ekonomi yang sejahtera melalui penguatan sektor pertanian, pariwisata, dan industri.	Meningkatkan produksi pangan sekaligus mengatasi kerawanan pangan di masyarakat.	Mendirikan gudang pangan di wilayah rawan untuk meningkatkan cadangan dan stabilitas pangan.								APBN, Dana Hibah	Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan	
				Mengimplementasikan program bantuan pangan untuk wilayah dengan kerentanan tinggi terhadap ketahanan pangan.								APBD, APBN	Dinas Sosial, Dinas Pertanian	
			Membangun dan memperluas kawasan industri strategis yang berdaya saing tinggi	Membentuk Kawasan Agroindustri Terpadu dengan dukungan infrastruktur dan teknologi modern.								APBN, PPP	Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian	

Konsep Pengembangan	Visi	Misi	Strategi	Rencana Aksi	Tahap Pelaksanaan (Tahun Ke)						Sumber Pembiayaan	Dinas
					1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30		
				Mengoptimalkan infrastruktur logistik untuk mempercepat distribusi hasil pertanian dan mendukung efisiensi rantai pasok.							APBN, Investasi Swasta	Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian
		Misi 3 “Mendorong pembangunan wilayah yang merata dan berkeadilan untuk mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi”	Memastikan pemerataan pembangunan hingga ke wilayah terpencil dan minim aksesibilitas.	Menyediakan program pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) terkait pengelolaan dan pemanfaatan energi terbarukan.							APBD, APBN	Dinas ESDM, Dinas Pendidikan
			Menata kawasan hutan untuk mengurangi permukiman kumuh	Menyusun perencanaan kawasan hutan terpadu untuk mencegah pertumbuhan permukiman kumuh dan melestarikan ekosistem hutan.							APBN, Dana LSM	Dinas LH, Bappeda
		Misi 4 “Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter sebagai fondasi pembangunan”:	Digitalisasi promosi pariwisata unggulan	Mengembangkan platform promosi digital berbasis web untuk meningkatkan daya tarik destinasi utama seperti Taman Nasional Tanjung Puting.							APBN, Dana Hibah	Dinas Pariwisata, Dinas Kominfo
			Mengoptimalkan kontribusi pariwisata untuk PAD melalui revisi regulasi	Menyusun regulasi baru tentang pajak dan retribusi penginapan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).							APBD, APBN	Bappeda, Dinas Pariwisata
			Membuat rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil pemantauan dampak pembangunan untuk mendukung perencanaan yang berkelanjutan.								APBD, APBN	Bappeda, Dinas LH
		Misi 6 “Mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan kesinambungan kesejahteraan”	Menyesuaikan dan memperbarui strategi pembangunan berdasarkan hasil evaluasi untuk memastikan relevansi dan keberlanjutan program.	Membentuk zonasi kawasan hulu, tengah, dan hilir untuk mendukung keberlanjutan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).							APBN, Dana LSM	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PU

Konsep Pengembangan	Visi	Misi	Strategi	Rencana Aksi	Tahap Pelaksanaan (Tahun Ke)							Sumber Pembiayaan	Dinas
					1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35		
			Mengembangkan tata ruang berbasis ekosistem DAS	Mendirikan laboratorium inovasi agribisnis untuk riset varietas unggul berbasis teknologi modern.								APBN, Investasi Swasta	Dinas Pertanian
			Mendirikan pusat penelitian dan pengembangan (R&D) untuk agribisnis	Menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan berbasis gender, teknologi, dan sektor prioritas seperti perikanan, UMKM, dan agribisnis, termasuk pelatihan digital seperti coding dan e-commerce.								APBD, Hibah LSM	Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian
Peningkatan Kualitas SDM dan SDA Berbasis Perikanan		Misi 4: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter sebagai fondasi pembangunan	Mengembangkan program pelatihan dan edukasi yang relevan dengan sektor prioritas	Memberikan subsidi alat tangkap ramah lingkungan dan teknologi energi bersih (solar dryer, pompa surya) untuk mendukung keberlanjutan nelayan kecil.								APBN, Hibah LSM	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi untuk mendukung pengembangan riset di sektor perikanan.								APBN, Dana Hibah	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Mendorong digitalisasi dan pemanfaatan teknologi modern di sektor perikanan	Menyediakan layanan kesehatan ibu dan anak di wilayah terpencil melalui klinik keliling dan pendampingan medis.								APBD, APBN	Dinas Kesehatan
			Memperluas dan meningkatkan akses layanan kesehatan guna menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta meningkatkan harapan hidup masyarakat	Melakukan digitalisasi layanan kesehatan melalui aplikasi mobile untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan.								APBN, Dana Hibah	Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo
				Mengimplementasikan layanan telemedicine untuk wilayah terpencil menggunakan aplikasi berbasis teknologi digital.								APBD, APBN	Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo

Konsep Pengembangan	Visi	Misi	Strategi	Rencana Aksi	Tahap Pelaksanaan (Tahun Ke)						Sumber Pembiayaan	Dinas	
					1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30			31-35
			Mendorong digitalisasi layanan kesehatan untuk daerah terpencil	Mengembangkan sistem e-commerce perikanan berbasis data untuk menghubungkan petani ikan dengan pasar lokal dan global.							APBN, Dana Hibah	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perdagangan	
			Digitalisasi tata niaga perikanan dan optimalisasi teknologi modern	Mendorong pengembangan energi terbarukan seperti biomassa dan biogas untuk meningkatkan ketahanan energi lokal.							APBN, PPP	Dinas ESDM	
		Misi 2: Mewujudkan kemandirian ekonomi yang sejahtera melalui penguatan sektor pertanian, pariwisata, dan industri.	Mendiversifikasi ekonomi dengan pengembangan sektor-sektor baru yang inovatif dan berkelanjutan.	Membentuk program inkubasi bisnis untuk membantu pengembangan startup dan usaha kecil di sektor unggulan.							APBD, Hibah LSM	Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian	
				Menyediakan pelatihan teknologi big data dan kecerdasan buatan (AI) bagi masyarakat dan pelaku industri lokal untuk meningkatkan kapasitas inovasi.							APBN, Investasi Swasta	Dinas Pendidikan, Dinas Kominfo	
			Pelatihan tenaga kerja berbasis teknologi digital di sektor strategis	Melaksanakan program edukasi digitalisasi untuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan masyarakat adat.							APBD, Hibah LSM	Dinas Sosial, Dinas Kominfo	
			Mendorong digitalisasi dan pemanfaatan teknologi modern di sektor perikanan.	Mengintegrasikan UMKM lokal dalam pengelolaan kawasan wisata berkelanjutan untuk meningkatkan inklusivitas ekonomi.							APBD, APBN	Dinas Koperasi, Dinas Pariwisata	
			Misi 3 "Mendorong pembangunan wilayah yang merata dan berkeadilan untuk mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi"	Menggalang kolaborasi antara pemerintah, swasta, masyarakat, dan pihak terkait	Membangun sekolah di desa pesisir untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak di wilayah terpencil.							APBN, Dana Desa	Dinas Pendidikan, Dinas Desa
			Misi 5 "Menyediakan infrastruktur berkualitas dengan	Menyediakan fasilitas umum yang merata	Mengembangkan teknologi biogas untuk pengelolaan limbah perikanan sebagai							APBN, Hibah LSM	Dinas ESDM, Dinas Kelautan dan Perikanan

Konsep Pengembangan	Visi	Misi	Strategi	Rencana Aksi	Tahap Pelaksanaan (Tahun Ke)						Sumber Pembiayaan	Dinas	
					1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30			31-35
		memperhatikan keberlanjutan dan ramah lingkungan”		sumber energi alternatif yang ramah lingkungan.									
			Mengembangkan energi terbarukan	Membentuk forum masyarakat berbasis inklusi untuk mengevaluasi program pembangunan secara partisipatif dan transparan.							APBD, Hibah LSM	Bappeda, Dinas Sosial	
		Misi 6 “Mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan kesinambungan kesejahteraan”	Menyesuaikan strategi pembangunan berdasarkan hasil evaluasi untuk memastikan relevansi dan keberlanjutan program.	Berkolaborasi dengan LSM untuk implementasi inovasi teknologi bersih di kawasan pesisir guna mendukung keberlanjutan lingkungan.							APBD, Hibah LSM	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan	

Sumber: Hasil Analisis, 2024